



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**



LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO. : 2

TANGGAL : 11 Agustus 2020

**PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN VII



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan.....	12
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	13
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	15
1. Ekonomi Makro	15
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019.....	20
3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	33
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	34
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan.....	34
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	37
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	39
2. Kebijakan Akuntansi.....	40
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	60
1. Laporan Realisasi Anggaran	60
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih	105
3. Neraca	105
4. Laporan Operasional.....	158
5. Atas Laporan Arus Kas.....	169
6. Laporan Perubahan Ekuitas	182
BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN	188
1. Keadaan Umum	188
2. Pembinaan Batas Wilayah	194
3. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	195
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	208
BAB VII PENUTUP.....	217
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2019.....	16
Tabel 2. 2	Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan	17
Tabel 2. 3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019	20
Tabel 2. 4	Kebijakan Belanja Langsung Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah....	28
Tabel 3. 1	Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	34
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2018 dengan TA. 2019.....	35
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 per SKPD dan Realisasi Tahun 2018.....	35
Tabel 3. 4	Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019 per SKPD dan Realisasi Tahun 2018	36
Tabel 4. 1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019.....	39
Tabel 4. 2	Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih	43
Tabel 4. 3	Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih	43
Tabel 5. 1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	60
Tabel 5. 2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019	60
Tabel 5. 3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018	61
Tabel 5. 4	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018	62
Tabel 5. 5	Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 dan 2018.....	63
Tabel 5. 6	Realisasi Pajak Restoran tahun 2019 dan 2018.....	63
Tabel 5. 7	Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 dan 2018.....	64
Tabel 5. 8	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 dan 2018.....	65
Tabel 5. 9	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018.....	67
Tabel 5. 10	Realisasi Retribusi Umum Tahun 2019 dan 2018.....	67
Tabel 5. 11	Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan 2018	69
Tabel 5. 12	Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2019 dan 2018	70
Tabel 5. 13	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2019 dan 2018	70
Tabel 5. 14	Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018.....	71
Tabel 5. 15	Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2019 dan 2018.....	73
Tabel 5. 16	Realisasi Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain Tahun 2019 dan 2018	73
Tabel 5. 17	Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2019 dan 2018	74
Tabel 5. 18	Realisasi Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2019 dan 2018	75
Tabel 5. 19	Realisasi Pendapatan transfer Tahun 2019 dan 2018	75
Tabel 5. 20	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	76
Tabel 5. 21	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan 2018	76
Tabel 5. 22	Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2019 dan 2018.....	78
Tabel 5. 23	Realisasi DAK Fisik Tahun 2019 dan 2018.....	81
Tabel 5. 24	Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2019 dan 2018	82
Tabel 5. 25	Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dan 2018.....	83



Tabel 5. 26	Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2019 dan 2018	83
Tabel 5. 27	Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan 2018.....	83
Tabel 5. 28	Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2019 dan 2018	85
Tabel 5. 29	Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2019 dan 2018	86
Tabel 5. 30	Realisasi Belanja Operasional Tahun 2019 dan 2018	87
Tabel 5. 31	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018	87
Tabel 5. 32	Realisasi Belanja Honorarium PNS Tahun 2019 dan 2018.....	89
Tabel 5. 33	Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2019	90
Tabel 5. 34	Realisasi Belanja barang Tahun 2019 dan 2018.....	91
Tabel 5. 35	Realisasi Belanja barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2019.....	92
Tabel 5. 36	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2019	93
Tabel 5. 37	Realisasi Belanja Barang Hibah Tahun 2019 dan 2018	94
Tabel 5. 38	Realisasi Belanja Barang Bantuan Sosial Tahun 2019.....	94
Tabel 5. 39	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018	95
Tabel 5. 40	Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018	95
Tabel 5. 41	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019.....	96
Tabel 5. 42	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018.....	97
Tabel 5. 43	Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2019 dan 2018	98
Tabel 5. 44	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2019.....	98
Tabel 5. 45	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019	99
Tabel 5. 46	Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018	100
Tabel 5. 47	Realisasi Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018.....	100
Tabel 5. 48	Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018.....	101
Tabel 5. 49	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018.....	102
Tabel 5. 50	Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2019 dan 2018	104
Tabel 5. 51	Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2019 dan 2018.....	104
Tabel 5. 52	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 dan 2018	105
Tabel 5. 53	Aset Tahun 2019 dan 2018.....	106
Tabel 5. 54	Aset Lancar Tahun 2019 dan 2018.....	106
Tabel 5. 55	Saldo per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	107
Tabel 5. 56	Saldo Kas Lainnya – Kas Dana BOS per 31 Desember 2019	108
Tabel 5. 57	Piutang Daerah Tahun 2019 dan 2018	109
Tabel 5. 58	Umur Piutang Pajak beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	109
Tabel 5. 59	Umur Piutang Retribusi beserta Piutang Tidak Tertagih.....	110
Tabel 5. 60	Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019	110
Tabel 5. 61	Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang	110
Tabel 5. 62	Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang.....	111
Tabel 5. 63	Saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih... 111	
Tabel 5. 64	Saldo Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	111
Tabel 5. 65	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2019.....	112
Tabel 5. 66	Piutang Retribusi berdasarkan Umur Piutang	112
Tabel 5. 67	Saldo Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang Retribusi Tidak tertagih. 113	
Tabel 5. 68	Saldo Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	113
Tabel 5. 69	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	114



Tabel 5. 70 Rincian Piutang Lainnya	115
Tabel 5. 71 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	117
Tabel 5. 72 Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	117
Tabel 5. 73 Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) per 31 Desember 2019	118
Tabel 5. 74 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	119
Tabel 5. 75 Dana Bergulir – Trading House	119
Tabel 5. 76 Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi	119
Tabel 5. 77 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan	120
Tabel 5. 78 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan	122
Tabel 5. 79 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap	123
Tabel 5. 80 Transfer Masuk Tanah.....	124
Tabel 5. 81 Penghapusan Aset Tetap Tanah.....	125
Tabel 5. 82 Transfer keluar Tanah.....	125
Tabel 5. 83 Bidang Tanah yang Dicatat pada Aset Lainnya sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	126
Tabel 5. 84 Bidang Tanah yang Dialihkan	127
Tabel 5. 85 Aset yang diserahkan dari Kabupaten Pekalongan.....	127
Tabel 5. 86 Tanah yang Masih Sengketa dengan pihak Ketiga.....	128
Tabel 5. 87 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan Mesin	129
Tabel 5. 88 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	129
Tabel 5. 89 Reklasifikasi Tambah Peralatan Mesin 2019	130
Tabel 5. 90 Reklasifikasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2019	131
Tabel 5. 91 Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.....	132
Tabel 5. 92 Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa	133
Tabel 5. 93 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung	133
Tabel 5. 94 Transfer Masuk Gedung dan Bangunan	134
Tabel 5. 95 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	134
Tabel 5. 96 Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan	135
Tabel 5. 97 Belanja modal Yang tidak Dikapitalisasi	136
Tabel 5. 98 Transfer Keluar Gedung dan Bangunan	137
Tabel 5. 99 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	137
Tabel 5. 100 Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	138
Tabel 5. 101 Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa	139
Tabel 5. 102 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi	141
Tabel 5. 103 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	143
Tabel 5. 104 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019.....	143
Tabel 5. 105 Belanja Barang Jasa Aset Tetap Lainnya.....	145
Tabel 5. 106 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya	146
Tabel 5. 107 Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya	146
Tabel 5. 108 Reklasifikasi Aset Tetap	147
Tabel 5. 109 Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan	147



Tabel 5. 110 Daftar Kontruksi dalam Pengerjaan.....	148
Tabel 5. 111 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019.....	149
Tabel 5. 112 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019.....	151
Tabel 5. 113 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal	151
Tabel 5. 114 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang Jasa	152
Tabel 5. 115 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang Jasa	152
Tabel 5. 116 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019	153
Tabel 5. 117 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga	154
Tabel 5. 118 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019	155
Tabel 5. 119 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2019.....	155
Tabel 5. 120 Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2019	157
Tabel 5. 121 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019	157
Tabel 5. 122 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2019	158
Tabel 5. 123 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2019	158
Tabel 5. 124 Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2019 dan 2018	159
Tabel 5. 125 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018.....	159
Tabel 5. 126 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019 dan 2018.....	160
Tabel 5. 127 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2019 dan 2018	160
Tabel 5. 128 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO Tahun 2019 dan 2018.....	161
Tabel 5. 129 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2019 dan 2018.....	161
Tabel 5. 130 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2019 dan 2018.....	161
Tabel 5. 131 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2019 dan 2018	162
Tabel 5. 132 Realisasi Penerimaan bagi Hasil pajak-LO Tahun 2019 dan 2018.....	162
Tabel 5. 133 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO Tahun 2019 dan 2018.....	162
Tabel 5. 134 Realisasi Penerimaan DAK– LO Tahun 2019 dan 2018	163
Tabel 5. 135 Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik – LO Tahun 2019 dan 2018.....	163
Tabel 5. 136 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2019 dan 2018	164
Tabel 5. 137 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2019 dan 2018	164
Tabel 5. 138 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2019 dan 2018	165
Tabel 5. 139 Beban – LO Tahun 2019 dan 2018	165
Tabel 5. 140 Beban Operasi – LO Tahun 2019 dan 2018.....	165
Tabel 5. 141 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2019 dan 2018	166
Tabel 5. 142 Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2019 dan 2018.....	166
Tabel 5. 143 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018	167
Tabel 5. 144 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018.....	167
Tabel 5. 145 Beban Transfer Tahun 2019 dan 2018.....	168
Tabel 5. 146 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2019 dan 2018.....	169
Tabel 5. 147 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018	169
Tabel 5. 148 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018.....	170
Tabel 5. 149 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018.....	173



Tabel 5. 150 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018.....	176
Tabel 5. 151 Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal Penjualan Aset Tetap	177
Tabel 5. 152 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....	177
Tabel 5. 153 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018.....	180
Tabel 5. 154 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	180
Tabel 5. 155 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	181
Tabel 5. 156 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris.....	181
Tabel 5. 157 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	181
Tabel 5. 158 Saldo Akhir Kas Tahun 2019.....	182
Tabel 5. 159 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	182
Tabel 5. 160 Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	183
Tabel 6. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2019.....	189
Tabel 6. 2 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan.....	189
Tabel 6. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	190
Tabel 6. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	190
Tabel 6. 5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	191
Tabel 6. 6 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2019 - 2024.....	192
Tabel 6. 7 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan	193
Tabel 6. 8 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan.....	193
Tabel 6. 9 Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi.....	194
Tabel 6. 10 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2018 s/d 2019.....	194
Tabel 6. 11 Rekapitulasi Rokok Tanpa Pita Cukai Tahun 2019.....	198
Tabel 6. 12 Rekapitulasi Pemadaman Kebakaran Tahun 2019	199
Tabel 6. 13 Rekapitulasi Evakuasi Hewan Liar Oleh Pemadam Kebakaran.....	200
Tabel 6. 14 Rekapitulasi Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	203
Tabel 6. 15 Rekapitulasi Pelanggaran Pk5 Th. 2019.....	204
Tabel 6. 16 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.....	211
Tabel 6. 17 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinperinaker	212
Tabel 6. 18 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 Program KOTAKU melalui Dinperkim.....	213
Tabel 6. 19 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan	214
Tabel 6. 20 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	216



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%).....	16
Gambar 5. 1	Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA. 2019	61
Gambar 5. 2	Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer	86
Gambar 6. 1	Peta Administratif Kota Pekalongan.....	188
Gambar 6. 2	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)	190

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TA. 2019**



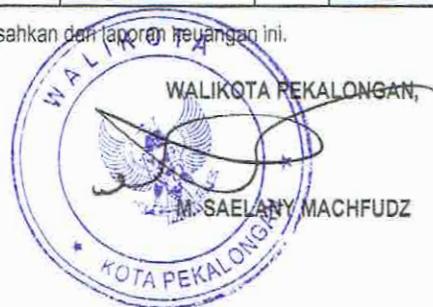
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2019	Realisasi s/d 31 Des 2019	%	Realisasi 2018
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	209.577.100.000,00	212.777.435.293,60	101,53	179.224.408.698,00
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	80.400.000.000,00	87.578.474.262,00	108,93	70.561.333.701,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	18.095.600.000,00	16.667.656.492,00	92,11	15.985.706.343,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.101.000.000,00	6.101.173.105,00	100	5.920.239.113,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	104.980.500.000,00	102.430.131.434,61	97,57	86.757.129.541,00
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	727.065.158.000,00	715.761.199.193,00	98,45	694.903.563.048,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	620.540.406.000,00	610.332.820.948,00	98,36	586.379.794.858,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	23.683.177.000,00	17.751.480.700,00	74,95	25.352.861.062,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	2.561.157.000,00	1.275.750.200,00	49,81	1.340.170.369,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	471.330.216.000,00	475.842.089.000,00	100,96	449.055.738.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	122.965.856.000,00	115.463.501.048,00	93,9	110.631.025.427,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	33.260.942.000,00	33.260.942.000,00	100	33.250.000.000,00
Dana Penyesuaian		33.260.942.000,00	33.260.942.000,00	100	33.250.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	73.263.810.000,00	72.167.436.245,00	98,5	75.273.768.190,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		73.263.810.000,00	72.167.436.245,00	98,5	75.273.768.190,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	35.899.321.000,00	43.085.829.634,00	120,02	31.103.600.822,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	23.324.321.000,00	23.949.677.589,00	102,68	23.778.759.822,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	12.575.000.000,00	19.136.152.045,00	152,18	7.324.841.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	99,91	905.231.572.568,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	845.315.489.000,00	771.512.589.320,00	91,27	734.880.485.431,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	429.514.183.000,00	390.898.339.975,00	91,01	352.531.365.055,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	368.868.065.000,00	338.655.157.845,00	91,81	317.053.705.432,00
Bunga	5.1.2.1.3	0	6.803.500,00	0	0
Hibah	5.1.2.1.4	33.307.241.000,00	29.310.400.000,00	88,00	52.630.714.944,00
Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	12.904.000.000,00	11.920.375.000,00	92,38	11.865.819.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.6	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	798.881.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	202.046.925.000,00	182.153.984.579,00	90,15	146.382.593.476,00
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	6.980.915.000,00	3.912.172.520,00	56,04	19.140.412.917,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	30.785.792.000,00	35.522.056.921,00	115,38	31.782.371.749,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	88.453.120.000,00	70.163.070.715,00	79,32	51.233.394.067,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	72.034.476.000,00	68.876.027.946,00	95,62	38.704.725.930,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.379.857.000,00	3.299.127.177,00	97,61	5.171.517.732,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	412.765.000,00	381.529.300,00	92,43	350.171.081,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.750.000.000,00	730.438.928,00	26,56	1.921.815.800,00
Belanja Tak Terduga		2.750.000.000,00	730.438.928,00	26,56	1.921.815.800,00
JUMLAH BELANJA		1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	90,89	883.184.894.707,00
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		0	0	0	0
JUMLAH TRANSFER		0	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	90,89	883.184.894.707,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-77.570.835.000,00	17.227.451.293,61	-22,21	22.046.677.861,00
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	102	78.606.608.989,00
Penggunaan SilPA	5.1.3.1.1	87.928.207.000,00	87.928.207.176,00	100	78.568.368.646,00
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	300.000.000,00	300.000.000,00	100	0
Pinjaman Dalam Negeri		0	1.800.000.000,00	∞	0
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.1.3	0	1.800.000.000,00	0	0
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.181.818,00	100,01	38.240.343,00
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.1.4	2.000.000.000,00	2.000.181.818,00	100,01	38.240.343,00

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2019	Realisasi s/d 31 Des 2019	%	Realisasi 2018
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	111,83	12.725.079.674,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	4.350.000.000,00	4.607.388.226,00	105,92	4.302.387.924,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	8.300.000.000,00	7.742.000.000,00	93,28	8.400.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.3.2.3	7.372.000,00	4.741.750,00	64,32	22.691.750,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0	1.800.000.000,00	∞	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.3.2.4	0	1.800.000.000,00	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0
PEMBIAAYAN NETTO		77.570.835.000,00	77.874.259.018,00	100,39	65.881.529.315,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0	95.101.710.311,61		87.928.207.176,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		87.928.207.176,00	78.568.368.646,00
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.1	-87.928.207.176,00	-78.568.368.646,00
JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		0	0
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.2	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00
JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		95.101.710.311,61	87.928.207.176,00
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		0	0
LAIN-LAIN		0	0
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	5.2.3	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
ASET	5.3.1				
ASET LANCAR	5.3.1.1				
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00	7.171.992.680,61	8,16
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	26.884.779.309,00	80.188.431.351,00	-53.303.652.042,00	-66,47
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	10.805.000,00	1.395.687,00	9.409.313,00	674,17
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.3	10.899.968.384,61	7.041.701.633,00	3.858.266.751,61	54,79
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.4	2.306.157.618,00	698.188.960,00	1.607.968.658,00	230,31
Setara Kas	5.3.1.1.1.5	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00	100
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0	0	0	0
Piutang	5.3.1.1.3	43.378.338.498,57	29.521.860.269,71	13.856.478.228,86	46,94
Piutang Pendapatan		45.002.682.491,50	37.908.665.824,50	7.094.016.667,00	18,71
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	31.912.580.850,00	29.497.982.436,00	2.414.598.414,00	8,19
Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	5.981.129.734,50	5.077.659.469,50	903.470.265,00	17,79
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.1.1.3.3	5.357.622.501,00	0	5.357.622.501,00	100,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.3.4	1.751.349.406,00	3.333.023.919,00	-1.581.674.513,00	-47,45
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3.5	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	7.311.543.944,75	36,49
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	7.311.543.944,75	36,49
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3.6	-28.973.255.379,98	-28.424.172.997,09	-549.082.382,89	1,93
Penyisihan Piutang Pendapatan		-20.687.062.313,35	-19.574.579.739,90	-1.112.482.573,45	5,68
Penyisihan Piutang Lainnya		-8.286.193.066,63	-8.849.593.257,19	563.400.190,56	-6,37
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	135.573.791,67	128.787.685,50	6.786.106,17	5,27
Belanja Dibayar Dimuka		135.573.791,67	128.787.685,50	6.786.106,17	5,27
Persediaan	5.3.1.1.5	15.594.536.097,85	12.205.600.745,65	3.388.935.352,20	27,77
Persediaan		15.594.536.097,85	12.205.600.745,65	3.388.935.352,20	27,77
JUMLAH ASET LANCAR		154.210.158.699,70	129.785.966.331,86	24.424.192.367,84	18,82
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2				
Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.1	1.197.696.251,00	3.199.752.072,00	-2.002.055.821,00	-62,57
Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.1	1.000.000.000,00	3.122.066.834,00	-2.122.066.834,00	-67,97
Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	482.586.701,00	502.975.701,00	-20.389.000,00	-4,05
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.1.2.1.3	-284.890.450,00	-425.290.463,00	140.400.013,00	-33,01
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	90.950.180.931,26	84.508.150.053,09	6.442.030.878,17	7,62
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	90.644.980.931,26	84.202.950.053,09	6.442.030.878,17	7,65
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	305.200.000,00	305.200.000,00	0	0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		92.147.877.182,26	87.707.902.125,09	4.439.975.057,17	5,06
ASET TETAP	5.3.1.3				
Tanah	5.3.1.3.1	1.311.204.062.019,37	1.048.418.220.665,37	262.785.841.354,00	25,06
Tanah		1.311.204.062.019,37	1.048.418.220.665,37	262.785.841.354,00	25,06
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	455.160.610.773,76	383.320.520.119,24	71.840.090.654,52	18,74
Peralatan dan Mesin		455.160.610.773,76	383.320.520.119,24	71.840.090.654,52	18,74
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	763.793.036.482,84	697.198.725.975,64	66.594.310.507,20	9,55
Gedung dan Bangunan		763.793.036.482,84	697.198.725.975,64	66.594.310.507,20	9,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	829.609.216.352,69	723.051.390.813,69	106.557.825.539,00	14,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan		829.609.216.352,69	723.051.390.813,69	106.557.825.539,00	14,74
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	35.865.985.752,78	35.759.170.065,78	106.815.687,00	0,3
Aset Tetap Lainnya		35.865.985.752,78	35.759.170.065,78	106.815.687,00	0,3
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	14.201.584.199,00	596,28
Konstruksi dalam Pengerjaan		16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	14.201.584.199,00	596,28
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	-959.644.184.898,21	-825.678.670.095,09	-133.965.514.803,12	16,22
Akumulasi Penyusutan		-959.644.184.898,21	-825.678.670.095,09	-133.965.514.803,12	16,22
JUMLAH ASET TETAP		2.452.572.023.682,23	2.064.451.070.544,63	388.120.953.137,60	18,8
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	5.3.1.4	12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,3
Dana Cadangan		12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,3
JUMLAH DANA CADANGAN		12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	4.307.388.226,00	51,3
ASET LAINNYA	5.3.1.5				
Tagihan Jangka Panjang		0	0	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	12.582.540.000,00	16.807.180.000,00	-4.224.640.000,00	-25,14
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		12.582.540.000,00	16.807.180.000,00	-4.224.640.000,00	-25,14
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2	1.283.030.799,80	1.251.375.473,40	31.655.326,40	2,53

Uraian	Reff CaLK	Jumlah		Lebih Kurang	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2.1	4.391.086.937,05	3.789.167.551,05	601.919.386,00	15,89
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.2.2	-3.108.056.137,25	-2.537.792.077,65	-570.264.059,60	22,47
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	130.956.964.761,31	154.433.065.256,00	-23.476.100.494,69	-15,2
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.1	154.442.440.256,00	154.433.065.256,00	9.375.000,00	0,01
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.2	-23.485.475.494,69	0	-23.485.475.494,69	100
Uang Jaminan	5.3.1.5.4	217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
Uang Jaminan		217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
JUMLAH ASET LAINNYA		145.039.811.623,11	172.707.516.529,40	-27.667.704.906,29	-16,02
JUMLAH ASET		2.856.674.222.675,30	2.463.049.418.792,98	393.624.803.882,32	15,98
KEWAJIBAN	5.3.2.1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	1.510.455,00	-1.510.455,00	-100
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	1.510.455,00	-1.510.455,00	-100
Utang Bunga		0	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	1.373.121.791,34	1.289.427.097,67	83.694.693,67	6,49
Pendapatan Diterima Dimuka		1.373.121.791,34	1.289.427.097,67	83.694.693,67	6,49
Utang Belanja	5.3.2.1.2	24.211.993.061,98	13.996.389.740,00	10.215.603.321,98	72,99
Utang Belanja		24.211.993.061,98	13.996.389.740,00	10.215.603.321,98	72,99
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	256.423.590,00	254.707.348,00	1.716.242,00	0,67
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3.1	39.147.528,00	38.811.548,00	335.980,00	0,87
Utang Uang Jaminan	5.3.2.1.3.2	217.276.062,00	215.895.800,00	1.380.262,00	0,64
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	10.299.503.802,65	66,27
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri		0	0	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya		0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA		0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	10.299.503.802,65	66,27
EKUITAS					
Ekuitas	5.3.2.2	2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66
Ekuitas		2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66
JUMLAH EKUITAS		2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31	383.325.300.079,67	15,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.856.674.222.675,30	2.463.049.418.792,98	393.624.803.882,32	15,98

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	91.299.275.643,00	73.136.734.477,00	18.162.541.166,00	24,83
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	17.554.406.636,00	16.358.576.244,33	1.195.830.391,67	7,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	5.856.763.925,89	5.668.366.961,87	188.396.964,02	3,32
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	111.166.751.640,49	80.369.432.561,99	30.797.319.078,50	38,32
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		225.877.197.845,38	175.533.110.245,19	50.344.087.600,19	28,68
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.1				
Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.1.1	22.557.670.368,00	25.352.861.062,00	-2.795.190.694,00	-11,03
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.1.2.1.2	1.827.183.033,00	1.340.170.369,00	487.012.664,00	36,34
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.1.2.1.3	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00	26.786.351.000,00	5,97
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.1.2.1.4	49.033.606.513,00	41.768.518.285,00	7.265.088.228,00	17,39
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	5.4.1.1.2.1.5	66.429.894.535,00	68.862.507.142,00	-2.432.612.607,00	-3,53
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		615.690.443.449,00	586.379.794.858,00	29.310.648.591,00	5,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2				
Dana Penyesuaian - LO		33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	10.942.000,00	0,03
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	10.942.000,00	0,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		70.585.760.651,00	78.159.164.010,00	-7.573.403.359,00	-9,69
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		70.585.760.651,00	78.159.164.010,00	-7.573.403.359,00	-9,69
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO		19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	11.811.311.045,00	161,25
Jumlah Bantuan Keuangan - LO		19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	11.811.311.045,00	161,25
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO		738.673.298.145,00	705.113.799.868,00	33.559.498.277,00	4,76
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3				
Pendapatan Hibah - LO		33.087.278.899,40	45.009.645.870,44	-11.922.366.971,04	-26,49
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		33.087.278.899,40	45.009.645.870,44	-11.922.366.971,04	-26,49
JUMLAH PENDAPATAN - LO		997.637.774.889,78	925.656.555.983,63	71.981.218.906,15	7,78
BEBAN	5.4.1.2				
BEBAN OPERASI - LO	5.4.1.2.1				
Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1.1	372.550.705.965,00	335.400.524.961,00	37.150.181.004,00	11,08
Beban Barang dan Jasa					
Beban Persediaan	5.4.1.2.1.2	72.892.414.571,93	57.404.110.028,09	15.488.304.543,84	26,98
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.1.3	12.494.978.093,00	11.144.116.587,00	1.350.861.506,00	12,12
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.1.4	28.731.743.848,00	28.765.914.398,00	-34.170.550,00	-0,12
Beban Jasa	5.4.1.2.1.5	250.552.896.845,04	241.411.002.078,22	9.141.894.766,82	3,79
Jumlah Beban Barang dan Jasa		364.672.033.357,97	338.725.143.091,31	25.946.890.266,66	7,66
Beban Bunga	5.4.1.2.1.6	6.803.500,00	0	6.803.500,00	∞
Beban Hibah	5.4.1.2.1.7	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00	6.864.196.000,00	30,58
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.8	11.920.375.000,00	11.867.319.000,00	53.056.000,00	0,45
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.9	103.276.506.692,86	92.514.476.889,06	10.762.029.803,80	11,63
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.10	1.498.760.305,90	6.316.153.644,44	-4.817.393.338,54	-76,27
Beban Lain-lain	5.4.1.2.1.11	187,19	7,49	179,7	2.399,20
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		883.235.585.008,92	807.269.821.593,30	75.965.763.415,62	9,41
BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.2				
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0	100.000.000,00	-100.000.000,00	-100
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		721.513.000,00	698.881.000,00	22.632.000,00	3,24
JUMLAH BEBAN TRANSFER		721.513.000,00	798.881.000,00	-77.368.000,00	-9,68

6

Uraian	Reff CaLK	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
JUMLAH BEBAN		883.957.098.008,92	808.068.702.593,30	75.888.395.415,62	9,39
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1.3	113.680.676.880,86	117.587.853.390,33	-3.907.176.509,47	-3,32
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO					
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		0	0	0	0
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.1.4				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.1.4.1	3.717.878.692,61	3.392.734.846,12	325.143.846,49	9,58
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.1.4.2	2.970.603.524,47	9.412.626.758,11	-6.442.023.233,64	-68,44
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL		6.688.482.217,08	12.805.361.604,23	-6.116.879.387,15	-47,77
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2	-6.688.482.217,08	-12.805.361.604,23	6.116.879.387,15	-47,77
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		106.992.194.663,78	104.782.491.786,10	2.209.702.877,68	2,11
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		0	0	0	0
BEBAN LUAR BIASA	5.4.3				
Beban Luar Biasa		730.438.928,00	1.921.815.800,00	-1.191.376.872,00	-61,99
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		730.438.928,00	1.921.815.800,00	-1.191.376.872,00	-61,99
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA		-730.438.928,00	-1.921.815.800,00	1.191.376.872,00	-61,99
SURPLUS / DEFISIT LO		106.261.755.735,78	102.860.675.986,10	3.401.079.749,68	3,31

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	87.578.474.262,00	70.561.333.701,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	16.657.441.492,00	16.044.288.253,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	6.101.173.105,00	5.920.239.113,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	102.151.706.347,61	84.086.154.207,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	17.751.480.700,00	25.352.861.062,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	1.275.750.200,00	1.340.170.369,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	115.463.501.048,00	110.631.025.427,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.10	72.167.436.245,00	75.273.768.190,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.11	23.949.677.589,00	23.762.375.000,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.12	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		971.335.824.033,61	902.602.794.322,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	390.898.339.975,00	352.531.365.055,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	338.655.157.845,00	347.238.216.376,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	6.803.500,00	0
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	11.920.375.000,00	11.865.819.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	721.513.000,00	798.881.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.7	730.438.928,00	1.921.815.800,00
Jumlah Arus Keluar Kas		772.243.028.248,00	736.802.301.231,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		199.092.795.785,61	165.800.493.091,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.1	279.230.774,00	2.670.169.647,00
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.2	300.000.000,00	0
Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.1.3	2.000.181.818,00	0
Jumlah Arus Masuk Kas		2.579.412.592,00	2.670.169.647,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	3.912.172.520,00	19.140.412.917,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	35.449.652.521,00	31.356.967.749,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	70.221.428.115,00	51.489.607.167,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	68.876.027.946,00	38.722.786.830,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	3.299.732.177,00	5.172.992.732,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	394.971.300,00	499.826.081,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.7	4.607.388.226,00	0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	7.742.000.000,00	0
Jumlah Arus Keluar Kas		194.503.372.805,00	146.382.593.476,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		-191.923.960.213,00	-143.712.423.829,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		1.800.000.000,00	0
Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah		0	38.240.343,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.800.000.000,00	38.240.343,00

8

Uraian	Reff CaLK	2019	2018
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0	4.302.387.924,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0	8.400.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	5.5.3.2.1	1.800.000.000,00	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.2.2	4.741.750,00	22.691.750,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.804.741.750,00	12.725.079.674,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-4.741.750,00	-12.686.839.331,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		57.835.705.918,00	52.588.321.020,00
Jumlah Arus Masuk Kas		57.835.705.918,00	52.588.321.020,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		57.837.216.373,00	52.593.324.155,00
Kiriman uang keluar		0	22.413.502,00
Jumlah Arus Keluar Kas		57.837.216.373,00	52.615.737.657,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		-1.510.455,00	-27.416.637,00
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		7.162.583.367,61	9.373.813.294,00
SALDO AWAL KAS		87.928.321.944,00	78.554.508.650,00
SALDO AKHIR KAS		95.090.905.311,61	87.928.321.944,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		10.805.000,00	1.395.687,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		0	0
SALDO AKHIR KAS DI BUD		81.884.779.309,00	80.188.431.351,00
SALDO AKHIR KAS DI BLUD		10.899.968.384,61	7.041.701.633,00
SALDO AKHIR KAS DANA BOS		2.306.157.618,00	698.188.960,00
SALDO AKHIR KAS	5.5.5	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.447.507.384.152,31	2.297.948.003.765,33
SURPLUS DEFISIT -LO	5.6.2	106.261.755.735,78	102.860.675.986,10
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	277.063.544.343,89	46.698.704.400,88
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
LAIN-LAIN		277.063.544.343,89	46.698.704.400,88
EKUITAS AKHIR		2.830.832.684.231,98	2.447.507.384.152,31

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini. 

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUZ



BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk kepentingan antara lain :

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Pemerintah Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut :

- a. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
 - j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
 - k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;
 - l. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan ;

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.



Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan

Bab ini berisi penjelasan mengenai keadaan umum Kota Pekalongan, Pembinaan Batas Wilayah, penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu seTahun.

Berdasarkan PDRB series Tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB mencapai 7,477 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 7,087 triliun rupiah pada Tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen, tumbuh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun sebelumnya dengan capaian 5,69 persen.

Delapan kategori yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,57 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,47 persen, Jasa Perusahaan sebesar 8,31 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,84 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,53 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,76 persen, Real Estate sebesar 5,62 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,47 persen.

Sedangkan delapan kategori yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah kategori Industri Pengolahan/Manufacturing sebesar 4,84 persen, Konstruksi sebesar 4,71 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,63 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,21 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,82 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,72 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 2,63 persen

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2018, rata-rata setiap kategori berfluktuatif laju pertumbuhannya. Namun, ada satu kategori yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yang signifikan yaitu Jasa Pendidikan.

Tahun 2018 pertumbuhan sebesar 7,59 persen dan pada tahun 2019 tumbuh melambat menjadi 2,63. Hal ini dikarenakan ada salah satu Universitas di Kota Pekalongan yang memindahkan dua fakultasnya ke Kabupaten Pekalongan dikarenakan rob.

Data Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2019

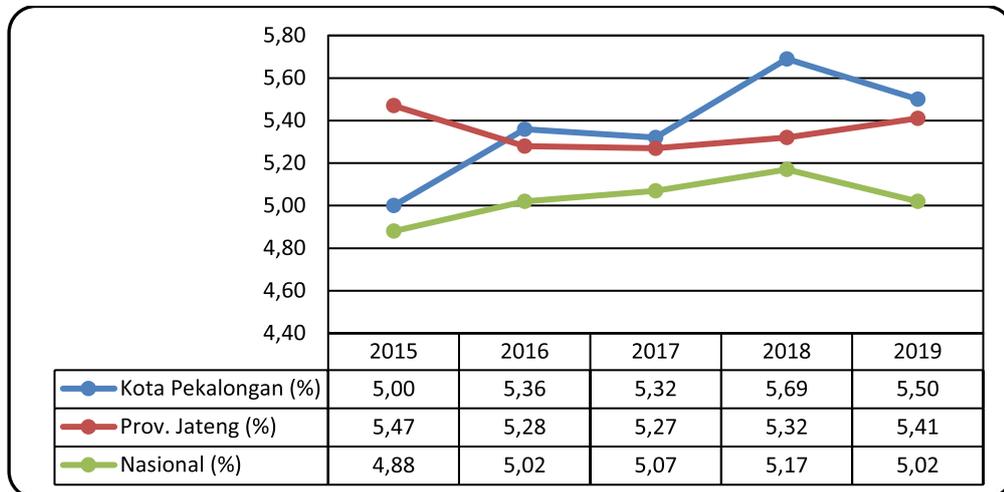
Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,98	-4,80	3,03	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,99	4,16	4,35	4,46	4,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,71	5,69	4,93	5,29	3,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	2,16	5,86	5,16	4,21
F	Konstruksi	5,64	4,52	5,51	5,59	4,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	4,86	5,71	5,53	5,47
H	Transportasi dan Perhubungan	5,45	5,16	5,84	7,07	7,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	7,94	5,92	5,88	6,76
J	Informasi dan Komunikasi	8,58	8,47	11,94	10,43	10,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	9,03	7,35	5,12	3,76
L	Real Estat	7,47	6,54	5,84	5,97	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	8,94	10,28	7,85	7,95	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	2,58	4,11	3,99	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,78	7,49	6,43	7,59	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	9,65	7,74	7,93	7,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	7,23	8,09	9,02	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		5,48	5,36	5,32	5,69	5,50

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara



sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekalongan didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, kategori



Industri Pengolahan dan kategori Kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan.

b. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di Kota Pekalongan, pada Tahun 2018, garis kemiskinan sebesar Rp. 415.172,00 per kapita per bulan dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 425.026,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 2,37 persen.

Persentase penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 6,75 persen berkurang pada Tahun 2019 menjadi 6,60 persen. Demikian juga secara absolut, pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 20,516 ribu jiwa dan pada Tahun 2019 berkurang menjadi 20,210 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan, pelaksanaan dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

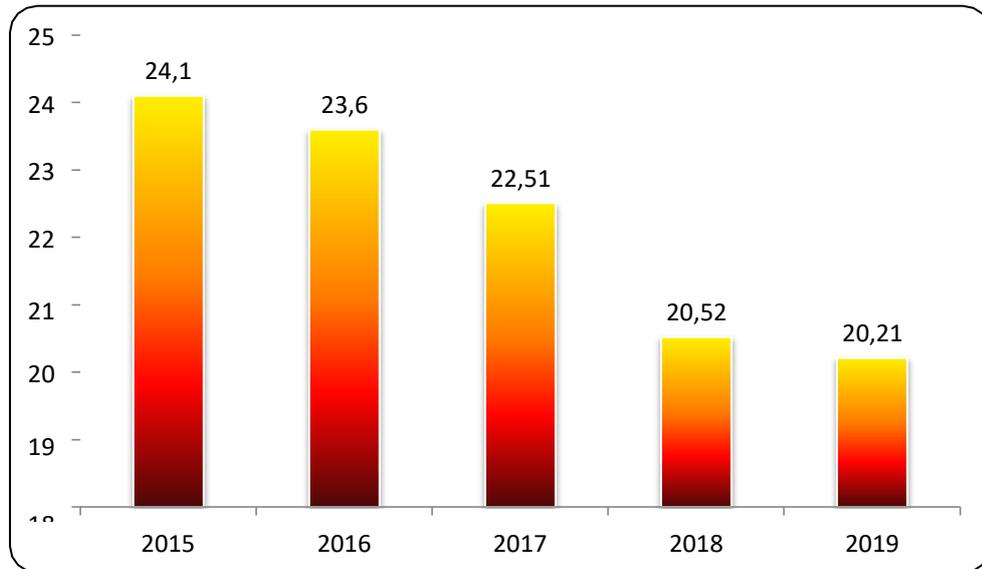
Seiring dengan jumlah dan persentase penduduk miskin yang terus berkurang, nilai kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinan berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan nilai keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan disparitas antar orang miskin juga mengalami peningkatan walaupun relatif rendah. Nilai P1 dan P2 yang semakin melebar mengindikasikan ada disparitas yang ekstrim pada penduduk miskin. Penduduk miskin ini sangat perlu dibantu karena kemiskinannya yang akut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk sisiwa miskin dan program pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat., meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Tabel 2. 2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2019

Uraian	2018	2019	Perubahan (%)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	415.172	425.026	2,37
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	20,516	20,210	-1,51
Persentase Penduduk Miskin / Po (%)	6,75	6,60	-2,22
Persentase Kedalaman Kemiskinan /P1 (%)	1,01	0,92	-8,91
Persentase Keparahan Kemiskinan /P2 (%)	0,22	0,18	-18,18

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (000 Jiwa)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program perlindungan sosial diantaranya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), jaminan kesehatan masyarakat, Kartu Tani dan Kartu Nelayan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan subsidi listrik murah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui intervensi pemberdayaan kepala rumah tangga produktif yang difokuskan pada sektor pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produk dengan didukung peningkatan kesempatan perluasan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dilakukan dengan bantuan ekonomi produktif, peningkatan akses permodalan dengan bunga rendah, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. Disamping itu, dilakukan pula pengembangan infrastruktur desa, peningkatan akses air minum, sanitasi lingkungan, dan stimulasi pemugaran RTLH.

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2019 tercatat sekitar 232.769 orang. Persentase angkatan kerja meningkat dari 70.21 persen menjadi 72.32 persen atau naik 2,11 poin pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) meningkat. Sisanya, yaitu 27,68 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Peningkatan TPAK pada Tahun 2018 seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,23 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,77 persen, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka



ada 5-6 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pekalongan periode Februari 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

URAIAN	2018	2019
TPAK	70,21	72,32
Bukan Angkatan Kerja	29,79	27,68
TKK	93,87	94,23
TPT	6,13	5,77

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Percepatan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dinilai sebagai capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi



Gambar 2.3 Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kota Pekalongan, 2015 - 2019

Sumber : Statistik Daerah Kota Pekalongan 2019, IPM Jawa Tengah 2019, 2020

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kota Pekalongan Tahun 2019 sebesar 74,77. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Pekalongan memperlihatkan perkembangan yang cukup



signifikan dari Tahun ke Tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Pekalongan. Dalam lima Tahun saja (2015 – 2019), terjadi kenaikan IPM hingga 2,08 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi setiap Tahunnya. Pada periode 2018 - 2019, pembangunan manusia di Kota Pekalongan berhasil tumbuh sebesar 0,70 persen.

Tabel 2. 3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

Uraian	2018	2019	Perubahan (poin)
• Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,25	74,28	0,03
• Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,79	12,83	0,04
• Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	8,57	8,71	0,14
• Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp.) disesuaikan	12.312	12.680	368
• IPM Kota Pekalongan	74,24	74,77	0,53

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 2019, 2020

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2019, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2019 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.



a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik 7,51% dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan semua jenis pajak daerah yang secara total pendapatan pajak daerah naik sebesar 11,88 % dengan prosentase kenaikan tertinggi diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.

Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - (1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - (2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
 - (3) Pajak Daerah diasumsikan naik 11,88 % dan Retribusi Daerah diasumsikan naik 3,60% dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik 6,67% dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
- c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD. Lain-lain PAD yang Sah diasumsikan naik 5,83 % dibandingkan dengan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dengan potensi kenaikan terbesar diperoleh dari penerimaan jasa giro naik sebesar 20 %.

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :



- (1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 diasumsikan sama dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diasumsikan sama dengan pagu DBH-CHT Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi diasumsikan sama dengan pagu definitif Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : Penganggaran DAU diasumsikan naik 3 % dibandingkan tahun 2018. Hal ini menyesuaikan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2019 yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan 8,3 % dari APBN Tahun Anggaran 2018. Dan dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.
- c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): Rencana DAK diasumsikan sama dengan pagu definitif DAK Tahun Anggaran 2018 akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan pendapatan hibah APBN Murni dari Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) guna mewujudkan pencapaian target 100 % akses air bersih pada tahun 2019 serta hibah dana BOS pendidikan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2018 menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana



diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d) Tahun 2019 Kota Pekalongan diasumsikan kembali akan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward atas kinerja pemerintah daerah. Mengingat penilaian DID yang semakin ketat maka pada tahun 2019, penerimaan DID diasumsikan sebesar 85% dari pagu DID Tahun 2018.
- e) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi diasumsikan sama dengan pagu Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018. Namun demikian didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
- b) Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- c) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
- d) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
- f) Memberikan reward and punishment, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
- g) Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung system, prosedur dan pelayanan;
- h) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
- i) Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
- j) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- k) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- l) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- m) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- n) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:



- 1) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2019;
- 2) Penyesuaian PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, serta penyesuaian deviden BUMD;
- 3) Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya kelebihan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pekalongan TA 2019;

Dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2019, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diperkirakan akan mengalami penurunan 1,66%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian pendapatan BLUD RSUD Bendan dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Selanjutnya, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 3,07% dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pos Pajak Daerah diasumsikan naik 9,90% karena ada kenaikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan.
- b) Pos Retribusi Daerah secara agregat diasumsikan turun 4,45% karena terdapat penurunan pada Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Meskipun ada kenaikan pada beberapa pos retribusi namun secara agregat retribusi daerah diasumsikan turun.
- c) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan turun sebesar 6,12% karena BKK Pekalongan Utara sedang dalam proses konsolidasi BKK se-Jawa Tengah dimana kredit diragukan dan macet harus dikeluarkan darineraca tanpa memperhitungkan agunan yang menyebabkan biaya PPAP tinggi (rugi) sehingga targetnya dinolkan.
- d) Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan turun sebesar 11,90% karena berdasarkan hasil evaluasi pendapatan BLUD RSUD Bendan pada tahun 2018 dan evaluasi pendapatan sampai tri wulan II tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan BLUD RSUD Bendan.

2) **Pos Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 0,28% karena adanya penyesuaian komponen dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yaitu bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, serta penyesuaian pagu DAK berdasarkan rencana kebutuhan dana.

3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar 5,37% disebabkan karena



adanya penyesuaian menyesuaikan pagu definitif bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Daerah APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Penurunan juga disebabkan karena realisasi hibah PDAM juga tidak mencapai target. Meskipun dana bagi hasil pajak dari provinsi mengalami peningkatan, namun secara agregat Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah mengalami penurunan.

c. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian. Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, sesuai dalam konteks Kota Pekalongan, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional



pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pada dasarnya Anggaran Tahun 2019 sudah merupakan tahun keempat periodisasi RPJM-D Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Total perkiraan belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.001.399.250.000,00 dengan estimasi 39,07% (Rp. 391.232.624.000,00) untuk belanja tidak langsung dan 60,93% (Rp. 610.166.626.000,00) untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja.

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya sebagaimana dialokasikan pada tahun 2018, perhitungan *accress* serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019;
- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- f) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non fisik yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- g) Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Sedangkan persyaratan "berbadan hukum Indonesia" hanya untuk Organisasi Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
 - b) Belanja Tidak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah
- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak
 - a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari



Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

4) **Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 Kebijakan Belanja Langsung Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah

KODE	URUSAN/SKPD	ANGGARAN (Rp)
11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	373.606.984.000
11.01	PENDIDIKAN	80.155.717.000
1.10.10	DINAS PENDIDIKAN	80.155.717.000
11.02	KESEHATAN	160.982.393.000
1.10.20	DINAS KESEHATAN	63.836.236.000
1.10.20	RSUD BENDAN	97.146.157.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



KODE	URUSAN/SKPD	ANGGARAN (Rp)
11.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.775.932.000
1.10.30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.775.932.000
11.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37.111.812.000
1.10.40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37.111.312.000
11.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.137.849.000
1.10.50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.451.527.000
1.10.50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.776.055.000
1.10.50	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.910.267.000
11.06	SOSIAL	7.443.281.000
1.10.60	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.443.281.000
12	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	68.196.871.000
12.01	TENAGA KERJA	4.604.856.000
1.20.10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.604.856.000
12.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.064.957.000
1.20.20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.064.957.000
12.03	PANGAN	1.732.339.000
1.20.30	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.732.339.000
12.04	PERTANAHAN	700.000.000
1.10.30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	700.000.000
12.05	LINGKUNGAN HIDUP	16.065.318.000
1.20.50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.065.318.000
12.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.176.511.000
1.20.60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.176.511.000
12.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.796.440.000
1.20.20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.796.440.000
12.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.132.550.000
1.10.60	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.132.550.000
12.09	PERHUBUNGAN	6.623.328.000
1.20.90	DINAS PERHUBUNGAN	6.623.328.000
12.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.561.390.000
1.21.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.561.390.000
12.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.723.666.000
1.21.10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.723.666.000
12.12	PENANAMAN MODAL	2.274.437.000
1.21.20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.274.437.000
12.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.567.879.000
1.21.30	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.567.879.000
12.14	STATISTIK	250.500.000
1.21.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	270.500.000
12.15	PERSANDIAN	324.000.000
1.21.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	324.000.000
12.16	KEBUDAYAAN	2.930.500.000
1.21.30	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.930.500.000
12.17	PERPUSTAKAAN	1.995.200.000
1.21.70	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.995.200.000
12.18	KEARSIPAN	653.000.000
1.21.70	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	653.000.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	64.228.784.000
20.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.465.984.000



KODE	URUSAN/SKPD	ANGGARAN (Rp)
2.00.10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.465.984.000
20.02	PARIWISATA	2.576.000.000
1.21.30	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.576.000.000
20.03	PERTANIAN	906.500.000
1.20.30	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	906.500.000
20.06	PERDAGANGAN	52.737.800.000
1.21.10	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	52.738.800.000
20.05	PERINDUSTRIAN	2.542.500.000
1.20.10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.542.500.000
30	URUSAN PENUNJANG	104.133.987.000
30.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	5.195.507.000
3.00.10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.195.507.000
30.02	KEUANGAN	9.594.757.000
30.02.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	9.594.757.000
30.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7.637.967.000
3.00.30	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.637.967.000
30.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.550.900.000
3.00.10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.550.900.000
30.00	FUNGSI LAINNYA	80.154.856.000
3.00.50	SEKRETARIAT DAERAH	36.537.402.000
3.00.50	SEKRETARIAT DPRD	28.454.992.000
3.00.50	INSPEKTORAT	2.027.109.000
3.00.50	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	3.403.579.000
3.00.50	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	3.543.597.000
3.00.50	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	2.848.721.000
3.00.50	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	3.339/456.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	610.166.626.000

d. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2019 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
- 2) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2019

1) Belanja Tidak Langsung

- a) Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 terkait gaji ketiga belas dan THR, penyesuaian SiLPA Tahun 2018 atas



belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru, penyesuaian atas penyelenggaraan jaminan kematian bagi PNSD dengan berpedoman pada PP Nomor 66 Tahun 2018, rencana pengadaan CPNS tahun 2019 serta penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi (penyesuaian belanja insentif karena peningkatan target pendapatan).

- b) Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja langsung kebelanja hibah, serta penyesuaian belanja hibah kepada asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c) Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya penyesuaian belanja bantuan sosial santunan kematian.
- d) Belanja Tidak Terduga bertambah dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2019

2) **Belanja Langsung**

- a) Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.
- b) Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
- c) Pengalokasian dana kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 termasuk di dalamnya peningkatan semangat gotong royong dalam peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan.
- d) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- e) Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.
- f) Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- g) Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- h) Penyusunan dokumen pendukung perencanaan guna penyusunan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2024.
- i) Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.
- j) Melanjutkan upaya peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021



untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan.

- k) Penguatan aksesoris kawasan-kawasan strategis dan infrastruktur pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai bagian dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan.
- l) Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan
- m) Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2019.
- n) Penganggaran pentahapan pemilu kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). Selain itu, SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2018 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah pembentukan dana cadangan dan pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.

f. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 maka rencana pembiayaan daerah



diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan *netto* agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 45.000.000.000,00, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 87.928.207.000,00. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah Sisa DAK s/d 2017, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana BOK, Sisa Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD Puskesmas, Sisa Kas di BLUD PSPJ dan Sisa Kas di BLUD BKPM yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing. Penerimaan pembiayaan juga berasal dari pencairan dana cadangan sebesar Rp. 300.000.000,00 yang akan digunakan dalam pentahapan Pemilu Kepala Daerah dimana prosesnya sudah dimulai sejak Bulan September 2019.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan pembentukan dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 7.372.000,00.

3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM dan BLUD PSPJ, sehingga tersaji sebagai entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan.

a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	(917.114.879,39)
Belanja dan Transfer	1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	(95.715.401.173,00)
Surplus / (Defisit)	(77.570.835.000,00)	17.227.451.293,61	94.798.286.293,61
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	1.800.181.994,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	1.496.757.976,00
Pembiayaan Netto	77.570.835.000,00	77.874.259.018,00	303.424.018,00
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran	0,00	95.101.710.311,61	95.101.710.311,61

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp971.624.464.120,61 atau sebesar 99,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp972.541.579.000,00.
- 2) Realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp954.397.012.827,00 atau sebesar 90,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.050.112.414.000,00.
- 3) Pada tahun 2019, Kota Pekalongan mengalami surplus anggaran sebesar Rp17.227.451.293,61.

b. Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018.

Perbandingan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 dengan tahun anggaran 2018 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2018 dengan TA. 2019

Uraian	Ralisasi		Selisih	%
	TA. 2019	TA. 2018		
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	971.624.464.120,61	905.231.572.568,00	66.392.891.552,61	7,33
Belanja dan Transfer	954.397.012.827,00	883.184.894.707,00	71.212.118.120,00	8,06
Surplus / (Defisit)	17.227.451.293,61	22.046.677.861,00	-4.819.226.567,39	-21,86
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	92.028.388.994,00	78.606.608.989,00	13.421.780.005,00	17,07
Pengeluaran Pembiayaan	14.154.129.976,00	12.725.079.674,00	1.429.050.302,00	11,23
Pembiayaan Netto	77.874.259.018,00	65.881.529.315,00	11.992.729.703,00	18,20
Sisa Lebih Pembiayaan	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00	7.173.503.135,61	8,16

- 1) Realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 meningkat sebesar Rp66.392.891.552,61 atau meningkat sebesar 7,33% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp905.231.572.568,00.
- 2) Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2019 meningkat sebesar Rp71.212.118.120,00 atau meningkat sebesar 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp883.184.894.707,00.
- 3) Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2019 sebesar Rp77.874.259.018,00 atau naik sebesar 18,20 % jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2018 sebesar Rp65.881.529.315,00.

c. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan per SKPD

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp971.624.464.120,61 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 per SKPD dan Realisasi Tahun 2018

No	OPD	Tahun 2019		%	Tahun 2018
		Anggaran Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	DINKES	17.415.000.000,00	17.907.362.366,00	102,83	15.676.241.408,00
2	RSUD BENDAN	75.000.000.000,00	70.469.240.049,61	93,96	56.849.801.951,00
3	DPU PR	1.791.000.000,00	1.999.518.600,00	111,64	2.766.085.500,00
4	DINPERKIM	1.002.400.000,00	1.255.904.866,00	125,29	1.141.344.838,00
5	DINPERINA KER	45.000.000,00	45.896.000,00	101,99	32.496.000,00
6	DINPERPA	94.000.000,00	100.667.500,00	107,09	124.155.359,00
7	DLH	950.000.000,00	726.765.000,00	76,50	519.989.000,00
8	DISHUB	2.242.000.000,00	1.738.908.800,00	77,56	1.722.468.100,00
9	DINDUKCAPIL	1.500.000,00	0,00	-	900.000,00
10	DISKOMINFO	450.000.000,00	319.751.613,00	71,06	331.065.981,00
11	DINDAGKOP	3.060.000.000,00	2.979.849.100,00	97,38	2.628.410.011,00
12	DPMTSP	0,00	0,00	-	8.612.900,00
13	DINPARBUDPORA	1.100.000.000,00	647.670.250,00	58,88	602.176.750,00
14	DKP	6.093.700.000,00	5.362.751.300,00	88,00	4.741.790.710,00
15	BKD	1.507.500.000,00	1.637.703.076,00	108,64	1.523.918.034,00
16	SKPKD	861.789.479.000,00	866.432.475.600,00	100,54	816.562.116.026,00
	Jumlah	972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	99,91	905.231.572.568,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp954.397.012.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019 per SKPD dan Realisasi Tahun 2018

No.	SKPD	TA. 2019		%	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA. 2018 (Rp)
1	DINDIK	243.503.365.000,00	228.406.615.720,00	93,80	218.741.777.077,00
2	DINKES	96.664.206.000,00	95.620.399.065,00	98,92	86.539.521.603,00
3	RSUD BENDAN	104.140.360.000,00	97.241.688.404,00	93,38	71.166.824.985,00
4	DPUPR	89.107.484.000,00	80.168.288.009,00	89,97	94.353.761.353,00
5	DINPERKIM	50.861.399.000,00	46.435.660.672,00	91,30	36.438.378.619,00
6	SATPOL PP	13.383.162.000,00	13.052.284.760,00	97,53	10.535.460.019,00
7	BPBD	3.288.927.000,00	2.859.067.496,00	86,93	3.141.368.692,00
8	KESBANGPOL	3.980.616.000,00	3.303.405.070,00	82,99	3.049.887.384,00
9	DINSOSP2KB	14.082.436.000,00	13.218.194.407,00	93,86	11.656.931.944,00
10	DINPERINAHER	12.485.706.000,00	11.299.894.653,00	90,50	14.079.594.112,00
11	DPMP2A	6.955.995.000,00	5.877.450.385,00	84,49	7.197.217.886,00
12	DINPERPA	8.365.265.000,00	8.074.988.637,00	96,53	6.327.445.166,00
13	DLH	26.618.811.000,00	23.476.754.312,00	88,20	27.214.398.653,00
14	DINDUKCAPIL	6.063.138.000,00	5.548.411.570,00	91,51	5.347.991.782,00
15	DISHUB	11.605.990.000,00	10.952.603.047,00	94,37	11.979.590.612,00
16	DISKOMINFO	12.642.955.000,00	10.985.865.481,00	86,89	10.379.757.236,00
17	DINDAGKOP	43.798.645.000,00	27.178.968.465,00	62,05	18.929.861.156,00
18	DPMP2SP	6.717.572.000,00	5.796.129.390,00	86,28	4.940.783.147,00
19	DINPARBUDPORA	18.371.112.000,00	16.583.275.970,00	90,27	14.502.444.561,00
20	DINARBUS	5.070.744.000,00	4.458.241.802,00	87,92	4.795.524.460,00
21	DKP	8.278.045.000,00	7.646.823.762,00	92,37	6.730.408.217,00
22	BAPPEDA	10.978.330.000,00	9.802.782.068,00	89,29	9.305.474.448,00
23	BKD	25.186.893.000,00	22.508.096.506,00	89,36	21.805.027.928,00
24	SKPKD	49.683.241.000,00	42.689.530.428,00	85,92	37.032.719.800,00
25	BKPPD	11.862.136.000,00	10.246.109.614,00	86,38	9.534.121.613,00
26	DPRD	15.189.488.000,00	13.859.368.290,00	91,24	12.914.485.174,00
27	WALIKOTA & WAKIL	787.635.000,00	686.494.724,00	87,16	456.583.924,00
28	SETDA	54.927.570.000,00	50.329.512.946,00	91,63	42.552.745.397,00
	BAGIAN TAPEM	2.344.267.000,00	2.096.633.450,00	89,44	1.726.616.600,00
	BAGIAN HUKUM	1.777.000.000,00	1.568.928.342,00	88,29	1.688.906.484,00
	BAGIAN ORGANISASI	1.137.020.000,00	1.096.407.677,00	96,43	1.063.076.256,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.586.600.000,00	1.471.036.994,00	92,72	1.291.386.883,00
	BAGIAN PBJ DAN DALBANG	1.149.800.000,00	1.038.149.681,00	90,29	1.103.821.360,00
	BAGIAN KESRA	11.621.970.000,00	10.914.135.295,00	93,91	9.756.537.914,00
	BAGIAN UMUM	18.901.851.000,00	16.456.333.906,00	87,06	14.322.878.369,00
	BAGIAN RTP	14.120.576.000,00	13.504.176.101,00	95,63	9.518.556.076,00
	BAGIAN HUMAS	2.288.486.000,00	2.183.711.500,00	95,42	2.080.965.455,00
29	SETWAN	36.679.382.000,00	31.109.964.491,00	84,82	32.027.873.779,00
30	INSPEKTORAT	5.600.933.000,00	5.032.116.049,00	89,84	4.667.401.330,00
	Jumlah Sementara	996.881.541.000,00	904.448.986.193,00	90,73	838.345.362.057,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



No.	SKPD	TA. 2019		%	Realisasi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		TA. 2018 (Rp)
	Saldo Pindahan	996.881.541.000,00	904.448.986.193,00	90,73	838.345.362.057,00
30	KEC. PEKALONGAN UTARA	13.365.927.000,00	12.576.090.686,00	94,09	10.045.227.508,00
	KEL.KANDANG PANJANG	683.387.000,00	649.913.744,00	95,10	288.668.139,00
	KEL.PANJANG WETAN	731.557.000,00	705.039.322,00	96,38	328.669.952,00
	KEL.DEGAYU	624.717.000,00	602.264.872,00	96,41	240.245.546,00
	KEL.BANDENGAN	608.777.000,00	552.628.155,00	90,78	237.924.638,00
	KEL.KRAPYAK	865.180.000,00	847.801.271,00	97,99	460.879.126,00
	KEL.PADUKUHAN KRATON	762.042.000,00	734.191.510,00	96,35	338.585.819,00
	KEL.PANJANG BARU	678.593.000,00	647.700.289,00	95,45	281.596.426,00
31	KEC. PEKALONGAN SELATAN	11.924.009.000,00	10.959.284.044,00	91,91	13.145.633.492,00
	KEL. JENGGOT	652.637.000,00	644.159.550,00	98,70	275.362.000,00
	KEL.BUARAN KRADENAN	678.357.000,00	654.008.687,00	96,41	301.123.077,00
	KEL.KURIPAN KERTOHARJO	640.437.000,00	603.790.456,00	94,28	245.284.211,00
	KEL.KURIPAN YOSOREJO	728.209.000,00	662.671.402,00	91,00	318.051.280,00
	KEL.SOKODUWET	659.237.000,00	610.319.011,00	92,58	271.622.203,00
	KEL.BANYURIP	707.782.000,00	662.253.913,00	93,57	313.738.018,00
33	KEC. PEKALONGAN BARAT	13.391.346.000,00	12.778.270.245,00	95,42	9.760.962.252,00
	KEL.MEDONO	729.777.000,00	704.748.516,00	96,57	396.626.927,00
	KEL.PODOSUGIH	628.167.000,00	538.708.609,00	85,76	232.386.412,00
	KEL.TIRTO	655.817.000,00	622.771.089,00	94,96	264.107.421,00
	KEL.SAPURO KEBULEN	750.577.000,00	726.731.293,00	96,82	337.420.667,00
	KEL.BENDAN KERGON	797.637.000,00	766.645.185,00	96,11	407.879.049,00
	KEL.PASIRKRATONKRAMAT	797.407.000,00	784.243.281,00	98,35	416.931.540,00
	KEL.PRINGREJO	800.917.000,00	771.952.069,00	96,38	408.507.265,00
34	KEC. PEKALONGAN TIMUR	14.549.591.000,00	13.634.381.659,00	93,71	11.887.709.398,00
	KEL.KAUMAN	857.907.000,00	850.486.567,00	99,14	466.512.791,00
	KEL.PONCOL	678.587.000,00	639.170.548,00	94,19	303.974.793,00
	KEL.KLEGO	686.297.000,00	653.058.181,00	95,16	273.612.666,00
	KEL.GAMER	622.757.000,00	608.502.107,00	97,71	247.320.982,00
	KEL.NOYONTAANSARI	731.613.000,00	713.046.379,00	97,46	330.109.509,00
	KEL.SETONO	748.573.000,00	735.303.281,00	98,23	368.746.785,00
	KEL.KALIBAROS	650.287.000,00	633.551.829,00	97,43	260.564.514,00
	Jumlah	1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	90,89	883.184.894.707,00

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 antara lain :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2019 yang tercapai 99,91%, Berapa pos tidak mencapai target karena beberapa hal antara lain :

- 1) Bagi Hasil Pajak/bukan pajak



Realisasi bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA) hanya mencapai 72,50% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak secara nasional tidak tercapai.

2) Dana Alokasi Khusus

a) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar 98,35%. Realisasi penerimaan DAK fisik ini menyesuaikan output kinerja belanja yang dibiayai oleh DAK Fisik.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Realisasi DAK non fisik mencapai 90,87% atau tidak mencapai target karena besaran transfer memperhitungkan sisa DAK non fisik tahun sebelumnya yang masih tersisa di kas daerah.

b. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 90,89%. Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena :

1) Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

2) Belum matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD.

3) Pada tahun 2019, terdapat 3 paket pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2019 tidak selesai, yaitu :

a) Pembangunan pusat kuliner fashion Sugihwaras oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelaksana pekerjaan adalah CV Suryatama Wahyu Abadi dengan nilai sebesar Rp5.616.650.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 27 Desember 2019

b) Renovasi gedung TK ABA Aisyiah Krapyak oleh Dinas Pendidikan. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Yudha Perkasa dengan nilai sebesar Rp146.990.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak adalah tanggal 31 Desember 2019

c) Pembangunan pintu air, pompa dan rumah pompa pengendali banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelaksana pekerjaan CV. Sinar Gemilang dengan nilai Rp5.280.758.000,00 dan jadwal selesai pekerjaan dalam buku kontrak tanggal 25 Desember 2019.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4. 1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019

Kode	Nama Entitas Akuntansi
10101	DINAS PENDIDIKAN
10201	DINAS KESEHATAN
10202	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
10301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10401	BADAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10503	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10601	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20101	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
20201	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20301	DINAS PERTANAN DAN PANGAN
20501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20901	DINAS PERHUBUNGAN
21001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21101	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
21201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21301	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12006	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12007	BADAN KEUANGAN DAERAH
12008	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
12009	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
12010	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
12010	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
12012	SEKRETARIS DAERAH
12023	SEKRETARIAT DPRD
12024	INSPEKTORAT
12027	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
12029	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
12030	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
12031	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR



Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM dan BLUD PSPJ.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

b. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.



Aset Lancar diakui sebagai berikut :

(1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

(2) Investasi Jangka Pendek

- (a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (c) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (d) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(3) Piutang

- (a) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
- (b) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses



- banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
- (c) Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (d) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- (e) Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- (a) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- (b) Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- (c) Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
- Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
 - Telah diterbitkannya surat penagihan.
- (d) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- (e) Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria:
- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - Jumlah piutang dapat diukur;
 - Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- (f) Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman

(4) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :



- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- (c) Pencatatan persediaan menggunakan metode perpektual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- (d) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan

(5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



(6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- (b) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

- (a) Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.
- (b) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;



- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen

(a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama



b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Instalasi;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap :

- (1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (e) Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- (2) Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (3) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Penilaian Awal Aset Tetap

- (1) *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
- (2) *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- (3) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi Aset Tetap

- (1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- (2) Pengeluaran yang Dikapitalisasi
 - (a) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - (b) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa



- konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya :
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - (c) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;



- (d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - (e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- (2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeriharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - (c) Bertambah volume, dan/atau;
 - (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - (e) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan

Pertukaran Aset

- (1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.



Penyusutan Aset Tetap

- (1) Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- (2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya



konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

c) **Aset Lainnya**

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

(1) Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(4) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan

(5) Aset Lain-lain

2) **Pengukuran Kewajiban**

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :



- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.
- f) Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



- c) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- d) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- a) Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- a) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- b) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4) Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.



Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat :
- (1) Timbulnya kewajiban.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.
 - (2) Terjadinya pengeluaran kas
Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan
 - (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.
- b) Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

- a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - (3) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
- (1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) Bertambah volume, dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



- c) Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- a) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- c) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- b) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- c) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- a) Beban diakui pada saat :
 - (1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - (2) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah
 - (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- b) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c) Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- d) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

a. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas*



yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada entitas.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- 4) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- 5) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut*

b. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) *Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) *Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
 - 1) ***Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.***
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
 - 3) Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
 - 4) Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
 - 5) *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*



- 6) *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
- 7) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
- 8) *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- 9) *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

c. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- 2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

d. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- 2) Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	(917.114.879,39)
Belanja dan Transfer	1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	(95.715.401.173,00)
Surplus / (Defisit)	(77.570.835.000,00)	17.227.451.293,61	94.798.286.293,61
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	1.800.181.994,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	1.496.757.976,00
Pembiayaan Netto	77.570.835.000,00	77.874.259.018,00	303.424.018,00
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran	0,00	95.101.710.311,61	95.101.710.311,61

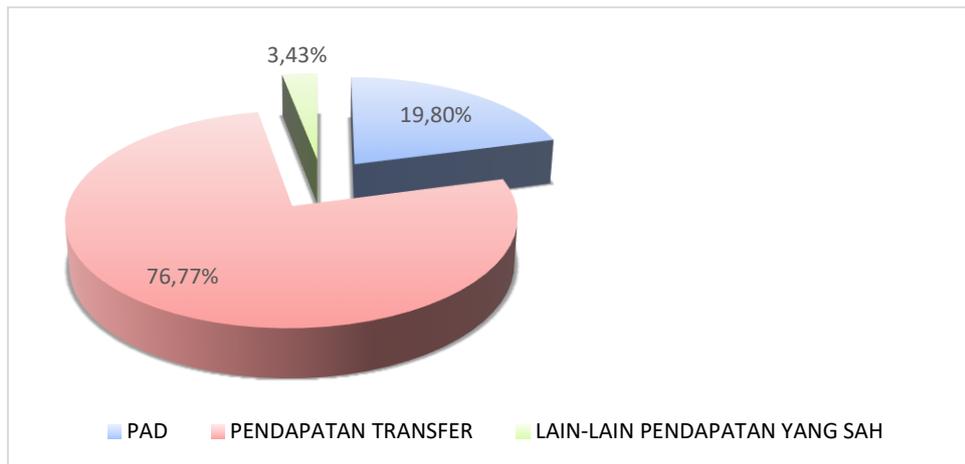
a. Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp971.624.464.120,61 atau 99,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp972.541.579.000,00. Realisasi pendapatan daerah bila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan 7,33% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp905.231.572.568,00. Rincian pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

Pendapatan Daerah :	TA. 2019		%	TA. 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	209.577.100.000,00	212.777.435.293,61	101,53	179.224.408.698,00
Pendapatan Transfer	727.065.158.000,00	715.761.199.193,00	98,45	694.903.563.048,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	35.899.321.000,00	43.085.829.634,00	120,02	31.103.600.822,00
Jumlah	972.541.579.000,00	971.624.464.120,61	99,91	905.231.572.568,00

Proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 5. 1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA. 2019
CvF

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pos Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 21,90% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 73,67% dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 4,43%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar Rp212.777.435.293,61 atau sebesar 101,53% dari target setelah perubahan sebesar Rp209.577.100.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	80.400.000.000,00	87.578.474.262,00	108,93	70.561.333.701,00
Retribusi Daerah	18.095.600.000,00	16.667.656.492,00	92,11	15.985.706.343,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.000.000,00	6.101.173.105,00	100,00	5.920.239.113,00
Lain-lain PAD Yang Sah	104.980.500.000,00	102.430.131.434,61	97,57	86.757.129.541,00
Jumlah	209.577.100.000,00	212.777.435.293,61	101,53	179.224.408.698,00

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,72% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp179.224.408.698,00. Realisasi masing-masing jenis pendapatan asli daerah tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan



hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan selaku SKPKD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa *“apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD”*. Pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Jenis pajak yang menggunakan mekanisme *official assessment* seperti PBB P2, pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan yang menggunakan *self assessment* seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak parkir. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp87.578.474.262,00 atau sebesar 108,93% dari target setelah perubahan sebesar Rp80.400.000.000,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 24,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp70.561.333.701,00. Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018

Pajak Daerah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hotel	7.000.000.000,00	7.437.962.444,00	106,26	6.734.560.722,00
Restoran	11.700.000.000,00	13.470.213.677,00	115,13	10.792.856.891,00
Hiburan	5.300.000.000,00	5.549.734.728,00	104,71	1.466.795.005,00
Reklame	2.200.000.000,00	2.263.405.846,00	102,88	1.603.942.781,00
Penerangan Jalan	21.600.000.000,00	21.840.421.391,00	101,11	20.851.300.929,00
Parkir	1.500.000.000,00	1.874.020.896,00	124,93	878.220.669,00
Air Tanah	600.000.000,00	1.436.884.068,00	239,48	341.490.800,00
PBB	14.500.000.000,00	14.212.332.279,00	98,02	12.977.362.631,00
BPHTB	16.000.000.000,00	19.493.498.933,00	121,83	14.914.803.273,00
Jumlah	80.400.000.000,00	87.578.474.262,00	108,93	70.561.333.701,00

Masing – masing jenis pajak dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 adalah sebesar Rp7.437.962.444,00 atau sebesar 106,26% dari target setelah perubahan sebesar Rp7.000.000.000,00. Pendapatan pajak hotel dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 dan 2018

Pajak Hotel :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hotel Bintang	6.900.000.000,00	7.340.690.444,00	106,39	6.618.937.458,00
Losmen/Rumah Kos	100.000.000,00	97.272.000,00	97,27	115.623.264,00
Jumlah	7.000.000.000,00	7.437.962.444,00	106,26	6.734.560.722,00

Penerimaan pajak hotel tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,44% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp6.734.560.722,00. Peningkatan penerimaan pajak hotel dikarenakan :

1. Adanya pemeriksaan pajak
2. Adanya intensifikasi penagihan
3. Adanya sosialisasi berkelanjutan

b. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Besaran tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 adalah sebesar Rp13.470.213.677,00 atau sebesar 115,13% dari target setelah perubahan sebesar Rp11.700.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Realisasi Pajak Restoran tahun 2019 dan 2018

Pajak Restoran	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Restoran	9.200.000.000,00	11.031.970.455,00	119,91	8.494.978.719,00
Katering	2.500.000.000,00	2.438.243.222,00	97,53	2.297.878.172,00
Jumlah	11.700.000.000,00	13.470.213.677,00	115,13	10.792.856.891,00

Penerimaan pajak restoran tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 24,81% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp10.792.856.891,00. Peningkatan penerimaan pajak restoran dikarenakan :

1. Adanya pemeriksaan pajak
2. Peningkatan jumlah pemasangan tapping box
3. Intensifikasi penagihan
4. Bertambahnya jumlah wajib pajak dengan berdirinya transmart

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan terdiri : dari pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop besar 20%, bioskop mini sebesar 10% dan bioskop keliling sebesar 5%. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15%. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 15%. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar



30%. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25%. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya sebesar 45%. Pusat Kebugaran dan sejenisnya sebesar 10%. Pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10%. Kesenian pertunjukan rakyat/ tradisional sebesar 5%. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2019 adalah sebesar Rp5.549.734.728,00 atau sebesar 104,71% dari target setelah perubahan sebesar Rp5.300.000.000,00. Penerimaan pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 dan 2018

Pajak Hiburan :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tontonan Film/Bioskop	2.770.000.000,00	3.538.591.817,00	127,75	35.656.000,00
Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	25.000.000,00	14.395.000,00	57,58	16.096.300,00
Karaoke	450.000.000,00	155.924.287,00	34,65	200.603.075,00
Permainan Biliar	5.000.000,00	1.650.000,00	33,00	1.650.000,00
Permainan Ketangkasan	1.950.000.000,00	1.754.353.468,00	89,97	1.106.303.769,00
Mandi Uap/Spa	50.000.000,00	34.524.156,00	69,05	40.997.568,00
Pusat Kebugaran	50.000.000,00	50.296.000,00	100,59	65.488.293,00
Jumlah	5.300.000.000,00	5.549.734.728,00	104,71	1.466.795.005,00

Penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 278,36% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp1.466.795.005,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru seperti bioskop XXI dan Trans Studio Mini, pemasangan *tapping box* dan pemeriksaan pajak.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2019 adalah sebesar Rp2.263.405.846,00 atau sebesar 102,88% dari target yang telah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp2.200.000.000,00. Penerimaan pajak ini mengalami peningkatan sebesar 41,12% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp1.603.942.781,00.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 9% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sedangkan 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019 adalah sebesar Rp21.840.421.391,00 atau sebesar 101,11% dari target setelah perubahan sebesar Rp21.600.000.000,00. Rincian pajak penerangan jalan dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5. 8 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 dan 2018

Pajak Penerangan Jalan :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerangan Jalan PLN	21.580.000.000,00	21.813.828.431,00	101,08	20.833.906.324,00
Penerangan Jalan Non PLN	20.000.000,00	26.592.960,00	132,96	17.394.605,00
Jumlah	21.600.000.000,00	21.840.421.391,00	101,11	20.851.300.929,00

Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,74% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 sebesar Rp20.851.300.929,00. Kenaikan pajak penerangan jalan ini tidak besar karena tidak ada kenaikan TDL pada tahun 2019. Kenaikan penerimaan disebabkan karena adanya peningkatan volume pemakaian daya listrik.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2019 adalah sebesar Rp1.874.020.896,00 atau sebesar 124,93% dari target setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 113,39% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2018 sebesar Rp878.220.669,00. Kenaikan penerimaan pajak parkir dikarenakan adanya pemeriksaan pajak, pemasangan tapping box, penambahan obyek pajak baru dan meningkatnya omset obyek pajak parkir.

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.436.884.068,00 atau sebesar 239,57% dari target setelah perubahan sebesar Rp600.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah mengalami kenaikan sebesar 320,77% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp341.490.800,00. Kenaikan penerimaan pajak ini dikarenakan tarif pemakaian air tanah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tarif dalam Peraturan Gubernur tersebut sangat signifikan.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 adalah sebesar



Rp14.212.332.279,00 atau sebesar 98,02% dari target setelah perubahan sebesar Rp14.500.000.000,00. Realisasi PBB ini tidak mencapai target, karena :

1. Adanya Kenaikan target PBB tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00, membawa konsekuensi pada kenaikan ketetapan PBB, sehingga banyak masyarakat yang keberatan dan mengajukan keringanan.
2. Beberapa wilayah terkena bencana rob yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar PBB nya.

Walaupun penerimaan PBB pada tahun 2019 tidak mencapai target, Penerimaan PBB P2 tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 9,52% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp12.977.362.631,00.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak BPHTB adalah sebesar Rp19.493.498.933,00 atau sebesar 121,83% dari target setelah perubahan sebesar Rp16.000.000.000,00. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30,70% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp14.914.803.273,00. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB, selain itu juga terdapat 3 transaksi yang nilai pajaknya mencapai Rp2,6 milyar.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.

Ketiga obyek retribusi tersebut dibagi lagi menjadi 19 jenis penerimaan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD Penghasil Pendapatan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp16.667.656.492,00 atau sebesar 92,11% dari target setelah perubahan sebesar Rp18.095.600.000,00. Penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 5,80% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp15.985.706.343,00. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5. 9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018

Retribusi Daerah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Ret. Jasa Umum	12.023.000.000,00	10.591.350.400,00	88,09	9.448.542.521,00
Ret. Jasa Usaha	4.523.600.000,00	4.418.826.092,00	97,68	4.092.521.822,00
Ret. Perijinan Tertentu	1.549.000.000,00	1.657.480.000,00	107,00	2.444.642.000,00
Jumlah	18.095.600.000,00	16.667.656.492,00	92,11	15.985.706.343,00

Rincian lebih lanjut pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2019 adalah sebesar Rp10.591.350.400,00 atau sebesar 88,09% dari target setelah perubahan sebesar Rp12.023.000.000,00. Penerimaan retribusi jasa umum tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,10% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp9.448.542.521,00. Penerimaan retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Realisasi Retribusi Umum Tahun 2019 dan 2018

Retribusi Jasa Umum	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelayanan Kesehatan	215.000.000,00	183.282.000,00	85,25	186.970.500,00
Pelayanan Persampahan /Kebersihan	850.000.000,00	692.966.000,00	81,53	466.674.000,00
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan	20.000.000,00	34.689.000,00	173,45	8.500.000,00
Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	1.600.000.000,00	1.240.036.000,00	77,50	1.255.150.000,00
Pelayanan Pasar	2.620.000.000,00	2.554.491.700,00	97,50	2.310.199.811,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	638.000.000,00	494.418.400,00	77,50	463.220.500,00
Pelayanan TPI	6.000.000.000,00	5.326.851.300,00	88,78	4.704.340.710,00
Tera dan Tera Ulang	80.000.000,00	64.616.000,00	80,77	53.487.000,00
Jumlah	12.023.000.000,00	10.591.350.400,00	88,09	9.448.542.521,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 jenis retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 jenis pelayanan yaitu pemeriksaan kualitas air dan pengawasan produksi makanan dan minuman. Pada tahun 2019 realisasinya tidak tercapai karena alat spektrofotometer untuk pemeriksaan kualitas air masih perlu perbaikan, sehingga tidak dapat mengerjakan pemeriksaan. Adapun untuk pelayanan permohonan produksi makanan/minuman jumlah pengajuan permohonan belum optimal.
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak tercapai karena kurang optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tercapai karena pihak ketiga selaku pengelola kontrak melakukan wanprestasi sehingga kontrak kerja diberhentikan dan berimbas pada penerimaan pendapatan.



4. Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target karena :
 - pedagang eks Pasar Banjarsari tidak dipungut retribusi
 - pedagang Pasar Sugih Waras yang belum direlokasi sebagai dampak pembangunan Pasar Sugihwaras Baru, mengalami penurunan omset dan berdampak pada pembayaran retribusi pasar.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tercapai karena wajib retribusi banyak yang tidak mengajukan pelayanan PKB di Kota Pekalongan.
6. Retribusi Pelayanan TPI, realisasi hanya mencapai 85,53% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena :
 - alur muara dangkal mengakibatkan kapal kesulitan masuk ke pelabuhan,
 - cuaca alam yang cukup ekstrim yang menyebabkan sebagian nelayan tidak berani melaut
 - daya beli bakul yang rendah sehingga hasil lelang menjadi tidak maksimal.
 - perubahan wilayah pengangkapan perikanan dari Laut Jawa ke Natuna sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama ketika harus kembali ke TPI Pekalongan
 - lamanya proses perijinan kapal > 30 GT
 - masih adanya lelang ulang
7. Retribusi Tera dan Tera Ulang tidak mencapai target karena :
 - Diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dimana terdapat beberapa alat yang semula merupakan alat wajib tera berubah menjadi alat kalibrasi, sehingga menurunkan potensi pendapatan.
 - Animo dan partisipasi wajib tera/pedagang di pasar rakyat untuk melakukan uji tera mengalami penurunan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2019 adalah sebesar Rp4.418.826.092,00 atau sebesar 97,68% dari target setelah perubahan sebesar Rp4.523.600.000,00. Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,97% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2018 sebesar Rp4.092.521.822,00. Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5. 11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan 2018

Retribusi Jasa Usaha:	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pemakaian Kekayaan Daerah	360.000.000,00	360.741.400,00	100,21	264.723.200,00
Tempat Penginapan /Villa	50.400.000,00	8.400.000,00	16,67	13.800.000,00
Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	21.635.000,00	21,64	53.315.000,00
Rumah Potong Hewan	90.000.000,00	90.007.500,00	100,01	112.344.000,00
Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.100.000.000,00	647.670.250,00	58,88	602.176.750,00
Pemakaian Kekayaan Daerah :				
- Sewa Rumah Dinas	65.000.000,00	79.972.578,00	123,03	55.283.076,00
- Sewa Ruangan/Bagunan/ Gedung Pertemuan	25.000.000,00	20.700.000,00	82,80	18.000.000,00
- Sewa Alat Berat	243.700.000,00	210.850.000,00	86,52	293.325.000,00
- Sewa Lahan Titik Strategis	250.000.000,00	263.177.800,00	105,27	235.195.000,00
- Sewa Tanah	175.000.000,00	251.995.498,00	144,00	190.239.958,00
- Sewa Garapan Eks Bengkok	967.500.000,00	983.357.200,00	101,64	1.005.200.000,00
- Sewa Alat Laboratorium	120.000.000,00	182.150.000,00	151,79	101.375.000,00
- Sewa Hunian Rusunawa	952.000.000,00	1.247.504.866,00	131,04	1.127.544.838,00
- Sarana Prasarana Reklame	25.000.000,00	38.500.000,00	154,00	20.000.000,00
Pengujian Laboratorium Lingkungan	0,00	12.164.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.523.600.000,00	4.418.826.092,00	97,68	4.092.521.822,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

1. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa tidak tercapai karena kalah bersaing dengan rumah kos/penginapan baru yang fasilitasnya lebih lengkap di sekitar Kelurahan Medono, kurangnya fasilitas daya listrik Pondok Boro yang berimbas pada pelarangan membawa alat-alat elektronik, dan banyaknya pelanggan (*sales*) yang pindah tugas.
2. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tidak tercapai karena pengguna jasa armada sedot kakus menurun baik mobil Pemerintah Kota maupun swasta.
3. Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga tidak tercapai karena :
 - seringnya terjadi rob di dalam dan di luar obyek wisata
 - obyek tempat olah raga mengalami penurunan penyewa
4. Retribusi PKD sewa ruangan/bangunan/gedung pertemuan tidak tercapai karena Gedung Wanita sebagai penghasil utama sepanjang tahun 2019 tidak disewakan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2019 adalah sebesar Rp1.657.480.000,00 atau sebesar 107,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.549.000.000,00. Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 32,20% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2018 sebesar Rp2.444.642.000,00. Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 12 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2019 dan 2018

Retribusi Perijinan Tertentu :	TA. 2019			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	
Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.607.129.600,00	107,14	2.399.435.500,00
Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00	8.612.900,00
Izin Trayek	4.000.000,00	4.454.400,00	111,36	4.097.600,00
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	45.000.000,00	45.896.000,00	101,99	32.496.000,00
Jumlah	1.549.000.000,00	1.657.480.000,00	107,00	2.444.642.000,00

Berdasarkan tabel diatas, retribusi semua retribusi memenuhi target. Pada tahun 2019, retribusi ijin gangguan/keramaian sudah tidak dilakukan pemungutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS, dalam PP tersebut obyek retribusi ijin gangguan tidak termasuk dalam retribusi perijinan tertentu. Disamping itu juga terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ Tahun 2019 tentang Penghapusan Ijin Gangguan.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 adalah sebesar Rp6.101.173.105,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.101.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 19,20% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp5.920.239.113,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 13 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2019 dan 2018

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda				
PD.BPR Bank Pekalongan	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00	479.548.458,00
PT Bank Jateng	4.138.000.000,00	4.138.095.336,00	100,00	3.756.582.869,00
PD.BPR BKK Kota Pekalongan	122.500.000,00	122.505.501,00	100,00	57.138.091,00
PD.BKK Pekalongan Utara	0,00	-	0,00	357.665.042,00
PDAM Kota Pekalongan	1.265.500.000,00	1.265.572.268,00	100,01	1.269.304.653,00
Jumlah	6.101.000.000,00	6.101.173.105,00	100,00	5.920.239.113,00

Berdasarkan tabel diatas, PD BKK Pekalongan Utara belum memberikan kontribusi ke Pemerintah Kota Pekalongan karena berdasarkan hasil audit KAP, BUMD tersebut masih mengalami kerugian. BKK Pekalongan Utara juga telah mengalami *merger* dengan BKK-BKK lain dari Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan nama baru yaitu PT BKK Jateng.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi penerimaan lain-lain



pendapatan asli daerah yang sah tahun 2019 adalah sebesar Rp102.430.131.434,61 atau sebesar 97,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp104.980.500.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 18,07% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp86.757.129.541,00.

Tabel 5. 14 Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018

Lain-lain PAD Yang Sah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	276.000.000,00	279.230.774,00	101,17	2.670.169.647,00
Penerimaan Jasa Giro	1.510.000.000,00	1.895.336.165,00	125,52	1.347.920.838,00
Penerimaan bunga deposito	8.000.000.000,00	8.241.036.971,00	103,01	6.742.255.884,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.000.000,00	7.100.000,00	47,33	14.100.000,00
Pendapatan Denda Keterlambatan	250.000.000,00	200.079.367,00	80,03	256.258.373,00
Pendapatan denda pajak	580.000.000,00	549.415.125,00	94,73	531.318.736,72
Pendapatan denda retribusi	1.500.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Pendapatan dari pengembalian	1.020.000.000,00	1.527.506.719,00	149,76	1.657.421.519,00
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan				293.135.200,00
Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain	715.000.000,00	824.348.471,00	115,29	472.392.301,28
Pendapatan BLUD	92.200.000.000,00	88.193.320.415,61	95,65	72.339.072.859,00
Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir	63.000.000,00	105.369.201,00	167,25	129.796.259,00
Pendapatan bunga dana cadangan	350.000.000,00	607.388.226,00	173,54	302.387.924,00
Jumlah	104.980.500.000,00	102.430.131.434,61	97,57	86.757.129.541,00

Realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Realisasi penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2019 adalah sebesar Rp279.230.774,00 atau sebesar 101,17% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp276.000.000,00. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2019 berupa penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil penebangan pohon.

Realisasi penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 89,54% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.670.169.647,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018, tidak ada penjualan aset tanah dan aset lainnya yang bernilai besar.

b. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2019 adalah sebesar Rp1.895.336.165,00 atau sebesar 125,52% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.510.000.000,00. Penerimaan jasa giro tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 40,61% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp1.347.920.838,00.

c. Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah (*idle cash*) pada bank umum yang sehat. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2019 adalah sebesar Rp8.241.036.971,00 atau sebesar 103,01% dari target yang telah ditetapkan



sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 22,23% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2018 sebesar Rp6.742.255.884,00. Hal ini disebabkan karena manajemen proses penempatan *idle cash* yang lebih baik dengan memilih bank umum yang memberikan kontribusi bunga lebih tinggi.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Realisasi TGR merupakan akumulasi dari TGR kerugian uang daerah dan TGR kerugian barang daerah. Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp7.100.000,00 atau sebesar 47,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi tahun 2019 ini menurun sebesar 49,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp14.100.000,00.

e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa/barang karena melewati batas akhir kontrak. Realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp200.079.367,00, atau 80,03% dari target setelah perubahan yaitu sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 21,92% dibanding dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp256.258.373,00.

f. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi dari penerimaan denda pajak merupakan pendapatan denda yang bersumber dari denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Realisasi penerimaan tahun 2019 adalah sebesar Rp549.415.125,00 atau sebesar 94,73% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00.

Realisasi penerimaan denda pajak PBB merupakan realisasi atas keterlambatan pembayaran pokok pajak PBB, sedangkan realisasi denda pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan realisasi atas denda sebagai tindak lanjut temuan BPK tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp531.318.980,00, maka realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,41%.

g. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan denda atas keterlambatan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melaporkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk dan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk, untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, namun bagi WNA yang terlambat melaporkan keterangan tinggal sementara lebih dari 30 hari dikenakan denda administrasi sebesar Rp300.000,00. Penganggaran pada pos pendapatan ini adalah sebesar Rp1.500,000,00 dan tidak ada realisasi atau Rp0,00 karena semua WNA tidak terlambat dalam pengurusan dokumen kependudukan.



h. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 1.527.506.719,00 atau sebesar 149,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.020.000.000,00. Rincian pendapatan dari pengembalian terdiri dari :

Tabel 5. 15 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian :				
Pajak Penghasilan Pasal 21	475.000.000,00	943.133.287,00	198,55	622.056.363,00
Pengembalian Bendahara	0,00	132.680,00		722.642,00
Iuran PT. Taspen	0,00	0,00	0,00	630.780,00
Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya	545.000.000,00	584.240.752,00	107,20	1.034.011.734,00
Jumlah	1.020.000.000,00	1.527.506.719,00	149,76	1.657.421.519,00

Pendapatan dari pengembalian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi sebesar Rp943.133.287,00, yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 karena adanya kelebihan setor.
2. Pengembalian Bendahara sebesar Rp132.680,00, merupakan pengembalian atas catatan penerimaan karena temuan pemeriksa.
3. Pengembalian Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya sebesar Rp584.240.752,00 merupakan setor kembali belanja SKPD tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan pemeriksa.

i. Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain

Realisasi pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain adalah sebesar Rp824.348.471,00 atau sebesar 115,29% dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp715.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 16 Realisasi Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kompensasi tukar guling	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Sumbangan Pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	15.821.895,00
Penerimaan sewa handtractor	1.500.000,00	8.160.000,00	544,00	1.500.000,00
Penerimaan Kebon Bibit	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	7.486.500,00
Penerimaan RSPD	200.000.000,00	185.542.678,00	92,77	199.417.745,00
Penerimaan TV Batik	250.000.000,00	134.208.935,00	53,68	131.648.236,00
Penerimaan Sapi Gaduhan dan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	2.824.859,00
Penerimaan Aset Kemitraan	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	86.093.100,00
Penerimaan lainnya	1.000.000,00	233.936.858,00	23.393,69	2.599.966,28
Jumlah	715.000.000,00	824.348.471,00	115,29	472.392.301,28



j. Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2019 adalah sebesar Rp88.193.320.415,61 atau sebesar 95,65% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp92.200.000.000,00. Penerimaan dari BLUD mengalami peningkatan sebesar 21,92% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp72.339.072.859,00.

Rincian penerimaan BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 17 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2019 dan 2018

Pendapatan BLUD :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BLUD RSUD Bendan	75.000.000.000,00	70.469.240.049,61	93,96	56.849.801.951,00
BLUD Puskesmas	16.300.000.000,00	16.904.880.594,00	103,71	14.790.257.794,00
BLUD BKPM	700.000.000,00	627.230.377,00	89,60	597.850.949,00
BLUD PSPJ	200.000.000,00	191.969.395,00	95,98	101.162.165,00
Jumlah	92.200.000.000,00	88.193.320.415,61	95,65	72.339.072.859,00

Pendapatan BLUD yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum diaudit, karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini audit Laporan Keuangan BLUD oleh Kantor Akuntan Publik belum selesai.

Penerimaan RSUD Bendan tidak memenuhi target karena :

1. Jumlah ratio kebutuhan tempat tidur rumah sakit di Kota Pekalongan berbanding dengan jumlah penduduk yang terlalu timpang. Idealnya 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 310 ribu, Kota Pekalongan mempunyai rumah sakit yang banyak sehingga dapat dikatakan *over supply*.
2. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengeanaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan. Sesuai peraturan tersebut, pasien non PBI hanya boleh naik satu tingkat diatas kelas haknya sehingga pasien mengurungkan niatnya naik kelas dan berimbas pada penurunan pendapatan.

Penerimaan BLUD BKPM tidak tercapai karena :

1. Peninggian ruangan di hampir seluruh ruang pelayanan mengakibatkan pelayanan menjadi kurang optimal
2. Rencana penutupan BKPM mengakibatkan dialihkannya rujukan penyakit paru ke fasilitas kesehatan lain untuk 3 bulan terakhir

Penerimaan PSPJ tidak tercapai target karena :

1. Belum tersedianya semua fasilitas sehingga menyebabkan sebagian fungsi belum berjalan secara optimal.

k. Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir

Realisasi penerimaan bunga pinjaman dana bergulir tahun 2019 adalah sebesar Rp105.369.201,00 atau sebesar 167,25% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp63.000.000,00. Rincian penerimaan bunga pinjaman dana bergulir:



Tabel 5. 18 Realisasi Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana bergulir Koperasi	13.000.000,00	7.982.343,00	61,40	17.459.802,00
Dana Bergulir UMKM Trading House	0,00	0,00	0,00	201.868,00
Dana Bergulir KKP Perikanan	50.000.000,00	97.386.858,00	194,77	112.134.589,00
Jumlah	63.000.000,00	105.369.201,00	167,25	129.796.259,00

I. Pendapatan Bunga Dana Cadangan

Realisasi penerimaan bunga dana cadangan sebesar Rp607.388.226,00 atau 173,54% dari target perubahan yaitu sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi ini merupakan bunga dana cadangan. Adapun besaran dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.000.000.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp 715.761.199.193,00 atau sebesar 98,36% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp727.065.158.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 3,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 694.903.563.048,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 19 Realisasi Pendapatan transfer Tahun 2019 dan 2018

Pendapatan Transfer :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	620.540.406.000,00	610.332.820.948,00	98,36	586.379.794.858,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	33.260.942.000,00	33.260.942.000,00	100,00	33.250.000.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	73.263.810.000,00	72.167.436.245,00	98,50	75.273.768.190,00
Jumlah	727.065.158.000,00	715.761.199.193,00	98,45	694.903.563.048,00

Berdasarkan rincian pendapatan daerah tersebut diatas, terlihat bahwa pendapatan transfer tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK. Penerimaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Sedangkan tata cara transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Kas Daerah dan Dana Desa. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	23.683.177.000,00	17.751.480.700,00	74,95	25.352.861.062,00
Dana Bagi Hasil SDA	2.561.157.000,00	1.275.750.200,00	49,81	1.340.170.369,00
Dana Alokasi Umum	471.330.216.000,00	475.842.089.000,00	100,96	449.055.738.000,00
Dana Alokasi Khusus	122.965.856.000,00	115.463.501.048,00	93,90	110.631.025.427,00
Jumlah	620.540.406.000,00	610.332.820.948,00	98,36	586.379.794.858,00

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2019 adalah sebesar Rp610.332.820.948,00. Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp17.751.480.700,00 atau sebesar 74,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp23.683.177.000,00. Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak mengalami penurunan sebesar 29,98% jika dibandingkan dengan penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp25.352.861.062,00. Penerimaan dana bagi hasil pajak dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 21 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan 2018

Bagi Hasil Pajak - Pusat	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari PBB	4.795.280.000,00	3.725.854.500,00	77,70	4.900.003.808,00
Bagi Hasil dari PPh	12.155.677.000,00	7.293.406.200,00	60,00	13.489.977.254,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.732.220.000,00	6.732.220.000,00	100,00	6.962.880.000,00
Jumlah	23.683.177.000,00	17.751.480.700,00	74,95	25.352.861.062,00

Rincian penerimaan bagi hasil pajak – pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.795.280.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun 2019 adalah sebesar Rp3.725.854.500,00 atau 77,70%. Realisasi ini tidak tercapai karena ada potongan lebih bayar tahun sebelumnya sebesar Rp1.269.912.261,00.

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan sebesar 23,96% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp4.900.003.808,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB adalah sebagai berikut :



- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

b. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Penerimaan bagi hasil dari PPh Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp12.155.677.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 adalah sebesar Rp7.293.406.200,00 atau sebesar 60,00%. Realisasi ini tidak tercapai karena penerimaan PPh pasal 25, 29 dan 21 tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi bagi hasil.

Realisasi penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 45,93% jika dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp13.489.977.254,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PPh adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

c. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Penganggaran penerimaan bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang rincian bagi hasil cukai hasil tembakau. Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.732.220.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2019 adalah sebesar Rp6.732.220.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan bagi hasil dari cukai hasil tembakau tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,31% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp6.962.880.000,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.275.750.200,00 atau sebesar 49,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.561.157.000,00. Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA mengalami penurunan sebesar 4,81% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.340.170.389,00. Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 22 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2019 dan 2018

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sumber Day a Hutan	234.494.000,00	140.696.400,00	60,00	282.138.205,00
Pengutan Pengusahaan Perikanan	983.593.000,00	295.077.900,00	30,00	701.234.591,00
Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan	295.000.000,00	295.077.900,00	100,03	
Pertambangan Minyak Bumi	69.000.000,00	95.052.100,00	137,76	36.346.929,00
Pertambangan Gas Bumi	936.340.000,00	419.934.900,00	44,85	291.237.025,00
Pertambangan Panas Bumi	42.534.000,00	29.773.800,00	70,00	26.570.761,00
Pertambangan Mineral & Batubara	196.000,00	137.200,00	70,00	2.642.858,00
Jumlah	2.561.157.000,00	1.275.750.200,00	49,81	1.340.170.369,00

Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :

a. Bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan

Penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp234.494.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2019 adalah sebesar Rp140.696.400,00 atau sebesar 60,00%. Realisasi ini tidak mencapai target karena ada pemotongan lebih salur tahun sebelumnya sebesar Rp147.154.524,00.

Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 50,13% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp282.138.205,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

b. Pungutan Pengusahaan Perikanan

Penerimaan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan sebesar Rp983.593.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan tahun 2019 adalah sebesar Rp590.155.800,00 atau sebesar 60,00%. Realisasi ini tidak mencapai target karena ada pemotongan transfer sebagai kompensasi lebih bayar tahun sebelumnya sebesar Rp99.184.671,00.

Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.



c. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan

Penerimaan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dianggarkan sebesar Rp295.000.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan adalah sebesar Rp Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%

Ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

d. Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp69.000.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi adalah sebesar Rp95.052.100,00 atau sebesar 137,36%. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 161,51% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp36.346.929,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah:

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

e. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar Rp936.340.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pertambangan gas bumi tahun 2019 adalah sebesar Rp419.934.900,00 atau sebesar 44,85%. Realisasi tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 44,19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp291.237.025,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

f. Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan panas bumi sebesar Rp42.534.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi tahun 2019 adalah sebesar Rp29.773.800,00 atau sebesar 70,00%. Realisasi tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 12,05% jika dibandingkan



dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp26.570.761,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

g. Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara

Penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp196.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara tahun 2019 adalah sebesar Rp137.200,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 dianggarkan berdasarkan beberapa peraturan yaitu :

- a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana alokasi umum sebesar Rp471.330.216.000,00, yang terdiri dari DAU reguler sebesar Rp461.800.809.000,00, DAU tambahan dana kelurahan sebesar Rp9.529.407.000,00
- b. berdasarkan PMK Nomor 166/PMK.07/2019 memberikan DAU tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk sebesar Rp4.494.640.000,00 selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 35/KM.7/2019 tentang Selisih Kurang Dan/Atau Selisih Lebih Atas Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, Pemerintah memberikan DAU tambahan DAU sebesar Rp17.233.000,00 untuk menutup kekurangan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi 47.312 tanggungan. Dengan terbitnya KMK tersebut maka pembayaran selisih perubahan iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah sesuai dengan perhitungan bersama dengan BPJS Kesehatan. PMK dan KMK tersebut terbit setelah APBD P tahun 2019 ditetapkan, sehingga penganggaran penambahan DAU diwadahi dalam Peraturan Walikota Nomor 86A tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019.



Realisasi DAU tahun 2019 sebesar Rp475.842.089.000,00 atau 100,96% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD P.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp122.965.856.000,00, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp49.858.608.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp73.107.248.000,00.

Realisasi penerimaan DAK tahun 2019 adalah sebesar Rp115.463.501.048,00 atau sebesar 93,90%, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp49.033.606.513,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp66.429.894.535,00. Penjelasan lebih lanjut tentang DAK adalah sebagai berikut :

a. DAK Fisik

Rincian DAK Fisik dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 23 Realisasi DAK Fisik Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Fisik :				
DAK bidang perumahan	3.262.144.000,00	3.220.394.000,00	98,72	2.375.699.000,00
DAK bidang pertanian	1.516.678.000,00	1.513.879.312,00	99,82	529.911.000,00
DAK bidang pariwisata	1.509.746.000,00	1.375.285.000,00	91,09	0,00
DAK bidang infrastruktur air minum	2.250.000.000,00	2.178.261.000,00	96,81	2.183.149.000,00
DAK bidang infrastruktur sanitasi	1.800.000.000,00	1.369.400.000,00	76,08	2.381.000.000,00
DAK bidang pasar	1.477.385.000,00	1.473.436.791,00	99,73	1.157.060.000,00
DAK bidang pendidikan SD/SLB	6.014.644.000,00	5.924.221.700,00	98,50	5.598.926.700,00
DAK bidang pendidikan SMP	1.249.600.000,00	1.224.608.000,00	98,00	2.215.810.000,00
DAK bidang pendidikan SKB	294.078.000,00	239.966.300,00	81,60	0,00
DAK bidang kesehatan	16.812.799.000,00	16.987.036.010,00	101,04	13.312.991.585,00
DAK bidang jalan konektivitas	12.823.069.000,00	12.694.618.400,00	99,00	12.013.971.000,00
DAK bidang Lingkungan Hidup	848.465.000,00	832.500.000,00	98,12	12.013.971.000,00
Jumlah	49.858.608.000,00	49.033.606.513,00	98,35	53.782.489.285,00

Realisasi penerimaan DAK Fisik didasarkan atas besaran realisasi belanja yang dibiayai dari dana DAK. Realisasi DAK Fisik Tahun 2019 adalah sebesar 98,35% dari target yang ditetapkan.

b. DAK Non Fisik

Rincian realiasi penerimaan DAK Non Fisik adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 24 Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
DAK Non Fisik :				
Tunjangan Profesi Guru	51.228.423.000,00	47.276.119.900,00	92,28	50.787.953.600,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	167.450.000,00	0,00	0,00	109.800.000,00
BOK dan BOKB	9.352.331.000,00	9.670.248.907,00	103,40	7.995.215.729,00
BOP PAUD	6.892.200.000,00	6.445.567.573,00	93,52	7.180.595.000,00
Peningkatan kapasitas koperasi, UKM dan ketenagakerjaan	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	0,00
Pelayanan Adm Kependudukan	988.244.000,00	872.658.155,00	88,30	764.311.813,00
Akreditasi Puskesmas	713.000.000,00	0,00	0,00	696.000.000,00
Jaminan Persalinan	415.000.000,00	0,00	0,00	1.328.631.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	2.370.600.000,00	1.185.300.000,00	50,00	0,00
BOP Penyelenggaraan museum	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	73.107.248.000,00	66.429.894.535,00	90,87	68.862.507.142,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian – Dana Insentif Daerah (DID)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2019. DID merupakan insentif bagi daerah yang dianggap berprestasi atas katagori tertentu. Katagori tersebut meliputi katagori utama dan katagori kinerja. Salah satu point yang masuk dalam katagori utama adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DID sebesar Rp33.260.942.000,00 dan terealisasi dalam jumlah yang sama atau 100%. Realisasi DID tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp33.250.000.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Penerimaan ini merupakan penerimaan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Penganggaran transfer Pemerintah Provinsi selain menyesuaikan keputusan gubernur, juga memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta alokasi kurang bayar.

Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 adalah sebesar



Rp72.167.436.245,00 atau sebesar 98,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp73.263.810.000,00. Rincian penerimaan bagi hasil pajak Provinsi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 25 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dan 2018

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil PKB	19.708.015.000,00	21.423.169.984,00	108,70	21.731.714.363,00
Bagi Hasil BBNKB	10.576.157.000,00	10.626.802.998,00	100,48	12.262.207.623,00
Bagi Hasil PBBKB	20.167.786.000,00	18.684.042.078,00	92,64	18.258.178.027,00
Bagi Hasil PAP	2.898.000,00	3.360.123,00	115,95	3.507.410,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	22.808.954.000,00	21.430.061.062,00	93,95	23.018.160.767,00
Jumlah	73.263.810.000,00	72.167.436.245,00	98,50	75.273.768.190,00

Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 4,13% jika dibandingkan realisasi penerimaan bagi hasil pajak Provinsi tahun 2018 sebesar Rp75.273.768.190,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2019 sebesar Rp43.085.829.634,00 atau sebesar 120,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp35.899.321.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 14,28% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp31.103.600.822,00.

Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 26 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019 (Rp)			TA 2018 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	23.324.321.000,00	23.949.677.589,00	102,68	23.778.759.822,00
Pendapatan lainnya	12.575.000.000,00	19.136.152.045,00	152,18	7.324.841.000,00
Jumlah	35.899.321.000,00	43.085.829.634,00	120,02	31.103.600.822,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2019 merupakan penerimaan hibah dari pemerintah pusat dan penerimaan hibah dana BOS dari Pemerintah Provinsi. Rincian penerimaan hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 27 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019 (Rp)			TA 2018 (Rp)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hibah dari Pemerintah	2.250.000.000,00	1.692.000.000,00	75,20	2.250.000.000,00
Hibah dana BOS	21.074.321.000,00	22.257.677.589,00	105,62	21.528.759.822,00
Jumlah	23.324.321.000,00	23.949.677.589,00	102,68	23.778.759.822,00



- a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat merupakan hibah untuk penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM. Penghitungan pencairan hibah ini menyesuaikan hasil verifikasi target sambungan rumah (SR) yang berhasil dicapai oleh PDAM. Dari target 1000 SR hanya tercapai 750SR Pada tahun 2019, sehingga klaim SR yang disetujui oleh pemerintah pusat adalah sebesar Rp1.692.000.000 atau 75,20% dari target yaitu sebesar Rp2.250.000.000,00.
- b. Pendapatan hibah dana BOS merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada 88 sekolah negeri yang terdiri dari 61 SD dan 17 SMP. Alokasi BOS pada tahun 2019 berbeda dengan alokasi BOS tahun-tahun sebelumnya. BOS tahun sebelumnya hanya ada BOS regular, sedangkan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh alokasi BOS regular dan BOS kinerja. Pagu alokasi BOS regular didasarkan pada data dapodik jumlah siswa dikalikan alokasi BOS per siswa. Adapun besaran alokasi BOS persiswa adalah sebesar Rp800.000/siswa untuk SD dan Rp1.000.000/siswa untuk SMP. Sedangkan alokasi BOS kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS kinerja diberikan kepada sekolah dengan kriteria berprestasi. Permendikbud 31 Tahun 2019 terbit setelah APBD Perubahan Tahun 2019 ditetapkan, sehingga penganggarannya diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 86A Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2019. Mekanisme pencairan dana BOS regular berasal dari RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening BOS masing-masing sekolah. Pencairan dana BOS dilaksanakan per triwulan atau 4 kali dalam satu tahun. Realisasi penermaan BOS tahun 2019 adalah sebesar Rp22.257.677.589,00 atau 105,62% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp21.074.321.000,00. Realisasi ini merupakan akumulasi dari transfer murni BOS dari pemerintah Provinsi (BOS regular dan BOS Kinerja), pengembalian administrasi bank dan pajak bunga tahun sebelumnya serta setor kembali akibat temuan pemeriksaan.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan TMMD, Sarpras Daerah, Bantuan Pendidikan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi berdasarkan DPA dan DPPA Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Provinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 28 Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2019 dan 2018

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
FEDEP	-	-	-	100.000.000,00
TMMD	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	501.600.000,00
Sistem Informasi Profil Daerah	-	-	-	50.000.000,00
Bantuan Sarpras Daerah	11.000.000.000,00	15.841.152.045,00	144,01	6.498.241.000,00
Bantuan Pendidikan	365.000.000,00	2.085.000.000,00	571,23	35.000.000,00
Pendidikan Untuk Semua (PUS)	-	-	-	50.000.000,00
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium	-	-	-	40.000.000,00
TKPKD	-	-	-	50.000.000,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	535.000.000,00	535.000.000,00	100,00	-
Jumlah	12.575.000.000,00	19.136.152.045,00	152,18	7.324.841.000,00

Sesuai dengan Perda APBD-P, Penerimaan bantuan provinsi pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp12.575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.136.152.045,00 atau 152,18%. Realisasi tahun 2019 melampaui target karena ada penambahan alokasi bantuan keuangan provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yaitu bantuan keuangan sarana dan prasarana daerah dan bantuan pendidikan.

Terbitnya peraturan gubernur tersebut terjadi setelah APBD-P Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan sehingga diwadahi dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86A Tahun 2019.

b. Belanja

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

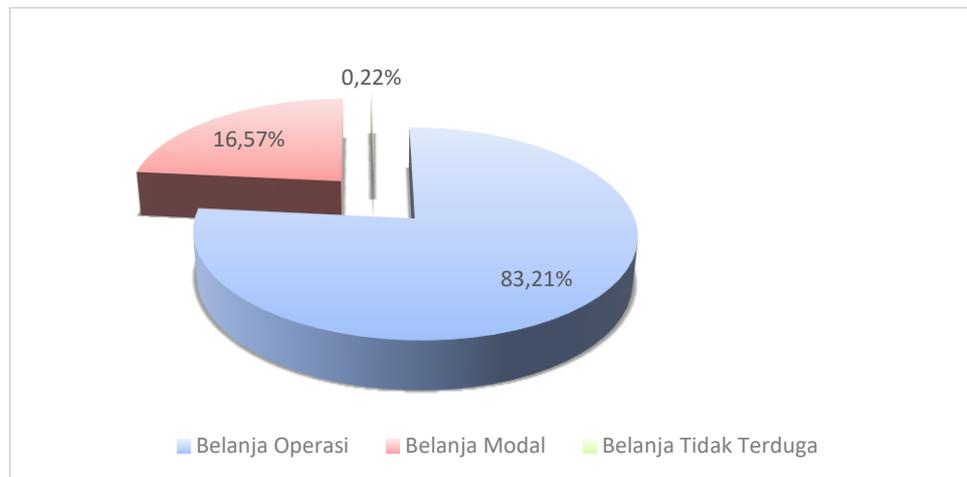
1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi belanja daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp954.397.012.827,00 atau sebesar 90,89% dari anggaran perubahan sebesar Rp1.050.112.414.000,00. Realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp883.184.894.707,00. Rincian belanja dan transfer dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 29 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2019 dan 2018

Belanja dan Transfer :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	845.315.489.000,00	771.512.589.320,00	91,27	734.880.485.431,00
Belanja Modal	202.046.925.000,00	182.153.984.579,00	90,15	146.382.593.476,00
Belanja Tidak Terduga	2.750.000.000,00	730.438.928,00	26,56	1.921.815.800,00
Transfer Daerah	-	-	-	-
Jumlah	1.050.112.414.000,00	954.397.012.827,00	90,89	883.184.894.707,00

Proporsi masing-masing belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5. 2 Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer

Berdasarkan gambar diatas, bahwa proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 80,84%, belanja modal sebesar 19,08% dan belanja tidak terduga sebesar 0,08%. Proporsi belanja operasi menurun jika dibandingkan belanja operasi tahun 2018 yaitu sebesar 83,21%, sedangkan proporsi belanja modal meningkat jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2018 sebesar 16,57%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian belanja operasional dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Operasional Tahun 2019 dan 2018

Belanja Operasi :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	429.514.183.000,00	390.898.339.975,00	91,01	352.531.365.055,00
Belanja Barang	368.868.065.000,00	338.655.157.845,00	91,81	317.053.705.432,00
Belanja Bunga	0,00	6.803.500,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	33.307.241.000,00	29.310.400.000,00	88,00	52.630.714.944,00
Bantuan Sosial	12.904.000.000,00	11.920.375.000,00	92,38	11.865.819.000,00
Bantuan Keuangan	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	798.881.000,00
Jumlah	845.315.489.000,00	771.512.589.320,00	91,27	734.880.485.431,00

Realisasi belanja operasi tahun 2019 adalah sebesar Rp771.512.589.320,00 atau sebesar 91,27% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp845.315.489.000,00. Realisasi belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 4,98% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2018 sebesar Rp734.880.135.431,00. Realisasi belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai (BP) meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur, dan Belanja Pegawai Dana BLUD. Realisasi belanja pegawai tahun 2019 adalah sebesar Rp390.898.339.975,00 atau sebesar 91,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp429.514.183.000,00. Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 10,88% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp352.531.365.055,00. Peningkatan belanja pegawai disebabkan karena adanya peningkatan gaji PNS dan peningkatan belanja pegawai BLUD. Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 31 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

Belanja Pegawai :	TAHUN 2019			TAHUN 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Gaji dan Tunjangan	294.271.899.000,00	264.884.354.193,00	90,01	255.914.884.188,00
Tambahan Penghasilan PNS	49.471.115.000,00	45.501.492.539,00	91,98	42.873.869.090,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.800.000.000,00	4.519.500.000,00	94,16	4.056.000.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.835.500.000,00	3.782.712.700,00	98,62	2.923.000.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	866.235.000,00	596.245.370,00	68,83	703.551.240,00
Honorarium PNS	18.200.121.000,00	16.741.336.500,00	91,98	15.763.687.492,00
Honorarium Non PNS	6.677.585.000,00	6.464.991.400,00	96,82	6.331.334.900,00
Uang Lembur	297.938.000,00	228.630.764,00	76,74	214.351.712,00
Honorarium pengelolaan dana BOS	626.100.000,00	614.455.000,00	98,14	1.005.437.000,00
Belanja Pegawai Dana BLUD	50.467.690.000,00	47.564.621.509,00	94,25	22.745.249.433,00
Jumlah	429.514.183.000,00	390.898.339.975,00	91,01	352.531.365.055,00



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2019 adalah sebesar Rp264.884.354.193,00 atau sebesar 90,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp294.271.899.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,50% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp255.914.884.188,00. Jumlah PNS Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah 3.142 orang. Peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan dikarenakan naiknya gaji PNS pada tahun 2019 dan adanya penambahan jumlah pegawai karena pengangkatan CPNS baru.

b. Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2019 merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019.

Realisasi belanja pos ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp45.501.492.539,00 atau sebesar 91,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp49.471.115.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 6,13% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp42.873.869.090,00.

c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari dua belanja yaitu belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja biaya penunjang operasional KDH/WKDH. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2019. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15A Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Realisasi belanja ini pada tahun 2019 sebesar Rp4.519.500.000,00 atau sebesar 94,16% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.800.000.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 11,43% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4.056.000.000,00.



d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan. Realisasi belanja ini pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.782.712.700,00 atau sebesar 98,62% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.835.500.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 29,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.923.000.000,00, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya target penerimaan pajak daerah.

e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp.596.245.370,00 atau sebesar 68,83% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp866.235.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 15,24% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp703.551.240,00. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pos retribusi yang tidak mencapai target sehingga tidak memperoleh insentif.

f. Honorarium PNS

Belanja honorarium PNS dibayarkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019. Realisasi belanja honorarium PNS sebesar Rp16.741.336.500,00 atau sebesar 91,98% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp18.200.121.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 6,20% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp15.763.687.492,00. Rincian belanja honorarium PNS dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Realisasi Belanja Honorarium PNS Tahun 2019 dan 2018

Honorarium PNS	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Panitia Pelaksana Kegiatan	12.571.778.000,00	11.716.433.250,00	93,20	11.002.940.000,00
Tim Pengadaan Barang Jasa	234.755.000,00	191.347.500,00	81,51	249.645.000,00
Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	266.425.000,00	148.791.250,00	55,85	219.540.000,00
Penatausahaan Keuangan	5.006.563.000,00	4.570.314.500,00	91,29	4.109.812.492,00
Tim Monitoring	9.000.000,00	8.250.000,00	91,67	24.000.000,00
Tim Penyusunan Materi	111.600.000,00	106.200.000,00	95,16	129.450.000,00
Tim Perencanaan Pengadaan	-	-	-	28.300.000,00
Jumlah	18.200.121.000,00	16.741.336.500,00	91,98	15.763.687.492,00



g. Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Jumlah pegawai non PNS yang ber SK Walikota per 31 Desember 2019 adalah sebesar 318 Orang. Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2019 adalah Rp6.464.991.400,00 atau sebesar 96,82% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.677.585.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp6.331.334.900,00 karena adanya peningkatan penerimaan honor menyesuaikan UMK Kota Pekalongan.

h. Uang Lembur

Realisasi belanja uang lembur tahun 2019 adalah sebesar Rp228.630.764,00 atau sebesar 76,74% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp297.938.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 6,66% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp214.351.712,00.

i. Belanja Honorarium Pengelolaan Dana BOS

Belanja honorarium pengelolaan dana BOS didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD. Realisasi belanja honorarium pengelolaan dana BOS pada tahun 2019 adalah sebesar Rp614.455.000,00 atau 98,14% dari anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp626.100.000,00. Realisasi tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 38,89% dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.005.437.000,00. Penganggaran dan realisasi belanja BOS merupakan akumulasi belanja BOS dari 61 SD negeri dan 17 SMP negeri se Kota Pekalongan.

j. Belanja Pegawai Dana BLUD

Belanja pegawai dana BLUD tahun 2019 terealisasi sebesar Rp47.564.621.509,00 atau 94,25% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp50.467.690.000,00. Realisasi belanja pegawai dana BLUD merupakan akumulasi dari belanja 4 BLUD yaitu RSUD Bendan, Puskesmas, BKPM dan PSPJ. Rincian belanja pegawai dana BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 33 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2019

Belanja pegawai BLUD	Belanja Pegawai
BLUD RSUD	33.888.954.308,00
BLUD Puskesmas	13.271.860.956,00
BLUD BKPM	299.660.480,00
BLUD PSPJ	104.145.765,00
Jumlah	47.564.621.509,00

Belanja BLUD yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum diaudit, karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini audit Laporan Keuangan BLUD oleh Kantor Akuntan Publik belum selesai.



5.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan pakai habis kantor, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, beasiswa Pendidikan PNS, dan kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, pemeliharaan, barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan barang dan jasa dana BLUD. Realisasi belanja barang 2019 adalah sebesar Rp338.655.157.845,00 atau sebesar 91,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp368.868.065.000,00. Realisasi ini meningkat sebesar 6,81% dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp317.053.705.432,00. Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Realisasi Belanja barang Tahun 2019 dan 2018

Belanja Barang	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bahan Pakai Habis Kantor	7.608.167.000,00	7.155.917.715,00	94,06	5.786.260.642,00
Bahan/Material	14.541.407.000,00	13.567.757.013,00	93,30	10.810.485.617,00
Jasa Kantor	136.497.099.000,00	126.538.392.876,00	92,70	116.571.418.940,00
Premi Asuransi	15.411.071.000,00	18.577.161.318,00	120,54	11.916.033.013,00
Perawatan Kend. Bermotor	8.160.937.000,00	7.120.581.390,00	87,25	5.888.068.044,00
Cetak & Penggandaan	6.619.106.000,00	6.045.509.622,00	91,33	5.801.630.180,00
Sewa Rumdim/Gedung	2.241.542.000,00	2.105.439.747,00	93,93	2.389.260.024,00
Sewa Sarana Mobilitas	993.144.000,00	853.687.000,00	85,96	846.350.500,00
Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.653.108.000,00	2.521.742.500,00	95,05	2.225.024.000,00
Makanan dan Minuman	23.465.171.000,00	21.659.204.490,00	92,30	19.910.160.516,00
Pakaian Dinas dan Atribut	1.056.400.000,00	979.669.650,00	92,74	130.950.700,00
Pakaian Kerja	1.890.425.000,00	1.859.932.900,00	98,39	661.901.000,00
Pakaian Khusus	630.785.000,00	612.823.000,00	97,15	436.779.000,00
Perjalanan Dinas	31.747.194.000,00	28.730.773.848,00	90,50	28.750.654.398,00
Beasiswa Pendidikan PNS	104.570.000,00	103.820.000,00	99,28	311.532.000,00
Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	964.005.000,00	936.858.350,00	97,18	2.311.450.000,00
Pemeliharaan	22.940.550.000,00	21.078.853.944,00	91,88	19.117.097.652,00
Jasa Konsultasi	7.212.356.000,00	5.189.185.700,00	71,95	4.703.049.000,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.402.063.000,00	9.434.308.386,00	90,70	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.932.543.000,00	1.701.364.100,00	88,04	0,00
Uang Yg akan diserahkan ke Masyarakat	1.575.800.000,00	1.487.250.000,00	94,38	52.630.714.944,00
Beasiswa Pendidikan Non PNS	143.000.000,00	143.000.000,00	100,00	200.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.167.200.000,00	2.922.701.510,00	92,28	5.221.650.133,00
Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli	7.671.915.000,00	6.330.528.799,00	82,52	6.995.845.000,00
Belanja inventaris non kapitalisasi	130.958.000,00	128.101.424,00	97,82	
Barang dan Jasa BLUD	42.423.463.000,00	35.265.005.163,00	83,13	47.920.819.377,00
Barang dan Jasa Dana BOS	16.684.086.000,00	15.605.587.400,00	93,54	15.965.735.96,00
Jumlah	368.868.065.000,00	338.655.157.845,00	91,81	351.537.134.680,00



Belanja barang dan jasa BLUD dan BOS masih dilaporkan secara total mengikuti penganggarannya. Apabila diperinci, hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan akumulasi belanja barang dan jasa dari 4 BLUD yaitu RSUD Bendan, Pusat Sainifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ), Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM). Rincian belanja barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 35 Realisasi Belanja barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2019

Belanja Barang dan Jasa BLUD	TA. 2019
	Realisasi
Bahan Pakai Habis Kantor	8.882.951.582,00
Bahan/Material	15.503.608.167,00
Jasa Kantor	4.330.842.552,00
Premi Asuransi	1.384.894.766,00
Perawatan Kend. Bermotor	153.551.812,00
Cetak & Penggandaan	958.312.656,00
Sewa Rumdin/Gedung	62.652.000,00
Sewa Sarana Mobilitas	18.380.000,00
Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.046.000,00
Makanan dan Minuman	648.277.820,00
Pakaian Dinas dan atributnya	9.188.500,00
Pakaian khusus hari hari tertentu	28.198.400,00
Perjalanan dinas	274.982.304,00
Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan	208.481.765,00
Pemeliharaan	1.688.131.538,00
Jasa konsultasi	636.184.000,00
Jasa pelayanan kesehatan	227.220.931,00
Jasa narasumber/tenaga ahli	183.427.550,00
belanja inventaris non kapitalisasi	62.672.820,00
Jumlah	35.265.005.163,00
Keterangan :	
BLUD	Nominal
RSUD Bendan	31.776.083.503,00
PSPJ	88.853.500,00
Puskesmas	3.057.557.157,00
BKPM	342.511.003,00
Total	35.265.005.163,00

Belanja BLUD yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum diaudit, karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini audit Laporan Keuangan BLUD oleh Kantor Akuntan Publik belum selesai.

b. Belanja Barang dan Jasa BOS

merupakan akumulasi belanja barang dan jasa pada 88 sekolah negeri yang berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu 71 SD dan 17 SMP. Rincian belanja barang dan jasa BOS adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 36 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2019

Belanja Barang dan Jasa BOS	Realisasi
Bahan Pakai Habis Kantor	2.005.840.585,00
Bahan/Material	1.513.318.164,00
Jasa Kantor	5.599.699.402,00
Belanja perawatan kendaraan bermotor	13.604.750,00
Cetak & Penggandaan	2.201.484.410,00
Sewa Rumdin/Gedung	4.725.000,00
Sewa Sarana Mobilitas	99.919.900,00
Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	101.053.800,00
Makanan dan Minuman	3.323.486.134,00
Pakaian khusus hari-hari tertentu	16.500.500,00
Belanja Perjalanan dinas	970.000,00
Pemeliharaan	403.301.095,00
Uang yang akan diserahkan ke masyarakat	2.225.000,00
Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli	319.458.660,00
Jumlah	15.605.587.400,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Realisasi belanja bunga tahun 2019 adalah sebesar Rp6.803.500,00 atas pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Bendan sebesar Rp1.800.000.000,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang yang ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus, dan memenuhi persyaratan penerima hibah serta harus digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Realisasi belanja hibah tahun 2019 adalah sebesar Rp29.310.400.000,00 atau 88,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.307.241.000,00. Realisasi belanja hibah mengalami penurunan sebesar 44,31% jika dibandingkan dengan



realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp52.630.714.944,00. Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 37 Realisasi Belanja Barang Hibah Tahun 2019 dan 2018

BELANJA HIBAH		2019			2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hibah kepada Pemerintah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0,00
2	Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	32.207.241.000,00	28.210.400.000,00	87,59	22.446.204.000,00
3	Hibah Barang atau Jasa Yang diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	28.806.648.558,00
4	Bantuan sosial barang	0,00	0,00	0,00	1.377.862.386,00
JUMLAH HIBAH		33.307.241.000,00	29.310.400.000,00	88,00	52.630.714.944,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 meliputi belanja bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.920.375.000,00 atau 92,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.904.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami peningkatan sebesar 0,46% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 11.865.819.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Realisasi Belanja Barang Bantuan Sosial Tahun 2019

No	Uraian Bantuan Sosial / Lembaga Penerima	Anggaran Sth Perubahan	Realisasi 2019		Jumlah Penerima (orang)
		(Rp.)	(Rp)	%	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12.904.000.000	11.920.375.000	92,38	
I	Bansos kepada Individu dan/atau Keluarga	6.464.000.000	5.746.375.000	88,9	2.567
1	Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Pendidikan	175.000.000	51.875.000	29,64	27
2	Bantuan Sosial Uang Duka bagi Anggota Linmas	50.000.000	13.500.000	27	5
3	Bantuan Sosial untuk Biaya Pembongkaran Bangunan dan Pindah bagi Penghuni Lahan Milik Pemerintah	275.000.000	7.500.000	2,73	3
5	Bantuan Sosial untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan	18.000.000	18.000.000	100	12
6	Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Kemiskinan	150.000.000	79.000.000	52,67	19
7	Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Warga Tidak Mampu	1.700.000.000	1.664.000.000	97,88	1.664
8	Bantuan Sosial Beasiswa Keluarga Tidak Mampu (BKTM) SMA/SMK/MA	596.000.000	594.000.000	99,66	594
9	Bantuan Sosial RTLH (DAK)	3.150.000.000	3.062.500.000	100,00	175
II	Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan	6.440.000.000	6.174.000.000	95,87	

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada partai pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2019 adalah sebesar Rp721.513.000,00 atau 99,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp722.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan kepada parpol ini mengalami penurunan sebesar 9,68% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp798.881.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 39 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018

Belanja Bantuan Keuangan :	TH 2019			TH. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realiasi
Belanja Bantuan kepada Provinsi				100.000.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR	196.367.000,00	196.367.000,00	100,00	191.749.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	71.761.000,00	71.761.000,00	100,00	78.156.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT	18.734.000,00	18.734.000,00	100,00	32.116.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	110.779.000,00	110.779.000,00	100,00	106.347.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA	48.295.000,00	48.295.000,00	100,00	52.746.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB	114.450.000,00	114.450.000,00	100,00	91.644.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	84.581.000,00	84.581.000,00	100,00	86.909.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	57.806.000,00	57.806.000,00	100,00	59.214.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol lainnya	487.000,00	-	0,00	-
Jumlah	722.000.000,00	721.513.000,00	99,93	798.881.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2019 adalah sebesar Rp182.153.984.579,00 atau sebesar 90,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp202.046.925.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 24,44% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2018 sebesar sebesar Rp146.382.593.476,00. Rincian belanja modal tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 40 Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

Belanja Modal :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tanah	6.980.915.000,00	3.912.172.520,00	56,04	19.140.412.917,00
Peralatan dan Mesin	30.785.792.000,00	35.522.056.921,00	115,38	31.782.371.749,00
Gedung dan Bangunan	88.453.120.000,00	70.163.070.715,00	79,32	51.233.394.067,00
Jalan	72.034.476.000,00	68.876.027.946,00	95,62	38.704.725.930,00
Aset Tetap Lainnya	3.379.857.000,00	3.299.127.177,00	97,61	5.171.517.732,00
Aset Lainnya	412.765.000,00	381.529.300,00	92,43	350.171.081,00
Jumlah	202.046.925.000,00	182.153.984.579,00	90,15	146.382.593.476,00



Realisasi belanja modal tahun 2019 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal pengadaan tanah tahun 2019 sebesar Rp3.912.172.520,00 atau 56,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.980.915.000,00. Realisasi belanja ini menurun sebesar 79,56% dibanding realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp19.140.412.917,00.

Perincian Belanja modal tanah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 41 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pengadaan tanah sarana pendidikan SD	622.700.000,00	
Pengadaan tanah sarana jalan	992.677.000,00	731.753.900,00
Pengurukan dan pematangan tanah	16.950.000,00	14.432.500,00
Pengadaan tanah sarana umum sanitasi dan air bersih	173.090.000,00	3.485.000,00
Pengadaan tanah bangunan pengairan	5.175.498.000,00	3.162.501.120,00
Jumlah	6.980.915.000,00	3.912.172.520,00

- a. Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebanyak 1 bidang yang direncanakan untuk pembangunan SDN Krapyak Lor 01 dengan anggaran sebesar Rp622.700.000,00. Belanja modal tanah tersebut gagal dilaksanakan karena adanya sengketa internal dari pemilik lahan dan ahli warisnya.
- b. Pengadaan tanah sarana jalan
Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 10 bidang dengan total luas 1.558,4 m². Realisasi belanja ini sebesar Rp731.753,900,00 atau 73,72% dari anggaran sebesar Rp992.677.000,00. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi penggantian tanah interchange jalan tol sebesar Rp729.003.900,00 dan untuk pembelian patok dan cat sebesar Rp2.750.000,00. Adapun perinciannya sebagaimana dalam **Lampiran 1**.
- c. Pengurukan dan pematangan tanah
Merupakan belanja pengurukan yang mengkapitalisasi nilai tanah, yaitu berupa peninggian kandang sapi RPH Panjang Wetan. Realisasi belanja pos ini sebesar Rp14.432.500,00 atau sebesar 85,15% dari anggaran sebesar Rp16.950.000,00
- d. Pengadaan tanah sarana umum sanitasi dan air bersih
Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 bidang untuk pembangunan sanitasi air bersih di Kelurahan Krapyak dengan anggaran sebesar Rp173.090.000,00. Pengadaan ini gagal dilaksanakan karena sertifikat tanah yang direncanakan dibeli masih diagunkan pemiliknya di bank. Pos belanja ini hanya terealisasi BOP saja sebesar Rp3.485.000,00



5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 adalah sebesar Rp35.522.056.921,00 atau sebesar 115,38% dari anggaran perubahan sebesar Rp30.785.792.000,00. Realisasi belanja melebihi anggaran karena terdapat belanja komputer dan belanja alat kedokteran yang penggarannya berasal dari bantuan keuangan provinsi. Ketetapan besaran belanja bantuan keuangan provinsi muncul setelah APBD-P tahun 2019 ditetapkan, sehingga diwadhahi dalam Peraturan Walikota Nomor 86 A tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp31.782.371.749,00 maka realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,77%.

Secara lebih rinci belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 42 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018

Belanja Modal :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Alat-Alat Besar Darat	1.646.015.000,00	1.595.027.000,00	96,9	1.984.227.168,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.741.178.000,00	2.649.816.000,00	96,67	2.736.506.250,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	201.650.000,00	187.610.030,00	93,04	152.045.033,00
Alat Angkut Apung Bermotor	110.000.000,00	107.690.000,00	97,9	136.500.000,00
Alat Bengkel Bermesin	54.600.000,00	53.766.650,00	98,47	225.760.800,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	210.703.000,00	209.624.070,00	99,49	283.703.450,00
Alat Ukur	277.400.000,00	167.988.000,00	60,56	735.170.000,00
Alat Pengolahan	115.045.000,00	81.155.000,00	70,54	36.307.200,00
Alat Kantor	1.701.984.000,00	1.417.616.540,00	83,29	871.486.024,00
Alat Rumah Tangga	3.925.102.000,00	3.399.347.335,00	86,61	4.344.596.342,00
Komputer	4.858.213.000,00	5.695.251.120,00	115,29	6.345.920.976,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	821.705.000,00	852.455.150,00	103,74	905.817.653,00
Alat Studio	658.327.000,00	595.385.320,00	90,44	606.239.020,00
Alat Komunikasi	943.950.000,00	935.762.600,00	99,13	360.971.950,00
Alat Kedokteran	3.272.507.000,00	13.214.146.306,00	403,79	7.730.153.388,00
Alat Kesehatan	6.350.500.000,00	1.498.623.492,00	23,6	1.507.056.448,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	121.634.000,00	90.477.500,00	74,39	65.952.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	213.500.000,00	204.066.014,00	95,58	14.000.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0	10.500.000,00
Peralatan dan Mesin Dana BOS	1.345.829.000,00	1.362.115.794,00	101,21	881.269.777,00
Pengadaan Rambu-Rambu	1.215.950.000,00	1.204.133.000,00	101,21	1.848.188.270,00
Jumlah	30.785.792.000,00	35.522.056.921,00	115,38	31.782.371.749,00

Belanja modal BLUD secara total mengikuti penganggarannya, apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal BLUD

Belanja Modal BLUD teralisasi sebesar Rp1.498.623.492,00 atau 23,60% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp6.350.500.000,00. Belanja modal BLUD merupakan akumulasi dari belanja modal 4 BLUD yaitu RSUD Benda, PSPJ,



Puskesmas dan BKPM. Adapun rincian belanja modal BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 43 Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2019 dan 2018

Belanja Modal :	TA. 2019
	Realisasi
Alat-alat berat	21.005.000,00
Alat-alat angkutan darat	28.101.000,00
Alat-alat bengkel	1.600.000,00
Peralatan kantor	129.926.750,00
Perlengkapan kantor	54.479.000,00
Komputer	292.703.980,00
Meubleair	304.692.100,00
Peralatan dapur	68.339.700,00
Alat-alat studio	14.318.000,00
Alat-alat komunikasi	9.057.000,00
Alat-alat kedokteran	501.996.562,00
Kontruksi/pembelian	58.357.400,00
buku/kepuustakaan	605.000,00
Software/aplikasi	13.442.000,00
Jumlah	1.498.623.492,00
Keterangan :	
Belanja modal untuk masing-masing BLUD :	
RSUD Bendan	1.465.380.992,00
PSPJ	-
Puskesmas	31.657.500,00
BKPM	1.585.000,00
Total	1.498.623.492,00

Belanja BLUD yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum diaudit, karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini audit Laporan Keuangan BLUD oleh Kantor Akuntan Publik belum selesai.

b. Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS

Belanja peralatan dan mesin dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS terealisasi sebesar Rp1.362.115.794,00

Tabel 5. 44 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2019

Belanja Modal :	Realisasi TA. 2019
Alat-alat bengkel	396.000,00
Peralatan kantor	13.670.000,00
Perlengkapan kantor	108.171.600,00
Komputer	990.922.863,00
Meubleair	44.810.000,00
Peralatan dapur	10.966.305,00
Alat-alat studio	50.112.100,00
Alat-alat ukur	400.000,00
Alat-alat laboratorium	140.124.526,00
Instalasi listrik telepon dan air	2.542.400,00
Jumlah	1.362.115.794,00



5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 merupakan realisasi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan yaitu sebesar Rp70.163.070.715,00 atau sebesar 79,32% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp88.453.120.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar 36,95% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp51.233.394.067,00.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 adalah sebesar Rp68.876.027.946,00 atau sebesar 95,62% dari anggaran perubahan sebesar Rp72.034.476.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini mengalami kenaikan sebesar 77,95% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp38.704.725.930,00.

Secara lebih rinci belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

Belanja Modal :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jalan	57.604.052.000,00	55.936.229.869,00	97,10	28.486.432.400,00
Jembatan	28.195.000,00	28.195.000,00	100,00	511.996.000,00
Bangunan Air Irigasi	12.411.072.000,00	11.283.466.390,00	90,91	6.020.140.200,00
Instalasi Air Minum Bersih	-	0,00	-	1.950.000,00
Bangunan Air Kotor	1.118.588.000,00	1.044.593.000,00	93,38	
Instalasi Air Kotor	70.660.000,00	51.220.450,00	72,49	482.925.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	290.600.000,00	88.815.575,00	30,56	383.842.000,00
Jaringan Air Minum	-	0,00	-	39.909.400,00
Jaringan Listrik	502.909.000,00	435.107.662,00	86,52	2.777.530.930,00
Jaringan Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	-
Jumlah	72.034.476.000,00	68.876.027.946,00	95,62	38.704.725.930,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019 adalah sebesar Rp3.299.127.177,00 atau sebesar 97,61% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.379.857.000,00. Sebagian realisasi belanja aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp3.066.040.277,00 merupakan belanja aset tetap lainnya yang berasal dari dana BOS.

Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 36,21% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp5.171.517.732,00.

Rincian lebih lanjut tentang belanja aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5. 46 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018

No	Belanja Modal (BM)	TA.2019			TA. 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	BM-Buku / Kepustakaan	241.115.000,00	209.329.900,00	86,82	1.047.638.250,00
2	BM-Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	1.757.000,00	1.757.000,00	100,00	14.900.000,00
4	BM-Sarpras Olahraga	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5	Belanja aset tetap lainnya (BOS)	3.114.985.000,00	3.066.040.277,00	98,43	4.104.979.482,00
	Jumlah	3.379.857.000,00	3.299.127.177,00	97,61	5.171.517.732,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2019 merupakan realisasi belanja software/aplikasi yaitu sebesar Rp381.529.300,00 atau 92,43% dari anggaran perubahan sebesar Rp412.765.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 8,96% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp350.171.081,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran realisasi dana tak terduga tahun 2019 adalah sebesar Rp730.438.928,00 atau 26,56% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp2.750.000.000,00.

Penggunaan belanja tak terduga tahun 2019 adalah untuk pembayaran restitusi BPHTB tahun sebelumnya atas nama Any Restiani sebesar Rp4.500.000,00 dan penanganan banjir senilai Rp725.938.928,00. SKPD yang ditunjuk untuk menangani kondisi darurat bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 47 Realisasi Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018

Pembiayaan Daerah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	102,00	78.606.608.989,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	111,83	12.725.079.674,00
Pembiayaan Netto	77.570.835.000,00	77.874.259.018,00	100,39	65.881.529.315,00



Realisasi pembiayaan netto tahun 2019 adalah sebesar Rp77.874.259.018,00 atau sebesar 100,39% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp77.570.835.000,00. Realisasi pembiayaan netto meningkat sebesar 18,20% jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2018 sebesar Rp65.881.529.315,00. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 48 Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018

Penerimaan Pembiayaan Daerah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penggunaan SiLPA	87.928.207.000,00	87.928.207.176,00	100,00	78.568.368.646,00
Pencairan dana cadangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Pinjaman dalam negeri	0,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.000.000.000,00	2.000.181.818,00	100,01	38.240.343,00
Jumlah	90.228.207.000,00	92.028.388.994,00	102,00	78.606.608.989,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp92.028.388.994,00 atau sebesar 102,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp90.228.207.000,00. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 17,07% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp78.606.608.989,00.

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2019 adalah sebesar Rp87.928.207.176,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp87.928.207.000,00. Realisasi Penggunaan SiLPA ini mengalami peningkatan sebesar 11,91% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp78.568.368.646,00. Realisasi penggunaan SiLPA ini merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun anggaran 2018.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi Pencairan Dana Cadangan tahun 2019 adalah sebesar Rp300.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp300.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini digunakan untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020.



5.1.3.1.3 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri tahun 2019 adalah sebesar Rp1.800.000,00. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman dari BLUD RSUD Bendan karena pada pertengahan bulan Nopember 2019, RSUD Bendan mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari belum cairnya klaim BPJS, pinjaman diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Pekalongan. Proses pinjaman BLUD RSUD Bendan dilakukan setelah APBD P 2019 ditetapkan sehingga untuk memwadahi hal tersebut diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 86A tahun 2019 dan dianggarkan pada pembiayaan PPKD.

5.1.3.1.4 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.181.818,00 atau sebesar 100,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.000.000.000,00. Rincian penerimaan pembiayaan yang berasal dari penarikan kembali investasi pemerintah daerah sebagai berikut :

- penarikan kembali investasi dana bergulir ketahanan pangan dan perikanan dari *chanelling agency* PD Bank Pekalongan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- penerimaan kembali investasi dana bergulir hewan ternak sebesar Rp181.818,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2019 adalah sebesar Rp14.154.129.976,00 atau sebesar 111,83% % dari anggaran perubahan sebesar Rp12.657.372.000,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 49 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2019 dan 2018

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :	TA. 2019			TA. 2018
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	4.350.000.000,00	4.607.388.226,00	105,92	4.302.387.924,00
Penyertaan Modal	8.300.000.000,00	7.742.000.000,00	93,28	8.400.000.000,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	7.372.000,00	1.804.741.750,00	24.481,03	22.691.750,00
Jumlah	12.657.372.000,00	14.154.129.976,00	111,83	12.725.079.674,00

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Realisasi penyertaan dana cadangan adalah sebesar Rp4.607.388.266,00 atau 105,92% dari anggaran perubahan sebesar Rp4.350.000.000,00. Realisasi ini merupakan akumulasi dari penempatan dana cadangan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan bunga deposito dana cadangan sebesar Rp.607.388.266,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2



Tahun 2017 pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan akan menambah dana cadangan.

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp7.742.000.000,00 atau 93,28% dari anggaran perubahan sebesar Rp8.300.000.000,00. Dasar hukum penyertaan modal adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan dan Keputusan Walikota Nomor 757/1021 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/162 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan rincian realisasi pengeluaran penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 2) Penyertaan modal kepada PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp4.342.000.000,00;
- 3) Penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
- 4) Penyertaan modal kepada PD.BKK Pekalongan Utara sebesar Rp800.000.000,00;
- 5) Penyertaan modal kepada PD.BPR BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00.

Penyertaan modal yang tidak mencapai pagu anggaran yang ditetapkan adalah PDAM.

5.1.3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri terealisasi sebesar Rp4.741.750,00 atau 64,32% dari anggaran perubahan sebesar Rp7.372.000,00. Pembayaran pokok pinjaman ini merupakan pembayaran hutang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.741.750,00.

5.1.3.2.4 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri – Lembaga Keuangan Bank terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 merupakan pembayaran pokok hutang RSUD Bendan ke Bank Mandiri.

d. Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2019, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 50 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA. 2019	TA. 2018
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan dan Belanja		
a. Pendapatan	971.624.464.120,61	905.231.572.568,00
b. Belanja	954.397.012.827,00	883.184.894.707,00
Surplus (Defisit) Anggaran	17.227.451.293,61	22.046.677.861,00
2 Pembiayaan		
a. Penerimaan Daerah	92.028.388.994,00	78.606.608.989,00
b. Pengeluaran daerah	14.154.129.976,00	12.725.079.674,00
Pembiayaan Netto	77.874.259.018,00	65.881.529.315,00
3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2019 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dari target pendapatan sebesar Rp972.541.579.000,00 terealisasi sebesar Rp971.624.464.120,61, sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp917.114.879,39.
- b. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.050.112.414.000,00 terealisasi sebesar Rp954.397.012.827,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp95.715.401.173,00, yang terdiri dari :
 - a) Sisa belanja operasi sebesar Rp73.803.199.680,00;
 - b) Sisa belanja modal sebesar Rp19.892.940.421,00;
 - c) Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp2.019.561.072,00.
- c. Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp77.570.835.000,00 terealisasi sebesar Rp77.874.259.018,00, sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp303.424.018,00.

Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 5. 51 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA. 2019	TA. 2018
	Rp	Rp
Kas di BUD	81.884.779.309,00	80.188.431.351,00
Kas di BLUD Bendahara	9.744.757.200,61	6.412.739.454,00
Kas di BLUD Puskesmas	1.022.557.275,00	478.752.294,00
Kas di BLUD BKPM	59.871.109,00	76.397.215,00
Kas di BLUD PSPJ	72.782.800,00	73.812.670,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	10.805.000,00	1.395.687,00
Kas lainnya	2.306.157.618,00	698.188.960,00
Jumlah	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00
Dikurangi Utang PFK		1.510.455,00
Jumlah SiLPA	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00

Adapun detail SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dalam **Lampiran 2**.



2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2018 adalah sebesar Rp87.928.207.176,00 seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019

Berdasarkan surplus anggaran sebesar Rp17.227.451.293,61 dan realisasi pembiayaan netto Rp77.874.259.018,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp95.101.710.311,61. yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari target pendapatan sebesar Rp972.541.579.000,00 terealisasi sebesar Rp971.624.464.120,61, sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp917.114.879,39.
- Dari anggaran belanja sebesar Rp1.050.112.414.000,00 terealisasi sebesar Rp954.397.012.827,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp95.715.401.173,00
- Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp560.812.244,00.

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61, yang terdiri dari :

Tabel 5. 52 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019	TA. 2018
	Rp	Rp
Kas di BUD	81.884.779.309,00	80.188.431.351,00
Kas di BLUD Bendan	9.744.757.200,61	6.412.739.454,00
Kas di BLUD Puskesmas	1.022.557.275,00	478.752.294,00
Kas di BLUD BKPM	59.871.109,00	76.397.215,00
Kas di BLUD PSPJ	72.782.800,00	73.812.670,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	10.805.000,00	1.395.687,00
Kas lainnya	2.306.157.618,00	698.188.960,00
Jumlah	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00
Dikurangi Utang PFK		1.510.455,00
Jumlah SiLPA	95.101.710.311,61	87.928.207.176,00

3. Neraca

Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2019 dan perbandingannya dengan neraca per 31 Desember 2018, dengan uraian sebagai berikut :

5.3.1 Aset

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.856.674.222.675,30, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5. 53 Aset Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Aset Lancar	154.210.158.699,70	129.785.966.331,86	18,82
Investasi Jangka Panjang	92.147.877.182,26	87.707.902.125,09	5,06
Aset Tetap	2.452.572.023.682,23	2.064.451.070.544,63	18,80
Dana Cadangan	12.704.351.488,00	8.396.963.262,00	51,30
Aset Lainnya	145.039.811.623,11	172.707.516.529,40	(16,02)
Jumlah	2.856.674.222.675,30	2.463.049.418.792,98	15,98

Nilai aset per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,98% jika dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.463.049.418.792,98. Komposisi aset Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp154.210.158.699,70 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 54 Aset Lancar Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Kas dan Setara Kas	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00	8,16
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	31.912.580.850,00	29.497.982.436,00	8,19
Piutang Retribusi	5.981.129.734,50	5.077.659.469,50	17,79
Piutang Lainnya	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	36,49
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.357.622.501,00	0,00	#DIV/0!
Piutang Transfer Pemda lainnya	1.751.349.406,00	3.333.023.919,00	-47,45
Penyisihan Piutang	-28.973.255.379,98	-28.424.172.997,09	1,93
Belanja Dibayar Dimuka	135.573.791,67	128.787.685,50	5,27
Persediaan	15.594.536.097,85	12.205.600.745,65	27,77
Jumlah	154.210.158.699,70	129.785.966.331,86	18,82

Saldo aset lancar per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,89% jika dibandingkan dengan saldo aset lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp129.785.966.331,86. Rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut :



5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, BLUD dan BOS. Pengelolaan kas baik di kas daerah, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BOS maupun BLUD didasarkan pada aturan sebagai berikut :

- a. perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 076/0002 dan 0025/HT.01.01/007/2018 tentang pengelolaan uang daerah (RKUD/giro)
- b. Perjanjian kerjasama nomor 900/1387 dan nomor 0007/HT.01.04/007/2019 antara PPKD Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang pengelolaan uang dalam bentuk deposito
- c. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- d. Terdapat 2 rekening penampungan kas yaitu :
 1. Rekening penampungan pembayaran PBB pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00359-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran PBB. Realisasi pembayaran PBB pada rekening ini langsung akan pindah ke rekening kasda pada sore harinya. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2019 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.
 2. Rekening penampungan pembayaran *e-tax* pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00510-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2019 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.

Adapun rincian saldo per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 55 Saldo per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun %
	Rp	Rp	
Kas di Kas Daerah	26.884.779.309,00	80.188.431.351,00	-66,47
Kas di Bendahara Penerimaan	10.805.000,00	1.395.687,00	674,17
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	10.899.968.384,61	7.041.701.633,00	54,79
Kas Lainnya	2.306.157.618,00	698.188.960,00	230,31
Setara Kas	55.000.000.000,00	0,00	
Jumlah	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00	8,16

Saldo kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61 dengan penjelasan sebagai berikut :



5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah (BUD)

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.884.779.309,00. Kas di Kas Daerah merupakan kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 1-007-00009-1. Rincian Kas di Kas Daerah sebagaimana dalam **Lampiran 3**.

5.3.1.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.805.000,00, yang merupakan kas di bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup atas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (laboratorium lingkungan). Kas tersebut telah disetor ke kasda pada Januari 2020.

5.3.1.1.1.3 Kas Di BLUD

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.899.968.384,61, yang terdiri dari :

- a. Saldo kas di BLUD RSUD Bendan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.744.757.200,61 dengan perincian:
 1. saldo bank sebesar Rp9.740.707.300,61 :
 - rekening Bank Jateng nomor 2-007-16094-4 sebesar Rp23.365.705,00
 - rekening Bank Jateng nomor 2-007-16093-6 sebesar Rp106.834,00
 - rekening Bank Syariah Mandiri nomor 4372220002 sebesar Rp717.233.761,61
 - deposito pada Bank Jateng sebesar Rp9.000.000.000,00
 2. saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp4.050.900,00
- b. Saldo kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.022.557.275,00. Dengan perincian :
 1. Saldo Bank sebesar Rp1.022.027.275,00 yang terbagi dalam 2 rekening yaitu:
 - Kas di Bank Jateng Syariah nomor rekening 5-053-01084-9 sebesar Rp1.021.465.898,00
 - Kas di Bank Jateng Syariah nomor rekening 5-053-01094-1 sebesar Rp561.377,00
 2. Saldo di bendahara penerimaan sebesar Rp530.000,00
- c. Saldo kas di BLUD BKPM per 31 Desember 2019 di bank jateng nomor rekening 2-007-11047-5 adalah sebesar Rp59.871.109,00.
- d. Saldo kas di BLUD PSPJ per 31 Desember 2019 di bank jateng nomor rekening 2-007-11045-9 adalah sebesar Rp72.782.800,00.

5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya – Saldo Dana Bos

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.306.157.618,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 56 Saldo Kas Lainnya – Kas Dana BOS per 31 Desember 2019

Jenjang Pendidikan	Saldo Bos Per 31 Desember 2018 (Neraca)	Tahun 2019			Saldo Bos Per 31 Desember 2019
		Penerimaan BOS	Pembayaran utang pajak	Belanja BOS	
SD	448.905.126,00	12.194.597.513,00	1.510.460,00	11.971.222.231,00	670.769.948,00
SMP	249.283.834,00	10.063.080.076,00		8.676.976.240,00	1.635.387.670,00
Jumlah	698.188.960,00	22.257.677.589,00	1.510.460,00	20.648.198.471,00	2.306.157.618,00



Adapun laporan Sisa kas untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.1.5 Setara Kas

Saldo setara kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp55.000.000.000,00 merupakan saldo deposito Pemerintah Kota Pekalongan, di Bank Jateng dengan jangka waktu deposito 1 bulan.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kota Pekalongan tidak mempunyai aset lancar dalam bentuk investasi jangka pendek.

5.3.1.1.3 Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.378.338.498,57. Saldo piutang per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 46,94% jika dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.521.860.269,71. Rincian piutang daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 57 Piutang Daerah Tahun 2019 dan 2018

Uraian		Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Naik/Turun
		Rp	Rp	%
A.	Piutang Pendapatan	45.002.682.491,50	37.908.665.824,50	18,71
1	Piutang Pajak	31.912.580.850,00	29.497.982.436,00	8,19
2	Piutang Retribusi	5.981.129.734,50	5.077.659.469,50	17,79
3	Piutang Dana Perimbangan	5.357.622.501,00	0,00	
4	Piutang Dana Bagi Hasil	1.751.349.406,00	3.333.023.919,00	-47,45
B.	Piutang Lainnya	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	36,49
1	Piutang Lain2 PAD Yang Sah	27.348.911.387,05	20.037.367.442,30	36,49
C.	Penyisihan Piutang	-28.973.255.379,98	-28.424.172.997,09	1,93
Jumlah		43.378.338.498,57	29.521.860.269,71	46,94

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut :

a. Piutang Pajak

Tabel 5. 58 Umur Piutang Pajak beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 5 tahun	100%



b. Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

Tabel 5. 59 Umur Piutang Retribusi beserta Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

Dasar pengakuan piutang pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SPT PBB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD, yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayaran dari wajib pajak. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.912.580.850,00, yang terdiri dari:

Tabel 5. 60 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019

Jenis Piutang Pajak	Saldo per 31 Desember 2019
Pajak Hotel	33.957.400,00
Pajak Restoran	92.009.985,00
Pajak Hiburan	5.470.000,00
Pajak Reklame	764.503.778,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-
Pajak Parkir	4.630.000,00
Pajak Air Tanah	159.022.504,00
Pajak Sarang Burung Walet	14.480.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	30.838.507.183,00
Jumlah	31.912.580.850,00

Piutang pajak disajikan sesuai dengan umur piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 61 Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

No	Uraian	<1 Tahun (2019)	1 th s.d <=2 th (2018)	2 th <= x <= 5 th (2015-2017)	> 5 th (<2015)	Jumlah
1	Pajak Hotel	-	-	33.032.400,00	925.000,00	33.957.400,00
2	Pajak Restoran	14.707.525,00	-	73.647.460,00	3.655.000,00	92.009.985,00
3	Pajak Hiburan	-	-	4.470.000,00	1.000.000,00	5.470.000,00
4	Pajak Reklame	476.034.685,00	28.610.813,00	-	259.858.280,00	764.503.778,00
5	PPJ	-	-	-	-	-
6	Pajak Parkir	-	-	-	4.630.000,00	4.630.000,00
7	Pajak Air Tanah	143.183.152,00	7.016.371,00	7.538.235,00	1.284.746,00	159.022.504,00
8	Pajak Sarbur walet	-	-	-	14.480.000,00	14.480.000,00
9	PBB P2	6.030.736.915,00	4.385.747.731,00	9.419.549.638,00	11.002.472.899,00	30.838.507.183,00
	Jumlah	6.664.662.277,00	4.421.374.915,00	9.538.237.733,00	11.288.305.925,00	31.912.580.850,00

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Sehingga nilai penyisihan piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5. 62 Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2019)	1 th s.d <=2 th (2018)	2 th < sd <= 5 th (2015-2017)	> 5 th (<2015)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Pajak Hotel	-	-	16.516.200,00	925.000,00	17.441.200,00
2	Pajak Restoran	78.537,63	-	36.823.730,00	3.655.000,00	40.557.267,63
3	Pajak Hiburan	-	-	2.235.000,00	1.000.000,00	3.235.000,00
4	Pajak Reklame	2.380.173,43	2.861.081,30	-	259.858.280,00	265.099.534,73
5	PPJ	-	-	-	-	-
6	Pajak Parkir	-	-	-	4.630.000,00	4.630.000,00
7	Pajak Air Tanah	715.915,76	701.637,10	3.769.117,50	1.284.746,00	6.471.416,36
8	Pajak Sarbur walet	-	-	-	14.480.000,00	14.480.000,00
9	PBB P2	30.153.739,74	438.574.773,10	4.709.774.819,00	11.002.472.899,00	16.180.976.230,84
	Jumlah	33.328.366,55	442.137.491,50	4.769.118.866,50	11.288.305.925,00	16.532.890.649,55

Tabel 5. 63 Saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih

No	URAIAN	PIUTANG PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG PAJAK SETELAH DIKURANGI PIUTANG TDK TERTAGIH
1	Pajak Hotel	33.957.400,00	17.441.200,00	16.516.200,00
2	Pajak Restoran	92.009.985,00	40.552.267,63	51.457.717,38
3	Pajak Hiburan	5.470.000,00	3.235.000,00	2.235.000,00
4	Pajak Reklame	764.503.778,00	265.099.534,73	499.404.243,28
5	PPJ	-	-	-
6	Pajak Parkir	4.630.000,00	4.630.000,00	-
7	Pajak Air Tanah	159.022.504,00	6.471.416,36	152.551.087,64
8	Pajak Sarbur walet	14.480.000,00	14.480.000,00	-
9	PBB P2	30.838.507.183,00	16.180.976.175,68	14.657.531.007,33
	Jumlah	31.912.580.850,00	16.532.885.594,39	15.379.695.255,62

Saldo piutang pajak bersih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.379.695.255,62. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp13.746.103.719,70, maka saldo piutang per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,88%, Kenaikan ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Saldo Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pajak Hotel	16.516.200,00	39.530.815,00	-58,22
Pajak Restoran	51.457.717,38	65.135.637,00	-21,00
Pajak Hiburan	2.235.000,00	6.898.200,00	-67,60
Pajak Reklame	499.404.243,28	82.278.255,60	506,97
Pajak Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	-
Pajak Parkir	0,00	0,00	-
Pajak Air Tanah	152.551.087,64	22.325.453,00	583,31
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	-
PBB	14.657.531.007,33	13.529.935.359,10	8,33
Jumlah	15.379.695.255,62	13.746.103.719,70	11,88



5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebelum penyisihan piutang adalah sebesar Rp5.981.129.734,50. Rincian piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2019

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2019
	Rp
PKD Titik Strategis	791.406.261,00
PKD Sewa Tanah	265.705.441,00
PKD Sarang Burung	5.850.000,00
PKD Administrasi Umum	275.000,00
Kolam renang	15.000.000,00
PKD sewa rumah dinas	276.588,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	4.000.000,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	10.000.000,00
Retribusi ijin trayek	801.600,00
Retribusi parkir	640.312.000,00
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	3.142.766.399,00
Retribusi ijin gangguan	34.193.500,00
Retribusi IMB	285.364.200,00
Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	237.007.500,00
Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	225.400.346,00
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	117.830.229,50
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	19.422.517,00
Retribusi menara telekomunikasi	185.518.153,00
Jumlah	5.981.129.734,50

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Piutang Retribusi berdasarkan Umur Piutang

UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2019)	1 th s.d <=2 th (2018)	2 th <d <=3 th (2017)	> 3 th (<2017)	Jumlah
	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
PENYISIHAN PIUTANG					
PKD Titik Strategis	401.775,06	440.500,00	-	706.646.250,00	707.488.525,06
PKD Sewa Tanah	1.248.935,43	-	-	15.918.356,00	17.167.291,43
PKD Sarang Burung	-	-	-	5.850.000,00	5.850.000,00
PKD Administrasi Umum	-	-	-	275.000,00	275.000,00
Kolam renang	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
PKD sewa rumah dinas	1.382,94	-	-	-	1.382,94
PKD Sewa ec tanah bengkok	-	400.000,00	-	-	400.000,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Retribusi ijin trayek	-	8.480,00	-	716.800,00	725.280,00
Retribusi parkir	2.914.685,00	3.849.000,00	-	18.885.000,00	25.648.685,00
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	470.058,55	20.881.924,10	204.668.870,50	2.430.597.708,00	2.656.618.561,15
Retribusi ijin gangguan	-	-	1.697.700,00	30.798.100,00	32.495.800,00
Retribusi IMB	-	2.849.820,00	10.839.100,00	235.187.800,00	248.876.720,00
Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	29.312,50	2.492.500,00	10.663.750,00	184.892.500,00	198.078.062,50
Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	746.919,66	2.074.804,30	12.138.360,50	30.991.650,00	45.951.734,46
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	385.067,32	2.245.442,05	7.109.448,50	4.143.449,00	13.883.406,87
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	94.428,17	53.688,40	-	-	148.116,57
Retribusi menara telekomunikasi	-	-	-	185.518.153,00	185.518.153,00
JUMLAH	6.342.564,61	35.296.158,85	247.117.229,50	3.865.420.766,00	4.154.176.718,96



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 67 Saldo Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang Retribusi Tidak tertagih

NO	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TDK TERTAGIH
1	PKD Titik Strategis	791.406.261,00	707.488.525,06	83.917.735,95
2	PKD Sewa Tanah	265.705.441,00	17.167.291,43	248.538.149,58
3	PKD Sarang Burung	5.850.000,00	5.850.000,00	-
4	PKD Administrasi Umum	275.000,00	275.000,00	-
5	Kolam renang	15.000.000,00	15.000.000,00	-
6	PKD sewa rumah dinas	276.588,00	1.382,94	275.205,06
7	PKD Sewa ec tanah bengkok	4.000.000,00	400.000,00	3.600.000,00
8	Pemakaian sarana dan prasarana reklame	10.000.000,00	50.000,00	9.950.000,00
9	Retribusi ijin trayek	801.600,00	725.280,00	76.320,00
10	Retribusi parkir	640.312.000,00	25.648.685,00	614.663.315,00
11	Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	3.142.766.399,00	2.656.618.561,15	486.147.837,86
12	Retribusi ijin gangguan	34.193.500,00	32.495.800,00	1.697.700,00
13	Retribusi IMB	285.364.200,00	248.876.720,00	36.487.480,00
14	Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	237.007.500,00	198.078.062,50	38.929.437,50
15	Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	225.400.346,00	45.951.734,46	179.448.611,54
16	Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	117.830.229,50	13.883.406,87	103.946.822,64
17	Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	19.422.517,00	148.116,57	19.274.400,44
18	Retribusi menara telekomunikais	185.518.153,00	185.518.153,00	-
	Jumlah	5.981.129.734,50	4.154.176.718,96	1.826.953.015,55

Saldo piutang retribusi bersih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.826.953.015,55. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.254.958.445,40, maka saldo piutang per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 45,58%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 68 Saldo Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Naik / Turun (%)
PKD Titik Strategis	83.917.735,95	11.934.000,00	603,18
PKD Sewa Tanah	248.538.149,58	0,00	
PKD Sarang Burung	0,00	0,00	0,00
PKD Administrasi Umum	0,00	0,00	0,00
Kolam renang	0,00	0,00	0,00
PKD sewa rumah dinas	275.205,06	0,00	0,00
PKD Sewa ec tanah bengkok	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Pemakaian sarana dan prasarana reklame	9.950.000,00	0,00	
Retribusi ijin trayek	76.320,00	76.320,00	0,00
Retribusi parkir	614.663.315,00	105.258.300,00	483,96
Retribusi pemakaian tempat pasar/grosir/kios/toko	486.147.837,86	832.609.827,60	-41,61
Retribusi ijin gangguan	1.697.700,00	3.933.730,00	100,00
Retribusi IMB	36.487.480,00	62.403.120,00	-41,53
Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	38.929.437,50	47.864.000,00	100,00
Retribusi PKD sewa rusunawa slamaran	179.448.611,54	92.754.485,80	100,00
Retribusi PKD sewa rusunawa kuripan	103.946.822,64	91.414.208,90	13,71
Retribusi PKD sewa rusunawa panjang baru	19.274.400,44	3.110.453,10	519,67
Retribusi menara telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.826.953.015,55	1.254.958.445,40	45,58



5.3.1.1.3.3 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.357.622.501,00 yang merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak Pusat sebesar Rp 4.806.189.668,00
- b. Bagi Hasil SDA Pusat sebesar Rp 551.432.833,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 Kota Pekalongan mendapatkan alokasi kurang bayar Tahun 2018 DBH Pajak Pusat sebesar Rp1.257.205.125,00 dan DBH SDA Pusat sebesar Rp293.412.605,00.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kota Pekalongan mendapatkan alokasi kurang bayar Tahun 2019 DBH Pajak Pusat sebesar 3.548.984.543,00 dan DBH SDA Pusat sebesar Rp258.020.228,00.

5.3.1.1.3.4 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.751.349.406,00, yang merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. 69 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Jenis Piutang Bagi Hasil	Per 31 Desember 2019
	Rp
Pajak Kendaraan bermotor	1.214.943.781,00
Bea balik nama kendaraan bermotor	533.086.664,00
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	3.177.469,00
Pajak air permukaan	141.492,00
Jumlah	1.751.349.406,00

5.3.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya sebelum penyisihan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp27.348.911.387,05. Adapun besaran penyisihan sebesar Rp8.286.193.066,63 sehingga piutang bersih piutang lainnya adalah sebesar Rp18.683.343.991,09. Rincian piutang lainnya adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 70 Rincian Piutang Lainnya

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Denda PBB	7.804.266.475,00	5.705.189.793,97	2.099.076.681,03
2	Piutang denda non PBB	344.763.588,91	193.961.464,51	150.802.124,40
3	Piutang denda parkir	54.036.668,00	4.193.903,54	49.842.764,46
4	Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi	45.529.166,67	29.657.104,16	15.872.062,51
5	Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House	54.053.247,43	54.053.247,42	0,01
6	Piutang Bunga Dana Bergulir KKP	244.963.400,40	239.397.083,74	5.566.316,66
7	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi	667.129,00	3.335,64	663.793,36
8	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Trading House	1.970,00	9,85	1.960,15
9	Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP	5.770.720,00	28.853,60	5.741.866,40
10	Piutang Hand Traktor	5.596.500,00	5.596.500,00	0,00
11	Piutang Ternak	13.605.000,00	13.605.000,00	0,00
12	Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak	44.471.949,00	44.471.949,00	0,00
13	Piutang pokok perguliran ternak awal dan redistribus	121.885.016,00	121.885.016,05	-0,05
14	Piutang Bunga Deposito	308.835.614,00	1.544.178,07	307.291.435,93
15	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	72.445.119,00	362.225,59	72.082.893,41
16	Piutang BLUD	18.228.019.823,64	1.872.243.401,49	16.355.776.422,15
	-PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)	17.918.311.624,64	1.870.694.860,50	16.047.616.764,14
	-PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)	309.708.199,00	1.548.541,00	308.159.658,00
	-BLUD PUSKESMAS	262.183.481,00	1.310.917,41	260.872.563,59
	-BLUD BKPM	47.524.718,00	237.623,58	47.287.094,42
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	27.348.911.387,05	8.286.193.066,63	18.683.343.991,09

5.3.1.1.3.6 Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.973.255.379,98, meningkat Rp549.082.382,89 dibandingkan saldo penyisihan piutang tahun 2018 sebesar Rp28.424.172.997,09. Penyisihan piutang terdiri dari :

- a. Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp20.687.062.313,35, terdiri dari :
 1. Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp16.532.885.594,39, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.63.
 2. Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp4.154.176.718,96, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.67.
- b. Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp8.286.193.066,63, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.70.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp135.573.791,67. Saldo beban dibayar dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Asuransi kematian bagi anggota Takmir Masjid dan Takmir Musholla sebesar Rp88.916.666,67, dengan nilai premi setahun sebesar Rp97.000.000,00. Belanja asuransi ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda. Masa berlaku asuransi adalah 19 November 2019 sampai dengan 19 November 2020, sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan. Pemberian asuransi kematian ini didasarkan pada Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS Kota Pekalongan Tahun 2019.



- b. Asuransi mobil dinas pada Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda sebesar Rp40.377.975,00, dengan nilai premi setahun sebesar Rp44.048.700,00 untuk 6 mobil yaitu G1A, G6A, G5A, G17A, G121A, G45A.
Masa berlaku asuransi adalah 3 Desember 2019 sampai 3 Desember 2020 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan.
- c. Asuransi mobil dinas pada Sekretariat Dewan sebesar Rp6.279.150,00 dengan nilai premi sebesar Rp8.372.200,00 untuk 1 mobil yaitu G7015A.
Masa berlaku asuransi adalah 19 September 2019 sampai dengan 19 September 2020 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 9 bulan.

5.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa :

- a. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- b. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Penyajian persediaan per 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam Perwal tersebut disampaikan bahwa yang termasuk barang persediaan adalah sebagai berikut :

- a. Persediaan Bahan Pakai Habis, terdiri dari persediaan alat tulis kantor persediaan barang cetakan, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko, materiail dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas, Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran, Persediaan Isi tabung gas, dan sejenisnya.
- b. Persediaan bahan/material, terdiri dari Persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/ bibit tanaman, persediaan bibit ternak, Persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan Bahan Makanan Pokok, Persediaan Suku Cadang dan sejenisnya
- c. Persediaan Barang Lainnya, terdiri dari Persediaan barang yang akan di berikan kepada pihak ketiga, dan sejenisnya.

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.594.536.097,85. Saldo persediaan tersebut berasal dari penghitungan saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 5**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka



waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp92.147.877.182,26. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,26% jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp87.707.902.125,09. Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 71 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Investasi Non Permanen	1.482.586.701,00	3.625.042.535,00	(59,10)
Penyisihan Diragukan Tertagih	(284.890.450,00)	(425.290.463,00)	(33,01)
Investasi Permanen	90.950.180.931,26	84.508.150.053,09	7,62
Jumlah	92.147.877.182,26	87.707.902.125,09	5,06

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Program dana bergulir yang disalurkan dan dikelola bekerja sama dengan PD BPR Bank Pekalongan (pergantian nama dari PD BPR Bank Pasar Pekalongan) selaku *channelling agency* adalah dana bergulir usaha ketahanan pangan dan KKP perikanan, dana bergulir kepada lembaga koperasi dan simpan pinjam dan dana bergulir koperasi UKM dan Trading House. Sedangkan dana bergulir hewan ternak disalurkan dan dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen – dana bergulir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.197.696.251,00. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 62,57% jika dibandingkan dengan saldo investasi non permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.199.752.072,00. Investasi non permanen dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 72 Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian Investasi Non Permanen	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Investasi dalam Proyek Pembangunan	1.000.000.000,00	3.122.066.834,00	(67,97)
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	482.586.701,00	502.975.701,00	(4,05)
Dana Bergulir diragukan tertagih	(284.890.450,00)	(425.290.463,00)	(33,01)
Jumlah	1.197.696.251,00	3.199.752.072,00	(62,57)

Investasi non permanen selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.2.1.1 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Penyajian investasi non permanen berdasarkan *Net Realizable Value (NRV)* yang disajikan sebesar sisa pokok perguliran dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir



yang diragukan dapat ditagih. Saldo investasi dalam proyek pembangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Adapun nilai dana bergulir diragukan dapat tertagih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.207.500,00.

Saldo investasi mengalami penurunan dibanding investasi tahun 2018 karena ada penarikan investasi Ketahanan pangan dan perikanan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2019. Alasan penarikan adalah :

- a. saldo yang mengendap terlalu tinggi
- b. mengikuti amanat dari Perda APBD tahun 2019 khususnya akun penerimaan pembiayaan

Selain itu dana bergulir hewan ternak sebesar Rp121.885.016,00 yang semula merupakan pos investasi non permanen berpindah ke pos piutang, karena sesuai dengan kebijakan akuntansi, sudah tidak memenuhi lagi sebagai unsur investasi non permanen. Investasi dalam proyek tahun 2019 hanya mencakup dana bergulir KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan). Dana bergulir ini merupakan dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012. Saldo bersih (setelah penyisihan atas dana bergulir yang diragukan tidak tertagih) investasi dana bergulir ketahanan pangan dan KKP Perikanan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp977.792.500,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 73 Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) per 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah
Dana Bergulir pada Penerima	300.274.000,00
Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih	(22.207.500,00)
Nilai Bersih Dana Bergulir	278.066.500,00
Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan	699.726.000,00
Jumlah Nilai dana Bergulir (nett)	977.792.500,00

Nilai investasi dana bergulir KKP diragukan tertagih sebesar Rp22.207.500,00 merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jumlah saldo dana bergulir yang mengendap di rekening penampungan (PD BPR Bank Pekalongan dengan nomor rekening 203-01898) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp699.726.000,00.

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 telah dilakukan penarikan terhadap saldo dana bergulir KKP yang mengendap di PD Bank Pekalongan sebesar Rp699.726.000,00, sehingga saldo dana bergulir pada tanggal tersebut Rp.0,00, namun demikian rekening di PD BPR Bank Pekalongan tidak ditutup dan masih tetap digunakan untuk menampung sisa angsuran dana bergulir dari para debitur.

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp482.586.701,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 74 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	Per 31 Desember 2019
Dana Bergulir - Trading House	232.586.701,00
Dana Bergulir - Koperasi UKM	250.000.000,00
Jumlah	482.586.701,00

Penjelasan tentang investasi non permanen trading house dan koperasi UKM dapat disajikan sebagai berikut :

a. Dana Bergulir – Trading House

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen dalam Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House per 31 Desember 2019 sebelum dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir adalah sebesar Rp232.586.701,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 75 Dana Bergulir – Trading House

Uraian	Jumlah
Dana dari Pemerintah Kota Pekalongan	1.125.000.000,00
Angsuran yang telah disetor ke Kas Daerah	892.413.299,00
Dana Bergulir pada Penerima	232.586.701,00
Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih	(232.586.701,00)
Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan	0,00
Jumlah Nilai dana Bergulir (nett)	0,00

Dana bergulir trading house yang macet sudah diserahkan kepada KPKNL per tanggal 1 Desember 2016 dengan surat penyerahan nomor 1047 sd 1060/BP/XII/2016 untuk 14 penunggak dengan nilai penyerahan sebesar Rp414.599.944,00 dan sampai posisi 31 Desember 2019 masih menyisakan 9 penunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp232.586.701,00.

b. Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir kepada sebelas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006. Saldo investasi non permanen dana bergulir – Simpan Pinjam Koperasi bersih (sebelum dikurangi dengan penyisihan dana bergulir diragukan tidak tertagih) adalah sebesar Rp250.000.000,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 76 Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi

Uraian	Jumlah
Saldo mengendap di Bank Pekalongan	217.820.851,00
Dana Bergulir pada Penerima	32.179.149,00
Jumlah Investasi	250.000.000,00
Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan tidak tertagih	(30.096.249,00)
Jumlah Investasi Dana Bergulir bersih	219.903.751,00



Penyisihan dana bergulir yang diragukan tidak tertagih sebesar Rp30.096.249,00 merupakan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Pada tanggal 19 Pebruari 2020 telah dilakukan penarikan terhadap saldo dana bergulir Simpan Pinjam Koperasi yang mengendap di PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp217.820.851,00, sehingga saldo dana bergulir pada tanggal tersebut Rp.0,00, namun demikian rekening di PD Bank Pekalongan tidak ditutup dan masih tetap digunakan untuk menampung sisa angsuran dana bergulir dari para debitur.

5.3.1.2.1.3 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp284.890.450,00, terdiri dari:

- Dana bergulir diragukan tertagih - Ketahanan Pangan dan Perikanan, sebesar Rp22.207.500,00
- Dana bergulir diragukan tertagih - Trading House, sebesar Rp 232.586.701,00
- Dana bergulir diragukan tertagih – Simpan Pinjam Koperasi, sebesar Rp 30.096.249,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Lembaga Keuangan bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT. PRPP Jateng.

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp90.950.180.931,26. Saldo investasi permanen tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,62% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen tahun 2018 sebesar Rp84.508.150.053,09. Saldo investasi permanen terdiri dari : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sebesar Rp90.644.980.931,26 dan Investasi Permanen Lainnya, sebesar Rp305.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 77 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan

Investasi Permanen	Kepemilikan	31-Des-19	31 Des 2018	Naik/Turun
	Saham (%)	(Rp)	(Rp)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		90.644.980.931,26	84.202.950.053,09	7,65
PT. Bank Jateng	0,61	22.393.000.000,00	20.393.000.000,00	9,81
BPR Bank Pekalongan	100,00	11.867.572.419,00	11.198.383.646,00	5,98
BPR BKK Kota Pekalongan	47,85	4.205.185.466,37	3.794.094.955,39	10,84
PT. BKK Jateng	2,03	6.950.000.000,00	7.205.559.942,72	(3,55)
Perumda Tirtayasa	98,14	45.229.223.045,89	41.611.911.508,98	8,69
Investasi Permanen Lainnya		305.200.000,00	305.200.000,00	-
PT PRPP Jateng	0,61	305.200.000,00	305.200.000,00	-
Jumlah		90.950.180.931,26	84.508.150.053,09	7,62



5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp90.644.980.931,26. Saldo penyertaan modal tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,65% jika dibandingkan dengan saldo penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp84.202.950.053,09.

Penambahan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal kepada :

- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00;
- b. Perumda Tirtayasa (PDAM) Kota Pekalongan sebesar Rp4.342.000.000,00;
- c. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
- d. BKK Pekalongan Utara sebesar Rp800.000.000,00;
- e. BPR BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00.

Jumlah total penyertaan modal pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7.742.000.000,00 namun nilai investasi permanen yang bertambah sebesar Rp6.442.030.878,18. Hal ini disebabkan karena metode pencatatan masing-masing BUMD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya atau sebesar nilai penyertaan modal, sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, nilai investasi pada PT. Bank Jateng, PT. BKK Jateng dihitung dengan metode biaya. Sedangkan BPR Bank Pekalongan, BPR BKK Pekalongan dan PT. Tirtayasa (PDAM) dicatat dengan metode ekuitas.

PT. BKK Jateng merupakan BUMD baru yang merupakan hasil merger BKK-BKK yang ada di kabupaten/kota se Jawa Tengah, salah satunya adalah BKK Utara Kota Pekalongan.

5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen lainnya merupakan investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. PRPP Jateng. Saldo investasi permanen lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp305.200.000,00. Saldo investasi permanen tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen lainnya tahun 2018 sebesar Rp305.200.000,00. Untuk penghitungan nilai investasi pada PT. PRPP Jateng dihitung dengan metode biaya.

Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat disajikan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD



Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ke tiga.

Penyajian Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 ini belum menggunakan kodifikasi sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, dikarenakan sedang dilakukan perubahan kebijakan akuntansi untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tersebut.

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2019 sebesar Rp2.452.572.023.682,23 meningkat sebesar Rp388.120.953.137,60 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar 2.064.451.070.544,63 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 78 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan

Jenis Aset Tetap	31-Des-19	Penambahan	Pengurangan	31-Des-18
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.311.204.062.019,37	280.095.072.971,00	17.309.231.617,00	1.048.418.220.665,37
Peralatan dan Mesin	455.160.610.773,76	83.964.367.948,47	12.124.277.293,95	383.320.520.119,24
Gedung & Bangunan	763.793.036.482,84	97.464.590.587,00	30.870.280.079,80	697.198.725.975,64
Jalan, Irigasi & Jaringan	829.609.216.352,69	130.479.881.259,17	23.922.055.720,17	723.051.390.813,69
Aset Tetap Lainnya	35.865.985.752,78	3.397.674.048,00	3.290.858.361,00	35.759.170.065,78
Konstruksi dlm Pengerjaan	16.583.297.199,00	16.583.297.199,00	2.381.713.000,00	2.381.713.000,00
Akumulasi Penyusutan	-959.644.184.898,21	148.354.628.633,19	14.390.890.348,07	-825.678.670.095,09
Nilai Buku	2.452.572.023.682,23			2.064.451.070.544,63

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.311.204.062.019,37 bertambah sebesar Rp. 262.785.841.354,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.048.418.220.665,37. Penambahan sebesar Rp. 262.785.841.354,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Realisasi Belanja Modal Tanah	Rp.	3.912.172.520,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp.	6.135.580.083,00
- Koreksi Saldo Awal	Rp.	3.755.472.909,00
- Inventarisasi	Rp.	258.472.624.651,00
- Transfer Masuk	Rp.	7.819.222.808,00
- Jumlah penambahan	Rp.	280.095.072.971,00

Pengurangan;

- Koreksi Saldo Awal	Rp.	8.814.398.809,00
- Penghapusan Barang Inventaris	Rp.	672.125.000,00
- BM tidak dikapitalisasi	Rp.	3.485.000,00
- Transfer Keluar	Rp.	7.819.222.808,00
- Jumlah pengurangan	Rp.	17.309.231.617,00

Penambahan dan pengurangan Tanah selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah dan Juga Inventarisasi.



Penambahan aset tetap tanah meliputi :

a. Reklasifikasi tambah aset tetap

Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 6.135.580.083,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap

OPD	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap
Jumlah	6.135.580.083,00
DINPARBUDPORA	81.600.000,00
DLH	132.500.000,00
BKD	4.224.640.000,00
DINKES	250.678.000,00
DINPERKIM	225.115.083,00
DINDIK	1.221.047.000,00
Jumlah	6.135.580.083,00

b. Koreksi Tambah Saldo Awal

Koreksi tambah saldo awal tahun 2019 pada OPD Kelurahan terdapat koreksi tambah jumlah aset tetap tanah sebesar Rp. 3.755.472.909 karena proses pensertifikatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Buaran Kradenan terdapat penambahan 2 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
2. Kelurahan Kuripan Kertoharjo terdapat penambahan 4 bidang tanah register dari proses pensertifikatan 3 bidang tanah menjadi 4 Sertifika1 Hak Pakai;
3. Kelurahan Noyontaansari terdapat penambahan 2 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
4. Kelurahan Kandang Panjang terdapat penambahan 12 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 5 bidang tanah menjadi 12 Sertifikat Hak Pakai;
5. Kelurahan Kalibaros terdapat penambahan 1 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 2 bidang tanah menjadi 1 Sertifikat Hak Pakai;
6. Kelurahan Setono terdapat penambahan 7 bidang tanah/ register dari proses pensertifikatan 14 bidang tanah menjadi 7 Sertifikat Hak Pakai;

c. Inventarisasi Tanah

Inventarisasi 1271 unit Tanah sebesar Rp. 258.472.624.651,00 pada OPD :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Tanah Untuk Jalan Desa se-Kota Pekalongan merupakan hasil inventarisasi jalan lingkungan dinas terkait sebanyak 1263 bidang;
2. DPU dan Penataan Ruang berupa Tanah Bangunan Gedung sebanyak 1 bidang;
3. Puskesmas Jenggot berupa Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu sebanyak 1 bidang;
4. Badan Keuangan Daerah berupa Tanah Bangunan Batik Plaza sebanyak 1 bidang;
5. Kelurahan Jenggot berupa Sawah Ditanami Padi sebanyak 5 bidang.

d. Transfer Masuk Tanah

Transfer masuk tanah sebesar Rp. 7.819.222.808,00 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5. 80 Transfer Masuk Tanah

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai	OPD Pemberi
DINKES	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	141.750.000	Kel. Kalibaros
DINKES	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	141.750.000	Kel. Kalibaros
DINKES	Tanah Utk Bangunan Jaringan Lain-lain	13.135.000	BKD
DINKES	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.643.757.000	Kel. Jenggot
DINPERKIM	Tanah Lapangan Bola Volly	34.800.000	DINPARBUDPORA
DLH	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolah Limbah	210.502.808	BKD
DLH	Sawah di Tanami Padi	42.000.000	Kel. Kalibaros
DLH	Sawah di Tanami Padi	183.750.000	Kel. Kalibaros
DLH	Sawah di Tanami Padi	409.500.000	Kel. Kalibaros
DLH	Sawah di Tanami Padi	101.250.000	Kel. Kalibaros
DPMPTSP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	173.452.000	BKD
DINPARBUDPORA	Tanah Bangunan Olah Raga	1.876.170.000	BKD
BKD	Tanah Kosong Lainnya	132.500.000	DLH
PANJANG WETAN	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (sekolah)	98.606.000	DINDIK
KURIPAN KERTOHARJO	Sawah Ditanami Padi	81.600.000	DINPARBUDPORA
KEC PKL BARAT	Tanah Bangunan Gedung	1.428.000.000	Kel. Tirta
KEC PKL BARAT	Tanah Bangunan Gedung	1.040.400.000	Kel. Tirta
MEDONO	Tanah Bangunan	66.300.000	Diperandagkop
Jumlah		7.819.222.808	

Pengurangan aset tetap tanah meliputi :

a. Koreksi Kurang Saldo awal

1. Pada OPD Dinas Sosial P2KB terdapat koreksi kurang atas aset tetap tanah berupa Makam Pahlawan sebesar Rp5.058.925.900,00 karena sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan OPD Kelurahan Klego koreksi kurang atas aset tetap tanah berupa Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama yaitu Asrama Kodim sebesar Rp326.400.000,00 karena sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 12 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Angkatan Darat.
2. Pada OPD kelurahan terdapat koreksi kurang jumlah aset tetap tanah sebesar Rp.3.755.472.909,00 karena adanya proses pensertifikatan, adapun rincian sebagai berikut :
 - Kelurahan Kalibaros terdapat pengurangan 1 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 2 bidang tanah menjadi 1 Sertifikat Hak Pakai;
 - Kelurahan Setono terdapat pengurangan 7 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 14 bidang tanah menjadi 7 Sertifikat Hak Pakai.
 - Kelurahan Buaran Kradenan terdapat pengurangan 1 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
 - Kelurahan Kuripan Kertoharjo terdapat pengurangan 3 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 3 bidang tanah menjadi 4 Sertifikat Hak Pakai;



- Kelurahan Noyontaan terdapat pengurangan 1 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 1 bidang tanah menjadi 2 Sertifikat Hak Pakai;
- Kelurahan Kandang Panjang terdapat pengurangan 5 bidang tanah/ register karena proses pensertifikatan 5 bidang tanah menjadi 12 Sertifikat Hak Pakai;

b. Penghapusan Aset Tetap (Tanah)

Penghapusan aset tetap tanah sebesar Rp. 672.125.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Penghapusan Aset Tetap Tanah

OPD/UPB	Jumlah Total	Hibah	
		050/1915-1916	Asrama Kodim
		23-Sep-19	
Jumlah Total	672.125.000,00	345.725.000,00	326.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	345.725.000,00	345.725.000,00	
Kelurahan Klego	326.400.000,00		326.400.000,00

c. Belanja Modal tidak dikapitalisasi

Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp 3.485.000,00 terjadi pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa DED Pengadaan Tanah Sarana Umum Sanitasi dan Air Bersih.

d. Transfer Keluar Tanah

Transfer keluar tanah sebesar Rp. 7.819.222.808,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Transfer keluar Tanah

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai	OPD Pemberi
Kel. Kalibaros	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	141.750.000	DINKES
Kel. Kalibaros	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	141.750.000	DINKES
BKD	Tanah Utk Bangunan Jaringan Lain-lain	13.135.000	DINKES
Kel. Jenggot	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.643.757.000	DINKES
DINPARBUDPORA	Tanah Lapangan Bola Volly	34.800.000	DINPERKIM
BKD	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolah Limbah	210.502.808	DLH
Kel. Kalibaros	Sawah di Tanami Padi	42.000.000	DLH
Kel. Kalibaros	Sawah di Tanami Padi	183.750.000	DLH
Kel. Kalibaros	Sawah di Tanami Padi	409.500.000	DLH
Kel. Kalibaros	Sawah di Tanami Padi	101.250.000	DLH
BKD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	173.452.000	DPMPSTP
BKD	Tanah Bangunan Olah Raga	1.876.170.000	DINPARBUDPORA
DLH	Tanah Kosong Lainnya	132.500.000	BKD
DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (sekolah)	98.606.000	PANJANG WETAN
DINPARBUDPORA	Sawah Ditanami Padi	81.600.000	KURIPAN KERTO HARJO
Kel. Tirta	Tanah Bangunan Gedung	1.428.000.000	KEC PKL BARAT
Kel. Tirta	Tanah Bangunan Gedung	1.040.400.000	KEC PKL BARAT
Diperandagkop	Tanah Bangunan	66.300.000	MEDONO
Jumlah		7.819.222.808	



Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Di dalam aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 3054 bidang tanah, yang tercatat sebagai aset tetap tanah sebanyak 3057 bidang sementara 3 (tiga) bidang dicatat pada aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga :

Tabel 5. 83 Bidang Tanah yang Dicatat pada Aset Lainnya sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	No.Sertifikat	Luas (m ²)	Hak Atas Tanah	Alamat	Penggunaan	Pihak Ketiga
1	AW 484191	3.900	Hak Pengelolaan	Jl. Mangga	Mall Banjarsari	PT. DISC Semarang
2	AB 972114	10.775	Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan)	Jl. Dr. Sutomo	Ex. Terminal Lama	PT. Prima Lestari Investindo
3	AE 193880	1.260	Hak Pakai	Jl.HOS Cokroaminoto	Ruko Grogolan	CV. Putra Perdana

2. Adapun tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1096 bidang yang belum bersertifikat sebanyak 1958 bidang. Dari 1096 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 1066 bidang adapun sisanya sejumlah 30 bidang tanah belum dapat diidentifikasi.
3. Didalam aset tetap tanah Pemerintah Kota Pekalongan terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Aset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus Tanah Negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar Surat Penguasaan tanah tersebut Pemerintah kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagai upaya pengamanan terhadap aset Pemerintah.
Adapun tanah negara yang di sewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ada pada **Lampiran 7**.
4. Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/5938 tanggal 9 Maret 2001 tentang Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Satuan Kerja Instansi Vertikal Departemen yang Dialihkan kepada Kota Pekalongan serta dokumen lain yang sah terdapat beberapa bidang tanah yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 84 Bidang Tanah yang Dialihkan

No	Instansi	Jenis Barang	Alamat	Luas		Sertifikat HP No	Penggunaan Sekarang
				Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)		
1.	Cabang Dinas Tenaga Kerja	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	392	162	HP No 44	Kantor Diskominfo
2.	Cabang Dinas Sosial	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	630	630	HP No 41	Kantor Satpol PP
3.	Cabang Dinas Sosial	Tanah Gedung Kantor	Kel. Panjang Wetan	840	256	HP No 33	
4.	Cabang Dinas Perindustrian	Tanah Gedung Kantor	Jl. Majapahit No 10 Podosugih	1,000	200	HP No 30	Kantor BKPPD

Atas peralihan tersebut masih terdapat dokumen yang tidak lengkap sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/ 2418 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan terkait kelengkapan dokumentasi, administrasi dan pelepasan hak atas tanahnya dimana sertifikat asli HP No. 30 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKPPD Kota Pekalongan belum diserahkan namun demikian hasil terakhir koordinasi ke BPKAD provinsi Jawa Tengah bahwa disana juga tidak menyimpan sertifikat asli tersebut.

5. Berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Maret 1990 tentang Serah Terima Fisik, Material dan Finansial Bagi 16 (Enam Belas) Desa/ Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, bahwa terdapat penyerahan aset dari Kabupaten Pekalongan kepada Kota Pekalongan, namun demikian sampai dengan saat ini belum adanya kejelasan hak atas tanah terhadap tanah Pasar Banyurip yang telah tercatat di Pemerintah Kota Pekalongan karena dobel catat dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. 85 Aset yang diserahkan dari Kabupaten Pekalongan

No	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (m ²)	Letak / Alamat	Penggunaan	Asal Usul
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Tanah Bangunan Pasar	6,270	Jl.Raya Banyurip Kel.Banyurip Alit	Pasar Banyu Urip	Hibah

6. Sebagian tanah eks bengkok di beberapa kelurahan telah berubah fungsinya, adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagaimana terdapat pada **Lampiran 8**.
7. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, adapun tanah dan bangunan gedung yang sekarang digunakan oleh Sekretariat Tagana berlokasi di Jl. Rajawali dengan sertifikat HP No. 71 An. Pemerintah Kota Pekalongan digugat oleh Sdr. Oey Joe Po yang juga memiliki sertifikat HM No. 533 dan HM No. 534 dan merupakan bidang tanah yang sama (tumpang tindih/ overlap), rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 86 Tanah yang Masih Sengketa dengan pihak Ketiga

SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	No. Reg	Luas	Tahun	No. Sertifikat	Alamat	Nilai (Rp)
Dinsos P2KB	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11 .02.03	1	357	1950	BO 709737	Jl. Rajawali	205.500.000,00

8. Terdapat 13 (tiga belas) bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang dihuni oleh warga, dengan rincian pada **Lampiran 9**.
Warga yang telah menghuni tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan tersebut telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan atas permohonan tersebut telah disetujui melalui DPRD Kota Pekalongan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29/DPRD/XII/2013 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, namun demikian atas rekomendasi DPRD Kota Pekalongan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena adanya kendala pada teknis pelaksanaan lelang dan pembiayaan karena sebagian besar warga merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
9. TA 2019 terdapat penambahan nilai atas tanah untuk *interchange* jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 10**.
10. TA 2019 terdapat penambahan nilai untuk pembangunan tanggul penahan rob pada Kelurahan Bandengan, adapun rincian tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 11**.
11. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa bidang tanah eks bengkok yang terkena kegiatan *interchange* jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 12**.
12. Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), adapun rinciannya tersaji pada **Lampiran 13**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 455.160.610.773,76 meningkat sebesar Rp 71.840.090.654,52 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp 383.320.520.119,24

Peningkatan tersebut sebesar Rp71.840.090.654,52 berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan :

- Koreksi Saldo awal	Rp.	,02
- Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	35.522.056.921,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa	Rp.	149.197.500,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp.	41.265.635.914,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp.	2.501.320.764,00
- Inventarisasi	Rp.	3.300.000,00
- Hutang Pada Pihak Ke tiga	Rp.	8.854.450,00
- Transfer Masuk	Rp.	4.514.002.399,00
- Jumlah penambahan	Rp.	83.955.513.498,47



Pengurangan :

- Koreksi Kurang Saldo Awal	Rp.	217.500,01
- Penghapusan Barang Inventaris	Rp.	4.344.449.436,49
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp.	1.588.656.150,00
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	Rp.	1.676.951.808,00
- Transfer Keluar	Rp.	4.514.002.399,45
- Jumlah pengurangan	Rp.	12.124.277.293,95

Penambahan Peralatan selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Koreksi saldo Awal, Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa, hibah dan Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan Mesin.

a. Koreksi Saldo Awal

Koreksi Saldo Awal dilakukan karena adanya koreksi aset tetap peralatan mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp, 0,02 yang terjadi pada pada OPD Sekretariat DPRD berupa pembulatan sistem aplikasi yang tidak sama:

Tabel 5. 87 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan Mesin

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Sekretariat DPRD	0,02	0,02	Lemari Sorok th 2014 sebanyak 1 buah @0,01 Hard Disk th 2014 sebanyak 1 buah @0,01
Jumlah	0,02	0,02	

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa merupakan pengakuan atas aset tetap yang bersumber dari belanja APBD Kota Pekalongan selain dari Belanja Modal yang menghasilkan Aset tetap.

Yang pertama berupa kapitalisasi BOP (Biaya Operasional) atau biaya-biaya yang timbul dalam proses untuk perolehan Aset Tetap yang dapat diatribusi langsung terhadap aset tersebut dan yang kedua merupakan pembelian langsung yang berwujud aset tetap.

Berikut daftar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp 149.197.500,00 yang berasal dari Belanja barang jasa.

Tabel 5. 88 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	3	4.200.000,00	Portable Water Pump 2 UNIT Rp. 3.700.000,00, Dispenser 1UNIT Rp. 500.000,00
Dinas Perhubungan	2	13.871.000,00	PC PARKIR Rp. 10.736.000, PRINTER PARKIR Rp. 3.135.000,00
Kecamatan Pekalongan Barat	1	1.500.000,00	Rak buku Rp. 1.500.000
DPUPR	3	91.326.500,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir, Belanja Pemeliharaan Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase Perbaikan Pompa Rumah Pabean Selatan Rp21.070.500, Sibulanan Rp24.777.000, Klego Rp20.773.000, Stationary Water Pump Rp. 24.706.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Rumah Pompa Krapyak
SDN Degayu 02	1	800.000,00	Dispencer Miyako Rp. 800.000,00
SDN Bendan 08	1	6.800.000,00	Laptop Lenovo Rp. 6.800.000,00



OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
SDN Landungsari 4	1	625.000,00	Kerangka manusia / Torso Rp625.000,00
SDN Kebulen	1	1.500.000,00	spiker aktif Rp. 1.500.000,00
SMPN 16	4	4.950.000,00	"External Hardisk Rp850.000,00 Printer Rp2.500.000 Boneka Manekin Anak Rp650.000,00 Boneka Manekin Dewasa Rp950.000,00
SMPN 7	3	3.025.000,00	"Lemari Kaca 2Unit @Rp. 1.237.500,00 Peralatan jaringan lain-lain Rp. 550.000,00
SDN Karangmalang	1	950.000,00	Papan Pengumuman
SDN Gamer 02	2	4.500.000,00	"Gendang Rp. 750.000,00 Keyboard Rp. 3.750.000,00
RSUD	12	15.150.000,00	P.C unit Acer / Aspire Kabid Ynmed, Keperawatan, Aksel 7, Cathlab, rehab medik, depo truntum, CSSD, Farmasi, VK Ponek, Kulit Rp. 1.250.000,00 Unintemuptible Power Supply (UPS) Rp. 650.000,00 "echo cardiograph Rp850.000,00 sterilisator Rp1.950.000,00 Extraction Filter Rp1.950.000,00 alat kedokteran umum lain lain Rp800.000,00 operating lamp Rp650.000,00 operating table Rp1.950.000,00 alat kedokteran Bedah Lain-Lain Rp1.050.000,00 anesthesia aparature Rp1.950.000,00 ventilator Rp1.050.000,00 patient monitor Rp1.050.000,00
Jumlah	35	149.197.500,00	

c. Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah merupakan pemberian dari Pihak diluar Pemda kepada pemda secara sah. Daftar Hibah Peralatan Mesin yang di terima oleh Pemda Kota Pekalongan selama periode 2018 sebesar Rp 41.265.635.914,00 (tersaji pada **Lampiran 14**).

d. Reklasifikasi tambah aset tetap

Berikut penjelasan penambahan dari Reklasifikasi Tambah Peralatan Mesin sebesar Rp 2.501.320.764,00, hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara Rekening Belanja Modal dengan Realisasi Fisik belanja. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap akun rekening tersebut.

Tabel 5. 89 Rekalisifikasi Tambah Peralatan Mesin 2019

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Ekstra komtabel
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		
DINPARBUDPORA	11.600.000,00	11.600.000,00		
DPU	2.085.698.000,00	2.085.698.000,00		
DISHUB	132.616.000,00		132.616.000,00	
DKP	1.757.000,00			1.757.000,00
DLH	9.694.400,00	9.694.400,00		
Kel. Buaran Kradenan	610.000,00		610.000,00	
Kel. Gamer	15.600.000,00	15.600.000,00		
DINPERKIM	242.395.364,00	242.395.364,00		



SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Ekstra komtabel
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		
SDN Bendan 01	600.000,00		600.000,00	
SMPN 14	750.000,00		750.000,00	
Jumlah	2.501.320.764,00	2.364.987.764,00	134.576.000,00	1.757.000,00

- e. Inventarisasi tambah aset tetap
 Berikut penjelasan penambahan dari Inventarisasi Aset Tetap sebesar Rp 3.300.000,00. hal ini terjadi dikarenakan adanya barang Inventaris yang belum tercatat di Buku inventaris SKPD yang perolehannya sebelum periode tahun berjalan. Yang melakukan pencatatan inventarisasi aset tetap pada OPD Sekretariat Dewan/DPRD sebesar Rp3.300.000,00 berupa 2 buah Hard Disk @ 1.650.000,00.
- f. Hutang pada Pihak ke tiga
 Hutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 8.854.450,00 pada OPD RSUD Bendan. Hal ini dikarenakan adanya kurang bayar kepada pihak ketiga yang sudah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah berupa 2 buah mobile humidifier seharga @ 4.427.225,00.
- g. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin
 Transfer masuk peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.514.002.399,45 dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 15**.

Pengurangan Peralatan mesin

- a. Koreksi Kurang saldo awal
 Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp. 217.500,00 terjadi pada OPD Bag.Perengkapan sebesar Rp. 217.500,00 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 buah Kompor gas dikoreksi karena merupakan double catat di aset tetap dan non aset.
- b. Penghapusan Barang Inventaris
 Daftar Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan mesin di tahun 2019 sebesar Rp 4.344.449.436,49 yang terdiri dari penghapusan karena Hilang/dimusnahkan sebesar Rp. 8.019.000,00, dan di Lelang sebesar Rp. 4.336.430.436,49 (tersaji **Lampiran 16**).
- c. Reklasifikasi Peralatan mesin
 Reklasifikasi kurang atas peralatan mesin sebesar Rp 1.588.656.150,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Reklasifikasi Kurang Peralatan Mesin Tahun 2019

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke			Reklas Tambah dari Aset Lainnya
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
DISHUB	844.124.500,00	844.124.500,00			
DPMPSTP	69.474.350,00		69.474.350,00		
DINKES	24.190.000,00		24.190.000,00		
BKPPD	38.030.000,00	38.030.000,00			
DINPERPAN	18.325.000,00	18.325.000,00			



SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke			Reklas Tambah dari Aset Lainnya
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
DISKOMINFO	364.513.900,00		364.513.900,00		
RSUD Bendan	62.231.500,00	48.184.500,00		605.000,00	13.442.000,00
DINDIK	165.356.900,00	105.739.900,00		59.617.000,00	
SDN Keputran 06	670.000,00			670.000,00	
SDN Bandengan 01	240.000,00			240.000,00	
SMPN 16	1.500.000,00			1.500.000,00	
Jumlah	1.588.656.150,00	1.054.403.900,00	458.178.250,00	62.632.000,00	13.442.000,00

d. Belanja Modal Tidak dikapitalisasi

Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp 1.676.951.808,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. Belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp 624.342.773,00 dan ektrakomtabel sebesar Rp 433.399.755,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp 619.209.280,00, (tersaji pada **Lampiran 17**).

Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 97.054.802.969,02 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 358.105.807.804,74 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2018			(282.573.666.345,22)
Biaya penyusutan	(41.451.494.478,02)		(41.451.494.478,02)
Koreksi saldo awal		130.500,00	(130.500,00)
Hibah	(38.340.511.300,00)		(38.340.511.300,00)
Penghapusan		4.258.780.818,49	(4.258.780.818,49)
Transfer antar SKPD	(2.115.127.188,79)	2.116.080.188,80	(953.000,01)
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2019	(81.907.132.966,81)	6.374.991.507,29	(75.532.141.459,52)

e. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

Transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.514.002.399,45 dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 18**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 763.793.036.482,84 mengalami peningkatan sebesar Rp66.594.310.507,20 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp697.198.725.975,64.

Peningkatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.594.310.507,20 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Koreksi Saldo Awal Rp. 0,00
- Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Rp. 70.163.070.715,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa Rp. 1.042.424.400,00



- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp.	0,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp.	4.090.760.072,00
- Inventarisasi aset	Rp.	20.502.156.000,00
- Hutang pada Pihak Ke Tiga	Rp.	0,00
- Transfer Masuk	Rp.	1.666.179.400,00
- Jumlah penambahan	Rp.	97.464.590.587,00

Pengurangan :

- Koreksi Saldo Awal	Rp.	444.069.750,00
- Penghapusan barang Inventaris	Rp.	5.974.138.143,80
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp.	21.414.878.026,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	Rp.	1.371.014.760,00
- Transfer Keluar	Rp.	1.666.179.400,00
- Jumlah pengurangan	Rp.	30.870.280.079,80

Penjelasan lanjutan atas mutasi tambah aset tetap gedung bangunan selain dari belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 1.042.424.400,00 terjadi pada 4 (empat) OPD dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Sekretariat Dewan/DPRD		584.087.000	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Rp. 194.535.000 Belanja pemeliharaan rumah dinas/jabatan Rp. 389.552.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		129.532.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kapitalisasi Gedung Batik TV Rp. 129.532.000
DPUPR		178.353.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya / Berkala Gedung Kantor, Penataan Halaman Parkir Kantor DPUPR Rp.5.222.005 Rp178.353.000
RSUD		150.452.400,00	Bangunan rumah Sakit umum, bangunan garasi/ pool, bangunan asrama
Jumlah	0,00	1.042.424.400,00	

b. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung

Tabel 5. 93 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap		
		Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP
DISHUB	844.124.500,00	844.124.500,00		
DINDAGKOP	2.182.936.000,00			2.182.936.000,00
DLH	84.214.223,00		84.214.223,00	
BKPPD	236.807.000,00	38.030.000,00		198.777.000,00
Kelurahan Noyontaansari	28.857.000,00		28.857.000,00	
DINPERKIM	525.941.949,00		525.941.949,00	
RSUD Bendan	48.184.500,00	48.184.500,00		
DINDIK	105.739.900,00	105.739.900,00		
DINPERPA	18.325.000,00	18.325.000,00		
Jumlah	4.075.130.072,00	1.054.403.900,00	639.013.172,00	2.381.713.000,00



c. Inventarisasi

Pada tahun 2019 terjadi inventarisasi bangunan gedung pada dua OPD sebesar Rp. 20.502.156.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. 17.384.960.000,00 berupa Komplek Batik Plaza (Jl. Merdeka).
2. BPBD sebesar Rp. 3.117.196.000,00 berupa Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar Semi Permanen.

d. Transfer Masuk Gedung dan Bangunan

Transfer masuk gedung dan bangunan sebesar Rp 1.666.179.400,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Transfer Masuk Gedung dan Bangunan

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINSOSP2KB	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	13.500.000,00	540.000,00	12.960.000,00	DLH
DISKOMINFO	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	28.297.000,00	4.527.520,00	23.769.480,00	DLH
DPMPSTP	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1.190.094.700,00	461.158.771,00	728.935.929,00	BKD
DINPARBUDPORA	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	75.601.000,00	9.072.120,00	66.528.880,00	BKD
DINPARBUDPORA	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	56.600.000,00	5.660.000,00	50.940.000,00	BKD
DINPARBUDPORA	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	49.800.000,00	6.972.000,00	42.828.000,00	BKD
PANJANG WETAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	95.780.000,00		95.780.000,00	Kec. Pkl. Utara
BANDENGAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96.250.000,00		96.250.000,00	Kec. Pkl. Utara
MEDONO	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	60.256.700,00	49.410.494,00	10.846.206,00	Disperand agkop
JUMLAH		1.666.179.400,00	537.340.905,00	1.128.838.495,00	

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang aset tetap Gedung Bangunan

a. Koreksi saldo Awal

Aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan terjadi kesalahan pencatatan sebesar Rp444.069.750,00 berupa 8 unit Traffic Light Rp49.945.000,00 di Ponolawen, Rp111.916.250,00 di Tirto, Rp87.106.250 di Alun-alun, Rp58.715.500,00 di sorogenen dan polsek timur, Rp36.016.250,00 di Posis, Rp70.597.500,00 di Grogolan.

b. Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 5.974.138.143,80 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

OPD/ UPB	Jumlah	Hibah	Di Lelang		
		No. 030/604 25-Mar-19	No. 032/1175 25-Nop-19	No. 032/806 24-Jun-19	No. 030/1196 17-Des-19
Sekretariat DPRD/DPRD	18.328.000,00		18.328.000,00		
Bagian Perekonomian	99.250.000,00	99.250.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	172.162.000,00			172.162.000,00	
Dinas Perhubungan	440.353.970,00				440.353.970,00
Puskesmas Bendan	219.992.271,13			219.992.271,13	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



OPD/ UPB	Jumlah	Hibah	Di Lelang		
		No. 030/604 25-Mar-19	No. 032/1175 25-Nop-19	No. 032/806 24-Jun-19	No. 030/1196 17-Des-19
Pustu Kebulen	70.000.000,00			70.000.000,00	
Puskesmas Pekalongan Selatan	929.354.431,26			929.354.431,26	
Pustu Kuripan Lor 2	40.000.000,00			40.000.000,00	
RSUD BENDAN	2.325.867.805,00		93.603.100,00	2.232.264.705,00	
SDN Dukuh 01	537.363.361,00			537.363.361,00	
SMP N 13	491.185,41		491.185,41		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	20.466.000,00			20.466.000,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.680.000,00			35.680.000,00	
Dinas Pertanian dan Pangan	112.395.962,00		112.395.962,00		
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	212.470.000,00		212.470.000,00		
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	581.608.951		428.023.626,50	153.585.324,50	
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	71.975.942,00		71.975.942,00		
Kecamatan Pekalongan Utara	26.121.565,00			26.121.565,00	
Kelurahan Kd. Panjang	60.256.700,00			60.256.700,00	
	5.974.138.143,80	99.250.000,00	937.287.815,91	4.497.246.357,89	440.353.970,00

- c. Reklasifikasi Kurang Barang Inventaris
 Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan sebesar Rp 21.414.878.026,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan

SKPD	Jumlah	PenguranganReklasifikasi Aset Tetap ke			Reklas Tambah dari Aset Lainnya
		Tanah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP	
DPU	628.618.000,00		628.618.000,00		
DINPARBUDPORA	334.556.000,00	81.600.000,00	252.956.000,00		
DINPERINAKER	650.567.000,00		650.567.000,00		
DINPERPAN	203.050.000,00		203.050.000,00		
DINDAGKOP	6.185.708.000,00			6.185.708.000,00	
DLH	1.319.900.000,00	132.500.000,00	1.187.400.000,00		
Kec. Pekalongan Timur	711.017.199,00			711.017.199,00	
BKD	147.147.000,00				147.147.000,00
DINKES	285.678.000,00	250.678.000,00			35.000.000,00
DINPERKIM	2.224.589.827,00	200.752.050,00	2.023.837.777,00		
RSUD Bendan	7.503.000.000,00			7.503.000.000,00	
DINDIK	1.221.047.000,00	1.221.047.000,00			
Jumlah	21.414.878.026,00	1.886.577.050,00	4.946.428.777,00	14.399.725.199,00	182.147.000,00

- d. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi
 Belanja Modal yang tidak dikapitalisas sebesar Rp. 1.371.014.760,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5. 97 Belanja modal Yang tidak Dikapitalisasi

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
DINPARBUDPORA	139.159.000,00			139.159.000,00	Pengecatan Lap. Bulutangkis GOR Medono dan DED Kolam Renang Tirta Sari
Kel. Banyurip	10.030.000,00			10.030.000,00	Rehab tempat parkir tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Kel. Soko Duwet	13.850.000,00			13.850.000,00	Pembuatan Saluran U20 Gedung PAUD (TERCATAT BERSAMAAN DENGAN GEDUNG KEL) tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Kel. Klego	10.000.000,00			10.000.000,00	Pengadaan auning tempat parkir motor tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Kel. Bandengan	2.940.000,00			2.940.000,00	Pemeliharaan jaringan RW. 6 dan RW 4 tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
DLH	400.000,00		400.000,00		Pengadaan habis pakai bakteri pengelola limbah
DISKOMINFO	21.300.000,00			21.300.000,00	BM Tidak dikapitalisasi karena belum ada bentuk fisiknya Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gedung RKB Kegiatan Penyelenggaraan LPP RKB
Kec. Pekalongan Timur	110.916.550,00			110.916.550,00	Perencanaan Penataan kampung cantik Kelurahan Noyontaansari, DE Bangunan gedung kantor permanen Kelurahan Poncol, dan DE Bangunan gedung kantor permanen Kelurahan Gamer
DPUPR	195.535.500,00	67.400.000,00	128.135.500,00		Pengadaan habis pakai 10,029 buah tanaman hias dan pengadaan 44 buah tanaman hias tidak memenuhi syarat aset tetap
DINPERKIM	61.981.710,00			61.981.710,00	Kegiatan kurasan lumpur di Jl. Sengkuyung Gg. Makam Kel. Setono dan Larangan 8 Kel. Poncol
DINDIK	779.552.000,00			779.552.000,00	Rehab 4 PAUD swasta dan 2 TK swasta, serta rehab SMPN 05 tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Bag. Perlengkapan dan Rumah Tangga	25.350.000,00			25.350.000,00	Jasa Perencanaan Rehabilitasi Dekorasi Ruang Rapat Kalijaga dan Ruang Kerja Sekda, serta Jasa Perencanaan Teknis Rehab Kolam Ikan Setda
Jumlah	1.371.014.760,00	67.400.000,00	128.535.500,00	1.175.079.260,00	



e. Transfer Keluar Gedung dan Bangunan

Transfer keluar gedung dan bangunan sebesar Rp 1.666.179.400,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Transfer Keluar Gedung dan Bangunan

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DLH	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	13.500.000,00	540.000,00	12.960.000,00	DINSOSP 2KB
DLH	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	28.297.000,00	4.527.520,00	23.769.480,00	DISKOMIN FO
BKD	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1.190.094.700,00	461.158.771,00	728.935.929,00	DPMPSTSP
BKD	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	75.601.000,00	9.072.120,00	66.528.880,00	DINPARB UDPOA
BKD	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	56.600.000,00	5.660.000,00	50.940.000,00	DINPARB UDPOA
BKD	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	49.800.000,00	6.972.000,00	42.828.000,00	DINPARB UDPOA
Kec. Pkl. Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	95.780.000,00		95.780.000,00	PANJANG WETAN
Kec. Pkl. Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96.250.000,00		96.250.000,00	BANDENGAN
Disperandagkop	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	60.256.700,00	49.410.494,00	10.846.206,00	MEDONO
JUMLAH		1.666.179.400,00	537.340.905,00	1.128.838.495,00	

Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 563.192.630.919,21 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 200.600.405.563,63 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2018			(188.624.666.616,16)
Biaya penyusutan	(14.746.206.839,74)		(14.747.983.357,74)
Koreksi saldo awal		396.655.052,09	396.655.052,09
Penghapusan		2.367.889.358,19	2.367.889.358,19
Reklas Aset Tetap		18.108.187.115,00	18.108.187.115,00
Transfer antar SKPD	(831.037.449,00)	831.037.449,00	-
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2019	(15.577.244.288,74)	3.603.281.859,27	(200.600.405.563,63)

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp829.609.216.352,69 meningkat sebesar Rp106.557.825.539,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp 723.051.390.813,69.

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp Rp106.557.825.539,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

- Koreksi Saldo Awal Rp. 4.756.258.469,17
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 68.876.027.946,00



- Kapitalisasi Belanja pemeliharaan	Rp.	8.376.855.500,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	Rp.	1.561.254.297,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp.	6.030.581.116,00
- Inventarisasi	Rp.	27.651.001.443,00
- Transfer Masuk	Rp.	13.227.902.488,00
- Jumlah penambahan	Rp.	130.479.881.259,17

Pengurangan :

- Koreksi Saldo Awal	Rp.	4.756.258.469,17
- Penghapusan barang Inventaris	Rp.	206.388.000,00
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp.	5.477.465.058,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitaliasi	Rp.	254.041.705,00
- Transfer Keluar	Rp.	13.227.902.488,00
- Jumlah pengurangan	Rp.	23.922.055.720,17

Pada tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan Inventarisasi Jalan Lingkungan atas aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa jalan lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan 11 (sebelas) kelurahan terdapat perubahan jumlah unit/ barang yaitu yang semula 686 unit berkurang menjadi 551 unit karena adanya penyesuaian dengan hasil inventarisasi tersebut, adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 100 Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	Jumlah barang/ unit jalan lingkungan hasil penyesuaian inventarisasi	
		Saldo 2018	2019
1	Kelurahan Bandengan	30	24
2	Kelurahan Padukuhankraton	19	16
3	Kelurahan Bendan Kergon	58	32
4	Kelurahan Yosorejo	6	4
5	Kelurahan Sapuro	32	20
6	Kelurahan Kandang Panjang	5	4
7	Kelurahan Pringrejo	52	38
8	Kelurahan Krapyak	12	11
9	DINPERKIM	400	363
10	Kelurahan Banyurip	3	2
11	Kelurahan Soko Duwet	65	35
12	Kel. Medono	4	2
	Jumlah	686	551

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi Tambah dan kurang atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi selain dari belanja modal sebagai berikut;

Penambahan

a. Koreksi Saldo Awal

Koreksi tambah saldo awal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.756.258.469,17 dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Pada OPD Dinperkim terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 2.639.616.648,00 sebanyak 31 unit/ register.
2. Pada OPD Kelurahan terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 2.116.641.821,17, adapun rincian sebagai berikut :
 - Kelurahan Bandengan terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 6 unit/ register;
 - Kelurahan Padukuhankraton terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 3 unit/ register;
 - Kelurahan Bendan Kergon terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 13 unit/ register;
 - Kelurahan Kuripan Yosorejo terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 2 unit/ register;
 - Kelurahan Sapurokebulen terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 4 unit/ register;
 - Kelurahan Kandang panjang terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Pringrejo terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 10 unit/ register;
 - Kelurahan Krapyak terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Banyurip terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Sokoduwet terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 19 unit/ register;
 - Kelurahan Medono terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 2 unit/ register.

Adapun rincian koreksi tambah saldo awal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dalam **Lampiran 19**.

b. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 8.376.855.500,00 terjadi pada 2 (dua) OPD dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
DPUPR		8.326.997.000	Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir, Penyambungan Daya Listrik Pompa Air Kel. Panjang Baru RT. 01 RW. 02 Rp4.503.716, Kel. Kandang Panjang RT. 06 R Rp4.503.714 Kel. Tirta RT. 02 RW. 03 Rp4.503.714 Jl. Kusuma Bangsa Kel. Panjang Baru RW. 05 Rp4.503.714 Kel. Pasirkratonkramat RT. 01 RW. 08 Rp4.503.714 Kel. Bandengan RW. 08 Belanja listrik 5220303 Rp4.503.714 Kel. Panjang Wetan Gg. 8 Rp4.503.714 Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota / Berkala Penerangan Jalan Umum - Pekerjaan Pemasangan Instalasi PJU Kertoharjo RW 10 (14 Tiang PJU) Rp90.143.000 Slamaran - Kandang Panjang Rp90.115.000 Tirta-Medono-Panjang Baru Rp48.703.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
			Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong, Pemeliharaan Tanggul Tirta - Meduri RW.3 Rp98.329.000
			Jl. Samudra Rp282.814.000
			Belakang Makam Syekh Abdurahman Sanjaya Rp68.810.000
			Krapyak Rp60.287.000
			Jalan Samudra Rp86.493.000
			Tirta-Meduri Rp100.899.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer, Belanja Pemeliharaan Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase Pompa Kramatsari - Jalan Teuku Umar Rp44.942.000
			Gg.8 Kel. Podosugih Rp18.815.000
			Panjang Wetan Rp166.248.000
			Jl. Labuhan Degayu Rp30.312.000
			Jalan Pantaisari dan Jalan Cemara Rp58.597.000
			Sibulanan Rp15.229.000
			Kuripan Lor Rp48.910.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir, Belanja Pemeliharaan Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase Pemasang Pintu Polimer Jl. Seruni Rp38.250.000
			Asem Binatur dari Mataram-Pintu Air Jalan Slamet Rp195.964.000
			Baros (Setono-Krapyak) Rp88.164.000
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan Akses ke Mataram Rp148.955.000
			Jenggot Rp434.100.000
			Jl. Seruni ke Utara Rp199.597.000
			Jl. Manunggal Rp68.748.000
			Rehabilitasi / Belanja Pemeliharaan Bahu Jalan/Trotoir, Rehab Trotoar Jalan Depan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rp191.021.000
			Jalan Depan Makam Pahlawan Rp196.731.000
			Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota / Berkala Makam, Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Makam Bong Cino Rp55.491.000
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jl. Otto Iskandar Dinata Rp196.413.000
			Jl. Selat Lombok Rp148.231.000
			Jl. Ampera Rp98.180.000
			Jl. Darkat Rp196.000.000
			Jalan Urip Sumoharjo Rp675.625.000
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Saluran Pematius Jalan, Rehab Saluran Pematius Jalan Barito Rp379.779.000
			Jalan Kenanga Rp146.019.000
			Jalan Jetayu Rp97.984.000
			Jalan A. Yani Rp98.452.000
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Saluran Pematius Jalan, Rehab Saluran Pematius Jalan Sabrawi Rp194.211.000
			Jalan Akses ke Tol Rp128.418.000
			Jalan Jlamprang Rp122.265.000
			Jalan Kusuma Bangsa Rp98.085.000
			Jalan Majapahit Rp194.637.000
			Rehabilitasi / Belanja Pemeliharaan Bahu Jalan/Trotoir, Rehab Trotoar Jalan Dr. Cipto Rp608.613.000
			Jalan Veteran Rp194.979.000
			Rehabilitasi / Belanja Pemeliharaan Bahu Jalan/Trotoir, Rehab Trotoar Jalan Kemakmuran Rp144.096.000



OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
			Jalan WR. Supratman Rp175.267.000 Jalan Tentara Pelajar Kandang Panjang Rp146.196.000 Jalan Tentara Pelajar Sisi Timur Rp94.664.000 Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota / Berkala Makam, Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Makam Kerkop Rp24.740.000 Jalan Paving Makam Kerkop Rp24.690.000 Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong, Pemeliharaan Tanggul Pengaman Pantai Bandengan - Kandang Panjang Rp469.900.000 Tambal Sulam Geutube/Sandbag Rp192.257.000 Tambal Sulam Tanggul Pengaman Pantai Rp195.734.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Primer, Belanja Pemeliharaan Sungai / Jaringan Air / Irigasi / Drainase Jalan AMD Kramatsari Rp63.294.000 Jalan Slamet Rp196.494.000 Tegalrejo Rp63.581.000
DINARPUS		49.858.500	Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas 300 KVA (Biaya up grade daya listrik gedung dinarpus dari 22.000-41.500 VA) Rp. 49.858.500
Jumlah	0,00	8.376.855.500,00	

- c. Hibah dari Pihak Ketiga
 Hibah untuk Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp 1.561.254.297,00 pada OPD DPUPR berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain / PJU 25 Unit sebesar Rp. 449.917.297,00 dan Saluran Drainase 1 unit sebesar Rp. 1.111.337.000,00.
- d. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
 Reklasifikasi Tambah jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.6.030.581.116,00 dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap		
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
DINPARBUDPORA	252.956.000,00		252.956.000,00	
DPU	628.618.000,00		628.618.000,00	
DINPERINAHER	650.567.000,00		650.567.000,00	
DINPERPAN	203.050.000,00		203.050.000,00	
DPMPSTP	69.474.350,00	69.474.350,00		
DLH	1.187.400.000,00		1.187.400.000,00	
DLH	500.974.089,00			500.974.089,00
DISKOMINFO	364.513.900,00	364.513.900,00		
Kelurahan Pringrejo	125.000.000,00			125.000.000,00
DINKES	24.190.000,00	24.190.000,00		
DINPERKIM	2.023.837.777,00		2.023.837.777,00	
Jumlah	6.030.581.116,00	458.178.250,00	4.946.428.777,00	625.974.089,00

- e. Inventarisasi
 Pada tahun 2019 terjadi inventarisasi pada Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa 747 ruas jalan senilai Rp. 27.651.001.443,00 berupa Jalan Desa pada OPD Dinas Perumahan dan Permukiman.



f. Transfer Masuk

Transfer masuk jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp. 13.227.902.488,00 sebagaimana dalam **Lampiran 20**.

Pengurangan

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

a. Koreksi Saldo Awal

Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp 4.756.258.469,17 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada OPD Dinperkim terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 2.639.616.648,00 sebanyak 37 unit/ register.
2. Pada OPD Kelurahan terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 2.116.641.821,17, adapun rincian sebagai berikut :
 - Kelurahan Bandengan terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 7 unit/ register;
 - Kelurahan Padukuhankraton terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 3 unit/ register;
 - Kelurahan Bendan Kergon terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 26 unit/ register;
 - Kelurahan Kuripan Yosorejo terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 2 unit/ register;
 - Kelurahan Sapurokebulen terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 12 unit/ register;
 - Kelurahan Kandang panjang terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Pringrejo terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 14 unit/ register;
 - Kelurahan Krapyak terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Banyurip terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 1 unit/ register;
 - Kelurahan Sokoduwet terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 30 unit/ register;
 - Kelurahan Medono terdapat koreksi jumlah aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 4 unit/ register;

Adapun rincian koreksi kurang saldo awal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dalam **Lampiran 21**.

b. Penghapusan Barang Inventarisasi

Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 206.388.000,00 terjadi pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp. 203.888.000,00 dengan No SK 032/1175 tanggal 25 November 2019, OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp 1.500.000,00 dengan No SK No. 030/1196 tanggal 17 Desember 2019 dan OPD Dinas Kesehatan Pada Puskesmas Pembantu Kuripan Lor 2 yang dimusnahkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan SK No. 030/1196 tanggal 17 Desember 2019.



- c. Reklasifikasi rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
 Reklasifikasi Kurang Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 5.477.465.058,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke				
		Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP
DPU	3.908.825.000,00		2.085.698.000,00			1.823.127.000,00
DINPARBUDPORA	11.600.000,00		11.600.000,00			
DLH	594.882.712,00		9.694.400,00	84.214.223,00	500.974.089,00	
Kelurahan Pringrejo	125.000.000,00				125.000.000,00	
Kelurahan Noyontaansari	28.857.000,00			28.857.000,00		
DINPERKIM	792.700.346,00	24.363.033,00	242.395.364,00	525.941.949,00		
Kel.Gamer	15.600.000,00		15.600.000,00			
Jumlah	5.477.465.058,00	24.363.033,00	2.364.987.764,00	639.013.172,00	625.974.089,00	1.823.127.000,00

- d. Belanja Modal Tidak dikapitalisasi
 Koreksi atas Belanja Modal Tidak dikapitalisasi sebesar Rp 254.041.705,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 28.834.303,00 berupa Kegiatan Kurasan Lumpur dan Pengadaan Dinding, pada OPD DPUPR sebesar Rp 179.080.000,00 berupa Pengadaan bahan habis pakai Lampu PJU, dan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 32.766.050,00 berupa pengadaan bakteri pengolah limbah, serta sebesar Rp 13.361.352,00 berupa pengadaan owning, honor pokja ULP dan pembuatan DED zona IV TPA Degayu.

- g. Transfer Keluar
 Transfer keluar jalan jembatan dan irigasi sebesar Rp. 13.227.902.488,00 sebagaimana dalam **Lampiran 22**.

Nilai buku Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp428.671.244.822,85 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp400.937.971.529,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019

Uraian	Penambahan Ak. penyusutan	Pengurangan Ak. penyusutan	Jumlah
Ak. penyusutan PER 31 Desember 2018			-354.480.337.133,71
Biaya penyusutan	-46.050.810.154,13		-46.050.810.154,13
Koreksi saldo awal	-2.662.381.346,17	2.584.815.867,17	((77.565.479,00))
Penghapusan		76.658.937,00	76.658.937,00
Reklas Aset Tetap	-128.497.561,34	128.497.561,34	-
Transfer antar SKPD	-2.016.159.716,00	1.622.644.616,00	-393.515.100,00
Inventarisasi	-12.402.600,00		-12.402.600,00
Ak. penyusutan PER 31 Desember 2019	-50.870.251.377,64	163.707.232,85	400.937.971.529,84



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 35.865.985.752,78 bertambah sebesar Rp 106.815.687,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp35.759.170.065,78.

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 106.815.687,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.299.127.177,00
- Kaptalisasi belanja Barang dan Jasa	Rp.	18.659.961,00
- Hibah	Rp.	7.023.510,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya	Rp.	62.632.000,00
- Transfer Masuk	Rp.	10.231.400,00
- Jumlah penambahan	Rp.	3.397.674.048,00

Pengurangan :

- Penghapusan Barang Inventaris	Rp.	95.057.900,00
- Reklasifikasi rekening Aset Tetap	Rp.	89.691.400,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	Rp.	3.095.877.661,00
- Transfer Keluar	Rp.	10.231.400,00
- Jumlah pengurangan	Rp.	3.290.858.361,00

Penjelasan lebih lanjut Mutasi Tambah atas Aset Tetap Lainnya selain yang berasal dari Belanja Modal antara lain:

- a. Hibah dari Pihak ke tiga
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota pekalongan mendapat bantuan hibah Aset Tetap Lainnya dari pemerintah Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7.023.510 berupa Buku Umum Lain-lain sebanyak 51 unit.
- b. Kapitalisasi Belanja barang dan jasa
Kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp. 18.659.961,00 pada DPUPR berupa pembelian tanaman



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



Tabel 5. 105 Belanja Barang Jasa Aset Tetap Lainnya

OPD	Jumlah	Nominal	Keterangan
Kelurahan Kuripan Yosorejo	6	710.400	Ilmu Pengetahuan Umum (Kitab Makhluq - makhluq Khayali 2Buah Rp. 224.000, Menguak Hakikat Makhluq Ghoib 2Buah Rp. 227.800, Panduan membaca dan memahami kitab kuning Rp. 126.000, Psycolinguistik Rp. 132.600)
Kelurahan Klego	2	250.000	Hukum (Hukum Tata Negara Indonesia Rp. 140.000, Asas-asas Hukum Pidana Rp. 110.000)
Kelurahan Pringrejo	16	2.564.950	"Buku Umum Lain-lain (Ensiklopedia Sahabat Rasulullah SAW Rp. 100.000, Nelson Mandela (Sebuah Biografi) Rp. 100.000, Aswaja 2 Buah Rp. 220.000, Islam dan Pendidikan Pluralisme Rp. 110.000, Studi Hukum Islam Rp. 116.450, Martin Luther King Jr Rp. 119.000, Islam Sontoloyo Rp. 126.000, Segala Hal Tentang Dinosaur Rp. 127.000, Marketing 1 Rp. 130.000, Misi Selamatkan Bumi Rp. 155.000, Marketing 3.0 Mulai dari Konsumen Ke Human Spirit Rp. 200.000, Mengapa, Ada Apa? Dinosaur Rp. 203.000, The Best Story Of Quran Rp.203.000, Ensiklopedia Seputar Al Quran Rp. 272.000, See Inside Alam Semesta / The Universe Rp. 383.000)"
Kecamatan Pekalongan Barat	60	3.500.000	"Buku Umum Lain-lain (Sejarah tokoh islam di Indonesia Rp30.600, Futsal sepakbola dalam ruangan Rp34.000, Kiat sukses beternak jangkrik Rp34.000, Atletik cabang lari Rp34.000, Atletik cabang lompat Rp34.000, Teknik menjahit pakaian pria Rp35.600, Cerita rakyat maluku dan Halmahera Rp37.400, Cerita rakyat nusatenggara Rp37.400, Indonesia nan indah : upacara adat Rp39.100, Indonesia nan indah : kerajinan khas daerah Rp39.100, Bercocok Tanam Pepaya Rp40.000, Beternak ikan di kolam Rp40.000, Jenis - jenis napza dan bahayannya Rp40.800, Mengenal produk nasional batik dan tenun Rp43.200, mencegah dan terapi diabetes Rp46.000, mari belajar menyablon Rp47.400, Kisah seorang proklamator Rp47.400, Kisah menarik seputar kemerdekaan Indonesia Rp47.400, Belajar mencari uang Rp47.400, Rumah adat di Indonesia Rp47.400, Tokoh penerima penghargaan Nobel Rp47.400, Tokoh perdamaian dunia Rp47.400, Gunung merapi di indonesia Rp47.400, Mengenal jenis hutan di indonesia Rp47.400, gizi untuk kecerdasan otak Rp47.500, Mengenal teknik penjemihan air Rp49.100, Budi daya jambu biji buah multi manfaat Rp49.500, membuat pigura dengan kreasi sendiri Rp49.500, mari belajar menyablon Rp49.500, membuat aneka minuman menyehatkan Rp49.500, Mengenal pajak Rp50.200, Kreasi origami dari kertas bekas Rp50.800, Akhlak membentuk pribadi muslim Rp51.000, Bunga rampai kultum ramadan Rp51.000, cara mudah untuk beramal Rp51.000, Mencapai ketentraman jiwa dengan salat Rp51.000, Mengenal sahabat - sahabat di sekitar Nabi Muhammad saw Rp51.000, Pengaruh mashab syafii di Asia Tenggara Rp51.000, Terapi sehat ala Nabi Muhammad Rp51.000, Desain grafis dengan corel draw Rp59.500, Desain web sederhana dengan microsoft front page Rp59.500, Menggabungkan gambar dengan photoshop Rp59.500, Mengolah database dengan microsoft acces Rp59.500, Resep masakan PKK dan taman gizi nasional Rp59.800, mengenal penyakit tulang sendi dan otot Rp60.800, Cara mudah merakit komputer Rp64.000, Muhammad Pemimpin yang Amanah Rp65.000, gangguan akibat kurang yodium Rp69.000, Bahaya penyalahgunaan narkoba Rp71.400, Olahragawan Rp74.800, Sang penakluk Rp74.800, Cerita rakyat Papua Rp81.600, Permainan tradisional kalimantan Rp81.600, Permainan tradisional papua Rp81.600, Ensiklopedia sari bumi dan alam semesta Rp85.000, Ilmuwan 2 Rp88.200, Wanita - wanita hebat Rp100.500, Nasionalisme NU Rp103.500, Ensiklopedia obat - obatan alami Rp178.000, Ensiklopedia olah raga atletik Rp178.000)"
SMPN 10	45	5.910.000,00	Erlangga Fokus UN 2019 40 Buku @129.000, Fokus UN Erlangga 2020 5Buku @150.000
SMPN 14	14	4.982.911,00	"Bimbingan Klasikal Kls 7 1 Buku Rp115.000 Bimbingan Klasikal Kls 8 1 Buku Rp110.000 Bimbingan Klasikal Kls 9 1 Buku Rp100.000 Paket Sejarah Nasional Indonesia 3 Buku Rp401.800 Paket PANDIK 3 Buku Rp329.100 Paket Literasi 3 Buku Rp556.137 Paket Referensi Kepramukaan 2 2 Buku Rp398.400 "
Kelurahan Tirto	1	171.700,00	Buku Umum Lain-lain (Ilmu Al Qur'an dan Tafsir) Rp. 171.700
Kelurahan Sapuro Kebulen	4	570.000	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain (Metode praktis menggunakan SD Maax + CD) Rp. 102.000, Enyclopedia, Kamus, Buku Referensi (ensiklopedia tokoh-tokoh besar dunia penjelajah dunia Rp. 131.000, ensiklopedia bermain dengan sains 6 Rp. 168.500, ensiklopedia nilai dan norma Rp. 168.500)
Jumlah	0	18.659.961,00	



- c. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya
Reklasifikasi Tambah Aset Tetap lainnya sebesar Rp 62.632.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap
		Peralatan Mesin
RSUD Bendan	605.000,00	605.000,00
DINDIK	59.617.000,00	59.617.000,00
SDN Keputran 06	670.000,00	670.000,00
SDN Bandengan 01	240.000,00	240.000,00
SMPN 16	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah	62.632.000,00	62.632.000,00

- d. Transfer Masuk
Transfer masuk aset tetap lainnya sebesar Rp. 10.231.400,00 berupa Alat tenis meja masuk ke OPD Kec. Pekalongan Barat ditransfer dari OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. (DINPARBUDPORA).

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap lainnya selain dari Belanja Modal

- a. Penghapusan barang Inventaris
Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 95.057.900,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 5. 107 Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya

SKPD	Jumlah	Hibah	Di Lelang	Di Lelang
		050/1227 01-Jul-19	SK No. 030/1196 17-Des-19	SK No. 030/1196 17-Des-19
SDN Pabean	5.142.500,00			5.142.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.500,00		192.500,00	
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	84.510.400,00	10.231.400,00	74.279.000,00	
Kecamatan Pekalongan Timur	120.000,00		120.000,00	
Kelurahan Bandengan	4.900.000,00		4.900.000,00	
Kecamatan Pekalongan Selatan	192.500,00		192.500,00	
Total	95.057.900,00	10.231.400,00	79.684.000	5.142.500,00

- b. Reklasifikasi rekening Aset Tetap
Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya sebesar Rp 89.691.400,00,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5. 108 Reklasifikasi Aset Tetap

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke	Ekstrakom	Aset Lainnya (Software)
		Peralatan Mesin		
DKP	1.757.000,00	1.757.000,00		
SDN Bendan 01	600.000,00	600.000,00		
SMPN 14	20.750.000,00	750.000,00	20.000.000,00	
SMPN 04	3.000.000,00		3.000.000,00	
SMPN 08	4.500.000,00		4.500.000,00	
SMPN 12	45.617.000,00		45.617.000,00	
SMPN 15	6.500.000,00		6.500.000,00	
Jumlah	89.691.400,00	3.107.000,00	79.617.000,00	6.967.400,00

c. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp 3.095.877.661 merupakan Realisasi Belanja Modal yang tidak mencerminkan sebagai aset tetap sesuai dengan Kriteria Aset Tetap dapat diperinci sebagai berikut. Belanja modal yang menjadi ekstrakomtabel sebesar Rp 3.040.092.282,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp 55.785.379,00, (tersaji pada **Lampiran 23**).

d. Transfer Keluar

Transfer keluar aset tetap lainnya sebesar Rp. 10.231.400,00 berupa Alat tenis meja keluar ke OPD Kec. Pekalongan Barat dari OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DINPARBUDPORA).

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.583.297.199,00 bertambah sebesar Rp14.201.584.199,00 dibandingkan dengan Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2018 Rp. 2.381.713.000,00.

Penambahan sebesar Rp14.201.584.199,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan

SKPD	Jumlah	Rekals Tambah dari		Reklas kurang ke	
		Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
DPUPR	1.823.127.000,00		1.823.127.000,00		
RSUD BENDAN	7.863.445.000,00	7.863.445.000,00			
DINDAGKOPUKM	4.002.772.000,00	6.185.708.000,00		2.182.936.000,00	
BKPPD	-198.777.000,00			198.777.000,00	
Kec. PKL Timur	711.017.199,00	711.017.199,00			
Jumlah	14.201.584.199	14.760.170.199,00	1.823.127.000,00	2.381.713.000,00	

Berikut daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 :



Tabel 5. 110 Daftar Kontruksi dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Alamat	Jumlah
1	DPUPR		
	KDP-Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	Rumah Pompa Kel. Pasirkratonkramat	1.039.777.000,00
	KDP-Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	Rumah Pompa Kel. Tirto	783.350.000,00
2	RSUD Bendan		
	KDP-Bangunan Gedung Kantor	Gedung IGD RSUD Bendan	7.863.445.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	KDP-Bangunan Gedung Pertokoan	Pasar Sugihw aras baru Jl. Dr. Cipto	6.185.708.000,00
4	Kecamatan Pekalongan Timur		
	KDP-Bangunan Gedung Kantor	Gedung Serbaguna Kel Noyontaansari	711.017.199,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp959.644.184.898,21 meningkat 16,22% atau sebesar Rp133.965.514.803,12 dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp825.678.670.095,09.

Akumulasi penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, sebesar Rp358.105.807.804,74
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, sebesar Rp200.600.405.563,63
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, sebesar Rp400.937.971.529,84

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan Pemerintah Kota Pekalongan ditempatkan di Bank Jateng. Jumlah dana cadangan adalah sebesar Rp12.704.351.488,00. Dana cadangan ini dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Besaran dana cadangan tahun 2019 merupakan akumulasi dari penempatan dana cadangan sebesar Rp4.000.000.000,00 per tahun yang dimulai dari tahun 2017, akumulasi bunga deposito dana cadangan dari tahun 2017 sampai 2019 sebesar Rp1.004.351.488,00 dikurangi penarikan dana cadangan pada tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00.

Bunga dana cadangan mengakumulasi besaran dana cadangan karena Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 7 ayat (4) yang menyebutkan bahwa penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan akan menambah dana cadangan.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp145.039.811.623,11. Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 111 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.582.540.000,00	16.807.180.000,00	(25,14)
Aset Tidak Berwujud	1.283.030.799,80	1.251.375.473,40	2,53
Aset Lain-lain	130.956.964.761,31	154.433.065.256,00	(15,20)
Uang Jaminan	217.276.062,00	215.895.800,00	0,64
Jumlah	145.039.811.623,11	172.707.516.529,40	(16,02)

Penjelasan lebih lanjut aset lainnya adalah sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.582.540.000,00. Kemitraan dengan Pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemitraan BOT Mall Banjarsari (Nilai Rp1.248.000.000,00)

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dalam kerjasama pengelolaan Pasar Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Pembangunan Pasar Banjarsari dan Mall Banjarsari di atas tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan seluas 17.330 m² senilai Rp5.545.600.000,00 dengan Hak Pakai Pemerintah Kota berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan sampai dengan addendum IV Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010 terdapat kerjasama kemitraan BOT untuk Mall Banjarsari dan BTO untuk Pasar Banjarsari. Untuk Kemitraan Mall Banjarsari Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat HGB diatas HPL atas tanah seluas 3.900 m² senilai Rp1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Nilai bangunan Mall Banjarsari (Atrium/Plaza tiga lantai) pada tahun 2012 sebesar Rp24.037.146.545,00 (dua puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan hasil LHP BPK RI atas LKD Tahun 2012, terkait dengan bangunan mall Banjarsari dan bangunan pasar, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar Pemerintah Kota Pekalongan memperhitungkan kembali nilai Aset Tetap sebesar Rp9.000.047.320,00 (sembilan milyar empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghitungan kembali Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari. Hasil penghitungan kembali dituangkan dalam berita acara Perhitungan Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari Nomor 050/0980.1 tanggal 14 Mei 2013. Berdasarkan berita acara tersebut, maka nilai bangunan mall banjarsari terkoreksi menjadi sebesar Rp26.272.678.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.235.531.455,00 dari nilai semula sebesar



Rp24.037.146.545,00. Perjanjian dimaksud berlaku sejak 25 September 2005 s/d 11 Juni 2032.

- b. Kemitraan BOT Pasar Grogolan Lama/Ruko Grogolan (Nilai Rp254.520.000,00) Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan CV. Putra Perdana dengan perjanjian kerjasama nomor 511.3/0062 tentang Perjanjian kerjasama penataan dan pembangunan rumah dan toko di lokasi pasar grogolan lama Kotamadya Pekalongan.
Pemerintah Kota Pekalongan telah menyerahkan sertifikat nomor AE 193880 HP No 3 atas tanah seluas 1.260 m² senilai Rp254.520.000,00 lokasi Jalan Hos Cokroaminoto dalam jangka waktu kerjasama selama 20 tahun
CV. Putra Perdana telah membangun sejumlah rumah toko dengan nilai Rp1.454.800.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai perjanjian, bangunan akan diserahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan pada saat perjanjian berakhir.
- c. Kemitraan BOT Ramayana (Nilai Rp11.080.020.000,00) Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m² senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun.

Nilai kemitraan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.224.640.000,00 dibanding nilai kemitraan tahun 2018 yaitu sebesar Rp16.807.180.000,00 yang disebabkan karena berakhirnya BOT antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT Jahamas Graha Utama dalam pengelolaan Batik Plaza Sri Ratu. Penyerahan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 dengan berita acara penyerahan nomor 640/6917/XI/2019. Dengan diserahkannya Batik Plaza Sri Ratu ke Pemerintah Kota Pekalongan, maka Batik Plaza Sri Ratu bukan lagi sebagai aset kemitraan tapi berpindah ke aset tetap tanah, sedangkan untuk bangunannya dilakukan penilaian.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud memiliki umur ekonomis 5 tahun. Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.283.030.799,80. Sado tersebut merupakan nilai buku yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5. 112 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019

OPD	Jumlah	Akumulasi	Nilai Buku
		Amortisasi	Per 31 Des 2019
DINDIK	509.306.884,05	174.375.384,05	334.931.500,00
DINKES	321.507.000,00	203.782.800,00	117.724.200,00
RSUD Bendan	1.320.446.886,00	1.133.097.377,20	187.349.508,80
DPU PR	130.857.100,00	77.070.620,00	53.786.480,00
DISHUB	171.707.725,00	119.579.725,00	52.128.000,00
Dindikcapil	62.229.600,00	53.846.040,00	8.383.560,00
DINDAGKOP	109.131.200,00	51.108.720,00	58.022.480,00
DPMP TSP	473.656.400,00	404.217.200,00	69.439.200,00
Bagian Hukum	34.199.950,00	31.259.960,00	2.939.990,00
BKD	608.044.330,00	431.479.530,00	176.564.800,00
BKPPD	52.405.000,00	32.521.000,00	19.884.000,00
DINSOSPKB	9.490.800,00	9.490.800,00	0,00
DINAR PUS	178.320.881,00	115.447.872,40	62.873.008,60
Kominfo	235.772.500,00	207.668.700,00	28.103.800,00
DINPERPA	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
DKP	11.385.681,00	7.431.408,60	3.954.272,40
Sekretariat DPRD	49.635.000,00	29.781.000,00	19.854.000,00
DLH	29.590.000,00	5.918.000,00	23.672.000,00
Bagian Adm. Pembangunan	75.150.000,00	15.030.000,00	60.120.000,00
Jumlah	4.391.086.937,05	3.108.056.137,25	1.283.030.799,80

Saldo aset tak berwujud 2019 sebesar Rp1.283.030.799,80 mengalami peningkatan sebesar Rp31.655.326,40 dibandingkan dengan saldo tahun 2018 sebesar Rp. 1.251.375.473,80.

5.3.1.5.2.1 Aset Tidak Berwujud

Nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2019 sebesar Rp 4.391.086.937,05 mengalami kenaikan sebesar Rp 601.919.386,00 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3.789.167.551,05 Peningkatan ini dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan:

- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp.	709.526.400,00
- Reklas tambah dari Aset tetap	Rp.	25.008.986,00
- Total Penambahan	Rp.	734.535.386,00

a. Pengadaan Aset Tak Berwujud

Pengadaan Aset tak berwujud sebesar Rp. 709.526.400,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengadaan dari Belanja Modal

Pengadaan Aset tak berwujud dari belanja modal sebesar Rp. 381.529.300,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal

OPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
Bagian Adm. Pembangunan	75.150.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Aplikasi Layanan ULP.
Badan Keuangan Daerah	97.820.000	Pengembangan aplikasi SIMPATDA Keg. Pengembangan SIM Pendapatan Daerah @ Rp 48.650.000,00 dan Aplikasi dan profil peta aset milik daerah Keg. Fasilitas peningk status hukum atas tanah aset daerah @Rp 49.170.000,00
Dinas Perhubungan	173.356.000	Televisi Display di Gedung Pengujian Rp. 27.790.500 direklas ke aset tetap



OPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
		Modul Display Slide Slip Tester Support RS232 di Gedng Pengujian Rp.18.833.500 direklas ke aset tetap
		Neon Box Gedung Uji Kendaraan Bermotor Rp.24.294.000 direklas ke aset tetap
		P.C stand alat bantu uji kendaraan bermotor di Gedung Pengujian Rp.34.390.500 direklas ke aset tetap
		Running Text Gedung Pengujian Rp.11.903.500 direklas ke aset tetap
		PC Adm Pengujian RP.11.639.500 direklas ke aset tetap
		Printer Adm Pengujian Rp.3.764.500 direklas ke aset tetap
		Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor RP.40.740.000
RSUD BENDAN	5.613.300	Pengadaan Software sismadak
Dinas Lingkungan Hidup	29.590.000	pengadaan Software AAS pada CV. Candi Saktie InstrumentKeg. Pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah	381.529.300	

2. Pengadaan dari Belanja Barang Jasa
 Pengadaan Aset tak berwujud dari belanja modal sebesar Rp. 327.997.100,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang Jasa

OPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
DPUPR	19.999.100	Pengadaan Sistem Informasi Laboratorium dan Alat Berat
Dinas Perhubungan	24.420.000	Pengadaan Aplikasi Parkir
Dinas Kesehatan	49.500.000	Pengembangan aplikasi SIMPUS/SIMKES
Dinas Pendidikan	234.078.000	Pengadaan SIM pendidikan Rp. 101.547.000,00, Pengadaan Aplikasi PPDB Rp.31.038.000,00 Pengadaan Aplikasi APBS Rp. 101.493.000,00
Jumlah	327.997.100	

3. Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud
 Reklasifikasi tambah aset tak berwujud dari belanja modal aset tetap sebesar Rp. 25.008.986,00 terjadi pada OPD RSUD Bendan berupa pengadaan Software TKMI Rp.10.041.586, Software Antrean Rp.5.500.00,00, dan OS Windows Pro Rp.2.500.000,00, dan pada OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa pengadaan buku elektronik (e-book) sebesar Rp 6.967.400,00.

Pengurangan:

Pengurangan aset tak berwujud sebesar Rp. 132.616.000,00 terjadi karena adanya reklasifikasi belanja aset lainnya ke belanja aset tetap. Pengurangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Pengadaan Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang Jasa

OPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
Dinas Perhubungan	27.790.500	Televisi Display di Gedung Pengujian Rp. 27.790.500 direklas ke aset tetap
	18.833.500	Modul Display Slide Slip Tester Support RS232 di Gedng Pengujian Rp.18.833.500 direklas ke aset tetap
	24.294.000	Neon Box Gedung Uji Kendaraan Bermotor Rp.24.294.000 direklas ke aset tetap
	34.390.500	P.C stand alat bantu uji kendaraan bermotor di Gedung Pengujian Rp.34.390.500 direklas ke aset tetap
	11.903.500	Running Text Gedung Pengujian Rp.11.903.500 direklas ke aset tetap
	11.639.500	PC Adm Pengujian RP.11.639.500 direklas ke aset tetap
	3.764.500	Printer Adm Pengujian Rp.3.764.500 direklas ke aset tetap
Jumlah	132.616.000	



5.3.1.5.2.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2019 sebesar Rp 3.108.056.137,25 mengalami kenaikan sebesar Rp 570.264.059,60 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.537.792.077,65 karena ada beban amortisasi tahun berjalan. Beban Amortisasi tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019

OPD	Beban Amortisasi Tahun 2019
Sekretariat DPRD/DPRD	9.927.000,00
Bagian Adm. Pembangunan	15.030.000,00
Bagian Hukum	6.839.990,00
Badan Keuangan Daerah	80.553.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.893.420,00
Dinas Perhubungan	13.032.000,00
RSUD BENDAN	140.251.577,20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.794.520,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.977.136,20
Dinas Pertanian dan Pangan	1.650.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.826.240,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	44.914.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.918.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.942.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.493.176,20
Dinas Komunikasi dan Informatika	36.072.100,00
DINAS KESEHATAN	39.241.400,00
DINDIKPORA	96.908.300,00
JUMLAH	570.264.059,60

5.3.1.5.3 Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang Rusak Berat dan Aset non aktif yakni aset yang dipinjamkakan kepada pihak ketiga dan aset tanah eks bengkok yang terkena rob (*idle*), sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna Barang. Nilai buku Aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.956.964.761,31. Nilai tersebut berasal dari Nilai Perolehan Rp154.442.440.256,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp23.485.475.494,69.

Nilai buku aset lain-lain tersebut berkurang sebesar Rp23.476.100.494,69 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain 31 Desember 2018 sebesar Rp154.433.065.256 dikarenakan perubahan penyajian dimana pada tahun 2018 aset lain-lain disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan untuk tahun 2019 disajikan sebesar nilai buku.

5.3.1.5.3.1 Aset lain-lain

Nilai perolehan aset lain-lain bertambah sebesar Rp9.375.000,00 dari Rp 154.433.065.256,00 31 Desember 2018 menjadi Rp154.442.440.256,00 pada 31 Desember 2019. Penambahan tersebut berasal dari penambahan Reklasifikasi rekening Aset Tetap sebesar Rp.182.147.000,00, pengurangan dari penghapusan sebesar Rp.172.162.000,00 dan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp. 610.000,00.



Informasi terkait tanah yang tergenang rob dan peralatan mesin yang dipinjam pakaikan adalah sebagai berikut :

- a. aset tetap tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, atas pencatatan tanah tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun tanah eks bengkok dimaksud tercantum dalam **Lampiran 24**.
- b. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), atas pencatatan tersebut direklasifikasikan ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun rincian gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 117 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas Lantai (m ²)	Letak / Lokasi Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket	SKPD Pencatat
		Kode Barang	Reg					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	8	315,25	Jl. Majapahit No. 8 Podosugih	441,668,318	Sekretariat KORPRI/BAZDA	BKD
2	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	9	380	JL.GAJAH MADA	670,866,500	Rumdin Kajari	BKD
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	7	145	JL.BANDUNG	124,817,450	Polsek Timur	BKD
4	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	6	280	JL.BAHAGIA 23	817.548.300	Rumdin Kapolresta	BKD
5	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	11	280	JL.BAHAGIA 1	605,521,800	Rumdin Wakapolresta	BKD
6	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	10	280	JL.GAJAH MADA	556.292.800	Rumdin Dandim	BKD
7	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.11.02.01.01	13	280	JL.BAHAGIA 5	455,349,800	Rumdin Kasdim	BKD
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	1	305	JL. VETERAN NO.27	589,135,750	Unit Donor Darah PMI	BKD
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	2	0	Jl. Tondano	163,350,000	Kantor Eks Kantor BP4	BKD
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	1	212	Jl. Pembangunan No. 4	524,187,600	Panwaslu	BKD
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	1	0	Jl. Pantai Sari	310,105,000	Gedung Lanal	DKP
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	2	954	Jl. Sriwijaya	3.287.660.758	Gedung KPU	BKD
13	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	4	350	Jl. Karya Bhakti	1.511.896.007	Gedung AKN	Dindik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	5	136	Jl. Karya Bhakti	270.100.000	Sekretariat AKN	Dinkes
15	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	03.11.02.03.01	1	54	JL.Darma Bhakti Medono	35.000.000	Gedung AKN	Dinkes



Mutasi tambah dan mutasi kurang aset lain-lain untuk masing-masing OPD sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 25**.

5.3.1.5.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Akumulasi Penyusutan aset lain-lain sebesar Rp 23.485.475.494,69 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 5. 118 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019

Uraian	Penambahan Ak.penysuutan	Pengurangan Ak.penysuutan	Jumlah
Ak.penysuutan PER 31 Desember 2018			(22.387.425.777,33)
Biaya penyusutan	(455.954.643,37)		(455.954.643,37)
Koreksi saldo awal	(634.395.073,99)		(634.395.073,99)
Reklas Aset Tetap	(7.700.000,00)		(7.700.000,00)
Ak.penysuutan PER 31 Desember 2019	(1.098.049.717,36)		(23.485.475.494,69)

5.3.1.5.4 Uang Jaminan

Utang jaminan merupakan uang jaminan rusunawa sebesar Rp217.276.062,00 yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa dan berada dalam tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Uang jaminan rusunawa dapat dirinci sebagai berikut :

- Uang jaminan penghuni Rusun Slamaran sebesar Rp89.015.862,00
- Uang jaminan penghuni Rusun Kuripan sebesar Rp71.140.200,00
- Uang Jaminan penghuni Rusun Panjang Baru Rp57.120.000,00

Dalam rekening koran tertera angka sebesar Rp57.900.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp780.000,00. Hal ini disebabkan karena saat ada penghuni yang keluar, uang jaminan harusnya ditarik dari tabungan, namun pengelola memberikan uang tunai dari setoran sewa penghuni lain yang belum disetorkan ke kasda.

Kewajiban dan Ekuitas

5.3.2.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.841.538.443,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 119 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Kew ajiban Jangka pendek	25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	66,27
Kew ajiban Jangka Panjang		0,00	-
Jumlah	25.841.538.443,32	15.542.034.640,67	66,27

Pemerintah Kota Pekalongan hanya mempunyai kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar



dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.373.121.791,34, yang terdiri dari :

- a. RSUD Bendan
Sewa lahan sebesar Rp8.166.666,67
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp14.521.917,00.
- c. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pendapatan diterima dimuka atas retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp11.516.000,00
- d. Dinas Perhubungan
Total pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp118.367.816,67 dengan perincian :
 1. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp117.757.416,67.
 2. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi izin trayek sebesar Rp610.400,00.
- e. Badan Keuangan Daerah
Total pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp506.462.127,00 dengan perincian :
 1. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa gedung serba guna Medono sebesar Rp750.000,00
 2. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa lahan titik strategis sebesar Rp93.404.361,00.
 3. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa tanah sebesar Rp74.598.233,00.
 4. Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa garapan eks bengkok sebesar Rp327.709.533,00
 5. Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian sarana dan prasarana reklame sebesar Rp10.000.000,00
- f. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
Total pendapatan diterima dimuka pada SKPKD sebesar Rp714.087.264,00 dengan perincian :
 1. Pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame/billboard/videotron/ megatron sebesar Rp684.090.598,00
 2. Pendapatan diterima dimuka atas reklame kain sebesar Rp21.663.333,00
 3. Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan lain-lain sebesar Rp8.333.333,00

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.211.993.061,98, yang terdiri dari : utang pada RSUD Bendan, BLUD PSPJ, Dinas kesehatan, DPUPR, Dindagkop, dan Dinperinaker.

Utang belanja pada Dinperinaker merupakan utang belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan belanja modal pembuatan pagar tahun 2018 yang sampai dengan



posisi tanggal 31 Desember 2019 belum dibayar. Rincian utang belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 120 Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2019

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Utang Belanja pada BLUD RSUD Bendan	24.170.627.040,98
Utang belanja bahan pakai habis	51.041.250,00
Utang belanja bahan material	13.316.087.913,98
Utang belanja lainnya	10.803.497.877,00
Utang Pada BLUD PSPJ :	1.212.188,00
Jasa Pelayanan	1.212.188,00
Utang Pada Dinas Kesehatan	36.623.833,00
Utang Jamkesda R. ARO Pekalongan	2.385.750,00
Utang Jamkesda RS. HA. Djunaid	5.219.747,00
Utang Jamkesda RS Siti Khotijah	26.250.936,00
Utang Jamkesda RSUD Budi Rahayu	2.767.400,00
Utang pada DPUPR	900.000,00
Utang Belanja rehab saluran pematang jalan	900.000,00
Utang pada DINPERINAHER	2.630.000,00
Utang Belanja Jasa konsultan Tomy agus K	1.640.000,00
Utang Belanja Jasa konsultan Panji Agus P	990.000,00
Jumlah	24.211.993.061,98

Pada tahun 2019, telah dibayarkan hutang belanja Pemerintah Kota Pekalongan melalui rekening pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.741.750,00 yaitu pembayaran hutang belanja Dinperkim.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp256.423.590,00, terdiri dari :

- Utang Jangka Pendek Lainnya, sebesar Rp39.147.528,00
- Utang Uang Jaminan, sebesar Rp217.276.062,00

dengan perincian sebagai berikut :

5.3.2.1.3.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.147.528,00, yang merupakan lebih bayar pajak maupun retribusi, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. 121 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Lebih Bayar	
Lebih Bayar retribusi sewa (BKD)	4,00
Lebih bayar PBB (SKPKD)	35.234.534,00
Lebih bayar retribusi pasar (Dindagkop)	3.912.990,00
Jumlah	39.147.528,00



5.3.2.1.3.1 Utang Uang Jaminan

Saldo Utang Uang Jaminan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp217.276.062,00, yang merupakan utang uang jaminan rusunawa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. 122 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2019

Jenis Utang	Jumlah (Rp)
Utang Uang Jaminan Rusunawa	
Rusunawa Slamaran	89.015.862,00
Rusunawa Kuripan	71.140.200,00
Rusunawa Panjang baru	57.120.000,00
Jumlah	217.276.062,00

5.3.2.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.830.832.684.231,98. Rincian ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 123 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Ekuitas 31 Desember 2018	2.447.507.384.152,31
Surplus/Defisit LO	106.261.755.735,78
Koreksi Ekuitas	277.063.544.343,89
Ekuitas 31 Desember 2019	2.830.832.684.231,98

Koreksi Ekuitas terdiri dari :

- Inventarisasi Aset	Rp	306.616.679.494,00
- Investasi	Rp	-2.002.055.821,00
- Koreksi Aset Tetap	Rp	-5.183.993.076,90
- Koreksi Persediaan	Rp	26.130.000,00
- Koreksi Piutang	Rp	-991.214.768,89
- Reklas Aset Tetap	Rp	19.826.800,00
- Transfer Keluar Aset	Rp	-22.925.115.303,00
- Transfer Masuk Aset	Rp	22.531.600.203,00
- Koreksi Utang	Rp	1.025.850,00
- Koreksi Akumulasi Aset Lain-Lain	Rp	-23.029.520.851,32
- Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.000.181.818,00
Jumlah	Rp	277.063.544.343,89

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas



pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 124 Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah		Naik/Turun (%)
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Kegiatan Operasional :			
Pendapatan - LO	997.637.774.889,78	925.656.555.983,63	7,78
Beban - LO	883.957.098.008,92	808.068.702.593,30	9,39
Surplus/Defisit	113.680.676.880,86	117.587.853.390,33	-3,32
Defisit Non Operasional	6.688.482.217,08	12.805.361.604,23	-47,77
Surplus/Defisit Sblm Pos Luar Biasa	106.992.194.663,78	104.782.491.786,10	2,11
Beban Luar Biasa	730.438.928,00	1.921.815.800,00	
Surplus/Defisit LO	106.261.755.735,78	102.860.675.986,10	3,31

a. Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp997.637.774.889,78. Pendapatan-LO dapat dirinci sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 125 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
	2019	2018	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO :			
Pajak Daerah - LO	91.299.275.643,00	73.136.734.477,00	24,83
Retribusi Daerah - LO	17.554.406.636,00	16.358.576.244,33	7,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.856.763.925,89	5.668.366.961,87	3,32
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	111.166.751.640,49	80.369.432.561,99	38,32
Jumlah	225.877.197.845,38	175.533.110.245,19	28,68

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan. Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp91.299.275.643,00. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 126 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian Pajak Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2019	2018	
Pajak Hotel	7.416.060.994,00	6.719.006.459,00	10,37
Pajak Restoran	13.465.232.758,00	10.732.461.453,00	25,46
Pajak Hiburan	5.549.614.728,00	1.470.523.005,00	277,39
Pajak Reklame	2.624.998.343,00	1.607.386.121,00	63,31
Pajak Penerangan Jalan	21.840.421.391,00	20.851.291.024,00	4,74
Pajak Parkir	1.873.920.896,00	837.360.706,00	123,79
Pajak Air Tanah	1.568.194.395,00	348.741.834,00	349,67
PBB Pedesaan dan Perkotaan	17.467.333.205,00	15.655.160.602,00	11,58
BPHTB	19.493.498.933,00	14.914.803.273,00	30,70
Jumlah	91.299.275.643,00	73.136.734.477,00	24,83

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 127 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian Retribusi Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun %
	2019	2018	
Ret. Pelayanan Kesehatan	183.282.000,00	186.970.500,00	-1,97
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	692.966.000,00	466.674.000,00	48,49
Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	27.812.083,00	31.227.917,00	-10,94
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.755.001.000,00	1.361.292.000,00	28,92
Ret. Pelayanan Pasar	2.492.994.149,00	2.559.500.133,00	-2,60
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	487.026.283,33	472.497.367,00	3,07
Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.635.000,00	53.315.000,00	-59,42
Ret. Tera dan Tera Ulang	64.616.000,00	53.487.000,00	0,00
Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	4.109.978.404,00	3.349.554.634,00	22,70
Ret. Tempat Pelelangan	5.326.851.300,00	4.704.340.710,00	13,23
Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	8.400.000,00	13.800.000,00	-39,13
Ret. Rumah Potong Hewan	90.007.500,00	112.344.000,00	-19,88
Ret. Tempat Olahraga	647.670.250,00	602.176.750,00	7,55
Ret. IMB	1.607.129.600,00	2.354.319.300,00	-31,74
Ret. Izin Trayek	4.657.066,67	4.580.933,33	1,66
Ret. Perpanjangan IMTA	34.380.000,00	32.496.000,00	5,80
Jumlah	17.554.406.636,00	16.358.576.244,33	7,31

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada tahun 2019 adalah sebesar



Rp5.856.763.925,89. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 128 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun		Naik/Turun %
	2019	2018	
Bagian Laba Perusda	540.883.804,90	1.925.838.289,29	129,07
Bagian Laba BUMD	1.177.784.784,99	-14.054.196,42	-8.480,31
Bagian Laba Bank Jateng	4.138.095.336,00	3.756.582.869,00	10,16
Jumlah	5.856.763.925,89	5.668.366.961,87	3,32

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp111.166.751.640,49, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 129 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian Pajak Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2019	2018	
Penerimaan jasa giro	1.901.775.984,00	1.344.713.038,00	41,43
Pendapatan bunga	9.331.792.218,00	7.141.977.021,12	30,66
Tuntutan ganti kerugian uang daerah	7.100.000,00	14.100.000,00	-49,65
Pendapatan denda pajak	1.651.642.418,02	1.905.244.739,61	-13,31
Pendapatan denda retribusi	12.734.350,00	42.202.318,00	-69,83
Pendapatan dari pengembalian	1.527.506.719,00	1.657.421.519,00	-7,84
Pendapatan BLUD	95.885.665.446,47	64.775.973.567,08	48,03
Lain-lain PAD yang sah lainnya	648.455.138,00	587.407.785,28	10,39
Pendapatan denda atas keterlambatan	200.079.367,00	256.258.373,00	-21,92
Hasil penjualan aset daerah yg tdk dipisahkan	0,00	782.100.000,00	0,00
Hasil penjualan aset lainnya	0,00	1.568.899.000,00	0,00
Pendapatan dari angsuran	0,00	293.135.200,00	0,00
Jumlah	111.166.751.640,49	80.369.432.561,09	38,32

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp738.673.298.145,00. Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun (%)
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Pendapatan Transfer - LO :			
Transfer Pemerintah Pusat - LO	615.690.443.449,00	586.379.794.858,00	5,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO	70.585.760.651,00	78.159.164.010,00	-9,69
Bantuan Keuangan - LO	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	161,25
Jumlah	738.673.298.145,00	705.113.799.868,00	4,76



5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 131 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO			
Bagi Hasil Pajak - LO	22.557.670.368,00	25.352.861.062,00	-11,03
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO	1.827.183.033,00	1.340.170.369,00	36,34
DAU - LO	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00	5,97
DAK Fisik - LO	49.033.606.513,00	41.768.518.285,00	17,39
DAK Non Fisik - LO	66.429.894.535,00	68.862.507.142,00	-3,53
Jumlah	615.690.443.449,00	586.379.794.858,00	5,00

5.4.1.1.2.1.1 Penerimaan Bagi Hasil Pajak – LO terdiri dari:

Penerimaan bagi hasil pajak – LO merupakan bagi hasil pajak pusat, perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 132 Realisasi Penerimaan bagi Hasil pajak-LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Penerimaan Bagi Hasil Pajak :			
Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan	105.057.042,00	0	
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29	10.971.870.970,00	13.489.977.254,00	-18,67
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.952.472.039,00	6.962.880.000,00	-0,15
Bagi Hasil dari PBB	4.528.270.317,00	4.900.003.808,00	-7,59
Jumlah	22.557.670.368,00	25.352.861.062,00	-11,03

5.4.1.1.2.1.2 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO terdiri dari :

Tabel 5. 133 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO :			
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	140.696.400,00	282.138.205,00	-50,13
Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	590.155.800,00	701.234.591,00	56,55
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	95.052.100,00	36.346.929,00	161,51
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	419.934.900,00	291.237.025,00	44,19
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	29.773.800,00	26.570.761,00	12,05
Bagi Hasil SDA Kehutanan/PSDH	56.505.816,00	0,00	
Bagi Hasil SDA Perikanan/Pungutan Perus. Perikanan	174.305.192,00	0,00	
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minerba/Royalti	585.298,00	2.642.858,00	-77,85
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Migas/SDA Minyak Bumi	53.183.158,00	0,00	
Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Migas/SDA Gas Bumi	255.362.209,00	0,00	
Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi/luran Tetap dan luran Produksi	11.628.360,00	0,00	
Jumlah	1.827.183.033,00	1.340.170.369,00	36,34



5.4.1.1.2.1.3 Penerimaan DAU – LO

Penerimaan DAU – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp475.842.089.000,00 atau meningkat 5,97% dibanding realisasi tahun 2018.

5.4.1.1.2.1.4 Penerimaan DAK Fisik – LO

Sama dengan DAU, tidak terdapat perbedaan pendapatan DAK Fisik – LO dengan pendapatan DAK Fisik – LRA. Adapun Penerimaan DAK – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 134 Realisasi Penerimaan DAK– LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah		Naik/Turun (%)
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Penerimaan DAK - LO :			
DAK Bid.Pendidikan	7.388.796.000,00	7.814.736.700,00	-5,45
DAK Bid.Kesehatan	14.558.643.610,00	13.312.991.585,00	14,63
DAK Bid.Lingkungan Hidup	832.500.000,00	0,00	0,00
DAK Bid.KB dan Kel. Sejahtera	2.428.392.400,00	612.846.260,00	296,25
DAK Bid.Pertanian	1.513.879.312,00	529.911.000,00	185,69
DAK Bid.Infrastruktur Air Minum	2.178.261.000,00	2.183.149.000,00	-0,22
DAK Bid.Infrastruktur Sanitasi	1.369.400.000,00	2.381.000.000,00	-42,49
DAK Bid. Infrastruktur Jalan	12.694.618.400,00	12.013.971.000,00	5,67
DAK Bid Perumahan	3.220.394.000,00	2.375.699.000,00	35,56
DAK Bid. Perdagangan	1.473.436.791,00	1.157.060.000,00	27,34
DAK-Bid Pariwisata	1.375.285.000,00	0,00	0,00
Jumlah	49.033.606.513,00	41.768.518.285,00	17,39

5.4.1.1.2.1.5 Penerimaan DAK Non Fisik – LO

Pendapatan DAK Non Fisik – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp66.429.894.535,00, yang terdiri dari :

Tabel 5. 135 Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah 2019	Jumlah 2018
Dana Alokasi Khusus Non Fisik :		
BOK dan BOKB	8.801.822.929,00	9.208.709.979,00
BOP PAUD	6.445.567.573,00	7.180.595.000,00
TPG	47.276.119.900,00	50.787.953.600,00
Tambahan Penghasilan Guru PNS	0,00	109.800.000,00
Administrasi kependudukan	872.658.155,00	764.311.813,00
BOP Pendidikan kesetaraan	1.185.300.000,00	0,00
BOP Museum	600.000.000,00	0,00
Peningkatan kapasitas Koperasi	380.000.000,00	0,00
BOKB	868.425.978,00	811.136.750,00
Jumlah	66.429.894.535,00	68.862.507.142,00



5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO merupakan pendapatan dana insentif daerah (DID). Penerimaan DID pada tahun 2019 adalah sebesar Rp33.260.942.000,00.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya- LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp70.585.760.651,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. 136 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah 2019	Jumlah 2018
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
PKB	21.276.714.765,00	23.093.113.024,00
BBNKB	10.662.660.662,00	12.759.436.158,00
PBBKB	17.213.010.547,00	19.732.386.656,00
Pajak Air Permukaan	3.313.615,00	3.695.504,00
Pajak Rokok	21.430.061.062,00	22.570.532.668,00
Jumlah	70.585.760.651,00	78.159.164.010,00

5.4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO

Penerimaan bantuan keuangan – LO adalah sebesar Rp19.136.152.045,00. Adapun perincian bantuan keuangan – LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 137 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Bantuan Keuangan - LO :			
FEDEP	0,00	100.000.000,00	-100,00
TMMD	675.000.000,00	501.600.000,00	34,57
Sistem Informasi Profil Daerah	0,00	50.000.000,00	-100,00
Sarpras Daerah	15.841.152.045,00	6.498.241.000,00	143,78
Bantuan Pendidikan	2.085.000.000,00	35.000.000,00	5.857,14
Pendidikan Untuk Semua (PUS)	0,00	50.000.000,00	-100,00
SIPD	535.000.000,00	0,00	0,00
TKPKD	0,00	50.000.000,00	-100,00
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium	0,00	40.000.000,00	0,00
Jumlah	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	161,25

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 merupakan pendapatan hibah yaitu sebesar Rp33.087.278.899,40. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 138 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Hibah dari Pemerintah	6.050.194.221,00	7.779.189.233,00	-22,23
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	4.740.022.089,40	2.230.494.867,44	87,74
Hibah dari Badan /Lembaga / Organisasi Swasta	39.385.000,00	13.385.478.870,00	-99,71
Hibah dari Kelompok Masyarakat	0,00	102.107.900,00	0,00
Pendapatan hibah BOS	22.257.677.589,00	21.512.375.000,00	0,00
Jumlah	33.087.278.899,40	45.009.645.870,44	-26,49

5.4.1.2 Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar Rp883.957.098.008,92 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 139 Beban – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Beban - LO :			
Beban Operasi - LO	883.235.585.008,92	807.269.821.593,30	9,41
Beban Transfer - LO	721.513.000,00	798.881.000,00	-9,68
Jumlah	883.957.098.008,92	808.068.702.593,30	9,39

Rincian tentang beban – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.2.1 Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp883.235.585.008,92, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 140 Beban Operasi – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Beban Operasi - LO :			
Beban Pegawai	372.550.705.965,00	335.400.524.961,00	11,08
Beban Persediaan	72.892.414.571,93	57.404.110.028,09	26,98
Beban Jasa	250.552.896.845,04	241.411.002.078,22	3,79
Beban Pemeliharaan	12.494.978.093,00	11.144.116.587,00	12,12
Beban Perjalanan Dinas	28.731.743.848,00	28.765.914.398,00	-0,12
Beban Bunga	6.803.500,00	0,00	0,00
Beban Hibah	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00	30,58
Beban Bantuan Sosial	11.920.375.000,00	11.867.319.000,00	0,45
Beban Amortisasi dan Penyusutan	103.276.506.692,86	92.514.476.889,06	11,63
Beban Penyisihan Piutang	1.498.760.305,90	6.316.153.644,44	-76,27
Beban Lain-lain	187,19	7,49	0,00
Jumlah	883.235.585.008,92	807.269.821.593,30	9,41

Rincian lebih lanjut tentang beban operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :



5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai – LO sebesar Rp372.550.705.965,00, yang terdiri dari :

Tabel 5. 141 Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Beban Pegawai - LO :			
Gaji dan Tunjangan	264.884.354.193,00	255.914.884.188,00	3,50
Tambahan Penghasilan PNS	45.501.492.539,00	42.873.869.090,00	6,13
Beban Penerimaan Lainnya a Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.519.500.000,00	4.056.000.000,00	11,43
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.782.712.700,00	2.923.000.000,00	29,41
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	596.245.370,00	703.551.240,00	-15,25
Uang Lembur	228.630.764,00	214.351.712,00	6,66
Honorarium pegawai dana BOS	614.455.000,00	1.005.437.000,00	-38,89
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	52.423.315.399,00	27.709.431.731,00	89,19
Jumlah	372.550.705.965,00	335.400.524.961,00	11,08

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp72.892.414.571,93 meningkat 26,98% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp57.404.110.028,09.

5.4.1.2.1.3 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp12.494.978.093,00 atau meningkat 12,12% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.144.116.587,00.

5.4.1.2.1.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp28.731.743.848,00 atau menurun sebesar 0,12% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp28.765.914.398,00.

5.4.1.2.1.5 Beban Jasa

Beban jasa – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp250.552.896.845,04 atau meningkat 3,79% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp241.411.002.078,22.

5.4.1.2.1.6 Beban Bunga

Beban bunga tahun 2019 adalah sebesar Rp6.803.500,00. Realisasi beban bunga pada tahun 2019 merupakan pengeluaran yang digunakan atas pinjaman RSUD Benda yang dianggarkan di SKPKD yaitu sebesar Rp1.800.000.000,00.

5.4.1.2.1.7 Beban Hibah – LO

Beban hibah tahun 2019 yang terdiri dari:

Tabel 5. 142 Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Beban Hibah - LO :			
Beban Hibah kepada Pemerintah	1.100.000.000,00	0,00	#DIV/0!
Beban Hibah kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	28.210.400.000,00	22.446.204.000,00	25,68
Jumlah	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00	30,58



5.4.1.2.1.8 Beban Bantuan Sosial – LO

Beban bantuan sosial LO tahun 2019 adalah sebesar Rp11.920.375.000,00, yang terdiri dari :

Tabel 5. 143 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun (%)
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Beban Bantuan Sosial - LO :			
Bantuan Soaial kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.174.000.000,00	6.949.000.000,00	-11,15
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	5.746.375.000,00	4.918.319.000,00	148,89
<i>Jumlah</i>	11.920.375.000,00	11.867.319.000,00	0,45

5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 adalah sebesar Rp103.276.506.692,86 atau meningkat 11,63% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp92.514.476.889,06. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 ini terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp102.706.242.633,26 dan beban amortisasi sebesar Rp570.264.059,60.

Perincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 144 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2019	Tahun 2018	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	41.451.494.478,02	42.098.768.354,85	-1,54
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	14.747.983.357,74	13.699.007.658,99	7,66
Beban Penyusutan Jalan	46.050.810.154,13	36.252.007.532,82	0,00
Beban amortisasi aset tidak berwujud	570.264.059,60	464.693.342,40	22,72
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	455.954.643,37	0,00	
Jumlah	103.276.506.692,86	92.514.476.889,06	11,63

5.4.1.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.498.760.305,90 atau menurun 76,27% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.316.153.644,44. Beban penyisihan ini merupakan akumulasi dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan lain-lain PAD yang sah dan beban penyisihan piutang lainnya.

5.4.1.2.1.11 Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2019 adalah sebesar Rp187,19. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp7,49.

5.4.1.2.2 Beban Transfer

Beban transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp721.513.000,00. Beban ini merupakan bantuan kepada partai politik Adapun Rincian beban transfer tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 145 Beban Transfer Tahun 2019 dan 2018

Belanja Bantuan Keuangan :	Jumlah		Naik/Turun
	Tahun 2019	Tahun 2018	%
Bantuan Transfer ke Provinsi		100.000.000,00	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR	196.367.000,00	191.749.000,00	2,41
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	71.761.000,00	78.156.000,00	(8,18)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT	18.734.000,00	32.116.000,00	(41,67)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	110.779.000,00	106.347.000,00	4,17
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA	48.295.000,00	52.746.000,00	(8,44)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB	114.450.000,00	91.644.000,00	24,89
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	84.581.000,00	86.909.000,00	(2,68)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	57.806.000,00	59.214.000,00	(2,38)
Belanja bantuan keuangan partai NASDEM	13.300.000,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura	5.440.000,00	-	-
Jumlah	721.513.000,00	798.881.000,00	(9,68)

5.4.1.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Jumlah surplus kegiatan operasional adalah sebesar Rp113.680.676.880,86 yang merupakan hasil penghitungan dari pendapatan-LO sebesar Rp997.637.774.889,78 dikurangi beban – LO sebesar Rp883.957.098.008,92.

5.4.1.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah defisit kegiatan non operasional adalah sebesar Rp6.688.482.217,08. yang terdiri dari :

5.4.1.4.1 Penjualan aset non lancar

Penjualan aset non lancar sebesar Rp3.717.878.692,61, mengalami kenaikan sebesar 9,58% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3.392.734.846,12. Merupakan hasil lelang aset tetap pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Bendan, DPUPR, Dinperkim, Dindukcapil, Dinperinaker, DPMPPA, Dinperpa, DLH, Diskominfo, Dindagkop, Dinparbudpora, Dinarpus, DKP, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, BKPPD, Sekretariat DPRD, Kec. Pekalongan Utara, Kel. Bandengan, Kec Pekalongan Selatan, Kel. Banyurip, Kel. Medono, Kel. Tirto, Kec Pekalongan Timur, dan Kel. Kandang Panjang.

5.4.1.4.2 Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2.970.603.524,47. Defisit kegiatan non operasional tahun 2019 menurun 68,44% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp9.412.626.758,11

5.4.3 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas belanja tidak terduga untuk mengatasi bencana tahun 2019 sebesar Rp730.438.928,00. Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2019 adalah bencana banjir. Beban luar biasa tahun 2019 mengalami penurunan 61,99% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.921.815.800,00



5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Tabel 5. 146 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 Rp	Tahun 2018 Rp	Naik/Turun %
Aktivitas Operasi	199.092.795.785,61	165.800.493.091,00	20,08
Aktivitas Investasi	-191.923.960.213,00	-143.712.423.829,00	33,55
Aktivitas Pendanaan	-4.741.750,00	-12.686.839.331,00	0,00
Aktivitas Transitoris	-1.510.455,00	-27.416.637,00	-94,49
Jumlah	7.162.583.367,61	9.373.813.294,00	-23,59

Selama periode tahun 2019 terjadi surplus arus kas bersih sebesar Rp7.162.583.367,61, mengalami penurunan sebesar 23,59% jika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun 2018.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 147 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 Rp	Tahun 2018 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	971.335.824.033,61	902.602.794.322,00	7,61
Arus Kas Keluar	772.243.028.248,00	736.802.301.231,00	4,81
Arus Kas Bersih	199.092.795.785,61	165.800.493.091,00	20,08

Realisasi arus kas bersih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp199.092.795.785,61. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 20,08%. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Tabel 5. 148 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018

Arus Masuk Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun %
	Rp	Rp	
Penerimaan Pajak Daerah	87.578.474.262,00	70.561.333.701,00	24,12
Penerimaan Retribusi Daerah	16.657.441.492,00	16.044.288.253,00	3,82
Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.173.105,00	5.920.239.113,00	3,06
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	102.151.706.347,61	84.086.154.207,00	21,48
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	17.751.480.700,00	25.352.861.062,00	(29,98)
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	1.275.750.200,00	1.340.170.369,00	(4,81)
Penerimaan DAU	475.842.089.000,00	449.055.738.000,00	5,97
Penerimaan DAK	115.463.501.048,00	110.631.025.427,00	4,37
Penerimaan Dana Penyesuaian	33.260.942.000,00	33.250.000.000,00	0,03
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	72.167.436.245,00	75.273.768.190,00	(4,13)
Penerimaan Hibah	23.949.677.589,00	23.762.375.000,00	0,79
Penerimaan Lainnya	19.136.152.045,00	7.324.841.000,00	161,25
Jumlah	971.335.824.033,61	902.602.794.322,00	7,61

Terjadi peningkatan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar 7,61% jika dibandingkan dengan arus masuk kas tahun 2018 sebesar Rp902.602.794.322,00.

Terdapat selisih antara arus kas masuk operasi dengan pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan penjualan aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp9.409.313,00. Selisih tersebut berasal dari Kas di bendahara penerimaan tahun 2019 yang belum masuk ke kasda sebesar Rp10.805.000,00 dikurangi kas di bendahara tahun 2018 yang baru masuk ke kasda pada tahun 2019 sebesar Rp1.395.687,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyebutkan bahwa pendapatan LRA diakui ketika ada kas masuk ke kasda maupun dalam entitas akuntansi (bendahara penerimaan)

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp87.578.474.262,00 meningkat sebesar 24,12% dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp70.561.333.701,00.

Penerimaan pajak daerah tahun 2019 terdiri dari :

- Pajak Hotel, sebesar Rp7.437.962.444,00
- Pajak Restoran, sebesar Rp13.470.213.677,00
- Pajak Hiburan, sebesar Rp5.549.734.728,00
- Pajak Reklame, sebesar Rp2.263.405.846,00
- Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp21.840.421.391,00
- Pajak Parkir, sebesar Rp1.874.020.896,00
- Pajak Air Tanah, sebesar Rp 1.436.884.068,00
- PBB, sebesar Rp14.212.332.279,00
- BPHTB, sebesar Rp19.493.498.933,00



5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp16.657.441.492,00 meningkat sebesar 3,82% dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp16.044.288.253,00.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2019 terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp10.591.350.400,00
- b. Retribusi Jasa Usaha, sebesar Rp4.418.826.092
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, sebesar Rp1.657.480.000,00

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp6.101.173.105,00 meningkat sebesar 3,06% dibandingkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 sebesar Rp5.920.239.113,00.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah :

- a. PD. BPR Bank Pekalongan, sebesar Rp 575.000.000,00
- b. PT. Bank Jateng, sebesar Rp 4.138.095.336,00
- c. PD. BPR BKK Kota Pekalongan, sebesar Rp122.505.501,00
- d. PDAM Kota Pekalongan, sebesar Rp1.265.572.268,00

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar Rp102.151.706.347,61 meningkat sebesar 21,48% dibandingkan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp84.086.154.207,00

Penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2019 terdiri dari :

- a. Penerimaan Jasa Giro, sebesar Rp1.895.336.165
- b. Penerimaan bunga deposito, sebesar Rp8.241.036.971,00
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sebesar Rp7.100.000,00
- d. Pendapatan Denda Keterlambatan, sebesar Rp200.079.367,00
- e. Pendapatan denda pajak, sebesar Rp549.415.125,00
- f. Pendapatan dari pengembalian, sebesar Rp1.527.506.719,00
- g. Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain, sebesar Rp824.348.471,00
- h. Pendapatan BLUD, sebesar Rp88.193.320.415,61
- i. Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir, sebesar Rp105.369.201,00
- j. Pendapatan bunga dana cadangan, sebesar Rp607.388.226,00

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp17.751.480.700,00 turun sebesar 29,98% dibandingkan penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp25.352.861.062,00.

Penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2019 terdiri dari :

- a. Bagi Hasil dari PBB, sebesar Rp 3.725.854.500,00
- b. Bagi Hasil dari PPh, sebesar Rp7.293.406.200,00
- c. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebesar Rp6.732.220.000,00



5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2019 sebesar Rp1.275.750.200,00 turun sebesar 4,81 % dibandingkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2018 sebesar Rp1.340.170.369,00.

Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2019 terdiri dari :

- a. Sumber Daya Hutan, sebesar Rp140.696.400,00
- b. Pungutan Pengusahaan Perikanan, sebesar Rp295.077.900,00
- c. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, sebesar Rp295.077.900,00
- d. Pertambangan Minyak Bumi, sebesar Rp95.052.100,00
- e. Pertambangan Gas Bumi, sebesar Rp419.934.900,00
- f. Pertambangan Panas Bumi, sebesar Rp29.773.800,00
- g. Pertambangan Mineral & Batubara, sebesar Rp137.200,00

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp475.842.089.000,00 meningkat sebesar 5,97% dibandingkan penerimaan dana alokasi umum tahun 2018 sebesar Rp449.055.738.000,00.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana alokasi khusus tahun 2019 sebesar Rp115.463.501.048,00 meningkat sebesar 4,37% dibandingkan penerimaan dana alokasi khusus tahun 2018 sebesar Rp110.631.025.427,00.

Penerimaan dana alokasi khusus tahun 2019 terdiri dari :

- a. DAK Fisik, sebesar Rp49.033.606.513,00, terdiri dari :
 1. DAK bidang perumahan, sebesar Rp3.220.394.000,00
 2. DAK bidang pertanian, sebesar Rp1.513.879.312,00
 3. DAK bidang pariwisata, sebesar Rp1.285.000,00
 4. DAK bidang infrastruktur air minum, sebesar Rp2.178.261.000,00
 5. DAK bidang infrastruktur sanitasi, sebesar Rp1.369.400.000,00
 6. DAK bidang pasar, sebesar Rp1.473.436.791,00
 7. DAK bidang pendidikan SD/SLB, sebesar Rp5.924.221.700,00
 8. DAK bidang pendidikan SMP, sebesar Rp1.224.608.000,00
 9. DAK bidang pendidikan SKB, sebesar Rp239.966.300,00
 10. DAK bidang kesehatan, sebesar Rp16.987.036.010,00
 11. DAK bidang jalan konektivitas, sebesar Rp12.694.618.400,00
 12. DAK bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp832.500.000,00
- b. DAK Non Fisik, sebesar Rp66.429.894.535,00, terdiri dari :
 1. Tunjangan Profesi Guru, sebesar Rp47.276.119.900,00
 2. BOK dan BOKB, sebesar Rp9.670.248.907,00
 3. BOP PAUD, sebesar Rp6.445.567.573,00
 4. Peningkatan kapasitas koperasi, UKM dan ketenagakerjaan, sebesar Rp380.000.000,00
 5. Pelayanan Adm Kependudukan, sebesar Rp872.658.155,00
 6. BOP Pendidikan Kesetaraan, sebesar Rp1.185.300.000,00
 7. BOP Penyelenggaraan museum, sebesar Rp600.000.000,00



5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan dana penyesuaian tahun 2019 sebesar Rp33.260.942.000,00 meningkat sebesar 0,03% dibandingkan penerimaan dana penyesuaian tahun 2018 sebesar Rp33.250.000.000,00

5.5.1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp72.167.436.245,00 turun sebesar 4,13% dibandingkan penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp75.273.768.190,00.

Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak tahun 2019 merupakan bagi hasil pajak Provinsi terdiri dari :

- Bagi Hasil PKB, sebesar Rp 21.423.169.984,00
- Bagi Hasil BBNKB, sebesar Rp10.626.802.998,00
- Bagi Hasil PBBKB, sebesar Rp18.684.042.078,00
- Bagi Hasil PAP, sebesar Rp3.360.123,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok, sebesar Rp21.430.061.062,00

5.5.1.1.11 Penerimaan Hibah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hibah tahun 2019 sebesar Rp23.949.677.589,00 meningkat sebesar 0,79% dibandingkan penerimaan hibah tahun 2018 sebesar Rp23.762.375.000,00.

penerimaan hibah tahun 2019 terdiri dari :

- Hibah dari Pemerintah, sebesar Rp1.692.000.000,00
- Hibah dana BOS, sebesar Rp22.257.677.589,00

5.5.1.1.12 Penerimaan Lainnya

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lainnya tahun 2019 sebesar Rp19.136.152.045,00 meningkat sebesar 161,25% dibandingkan penerimaan lainnya tahun 2018 sebesar Rp7.324.841.000,00.

Penerimaan lainnya tahun 2019 merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- TMMD, sebesar Rp675.000.000,00
- Bantuan Sarpras Daerah, sebesar Rp15.841.152.045,00
- Bantuan Pendidikan, sebesar Rp2.085.000.000,00
- Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, sebesar Rp535.000.000,00

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5. 149 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018

Arus Keluar Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pembayaran Pegawai	390.898.339.975,00	352.531.365.055,00	10,88
Pembayaran Barang	338.655.157.845,00	347.238.216.376,00	(2,47)
Pembayaran bunga	6.803.500,00	-	
Pembayaran Hibah	29.310.400.000,00	22.446.204.000,00	30,58
Pembayaran Bantuan Sosial	11.920.375.000,00	11.865.819.000,00	0,46
Pembayaran Bantuan Keuangan	721.513.000,00	798.881.000,00	(9,68)
Pembayaran Tak Terduga	730.438.928,00	1.921.815.800,00	(61,99)
Jumlah	772.243.028.248,00	736.802.301.231,00	4,81



Kenaikan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar 4,81% jika dibandingkan dengan arus keluar kas tahun 2018 sebesar Rp736.802.301.231,00.

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran pegawai tahun 2019 sebesar Rp390.898.339.975,00 meningkat sebesar 10,88% dibandingkan pembayaran pegawai tahun 2018 sebesar Rp352.531.365.055,00

Pembayaran pegawai tahun 2019, terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan, sebesar Rp264.884.354.193,00
- b. Tambahan Penghasilan PNS, sebesar Rp45.501.492.539,00
- c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp4.519.500.000,00
- d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, sebesar Rp3.782.712.700,00
- e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, sebesar Rp596.245.370,00
- f. Honorarium PNS, sebesar Rp16.741.336.500,00
- g. Honorarium Non PNS, sebesar Rp6.464.991.400,00
- h. Uang Lembur, sebesar Rp228.630.764,00
- i. Honorarium pengelolaan dana BOS, sebesar Rp614.455.000,00
- j. Belanja Pegawai Dana BLUD, sebesar Rp47.564.621.509,00

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran barang tahun 2019 sebesar Rp338.655.157.845,00 turun sebesar 2,47% dibandingkan pembayaran barang tahun 2018 sebesar Rp347.238.216.376,00

Pembayaran barang tahun 2019 terdiri dari :

- a. Bahan Pakai Habis Kantor, sebesar Rp7.155.917.715,00
- b. Bahan/Material, sebesar Rp13.567.757.013,00
- c. Jasa Kantor, sebesar Rp126.538.392.876,00
- d. Premi Asuransi, sebesar Rp18.577.161.318,00
- e. Perawatan Kend. Bermotor, sebesar Rp7.120.581.390,00
- f. Cetak & Penggandaan, sebesar Rp6.045.509.622,00
- g. Sewa Rumdin/Gedung, sebesar Rp2.105.439.747,00
- h. Sewa Sarana Mobilitas, sebesar Rp853.687.000,00
- i. Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor, sebesar Rp2.521.742.500,00
- j. Makanan dan Minuman, sebesar Rp21.659.204.490,00
- k. Pakaian Dinas dan Atribut, sebesar Rp979.669.650,00
- l. Pakaian Kerja, sebesar Rp1.859.932.900,00
- m. Pakaian Khusus, sebesar Rp612.823.000,00
- n. Perjalanan Dinas, sebesar Rp28.730.773.848,00
- o. Beasiswa Pendidikan PNS, sebesar Rp103.820.000,00
- p. Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, sebesar Rp936.858.350,00
- q. Pemeliharaan, sebesar Rp21.078.853.944,00
- r. Jasa Konsultansi, sebesar Rp5.189.185.700,00
- s. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, sebesar Rp9.434.308.386,00
- t. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, sebesar Rp1.701.364.100,00



- u. Uang Yg akan diserahkan ke Masyarakat, sebesar Rp1.487.250.000,00
- v. Beasiswa Pendidikan Non PNS, sebesar Rp143.000.000,00
- w. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp2.922.701.510,00
- x. Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli, sebesar Rp6.330.528.799,00
- y. Belanja inventaris non kapitalisasi, sebesar Rp128.101.424,00
- z. Barang dan Jasa BLUD, sebesar Rp35.265.005.163,00
- aa. Barang dan Jasa Dana BOS, sebesar Rp15.605.587.400,00

5.5.1.2.3 Pembayaran Bunga

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bunga tahun 2019 sebesar Rp6.803.500,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Bendan sebesar Rp1.800.000.000,00.

5.5.1.2.4 Pembayaran Hibah

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran hibah tahun 2019 sebesar Rp29.310.400.000,00 meningkat sebesar 0,79% dibandingkan pembayaran hibah tahun 2018 sebesar Rp22.446.204.000,00

Pembayaran hibah tahun 2019 terdiri dari :

- a. Hibah kepada Pemerintah, sebesar Rp1.100.000.000,00
- b. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, sebesar Rp28.210.400.000,00

5.5.1.2.5 Pembayaran Bantuan Sosial

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp11.920.375.000,00 meningkat sebesar 161,25% dibandingkan pembayaran bantuan keuangan tahun 2018 sebesar Rp11.865.819.000,00

Pembayaran bantuan sosial tahun 2019 terdiri dari :

- a. Bansos kepada Individu dan/atau Keluarga, sebesar Rp5.746.375.000,00, terdiri dari :
 - 1. Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Pendidikan, sebesar Rp51.875.000
 - 2. Bantuan Sosial Uang Duka bagi Anggota Linmas, sebesar Rp13.500.000,00
 - 3. Bantuan Sosial untuk Biaya Pembongkaran Bangunan dan Pindah bagi Penghuni Lahan Milik Pemerintah, sebesar Rp7.500.000,00
 - 4. Bantuan Sosial untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan, sebesar Rp18.000.000,00
 - 5. Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Kemiskinan, sebesar Rp79.000.000,00
 - 6. Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Warga Tidak Mampu, sebesar Rp1.664.000.000,00
 - 7. Bantuan Sosial Beasiswa Keluarga Tidak Mampu (BKTM) SMA/SMK/MA, sebesar Rp594.000.000,00
 - 8. Bantuan Sosial RTLH (DAK), sebesar Rp3.062.500.000,00
- b. Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan, sebesar Rp6.174.000.000,00



5.5.1.2.6 Pembayaran Bantuan Keuangan

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bantuan keuangan tahun 2019 sebesar Rp721.513.000,00 turun sebesar 9,68% dibandingkan pembayaran bantuan keuangan tahun 2018 sebesar Rp798.881.000,00

Pembayaran bantuan keuangan tahun 2019 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik, terdiri dari :

- a. Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR, sebesar Rp196.367.000,00
- b. Bantuan Keuangan kepada Partai PKS, sebesar Rp71.761.000,00
- c. Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT, sebesar Rp18.734.000,00
- d. Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP, sebesar Rp110.779.000,00
- e. Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA, sebesar Rp48.295.000,00
- f. Bantuan Keuangan kepada Partai PKB, sebesar Rp114.450.000,00
- g. Bantuan Keuangan kepada Partai PPP, sebesar Rp84.581.000,00
- h. Bantuan Keuangan kepada Partai PAN, sebesar Rp57.806.000,00
- i. Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem, sebesar Rp13.300.000,00
- j. Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura, sebesar Rp5.440.000,00

5.5.1.2.7 Pembayaran Tak Terduga

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran tak terduga tahun 2019 sebesar Rp730.438.928,00 turun sebesar 61,99% dibandingkan pembayaran tak terduga tahun 2018 sebesar Rp1.921.815.800,00.

Pembayaran tak terduga tahun 2019 digunakan untuk restitusi BPHTB tahun sebelumnya atas nama Any Restiani sebesar Rp. 4.500.000,00 dan penanganan banjir sebesar Rp725.938.928,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2019 adalah defisit sebesar Rp191.923.960.213,00.

Rincian arus kas bersih dari aktivitas investasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 150 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 Rp	Tahun 2018 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	2.579.412.592,00	2.670.169.647,00	-3,40
Arus Kas Keluar	194.503.372.805,00	146.382.593.476,00	32,87
Arus Kas Bersih	-191.923.960.213,00	-143.712.423.829,00	33,55

Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5. 151 Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal Penjualan Aset Tetap

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun %
	Rp	Rp	
Penjualan aset tetap	279.230.774,00	0,00	0,00
Pencairan dana cadangan	300.000.000,00	2.670.169.647,00	-88,76
Penerimaan kembali investasi Pemda	2.000.181.818,00	0,00	0,00
Arus Kas Masuk	2.579.412.592,00	2.670.169.647,00	-3,40

5.5.2.1.1 Penjualan Aset Tetap

Realisasi arus masuk kas dari penjualan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp279.230.774,00 turun sebesar 89,54% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2018 sebesar Rp Rp2.670.169.647,00. Berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2019 berupa penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil pennebangan pohon.

5.5.2.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi arus masuk kas dari pencairan dana cadangan tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 yang akan digunakan dalam pentahapan Pemilu Kepala Daerah dimana prosesnya sudah dimulai sejak Bulan September 2019.

5.5.2.1.3 Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan kembali investasi pemerintah daerah tahun 2019 sebesar Rp2.000.181.818,00, terdiri dari :

- Penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp2.000.181.818,00 (dana bergulir ketahanan pangan dan perikanan) dari channelling agency PD Bank Pekalongan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- Penerimaan kembali investasi dana bergulir hewan ternak sebesar Rp181.818,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5. 152 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun %
	Rp	Rp	
Perolehan Tanah	3.912.172.520,00	19.140.412.917,00	-79,56
Perolehan Peralatan dan Mesin	35.449.652.521,00	31.356.967.749,00	13,05
Perolehan Gedung dan Bangunan	70.221.428.115,00	51.489.607.167,00	36,38
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.876.027.946,00	38.722.786.830,00	77,87
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.299.732.177,00	5.172.992.732,00	-36,21
Perolehan Aset Lainnya	394.971.300,00	499.826.081,00	-20,98
Pembentukan Dana Cadangan	4.607.388.226,00	0,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.742.000.000,00	0,00	
Jumlah	194.503.372.805,00	146.382.593.476,00	32,87



Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 32,87% % jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp146.382.593.476,00.

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Realisasi arus keluar kas dari perolehan tanah tahun 2019 sebesar Rp3.912.172.520,00 turun sebesar 79,56% dibandingkan perolehan tanah tahun 2018 sebesar Rp19.140.412.917,00.

Perolehan tanah tahun 2019, terdiri dari :

- a. Pengadaan tanah sarana jalan, sebesar Rp731.753.900,00
- b. Pengurukan dan pematangan tanah, sebesar Rp14.432.500,00
- c. Pengadaan tanah sarana umum sanitasi dan air bersih, sebesar Rp3.485.000,00
- d. Pengadaan tanah bangunan pengairan, sebesar Rp3.162.501.120,00

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus keluar kas dari perolehan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp35.449.652.521,00 naik sebesar 115,38% dibandingkan perolehan peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp31.356.967.749,00.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.522.056.921,00, dibandingkan dengan realisasi arus keluar kas Laporan Arus Kas (LAK) terdapat selisih sebesar Rp72.404.400,00 yang merupakan realisasi Belanja Modal pada BLUD RSUD Bendan, karena penganggaran Belanja Modal pada BLUD RSUD Bendan dalam satu rekening, sehingga pencatatan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Lainnya menjadi satu pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan pencatatan untuk Laporan Arus Kas dipisahkan sesuai dengan jenis belanjanya.

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp70.221.428.115,00 naik sebesar 36,95% dibandingkan perolehan gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp51.489.607.167,00.

Perolehan gedung dan bangunan tahun 2019, terdiri dari :

- a. Pengadaan Gedung Tempat Kerja, sebesar Rp69.553.389.715,00
- b. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, sebesar Rp147.147.000,00
- c. Pengadaan Bangunan Bersejarah, sebesar Rp462.534.000,00
- d. Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD RSUD Bendan, sebesar Rp58.357.400,00

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar Rp68.876.027.946,00 naik sebesar 77,95% dibandingkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp38.722.786.830,00.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 terdiri dari :

- a. Jalan, sebesar Rp55.936.229.869,00
- b. Jembatan, sebesar Rp28.195.000,00
- c. Bangunan Air Irigasi, sebesar Rp11.283.466.390,00
- d. Bangunan Air Kotor, sebesar Rp1.044.593.000,00
- e. Instalasi Air Kotor, sebesar Rp51.220.450,00



- f. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, sebesar Rp88.815.575,00
- g. Jaringan Listrik, sebesar Rp435.107.662,00
- h. Jaringan Telepon, sebesar Rp8.400.000,00

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp3.299.732.177,00 turun sebesar 36,21% dibandingkan perolehan aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp5.172.992.732,00.

Perolehan aset tetap lainnya tahun 2019 terdiri dari :

- a. Buku / Kepustakaan, sebesar Rp209.329.900,00
- b. Barang bercorak kesenian/Kebudayaan, sebesar Rp1.757.000,00
- c. Sarpras Olahraga, sebesar Rp22.000.000,00
- d. Aset tetap lainnya (BOS), sebesar Rp3.066.040.277,00

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp394.971.300,00 turun sebesar 20,98% dibandingkan perolehan aset lainnya tahun 2018 sebesar Rp499.826.081,00.

Perolehan aset lainnya tahun 2019 terdiri dari :

- a. software/aplikasi, sebesar Rp381.529.300,00
- b. aset lainnya BLUD RSUD Bendan, sebesar Rp13.442.000,00

5.5.2.2.7 Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi arus keluar kas dari pembentukan dana cadangan tahun 2019 sebesar Rp4.607.388.226,00, terdiri dari :

- a. Penempatan dana cadangan, sebesar Rp4.000.000.000,00
- b. Penempatan bunga dana cadangan, sebesar Rp607.388.226,00

5.5.2.2.8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi arus keluar kas dari penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2019 sebesar Rp7.742.000.000,00, terdiri dari :

- a. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal kepada PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp4.342.000.000,00
- c. Penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00
- d. Penyertaan modal kepada PD.BKK Pekalongan Utara sebesar Rp800.000.000,00
- e. Penyertaan modal kepada PD.BPR BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 153 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 Rp	Tahun 2018 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	1.800.000.000,00	38.240.343,00	4.607,07
Arus Kas Keluar	1.804.741.750,00	12.725.079.674,00	-85,82
Arus Kas Bersih	-4.741.750,00	-12.686.839.331,00	-99,96

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari pinjaman dalam negeri (Bank Syariah Mandiri) untuk RSUD Bendan sebesar sebesar Rp1.800.000.000,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pembentukan dana cadangan		4.302.387.924,00	0,00
Pemnyertaan modal Pemda		8.400.000.000,00	0,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	1.800.000.000,00		0,00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya	4.741.750,00	22.691.750,00	0,00
Jumlah	1.804.741.750,00	12.725.079.674,00	-85,82

Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 85,82% jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp12.725.079.674,00.

5.5.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Realisasi arus keluar kas dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank tahun 2019 merupakan pembayaran pokok hutang RSUD Bendan ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00

5.5.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya tahun 2019 merupakan pembayaran hutang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.741.750,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang transitoris dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5. 155 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2019 Rp	Tahun 2018 Rp	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	57.835.705.918,00	52.588.321.020,00	9,98
Arus Kas Keluar	57.837.216.373,00	52.615.737.657,00	9,92
Arus Kas Bersih	-1.510.455,00	-27.416.637,00	-94,49

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5. 156 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Penerimaan PFK	57.835.705.918,00	52.588.321.020,00	9,98
Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu		0,00	-
Kiriman Uang Masuk		0,00	-
Jumlah	57.835.705.918,00	52.588.321.020,00	9,98

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan PFK yang terdiri dari potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp57.835.705.918,00. Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui Bendahara Umum Daerah.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5. 157 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Pengeluaran PFK	57.837.216.373,00	52.615.737.657,00	9,92
Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu			-
Kiriman Uang Keluar		22.413.502,00	
Jumlah	57.837.216.373,00	52.638.151.159,00	9,88

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Pengeluaran PFK terdiri dari pembayaran potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan



oleh BUD dengan nilai akumulasi sebesar Rp57.837.216.373,00 atau mengalami peningkatan 9,88% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp52.638.151.159,00.

5.5.5 Sisa Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2019 adalah sebesar Rp95.101.710.311,61 atau naik sebesar Rp7.171.992.680,61 dibanding saldo kas tahun 2018 yaitu sebesar Rp87.929.717.631,00. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Saldo Akhir Kas Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Saldo Akhir Kas Di BUD	81.884.779.309,00	80.188.431.351,00	
Deposit	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	
Saldo di RKUD	26.884.779.309,00	25.188.431.351,00	
Saldo Kas Di Bendahara	10.805.000,00	1.395.687,00	
Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00	
Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan	10.805.000,00	1.395.687,00	
Saldo Akhir di BLUD	10.899.968.384,61	7.041.701.633,00	54,79
RSUD Bendan	9.744.757.200,61	6.412.739.454,00	
Puskesmas	1.022.557.275,00	478.752.294,00	
BKPM	59.871.109,00	76.397.215,00	
PSPJ	72.782.800,00	73.812.670,00	
Saldo Kas Lainnya (Saldo Dana BOS)	2.306.157.618,00	698.188.960,00	
Saldo Akhir Kas	95.101.710.311,61	87.929.717.631,00	8,16

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2019. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.830.832.684.231,98, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 159 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian	Jumlah
Saldo Ekuitas 31 Des 2018	2.447.507.384.152,31
Surplus/Defisit LO	106.261.755.735,78
Koreksi Ekuitas	277.063.544.343,89
Ekuitas 31 Desember 2019	2.830.832.684.231,98

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.447.507.384.152,31.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit)-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp106.261.755.735,78.



5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp277.063.544.343,89, terdiri dari :

Tabel 5. 160 Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

URAIAN	JUMLAH
Inventarisasi Aset	306.616.679.494,00
Investasi	-2.002.055.821,00
Koreksi Aset Tetap	-5.183.993.076,90
Koreksi Persediaan	26.130.000,00
Koreksi Piutang	-991.214.768,89
Reklas Aset Tetap	19.826.800,00
Transfer Keluar Aset	-22.925.115.303,00
Transfer Masuk Aset	22.531.600.203,00
Koreksi Utang	1.025.850,00
Koreksi Akumulasi Aset Lain-Lain	-23.029.520.851,32
Penerimaan Pembiayaan	2.000.181.818,00
Jumlah	277.063.544.343,89

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mutasi tambah dari inventarisasi aset sebesar Rp 306.616.679.494,00 merupakan hasil inventarisasi jalan lingkungan Dinperkim sebesar Rp280.746.134.494,00, inventarisasi komplek Batik Plaza sebesar Rp17.384.960.000,00, inventarisasi aset tanah ex SDN Sampangan 1 dan 2 sebesar Rp812.800.000,00, inventarisasi tanah dan bangunan gedung kantor DPUPR sebesar Rp138.150.000,00, inventarisasi aset tanah sawah dan tanah untuk bangunan di Kelurahan Jenggot sebesar Rp4.414.139.000,00, inventarisasi aset tetap BPBD sebesar Rp3.117.196.000,00 dan inventarisasi aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp3.300.000,00.
- Mutasi kurang dari investasi sebesar Rp2.002.055.821,00 merupakan penarikan investasi dana bergulir KKP (Dinperpa) sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penyesuaian nilai investasi dana bergulir simpan pinjam koperasi (Dindagkop UKM) sebesar Rp2.055.821,00.
- Mutasi kurang aset tetap sebesar Rp 5.183.993.076,90 merupakan koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap pada DPUPR sebesar Rp44.465.436,00, koreksi kurang saldo awal aset tetap pada Dinperkim sebesar Rp10.623.533,99, koreksi tambah akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinperkim sebesar Rp18.412.980,00, koreksi kurang karena salah catat aset tetap tanah pada Dinsos P2KB sebesar Rp5.058.925.900,00, koreksi kurang saldo awal aset tetap pada Dishub sebesar Rp47.414.697,92, koreksi tambah saldo awal aset tetap pada Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan sebesar Rp87.000,00, koreksi kurang saldo aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp0,01, koreksi tambah aset tetap jalan desa pada Kelurahan Krapyak sebesar Rp85.514.400,00, koreksi tambah aset tetap pada Kelurahan Medono sebesar Rp7.480.000,00 dan koreksi tambah saldo awal aset tetap pada Kelurahan Pringrejo sebesar Rp1,00.
- Mutasi kurang dari persediaan sebesar Rp26.130.000,00 merupakan koreksi saldo awal persediaan bank darah (BDRS) pada RSUD Bendan



- e. Mutasi kurang dari piutang sebesar Rp991.214.768,89 merupakan penyesuaian penyisihan piutang BLUD BKPM dan BLUD Puskesmas (DINKES) sebesar Rp 87.547.490,00, penyesuaian penghapusan piutang BLUD Puskesmas (DINKES) sebesar Rp39.143.000,00, koreksi piutang (RSUD) sebesar Rp 39.758.595,90, Penyesuaian Penyisihan Piutang (RSUD) sebesar Rp923.196.466,26, Penyesuaian Penyisihan piutang Rusunawa (DINPERKIM) sebesar Rp4.305.833,45, Penyesuaian angsuran handtraktor (DINPERPA) sebesar Rp8.160.000,00, penyesuaian penyisihan piutang (BKD) sebesar Rp2.001.776,00, Penghapusan piutang pajak restoran, hiburan dan air tanah (SKPKD) sebesar Rp 7.093.950,00, Koreksi piutang pajak reklame (SKPKD) sebesar Rp1.251.000,00, penyesuaian penyisihan piutang pajak reklame, parkir, dan air tanah (SKPKD) sebesar Rp9.218.120,50, Koreksi tambah Piutang PBB karena penetapan Piutang PBB th 2008 sd 2018 (SKPKD) sebesar Rp20.129.593,00, Koreksi piutang PBB karena cleansing (th 2008 sd 2012) (SKPKD) sebesar Rp6.616.706,00, Koreksi piutang PBB karena penghapusan piutang PBB th 2008 sd 2018 (SKPKD) sebesar Rp1.362.812.957,00, Penyesuaian penyisihan piutang Bunga Dana Bergulir (SKPKD) sebesar Rp5.133.252,80, Penyesuaian penyisihan pembayaran piutang Kemitraan Ramayana tahun lalu (SKPKD) sebesar Rp32.000.000,00, Koreksi tambah piutang denda PBB th 2008 sd 2017 karena kurang catat (SKPKD) sebesar Rp141.072.163,00, Koreksi piutang denda PBB (SKPKD) sebesar Rp Rp800.615.187,00, pembebasan piutang bunga DB Trading House tahun lalu (SKPKD) sebesar Rp4.254.024,00, keringanan piutang bunga dana bergulir KKP tahun lalu (SKPKD) sebesar Rp1.578.125,00, Koreksi piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2018 (SKPKD) sebesar Rp1.081,00
- f. Mutasi tambah dari reklas aset tetap sebesar Rp19.826.800,00 merupakan reklas aset tetap gedung dari ekstrakom tahun lalu pada Dindik sebesar Rp15.630.000,00, reklasifikasi aset tetap ke non aktif pada Dinkes sebesar Rp7.700.000,00, reklas aset ekstrakomptabel ke aset tetap pada RSUD Bendan sebesar Rp3.503.200,00
- g. Mutasi kurang dari transfer keluar aset tetap Rp22.925.115.303,00 merupakan transfer aset tanah dari Dindik sebesar Rp98.606.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Dinperkim sebesar Rp9.020.727.330,00, transfer aset peralatan dan mesin dari BPBD sebesar Rp68.850.000,00, transfer aset gedung dan bangunan dari DLH sebesar Rp36.729.480,00, transfer aset jalan, jaringan dan irigasi dari DLH sebesar Rp16.124.500,00, transfer aset tanah dari DLH sebesar Rp132.500.000,00, transfer aset peralatan dan mesin dari Diskominfo sebesar Rp106.574.548,00, transfer aset tanah dari Dindagkop UKM sebesar Rp77.146.206,00, transfer aset tanah dari Dinparbudpora sebesar Rp116.400.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Dinparbudpora sebesar Rp172.002.000,00, transfer aset aset tetap lainnya dari Dinparbudpora sebesar Rp10.231.400,00, transfer aset peralatan dan mesin dari BAPPEDA sebesar Rp290.000,00, transfer aset tanah dari BKD sebesar Rp2.273.259.808,00, transfer aset gedung dan bangunan dari BKD sebesar Rp889.232.809,00, transfer aset jalan, jaringan dan irigasi dari BKD sebesar Rp178.125.975,00, transfer aset peralatan dan mesin dari BKD sebesar Rp2.392.809.806,00, transfer aset peralatan dan mesin dari Bag RTP sebesar Rp357.480.180,00, transfer aset gedung dan bangunan dari Kec Pkl Utara sebesar Rp192.030.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Kandang Panjang sebesar Rp54.850.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Panjang Wetan sebesar Rp16.340.691,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Degayu sebesar Rp176.252.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Krapyak sebesar Rp155.830.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari



Panjang Baru sebesar Rp125.046.000,00, transfer aset tanah dari Jenggot sebesar Rp1.643.757.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Jenggot sebesar Rp90.200.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Kuripan Kertoharjo sebesar Rp53.601.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Kuripan Yosorejo sebesar Rp120.720.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Medono sebesar Rp56.763.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Podosugih sebesar Rp124.520.000,00, transfer aset tanah dari Tirto sebesar Rp2.468.400.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Tirto sebesar Rp205.987.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Sapuro Kebulen sebesar Rp142.249.750,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Bendan Kergon sebesar Rp84.448.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Pasirkratonkramat sebesar Rp158.636.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Pringrejo sebesar Rp28.500.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Kauman sebesar Rp149.148.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Poncol sebesar Rp49.434.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Gamer sebesar Rp75.596.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Noyontaansari sebesar Rp57.637.000,00, transfer aset tanah dari Kalibaros sebesar Rp1.020.000.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi dari Kalibaros sebesar Rp85.560.000,00.

- h. Mutasi tambah dari transfer masuk aset Rp22.531.600.203,00 merupakan transfer aset peralatan dan mesin pada Dindik sebesar Rp86.134.400,00, transfer aset tanah pada Dinkes sebesar Rp1.940.392.000,00, transfer aset jalan, jaringan dan irigasi pada Dinperkim sebesar Rp16.124.500,00, transfer aset tanah pada Dinperkim sebesar Rp34.800.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Dinperkim sebesar Rp2.117.799.750,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Satpol Pp sebesar Rp24.641.148,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Dinsosp2kb sebesar Rp12.960.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Dinperpa sebesar Rp290.000,00, transfer aset tanah pada DLH sebesar Rp947.002.808,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Diskominfo sebesar Rp23.769.480,00, transfer aset tanah pada Dpmpstsp sebesar Rp173.452.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Dpmpstsp sebesar Rp11.632.000,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Dpmpstsp sebesar Rp728.935.929,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Dinparbudpora sebesar Rp66.528.880,00, transfer aset tanah pada Dinparbudpora sebesar Rp1.876.170.000,00, transfer aset jalan, jaringan dan irigasi pada Dinparbudpora sebesar Rp178.125.975,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Dinparbudpora sebesar Rp93.768.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Dinarpus sebesar Rp2.100.500,00, transfer aset tanah pada BKD sebesar Rp132.500.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag Hukum sebesar Rp32.481.540,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag Organisasi sebesar Rp63.396.720,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag Perekonomian sebesar Rp31.556.520,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag PBJ sebesar Rp145.709.200,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag Umum sebesar Rp1.471.426,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag RTP sebesar Rp1.518.245.500,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bag Humas sebesar Rp84.336.200,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Kec Pkl Utara sebesar Rp68.850.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Kandang Panjang sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Panjang Wetan sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Panjang Wetan sebesar Rp95.780.000,00, transfer aset tanah pada Panjang Wetan sebesar



Rp98.606.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Degayu sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bandengan sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Bandengan sebesar Rp96.250.000,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Bandengan sebesar Rp99.496.268,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Krapyak sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Krapyak sebesar Rp647.514.728,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Padukuhan Kraton sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Padukuhan Kraton sebesar Rp522.077.472,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Panjang Baru sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Jenggot sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Jenggot sebesar Rp123.959.646,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Buaran Kradenan sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Buaran Kradenan sebesar Rp144.144.000,00, transfer aset tanah pada Kuripan Kertoharjo sebesar Rp81.600.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Kuripan Kertoharjo sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Kuripan Kertoharjo sebesar Rp36.827.173,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Kuripan Yosorejo sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Kuripan Yosorejo sebesar Rp197.883.323,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Soko Duwet sebesar Rp916.258.566,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Soko Duwet sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Banyurip sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Banyurip sebesar Rp1.111.904.524,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Banyurip sebesar Rp804.628.953,00, transfer aset tanah pada Kec Pkl Barat sebesar Rp2.468.400.000,00, transfer aset tetap lainnya pada Kec Pkl Barat sebesar Rp10.231.400,00, transfer aset tanah pada Medono sebesar Rp66.300.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Medono sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset gedung dan bangunan pada Medono sebesar Rp10.846.206,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Medono sebesar Rp26.635.190,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Podosugih sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Podosugih sebesar Rp40.357.000,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Tirto sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Tirto sebesar Rp258.449.625,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Sapuro Kebulen sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Sapuro Kebulen sebesar Rp633.210.195,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Bendan Kergon sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Bendan Kergon sebesar Rp884.336.396,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Pasirkratonkramat sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Pasirkratonkramat sebesar Rp269.492.105,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Pringrejo sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Pringrejo sebesar Rp1.721.739.483,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Kauman sebesar Rp209.794.445,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Poncol sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Klego sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Klego sebesar Rp212.338.165,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Gamer sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Noyontaansari sebesar Rp17.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi



pada Noyontaansari sebesar Rp323.134.080,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Setono sebesar Rp43.469.600,00, transfer aset jalan, jalan, jaringan dan irigasi dan irigasi pada Setono sebesar Rp330.650.137,00, transfer aset peralatan dan mesin pada Kalibaros sebesar Rp17.469.600,00.

- i. Mutasi tambah dari utang sebesar Rp1.025.850,00 merupakan koreksi pencatatan utang tahun 2018 RSUD Bendan.
- j. Mutasi kurang dari akumulasi aset lain-lain sebesar Rp23.029.520.851,32 merupakan koreksi saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain pada : Dinas Pendidikan sebesar Rp30.237.920,14, Dinas Kesehatan sebesar Rp208.324.000,00, Dindagkop UKM sebesar Rp17.913.715.115,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 641.239.800,00, BKD sebesar Rp4.217.804.016,18 dan Bag. Rumah Tangga dan Perlengkapan sebesar Rp18.200.000,00.
- k. Mutasi tambah dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 2.000.181.818,00 merupakan penerimaan kembali investasi dana bergulir KKP dari Bank Pekalongan (Dinperpa) sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penerimaan kembali investasi dana bergulir hewan ternak (Dinperpa) sebesar Rp181.818,00.



BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

1. Keadaan Umum

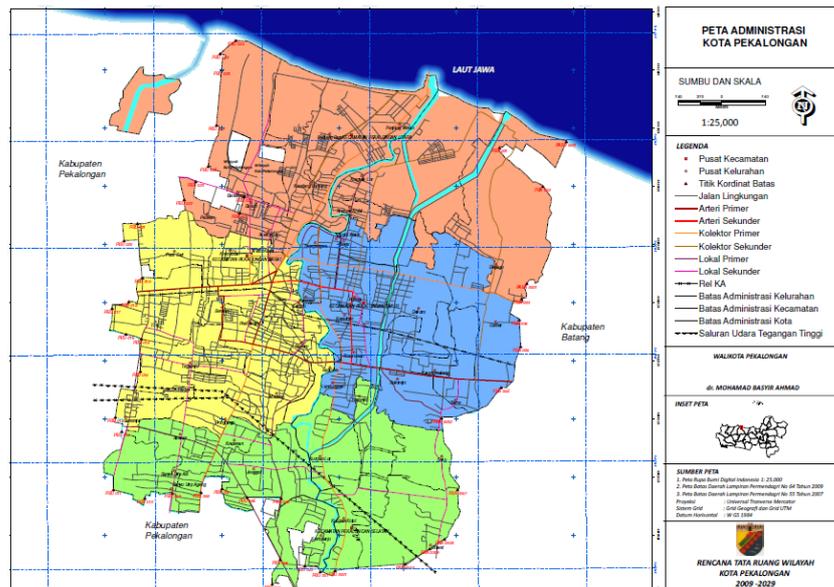
a. Dasar Pembentukan

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan yang semula Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

b. Letak Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Peta administrasi Kota Pekalongan sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 6. 1 Peta Administratif Kota Pekalongan



Batas administratif Kota Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Tabel 6. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2019

Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	%
Kec. Pekalongan Barat	7	10,05	22,21
Kec. Pekalongan Timur	7	9,52	21,04
Kec. Pekalongan Utara	7	14,88	32,88
Kec. Pekalongan Selatan	6	10,80	23,87
JUMLAH	27	45,25	100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2020

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 14,88 km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 6. 2 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Pekalongan Barat	10,50	22
2	Pekalongan Timur	9,52	21
3	Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Pekalongan Utara	14,88	33
	Total	45,25	100

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada Tahun 2019 sebanyak 307.097 jiwa, terdiri dari 153.518 jiwa laki-laki dan 153.579 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima Tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 99,96 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,96 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

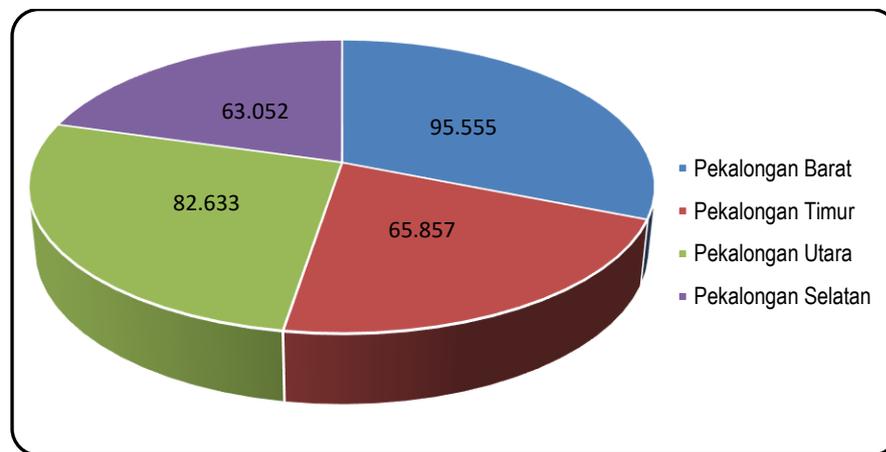


Tabel 6. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2015	148.295	148.238	296.533
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.518	153.579	307.097

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan penyebarannya, pada Tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 95.555 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 82.633 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 65.857 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 63.052 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 6. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang Tahun 2015-2019 dalam kisaran 0,86% sampai 0,96%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dan 2018 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,96%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,86%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan selama lima Tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

	0,96
	0,95
	0,94
	0,96
	0,86

sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan



kenaikan jumlah penduduk, Tahun 2015 sebesar 6.554 jiwa/km², Tahun 2019 meningkat menjadi 6.787 jiwa/km². Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 42,37 persen, lebih kecil dari Tahun 2018 yang mencapai 42,48 persen. Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.

Tabel 6. 5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
2015	6.554	43,77
2016	6.613	42,88
2017	6.672	42,64
2018	6.729	42,48
2019	6.787	42,37

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

d. Kelembagaan

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.8484 Tahun 2017, **H. M. Saelany Machfudz, SE**, ditetapkan sebagai Walikota Pekalongan masa jabatan 2016-2021 menggantikan **H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE** yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2017. Sedangkan **H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33-986 Tahun 2019 ditetapkan sebagai Wakil Walikota Pekalongan yang kosong sejak tahun 2017. Sedangkan Sekretaris Daerah dijabat oleh **Sri Ruminingsih, SE, M.Si.**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah (3 Asisten dan 9 Bagian);
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Staf Ahli;
- 4) Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Inspektorat;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c) Badan Keuangan Daerah;
 - d) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) RSUD;
- 5) Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 - g) Dinas Pendidikan;
 - h) Dinas Kesehatan;
 - i) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - k) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - o) Dinas Lingkungan Hidup;



- p) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q) Dinas Perhubungan;
 - r) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - s) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - t) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - v) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - w) Dinas Kelatan dan Perikanan;
- 6) Kecamatan, terdiri dari :
- a) Kecamatan Pekalongan Barat;
 - b) Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c) Kecamatan Pekalongan Utara;
 - d) Kecamatan Pekalongan Selatan.
- 7) Lembaga lain, yang terdiri dari :
- a) Satpol PP;
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota DPRD Kota Pekalongan periode 2019-2024 sebanyak 35 orang, merupakan hasil pemilu tahun 2019 telah dilantik dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 14 Agustus 2019. Adapun nama-nama dan partai dari anggota DPRD tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. 6 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Periode 2019 - 2024

No	Anggota Dewan	Partai
1	NUSRON, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ROBIKIN	Partai Kebangkitan Bangsa
3	dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes	Partai Golongan Karya
4	H. BUDI SETIAWAN, SE	Partai Golongan Karya
5	ANYTA RIANTI	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	H. ISMET INONU, SH, M.H	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Ir. H. SAPRUDIN, MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	MOFID, SH	Partai Golongan Karya
9	H. FAISOL KHANNAN, S.H.I	Partai Golongan Karya
10	NASHRULLAH	Partai Keadilan Sejahtera
11	ABDUL ROZAK, S.IP	Partai Persatuan Pembangunan
12	H.M. BAGUS RIZA ASTIAN, S.Sos	Partai Amanat Nasional
13	IDI AMIN	Partai Kebangkitan Bangsa
14	RIANA SETYAWATI, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya
15	EDY SUPRIYANTO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16	MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc	Partai Golongan Karya
17	ISNAINI RUHULLAH KUMAINI	Partai Nasional Demokrat
18	IRAWADI SETIAWAN	Partai Keadilan Sejahtera
19	MUKHLIKIN	Partai Persatuan Pembangunan
20	H. MAKMUR SOFYAN MUSTOFA, S.Pd	Partai Amanat Nasional
21	MOCHAMMAD SUFI AKBAR	Partai Kebangkitan Bangsa
22	DRS. HM. FATONI, MH	Partai Kebangkitan Bangsa
23	ABDUL GHOFUR	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24	FAUZI UMAR LAHJI, SE	Partai Golongan Karya
25	DESY TRIA AMIRA FASA, A.Md	Partai Golongan Karya
26	MUNGZILIN, SH.I	Partai Keadilan Sejahtera
27	H. MABRUR, SH	Partai Persatuan Pembangunan



No	Anggota Dewan	Partai
28	H.M.BOWO LEKSONO, Ah.T, SH, MM, MH	Partai Hati Nurani Rakyat
29	MUHAMMAD LATIFUDDIN	SSKDN
30	JECKY ZAM ZAMI	Partai Kebangkitan Bangsa
31	GUMELAR	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32	HJ. BALGIS DIAB, SE, MM	Partai Golongan Karya
33	H.AMINUDDIN AZIZ, SE	Partai Golongan Karya
34	DRS.NUR HADI	Partai Persatuan Pembangunan
35	H.M.RIZQON, S.IP	Partai Amanat Nasional

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

Untuk pimpinan DPRD telah ditetapkan dalam rapat paripurna Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan Masa Jabatan 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019, terdiri dari :

- 1) Ketua DPRD : Hj. Balgis Diab, SE, MM
- 2) Wakil Ketua DPRD : Nusron, S.Ag dan Edy Supriyanto

e. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 3.142 orang, yang terdiri dari PNS dan CPNS dengan rincian menurut golongan seperti tabel berikut:

Tabel 6. 7 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Golongan I	98	92	3,21	2,93
2	Golongan II	527	532	17,27	16,93
3	Golongan III	1.622	1.762	53,15	56,08
4	Golongan IV	805	756	26,38	24,06
	Jumlah	3.052	3.142	100,00	100,00

Sumber : BKPPD per 31 Desember 2019

Jika dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.734 orang dan yang paling sedikit adalah S-3 yaitu 3 orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 8 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
1	SD	93	76	3,05	2,42
2	SLTP	115	109	3,77	3,47
3	SLTA	619	585	20,28	18,62
4	DIPLOMA I	9	9	0,29	0,29
5	DIPLOMA II	40	31	1,31	0,99
6	DIPLOMA III	326	358	10,68	11,39
7	DIPLOMA IV	36	38	1,18	1,21
8	S-1	1.625	1.734	53,24	55,19
9	S-2	188	199	6,16	6,33



No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
10	S-3	1	3	0,03	0,09
	Jumlah	3.052	3.142	100,00	100,00

Sumber : BKPPD per 31 Desember 2019

Sedangkan jumlah PNS/CPNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2019, sebanyak 81 orang, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6. 9 Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi

No	Tingkat Eselon	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D1	D3	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	1	-	1
3	Eselon IV	-	-	2	17	2	21
4	Staf	14	-	20	19	-	53
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	4	2	6
	Jumlah	14	-	22	41	4	81

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan, 2019.

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sebanyak 271 orang atau 53,87%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 10 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2018 s/d 2019

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2018	2019	2018	2019
1	II.A	1	1	0,19	0,20
2	II.B	25	27	4,80	5,38
3	III.A	43	37	8,25	7,35
4	III.B	72	66	13,82	13,12
5	IV.A	296	271	56,81	53,87
6	IV.B	84	101	16,12	20,08
	Jumlah	521	503	100,00	100,00

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan, 2019.

2. Pembinaan Batas Wilayah

Pada Tahun 2019 tidak dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan batas wilayah tetapi hanya rapat koordinasi dengan Lurah, Camat dan Instansi terkait Pemerintah Kota Pekalongan dan Lurah, Camat, Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta dengan Lurah, Camat dan Instansi Pemerintah Kabupaten Batang terkait Identifikasi Batas Wilayah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2017 serta pengecekan kembali data Batas Wilayah setelah dilakukan dengan GPS dan pada Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah.



3. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Sedangkan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Karena merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka dengan kata lain tugas dan fungsi dinas ini setara dengan urusan Wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta sosial. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- a. Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara.
- c. Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

a. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan melalui sosialisasi/sarasehan di kelompok sasaran tibum yang dalam hal ini ditargetkan pada 50% jumlah Kelurahan se-Kota Pekalongan. Namun pada pelaksanaannya anggaran sosialisasi dialihkan untuk pelaksanaan sosialisasi penertiban pedagang di Jl. Pelita II.

1) Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan evaluasi bagi anggota Satpol PP bertujuan untuk menjaga performa tugas anggota Satpol PP dan instansi Satpol PP itu sendiri.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah kegiatan Forkomkon yang bertujuan sebagai sarana/forum komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait atau dengan masyarakat seperti pedagang kaki lima. Dari kegiatan ini Satpol PP bisa saling berkomunikasi dengan masyarakat sehingga dapat melaksanakan pencegahan tindak kriminal. Pada tahun 2019 forkonkom dilaksanakan dengan tema “Sinergitas Pemangku Kepentingan di Bidang Tibum Tranmas dalam rangka Penanganan PMKS di Kota Pekalongan”. Peserta kegiatan adalah Camat dan Lurah sekota Pekalongan beserta Kasi Trantib yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Sosial P2KB, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepala RPSBM Kota Pekalongan. Tujuan dari pelaksanaan forkonkom ini adalah:

- a) Menyamakan persepsi pentingnya kerjasama yang baik dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Punk, WTS, Narkoba, Miras dan Pengamen, Penyakit masyarakat lainnya).
- b) Pemangku kepentingan terkait PMKS di Kota Pekalongan dapat lebih saling bersinergi dalam menciptakan Kota Pekalongan yang aman, nyaman dan tertib dari PMKS.
- c) Stake Holder dapat mengambil langkah yang efektif dalam penanganan PMKS.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa meliputi Kesamaptaan Anggota Satpol yang diadakan di Gedug Diklat Kota Pekalongan dan Lapangan Mataram Kota Pekalongan pada 22-23 November 2019 dengan tujuan melihat dan menilai kesiapan



tenaga bantu kegiatan Satpol PP baik secara fisik maupun lainnya untuk menerima tugas di tahun selanjutnya. Kegiatan Kesamaptaaan terdiri dari Test Tertulis, Wawancara, Kesehatan dan Kesamaptaaan.

Kegiatan Bintek Penyuluhan Undang-Undang juga telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2019 di ruang amarta Setda Kota Pekalongan dengan tema penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Pekalongan dan peserta adalah seluruh anggota Satpol PP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat dan mensinergitaskan pemangku kepentingan di bidang tibum tranmas terkait PMKS di Kota Pekalongan serta membekali Anggota dengan pengetahuan terkait dasar hukum dan penyelesaian persoalan di lapangan. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan yaitu :

- a) Menyamakan persepsi pentingnya kerjasama yang baik dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Punk, WTS, Narkoba, Miras dan Pengamen, Penyakit masyarakat lainnya).
- b) Anggota Satpol PP lebih memahami dan mengerti dasar hukum dan batasan terkait tugas dan fungsinya.
- c) Anggota Satpol PP Kota Pekalongan dapat lebih cepat dan tanggap dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP juga turut berpartisipasi pada Lomba Defile dalam rangka peringatan HUT Satpol PP Tk. Provinsi Jawa Tengah th. Satpol PP berhasil menorehkan prestasi dengan meraih Juara II Lomba Defile ini.

Kegiatan Gelar Pasukan dan lomba dalam rangka HUT Satpol PP TiProvinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Februari 2019 bertempat di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan dan diikuti oleh Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. Adapun pemenang Lomba Defile Satpol PP :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Juara 1 | : Kota Semarang |
| - Juara 2 | : Kota Pekalongan |
| - Juara 3 | : Kabupaten Magelang |
| - Juara Harapan I | : Kota Salatiga |
| - Juara Harapan II | : Kabupaten Pekalongan |
| - Juara Harapan III | : Kabupaten Semarang |

b. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

Pelaksanaan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) oleh Satpol PP Kota Pekalongan didampingi petugas dari Bea Cukai dan perangkat daerah lainnya dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan razia ke tempat-tempat peredaran dan penjualan eceran di sekitar Kota Pekalongan, serta memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat dan penjual untuk tidak mendistribusikan lagi rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Sampai akhir Tahun 2019, Satpol PP berhasil mendata 541 bungkus rokok ilegal dan mengkoordinasikannya kepada Bea Cukai untuk ditangani. Hal ini menunjukkan keberhasilan Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat karena jumlah bungkus rokok ilegal yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 570 bungkus.



Satpol PP melalui kegiatan ini melaksanakan tugas pengumpulan data mengenai rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai. Operasi razia pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melibatkan instansi lain diantaranya: Bagian Hukum, Dindakop, Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, Bagian Perekonomian, dll. Target pengumpulan data dan informasi ini adalah toko-toko penjual rokok yang ada di Kota Pekalongan. Selain melakukan pengumpulan data, Satpol PP juga turut mensosialisasikan kepada toko-toko yang didatangi mengenai larangan peredaran rokok tanpa pita cukai dengan menempel stiker dan membagikan brosur.

Hasil pengumpulan data dan informasi ini kemudian dilaporkan untuk dikoordinasikan dengan Bea Cukai untuk segera ditindaklanjuti. Berikut hasil rekapitulasi pengumpulan data dan informasi rokok tanpa pita cukai tahun 2019 :

Tabel 6. 11 Rekapitulasi Rokok Tanpa Pita Cukai Tahun 2019

NO.	BULAN	BATANG	BUNGKUS
1	JANUARI	-	-
2	FEBRUARI	1500	75
3	MARET	27	1
4	APRIL	-	-
5	MEI	-	-
6	JUNI	3680	184
7	JULI	887	44
8	AGUSTUS	-	-
9	SEPTEMBER	3040	152
10	OKTOBER	-	-
11	NOVEMBER	1700	85
12	DESEMBER	-	-

Sumber : Satpol PP, 2019, diolah

c. Pelayanan Kedaruratan Sipil

Kedaruratan Sipil tak lepas dari peran Satpol PP menciptakan kemandirian, ketentraman dan ketertiban umum program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung siap siaga bencana dan pertolongan pada bahaya kebakaran serta non kebakaran.

Satpol PP melalui Program Kedaruratan Sipil selalu siap siaga mengerahkan petugas pemadam kebakaran dalam menangani bahaya kebakaran dan menangani bantuan kepada masyarakat seperti penanganan sarang tawon dan ular serta petugas Satlinmas dalam penjagaan posko bencana alam dan pengamanan wilayah.

1) Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (LINMAS) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 meliputi Posko Penanggulangan Bencana Alam (PBA), Pengamanan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Syawal dan Natal serta pengamanan pada saat Tahun baru sehingga tercipta peningkatan situasi yang aman dan kondusif. Terciptanya kerukunan antar umat beragama serta keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kota Pekalongan juga menjadi tujuan dari kegiatan ini.



Kegiatan Linmas juga berkaitan dengan pelatihan petugas Linmas di Kota Pekalongan antara lain Pelaksanaan Kegiatan Kesamaptaan di Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang dan diikuti Linmas Ton Inti sebanyak 35 orang dengan materi Pembinaan Kelinmasan, Peran Satlinmas dalam Pertahanan Negara dan Penanganan Pertama pada Korban Bencana.

2) **Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan**

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan meliputi pelaksanaan kegiatan sarasehan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi antara Satpol PP dengan masyarakat sehingga pengelolaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat secara efektif terlaksana dengan tepat sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di kelurahan- kelurahan yang ada di Kota Pekalongan dengan peserta adalah perangkat daerah kelurahan serta masyarakat sekitar dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.

Satpol PP Kota Pekalongan juga telah membentuk Kader Siaga Trantib (KST) di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pekalongan sebagai kepanjangan tangan dari Satpol PP untuk wilayah kelurahan dimana terkadang terdapat pelanggaran kantrantibmas yang tidak terjangkau oleh Satpol PP. Kader Siaga Trantib yang menemukan adanya pelanggaran kantrantibmas akan melaporkan kejadian secara berkala kepada Satpol PP dan segera ditindak lanjuti oleh petugas Satpol PP.

Pada kegiatan pengendalian keamanan lingkungan juga meliputi pelaksanaan operasi Cipta Kondisi yang dilaksanakan secara gabungan dengan TNI dan Polri menyusuri wilayah Kota Pekalongan guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Pekalongan.

3) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

Kegiatan ini meliputi kegiatan operasional Damkar, seperti penanganan kebakaran yang terjadi di dalam dan sekitar wilayah Kota Pekalongan. Tidak hanya menangani kebakaran yang terjadi, anggota Damkar Kota Pekalongan juga selalu siap siaga dalam menanggapi laporan warga terkait permohonan bantuan bencana alam lain seperti penanganan sarang tawon, penaklukan ular di lingkungan warga dan laporan-laporan lain.

Pencegahan bahaya kebakaran juga selalu menjadi prioritas Damkar Kota Pekalongan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghindari bahaya kebakaran sampai dengan cara penanggulangannya.

Tabel 6. 12 Rekapitulasi Pemadaman Kebakaran Tahun 2019

No	Tanggal	Tempat Kebakaran/ Alamat	Terbakar	Penyebab Kebakaran
1	25-01-2019	Kelurahan Banyurip	Rumah	Api Kompor
2	25-02-2019	Depan TK Batik Setono	Gerobak	Api Kompor
3	13-03-2019	BPJS Ketenagakerjaan	Saklar	Saklar meledak
4	14-03-2019	Jl. Kebon Sari, Karang Malang	Gudang Kapuk	Arus Pendek Listrik
5	21-04-2019	Kelurahan Soko Duwet Rt 01/02 (Kab.	Dapur Home Industri	Tungku



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



No	Tanggal	Tempat Kebakaran/ Alamat	Terbakar	Penyebab Kebakaran
		Pekalongan)		
6	23-04-2019	Simbang Kulon Gg. Kartiko Rt 24/ Rw 09 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Kompor Cap Batikan
7	26-04-2019	Simbang Kulon Raya	Dapur	Arus Pendek Listrik
8	12-05-2019	Jl. Ahmad Yani	Lahan Kosong	Anak Mainan Petasan
9	15-05-2019	Jl. Sultan Agung	Kios Buah	Obat Nyamuk Bakar
10	18-05-2019	Mall Ramayana	1 Unit Gudang genset	Konsleting
11	26-05-2019	Jalan Tol Pekalongan - Pemalang	Truk Muatan	Tangki Bensin Bocor
12	01-06-2019	PG. Sragi PTPN X Nusantara	Pabrik	Percikan Api
13	02-06-2019	Pabrik Dupantex Tirto	Pabrik	Arus Pendek Listrik
14	10-06-2019	Ruko Batik Kuntul Mas	Ruko	Puntung Rokok
15	28-06-2019	Ruko Jl. Kusuma Bangsa No. 25	Ruko	Kompor Gas
16	02-07-2019	TPA Degayu	TPA	Cuaca Panas
17	10-07-2019	Jl. Gatot Subroto Kios Ayam Bakar	Kios Buah	Kompor Gas
18	19-07-2019	Jl. RE Martadinata (Kab. Batang)	Rumah	Kompor Gas
19	23-07-2019	Perum Swadaya Kandang Panjang	Rumah	Arus Pendek Listrik
20	24-07-2019	Sebelah Rusunawa Panjang	Lahan Kosong	Bakar-Bakar Sampah
21	07-08-2019	Home Industri Gondo, Jl. Letnan Suprpto	Home Industri	Gondo Meluap
22	08-08-2019	TPA Degayu	TPA	Cuaca Panas
23	09-08-2019	Jl. Garuda gg. Delima No. 41 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik
24	14-08-2019	Simbang Wetan Rt 08/ Rw. 03 Buaran (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik
25	27-08-2019	Bong Cino Belakang BLK Kuripan	Alang-alang Bong Cino	Bakar-Bakar Sampah
26	29-08-2019	PT. Sinar Amaril Batang, Tulis (Batang)	Pabrik	Arus Pendek Listrik
27	30-08-2019	Jl. WR. Supratman (Along Jaya)	Kapal	Bakar-Bakar Sampah
28	30-08-2019	Lap. Tembak Mako Brimob Kalibanger	Lahan Kosong	Bakar Sampah Ban
29	06-09-2019	SD Panjang Wetan 04	Lahan Kosong	Bakar Sampah
30	08-09-2019	Jl. Diponegoro	Sampan	Bakar-Bakar Sampah
31	10-09-2019	Perum. Podosugih	Lahan Kosong	Bakar Sampah
32	11-09-2019	Jl. Patimura Kel. Gamer	Bahu Persawahan Lahan Kosong	Bakar Jerami
33	12-09-2019	Wonoyoso Gg. 1 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik
34	14-09-2019	Rumah Kos Jl. Kusuma Bangsa	Rumah Kos	Obat Nyamuk Bakar
35	24-09-2019	BLK Kuripan	Alang-alang Halaman BLK	Bakar- Bakar Lahan
36	29-09-2019	Kauman Gg. 3 No. 4	Rumah Kos	Konsleting Listrik
37	04-10-2019	Pisang Sari Kel. Panjang Wetan	Rumah	Konsleting Listrik
38	07-10-2019	Jl. Keputran Gg. A	Rumah	Konsleting Listrik
39	24-10-2019	Kuripan Kidul Gg. 2	Lahan Kosong	Bakar - Bakar Sampah

Sumber : Satpol PP, 2019, diolah

Tabel 6. 13 Rekapitulasi Evakuasi Hewan Liar Oleh Pemadam Kebakaran

No	Tanggal	Jenis Hewan	Tempat Evakuasi	Korban
1	04-01-2019	Tawon Liar	Alun-Alun Kota Pekalongan	Nihil
2	05-01-2019	Tawon Liar	Alun-Alun depan bank Mandiri	Nihil
3	09-01-2019	Tawon Liar	Jl. Trikora Gg. 1 Kel. Yosorejo	Nihil



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019



No	Tanggal	Jenis Hewan	Tempat Evakuasi	Korban
4	09-01-2019	Tawon Liar	Soko Duwet Gg. 19	Nihil
5	09-01-2019	Tawon Liar	Jl. Trikora No. 73 Kel. Yosorejo	Nihil
6	09-01-2019	Tawon Liar	Yosorejo RT. 03/06 Kuripan Yosorejo	Nihil
7	11-01-2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata No.3	Nihil
8	11-01-2019	Tawon Liar	Noyontaan Gg. 16 B No.3	Nihil
9	14-01-2019	Biawak	Perum. Beringin	Nihil
10	17-01-2019	Tawon Liar	Noyontaan Gg. 12 A	Nihil
11	18-01-2019	Tawon Liar	Kradenan Gg.1 Buaran	Nihil
12	18-01-2019	Biawak	Perum. Villa Atria Blok No.2	Nihil
13	18-01-2019	Tawon Liar	Dinas Pendidikan	Nihil
14	20-01-2019	Tawon Liar	Keputran Gg. 7	Nihil
15	02-02-2019	Tawon Liar	Jl. Kh Ahmad Dahlan Rt 03/ 07	Nihil
16	04-02-2019	Tawon Liar	Jl. Jawa	Nihil
17	16-02-2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata Rt 03/01	Nihil
18	11-03-2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata Rt 01/04	Nihil
19	15-03-2019	Tawon Liar	Aspol Kraton	Nihil
20	20-03-2019	Tawon Liar	Jl. Dr. Wahidin Gg.2 No.34	Nihil
21	24-03-2019	Tawon Liar	TK Mahad Islam	Nihil
22	29-03-2019	Tawon Liar	Kraton Gg. 1 B No.3	Nihil
23	29-03-2019	Tawon Liar	Jl. Karya Bakti Gg. Sunan Giri	Nihil
24	02-04-2019	Tawon Liar	Jl. Karang Malng	Nihil
25	26-04-2019	Tawon Liar	Jl. Kalimantan	Nihil
26	28-04-2019	Tawon Liar	Jl. Sulawesi	Nihil
27	07-05-2019	Tawon Liar	Jl. Asem Binatur	Nihil
28	08-05-2019	Tawon Liar	Taman Wilis Sebelah Selatan	Nihil
29	16-05-2019	Tawon Liar	Jl. Nusa Indah No. 10	Nihil
30	11-07-2019	Tawon Liar	Jl. Blimbing No.60-62 Rt03/04	Nihil
31	09-06-2019	Ular	Jl. Pringlangu Gg. 1 Kel. Pringrejo	Nihil
32	15-07-2019	Tawon Liar	Hotel Shantika	Nihil
33	26-07-2019	Anjing	Perum. Binagriya Jl. Elok Baru	Nihil
34	31-07-2019	Tawon Liar	Jl. Irian Gg. 4 Sapuro Kebulen	Nihil
35	13-08-2019	Tawon Liar	Kuripan Lor Gg. 14	Nihil
36	10-09-2019	Tawon Liar	Jl. Sumatra Gg.9	Nihil
37	11-09-2019	Tawon Liar	Jl. Madura Gg. 1 Kebulen	Nihil
38	17-09-2019	Tawon Liar	Jl. Prisma Raya Perum. Linmas	Nihil
39	20-09-2019	Tawon Liar	Perum GTA	Nihil
40	25-09-2019	Biawak	Setono GG. V No. 55	Nihil
41	29-09-2019	Tawon Liar	Jl. Kanfer Perum. Slamaran	Nihil
42	04-10-2019	Tawon Liar	BPJS Kesehatan	Nihil
43	05-10-2019	Kucing terjepit	Jl. WR. Supratman Pisang Sari gg. Lemuru No.36	Nihil
44	16-10-2019	Tawon Liar	Klego Gg.8	Nihil
45	26-10-2019	Tawon Liar	Duwet RT 02 RW 02	Nihil
46	04-11-2019	Tawon Liar	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kraton	Nihil
47	07-11-2019	Tawon Liar	Jl. Pembangunan	Nihil
48	09-11-2019	Tawon Liar	Kramatsari Gg. 19	Nihil
49	17-11-2019	Tawon Liar	Kel. Tegal Rejo RT 04/ RW 09	Nihil
50	18-11-2019	Tawon Liar	Jl. Gajah Mada Tirta gg 1 Rt 03 RW 01	Nihil
51	19-11-2019	Tawon Liar	Noyontaan Rt 02 Rw 06	Nihil
52	21-11-2019	Tawon Liar	Jl. Untung Suropati Gg. Kyai Adnan No. 32	Nihil
53	27-11-2019	Tawon Liar	Kantor BAPPEDA	Nihil
54	27-11-2019	Tawon Liar	Jl. Tentara Pelajar	Nihil



No	Tanggal	Jenis Hewan	Tempat Evakuasi	Korban
55	27-11-2019	Tawon Liar	Kraton Kidul	Nihil
56	28-11-2019	Tawon Liar	Jl. Patriot No. 29	Nihil
57	28-11-2019	Tawon Liar	Jl. Agus Salim	Nihil
58	29-11-2019	Tawon Liar	Klego	Nihil
59	29-11-2019	Tawon Liar	Jl. Kayu Manis	Nihil
60	30-11-2019	Tawon Liar	Jl. Parang Garuda	Nihil
61	30-11-2019	Tawon Liar	Jl. Jendral Sudirman	Nihil
62	30-11-2019	Tawon Liar	Jl. Pringgosari	Nihil
63	30-11-2019	Tawon Liar	Jl. Buaran Gg. 2	Nihil
64	01-12-2019	Tawon Liar	Jl. Pagerung Bendan Kergon	Nihil
65	03-12-2019	Tawon Liar	Perum. BRD	Nihil
66	04-12-2019	Tawon Liar	Kantor Dishub	Nihil
67	04-12-2019	Tawon Liar	Kel. Klego	Nihil
68	04-12-2019	Tawon Liar	Jl. Cendrawasih	Nihil
69	05-12-2019	Tawon Liar	Jl. Rajawali Utara	Nihil
70	05-12-2019	Tawon Liar	Poncol	Nihil
71	06-12-2019	Tawon Liar	SMP N 05	Nihil
72	06-12-2019	Tawon Liar	Puskesmas Noyontaan	Nihil
73	06-12-2019	Tawon Liar	Setono Gg. 6	Nihil
74	06-12-2019	Tawon Liar	Bendan Kergon	Nihil
75	06-12-2019	Tawon Liar	Jl. Untung Suropati	Nihil
76	07-12-2019	Tawon Liar	Jl. Irian	Nihil
77	07-12-2019	Tawon Liar	Jl. Kapita Patimura	Nihil
78	08-12-2019	Tawon Liar	Jl. Rajawali Selatan	Nihil
79	13-12-2019	Tawon Liar	EXTREM Futsal	Nihil
80	13-12-2019	Tawon Liar	Jl. H. Agus Salim	Nihil
81	19-12-2019	Tawon Liar	Mushola instansi KPKNL	Nihil
82	19-12-2019	Tawon Liar	Banyurip Alit	Nihil
83	19-12-2019	Tawon Liar	Jl. Otto Iskandardinata	Nihil
84	21-12-2019	ULAR	Karanganyar Gg. XI	Nihil
85	22-12-2019	Tawon Liar	Soko	Nihil
85	22-12-2019	Tawon Liar	Soko	Nihil

Sumber: Satpol PP, 2019, diolah

4) Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum

Pada Tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan legislatif, kegiatan ini bertujuan guna menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tertib selama pelaksanaan Pemilu. Pengamanan dilaksanakan mulai dari Apel Siaga oleh petugas Satpol PP, Linmas dan Dishub bertempat di Lapangan Mataram. Pengamanan pada saat Pemilu berlangsung yang dilaksanakan di Kelurahan, Kecamatan, Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan patroli wilayah di Kota Pekalongan.

Satpol PP Kota Pekalongan mengerahkan regu *full team* yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP mulai dari kegiatan apel siaga, pembersihan *attribute* pemilu, pengamanan pra pemilu dan pasca pemilu sehingga berlangsung lancar dan sukses.



d. Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah

Satpol PP telah berupaya menegakkan Peraturan Daerah dengan dilaksanakannya patroli rutin serta operasi rutin yaitu operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Operasi Reklame, Operasi PGOT, serta sarasehan penegakan Perda. Target kinerjanya program penyelesaian persentase penyelesaian pelanggaran Perda tidak tercapai 100%, ketercapaian indikator 98,63%. Penyelesaian pelanggaran Perda dari jumlah laporan sebanyak 1382 telah ditindak lanjuti sebanyak 1363 kasus. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya sering melanggar perda sudah tidak ada dilokasi atau kabur (anak punk, ODGJ, dll).

1) Kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Program Peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penegakan Perda dan Keputusan Walikota. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program kerja inti dan senantiasa dilaksanakan secara konsisten oleh Satpol PP Kota Pekalongan. Kegiatan ini meliputi Operasi Penyakit Masyarakat (Miras, Narkoba, PSK, Judi, Anak Punk), Operasi PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar), Operasi Reklame, Patroli Wilayah, Pengamanan Rumah Dinas dan Aset Daerah, Sosialisasi Perda ke Aparat dan Masyarakat. Satpol PP juga senantiasa bekerja sama dengan SKPD lain dalam upaya penegakan Perda yaitu BPPT (ijin usaha, HO, warnet), Dindagkop-UKM (operasi makanan kadaluarsa, pasar tiban), BKD, Inspektorat dan Bagian Hukum (Disiplin Pegawai), TNI/POLRI (pengamanan wilayah dan kegiatan).

Dari hasil operasi rutin yang dilakukan serta tindak penertiban yang dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan sesuai SOP yang ada, berikut hasil rekapitulasi kegiatan penegakan Perda dan Keputusan Walikota :

Tabel 6. 14 Rekapitulasi Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pasangan Asusila	22
2	Peminum Minuman Keras	199
3	Penjual Miras	2
4	Anak Jalanan	155
5	Pelajar Bolos	25
6	PGOT	185
7	Bangunan Tidak ada IMB	19
8	Reklame tidak tertib	1068

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2019, diolah

Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP Kota Pekalongan juga rajin memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Sesuai SOP yang ada, sebelum melakukan penertiban pihak Satpol PP memberikan peringatan kepada pedagang agar lebih tertib, setelah peringatan yang diberikan tidak ditindaklanjuti, penertiban baru akan dilaksanakan. Selama tahun 2019, berikut rekapitulasi hasil penertiban pedagang kaki lima :



Tabel 6. 15 Rekapitulasi Pelanggaran Pk5 Th. 2019

No	Nama Pedagang	Lokasi Jualan	Jenis Pelanggaran	Bulan Penertiban
1	Ahmad M	Alun-alun	Di atas Trotoar	03-Jan-19
2	Soraji	Pasir Sari	Di atas Trotoar	03-Jan-19
3	Ahmad Rifai	Sorogenen	Di atas Trotoar	05-Jan-19
4	Amat Sodikin	Jl. Gajahmada	Di atas Trotoar	08-Jan-19
5	Imam	Jl. Progo	Di atas Trotoar	09-Jan-19
6	Cahyo Lukman	Jl. Progo	Di atas Trotoar	09-Jan-19
7	Diah Pitaloka Safitri	Jetayu	Di atas Trotoar	14-Jan-19
8	Jubiyah	Jl. Sultan Agung	Lokasi larangan PK5	14-Jan-19
9	Achan	Jl. Progo	Di atas Trotoar	15-Jan-19
10	Wasdui	Jl. Sultan Agung	Di atas Trotoar	14-Jan-19
11	Puji Lestari	Jetayu	Di atas Trotoar	13-Feb-19
12	Sutirah	Sorogenen	Di atas Trotoar	04-Mar-19
13	Donny Agustin	Stadion Hoegeng	Di atas Trotoar	04-Mar-19
14	Torah	Alun-alun	Di atas Trotoar	03-Mei-19
15	Sumirah	Depan Gereja	Di atas Trotoar	04-Mei-19
16	Komariyah	Alun-alun	Di atas Trotoar	06-Mei-19
17	M. Haqqul Hana	Depan Hotel Asia	Di atas Trotoar	06-Mei-19
18	M. Arif Rahman	Jl. Wahid Hasyim	Di atas Trotoar	09-Mei-19
19	Nur Hidayat	Alun-alun Sisi Selatan	Di atas Trotoar	13-Mei-19
20	M. Hatta	Lap. Mataram	Barang ditinggal	14-Mei-19
21	Sobirin	Lap. Mataram	Barang ditinggal	20-Mei-19
22	Teguh Harmoko	Jl. Dr. Cipto	Di atas Trotoar	22-Mei-19
23	Adi Susanto	Jl.Dr.Sutomo	Di atas Trotoar	07-Jul-19
24	Mujiyono	Jl Kurinci	Di atas Trotoar	16-Jul-19
25	Eni Astuti	Lap. Mataram	Barang ditinggal	16-Jul-19
26	Robiman	Lap. Mataram	Di atas Trotoar	16-Jul-19
27	Sulisriyono	Jl Binagriya	Di atas Trotoar	17-Jul-19
28	Mardiyanto	Jl Binagriya	Di atas Trotoar	17-Jul-19
29	Nuryanto	Jl Dr.Wahidin	Di atas Trotoar	23-Jul-19
30	Setia Ningsih	Depan Hotel Namira	Di atas Trotoar	30-Jul-19
31	Eko Mulyo	Jl Urip Sumoharjo	Di atas Trotoar	29-Jul-19
32	M Risqi Darmawan	Jl Dr.Cipto	Di atas Trotoar	30-Jul-19
33	Muslikhun	Baros	Di atas Trotoar	02-Agust-19
34	Rasidin	Jl Hasyim Ashari	Di atas Trotoar	06-Agust-19
35	Bambang Supriyanto	Jl Dr.Cipto	Di atas Trotoar	12-Agust-19
36	Muslimin	Jl Veteran	Di atas Trotoar	22-Agust-19
37	Amrozi	Depan Asrama Brimob	Di atas Trotoar	16-Agust-19
38	Yunan Helmi	Depan SD Kraton	Di atas Trotoar	22-Agust-19
39	Ummu Siba Shidqiyah	Sorogenen	Di atas Trotoar	23-Agust-19
40	Shobirin	Jl Urip Sumoharjo	Di atas Trotoar	11-Sep-19
41	M Arif Budiman	Jl Semarang	Di atas Trotoar	13-Sep-19
42	Fathia Wati	Depan SD Kraton	Di atas Trotoar	19-Sep-19
43	Sobirin	Sebelah Transmart	Lapak di tinggal	22-Okt-19
44	Solehudin	Sebelah Transmart	Lapak di tinggal	22-Okt-19
45	M Tohiri	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
46	M Trikhamdanil	Depan Hotel Dafam	Lapak di tinggal	22-Okt-19
47	Ahmad Farozi	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
48	Abdul Gani	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
49	Rohmat	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19



No	Nama Pedagang	Lokasi Jualan	Jenis Pelanggaran	Bulan Penertiban
50	Nurul Anam	Jl.Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
51	Nirwan Gerdiawan	Jl.Urip Sumoharjo	Lapak Di Tinggal	22-Okt-19
52	Daraji	Jl.Urip Sumoharjo	Lapak Di Tinggal	22-Okt-19
53	Sriono Budi Santoso	Jl.Karang Malang	Lapak Di Tinggal	29-Nop-19
54	Roziqin	Jl.Bina Griya no 70	Lapak Di Tinggal	19-Nop-19
55	Setiawan B	Depan Pengadilan	Diatas Troatoar	06-Nop-19
56	Rozali	Jl. Bina Griya Raya	Lapak Di Tinggal	18-Nop-19
57	Rudiyem	Pringlangu	Diatas Troatoar	22-Nop-19
58	Saiful	Pasar Banyurip	Diatas Troatoar	19-Nop-19
59	Fauzi	Jl.Pelita II	Lapak Di Tinggal	02-Des-19
60	Kartinah	Perempatan Kauman	Di Pos Polisi	16-Des-19
61	Mustaqim	Jl,Sultan Agung	Diatas Troatoar	13-Des-19
62	Rohmat	Lapangan Bumirejo	Lapak Di Tinggal	26-Des-19
63	Slamet R	Jl.Wilis	Lapak Di Tinggal	23-Des-19
64	Kusnen	Pasar Banyurip	Lapak Di Tinggal	19-Des-19

Sumber: Satpol PP, 2019, diolah

e. Penanggulangan Bencana Alam

Selama tahun 2019 jumlah korban bencana alam yang tertangani sebanyak 2.964 jiwa dari jumlah korban bencana sebanyak 2.964 jiwa. Sehingga persentase korban bencana yang ditangani tercapai 100%.

Pada tahun 2019 ini BPBD Kota Pekalongan telah menjalin mitra dengan 11 (sebelas) kelompok komunitas relawan yaitu Pekalongan Resque, Sotong resque, Mancing mania, Java resque, One resque, Batik resque, Jogo Samudro, MDMC, RAPI, LPBI-NU dan Bagana. Dimana hal tersebut mengalami peningkatan daripada tahun 2016 yang masih terdapat 6 (enam) komunitas.

1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pada kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) indikator yang dilaksanakan, yaitu pemasangan spanduk, pembuatan leaflet dan pendirian posko; penyelenggaraan sosialisasi; dan penyelenggaraan apel siaga. Pemasangan spanduk, pembuatan leaflet dan pendirian posko sebagai sarana pemantauan dan penyebarluasan informasi kebencanaan bagi masyarakat. Selain itu penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti instagram, twitter dan facebook Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan selama tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan lokasi di Kecamatan Pekalongan Barat, RSUD Bendan, SMKN 2 Pekalongan dan SMPN 12 Pekalongan dengan melibatkan peserta sebanyak 400 orang dari pelajar dan aparaturnya kecamatan, anggota PKK, RSUD Bendan. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain dari PMI, TNI. Output yang dihasilkan adalah 100%.

Akan tetapi, pada tahun 2019, sub kegiatan apel siaga tidak dapat terealisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang saling berbenturan dan banyaknya permintaan sosialisasi/ simulasi baik dari kelurahan terkait dana kelurahan/ instansi/ lembaga masyarakat, serta terbatasnya waktu dan kurangnya koordinasi guna pelaksanaan kegiatan.



2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen SOP Kontijensi Banjir. SOP Kontijensi Banjir ini diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana/ kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. SOP Kontijensi Banjir dibuat sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana yang terjadi.

3) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembelian logistik dan obat-obatan bagi korban yang disalurkan saat terjadi bencana. Di Kota Pekalongan tahun 2019 terdapat 1 kejadian bencana yaitu pada tanggal 26 Januari 2019 terjadi banjir di hampir 70% wilayah kota Pekalongan yang mengakibatkan 2.964 jiwa mengungsi.

4) Kegiatan Fasilitasi Tanggap Darurat

Pada Kegiatan Fasilitasi Tanggap Darurat selain untuk honor tenaga kegiatan (Satgas PB dan Pekarya), juga digunakan untuk memfasilitasi kegiatan evakuasi-evakuasi saat terjadi bencana, pembuatan tanggul darurat, evakuasi bangkai kapal dan juga bersih sungai massal. Ketercapaian output Kegiatan ini adalah sebesar 100%.

5) Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pekalongan agar memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam penanggulangan bencana sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga penanganan terhadap bencana dapat lebih cepat, tepat, dan dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti oleh 200 orang peserta dari unsur relawan, pelajar/ mahasiswa, aparat kelurahan/ kecamatan. Narasumber kegiatan dari BPBD Prov. Jateng, BASARNAS, TNI, POLRI/BRIMOB. Pada kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 100%

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, untuk membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) yang diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mempunyai tugas antara lain :

- a) melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;



- b) memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c) melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;
- d) melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;
- e) melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f) melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g) melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h) menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i) mendirikan pelayanan dapur umum.

Dalam rangka pelayanan masyarakat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon BPBD Kota Pekalongan secara langsung di (0285) 4151508 yang siaga 24 jam. Selain itu, untuk mendukung layanan kepada masyarakat juga disediakan melalui media sosial seperti instagram (@bpbdkotapekalongan), twitter (@pkl_bpbd) dan juga facebook @Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (BPBD Kota Pekalongan).

Adapun layanan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pekalongan disamping layanan terkait kebencanaan, juga melayani aduan masyarakat seperti adanya sarang tawon, ular, dan lain-lain

f. Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam pelaksanaan program Pendidikan politik masyarakat pada tahun 2019 dengan target 34,96 % tidak tercapai, disebabkan jumlah pemilih pemula terdidik sebesar 697 orang dibandingkan dengan jumlah pemilih pemula sebesar 3.989 orang (data KPU Kota Pekalongan 2019) sehingga perhitungan sangat rendah sebesar 17,47 %. Hal ini dikarenakan antara lain beberapa pemilih pemula bersekolah di luar kota tetapi daerah pemilihan di kota Pekalongan. Dibandingkan capaian tahun 2018 jumlah pemilih pemula terdidik sebesar 1.750 orang dibanding dengan jumlah pemilih pemula sebesar 1.541 orang (data KPU Kota Pekalongan 2018) sehingga perhitungannya sebesar 113,56 %. Hal ini dikarenakan antara lain terdapat pemilih pemula terdidik berasal dari luar kota bersekolah dan mengikuti sosialisasi pendidikan politik yang diadakan di Kota Pekalongan.

Dengan dilaksanakannya pendidikan politik pada pemilih pemula dapat meningkatkan hasil capaian tingkat partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dari target 77,50 % tercapai 85,88 %



(Data KPU) atau melebihi target yang ditetapkan.

Program ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik melalui :

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat
- 2) Sosialisasi pertanggungjawaban parpol
- 3) Sosialisasi Pemilihan Umum
- 4) Fasilitasi Pengamanan Pemilihan

g. Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kemitraan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kemajemukan sehingga terwujudnya situasi sosial yang kondusif.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang diukur dengan indikator persentase penanganan kerawanan/konflik sosial tahun 2019 tercapai 100 %, sedangkan indikator penurunan kasus narkoba belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi telah dapat menurunkan kasus narkoba sebesar 12, 00 % dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat tercapai melalui beberapa kegiatan yang melibatkan dinas/instansi terkait, sekolah dan masyarakat serta kerjasama dengan unsur BNN dari luar daerah.

Dengan dilaksanakannya program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan potensi kerawanan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pada program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) :

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- 2) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
- 3) Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
- 4) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
- 5) Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera
- 6) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- 7) Fasilitasi upacara bendera tingkat kota
- 8) Pengawasan Orang Asing
- 9) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
- 10) Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial

4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga Pemerintahan Daerah tidak hanya menyelenggarakan apa yang menjadi urusan daerah, tapi juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi



kewenangan Daerah provinsi. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi vertikal di daerah didanai melalui anggaran kementerian/lembaga. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan kewenangan dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah. Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolute), atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar ataupun intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah. Secara pendanaan, urusan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksana dalam urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan wali kota/bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Adapun pola pertanggungjawaban dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, dan bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan pada asas tugas pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari



Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaspembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik di lingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalanya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Wali kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah. Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum tersusun, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Saat ini Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran lebih selektif dalam memberikan penugasan kepada pemerintah daerah. Sehingga jika pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih urusan dalam Tugas Pembantuan, maka mulai tahun 2016 terjadi perubahan mekanisme dari Tugas Pembantuan beralih pada Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan tidak memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan, tetapi ada beberapa kegiatan yang dialokasikan di Kota Pekalongan bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi Jawa Tengah) melalui perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menerima beberapa program kegiatan yang bersumber dari APBN, baik yang terkait dengan peningkatan kompetensi pembelajaran maupun penyelenggaraan pendidikan keluarga. Dalam rangka untuk memperkuat kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat (Tri Pusat Pendidikan) dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuh kembangkan karakter dan budaya prestasi peserta didik telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi 342 orang yang terdiri dari unsur PAUD, TK, SMP, RA, Organisasi Mitra (Pengawas Madrasah, Himpaudi, IGTKI, IGRA) dan Bintek Pembinaan Pendidikan keluarga bagi 50 orang yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah SD,



SMP, TK, KB, PKBM, Penilik PNF, Pengawas Sekolah, organisasi mitra, dan Dinas Pendidikan.

Dan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*), pada tahun 2019 telah dialokasikan kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi 473 orang guru (SD dan SMP) melalui dana APBN. Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 16 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
1	Bintek Pembinaan Pendidikan keluarga	147.680.000,00	Bintek bagi 50 orang yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah SD, SMP, TK, KB, PKBM, Penilik PNF, Pengawas Sekolah, organisasi mitra, dan Dinas Pendidikan
2	Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	137.676.000,00	Sosialisasi bagi 342 orang yang terdiri dari unsur PAUD, TK, SMP, RA, Organisasi Mitra (Pengawas Madrasah, Himpaudi, IGTKI, IGRA)
3	Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran	712.929.000,00	Diklat bagi 473 orang (Guru SD dan SMP)
4	Bantuan Pemberian Makanan Sehat	90.000.000,00	Pemberian Makanan Sehat Kepada 6 Lembaga

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2019

b. Dinperinaker

Dalam upaya meningkatkan keterampilan pencari kerja di Kota Pekalongan, Dinperinaker juga memperoleh alokasi anggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang bersumber dari APBN melalui DIPA BBPLK Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,65 M untuk 832 peserta. Pelatihan yang diselenggarakan adalah:

- 1) Mekanik sepeda motor dengan 4 angkatan @ 16 orang peserta.
- 2) Juru Las SMAW dengan 4 angkatan @ 16 orang peserta.
- 3) Instalasi penerangan dengan 3 angkatan @ 16 orang peserta.
- 4) Teknisi AC hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- 5) Instalasi Tenaga hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- 6) Practical Office dengan 5 angkatan @ 16 orang peserta.
- 7) Desain Grafis dengan 3 angkatan @ 16 orang peserta.
- 8) Administrasi Perkantoran hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- 9) Menjahit sebanyak 9 angkatan @ 16 orang peserta.
- 10) Processing Hasil Pertanian sebanyak 6 angkatan @ 16 orang peserta dimana 2 angkatan dilaksanakan melalui skema Mobile Training Unit di Kelurahan Pringrejo dan Kelurahan Tirto
- 11) Kecantikan kulit dengan 2 angkatan @ 16 orang peserta



- 12) Kecantikan Rambut hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- 13) Tata Rias Kecantikan dengan 2 angkatan @ 16 orang peserta
- 14) Mekanik Mobil dengan 2 angkatan @ 16 orang peserta
- 15) Operator Mesin Bubut dengan 3 angkatan @ 16 orang peserta
- 16) Teknisi HP dengan 2 angkatan @ 16 orang peserta
- 17) Skill for future (pelatihan dalam upaya up skilling dan re skilling bagi pekerja yang akan alih keterampilan karena imbas PHK) 3 angkatan @ 16 orang peserta.

Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinperinaker adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 17 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinperinaker

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pbk)	3.856.902.400,00	Terfasilitasinya Peatihan Keterampilan Bagi 832 Pencari Kerja Di Kota Pekalongan

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 2019

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali memperoleh alokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program ini diawali dengan pelaksanaan pendataan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di kelurahan dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan



kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 kembali memperoleh alokasi program Kotaku. Program Kotaku yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pananganan Banjir/Rob, berupa pembangunan tanggul pengedali banjir di Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Kelurahan Tirto dengan anggaran sebesar Rp. 1,3 M.
- 2) Kegiatan Peningkatan kualitas Drainase, berupa pekerjaan drainase lingkungan, palt dekker dan gorong-gorong di Kelurahan Bandengan, Krapyak, Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tritto dengan anggaran sebesar Rp. 3,86 M.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan, berupa pekerjaan jalan beton, paving dan aspal di Kelurahan Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Bandengan, Krapyak, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tirto dengan anggaran sebesar Rp. 4.24 M.
- 4) Kegiatan Peningkatan Sarana Air Bersih, berupa pekerjaan Pembangunan Tower Air Bersih dan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 232,6 juta.
- 5) Kegiatan Peningkatan Sarana Sanitasi, berupa Pembangunan dan MCK Komunal di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 231,45 juta dan di Kelurahan Panjang Baru dengan anggaran 27,7 juta.
- 6) Kegiatan Peningkatan Sarana Persampahan, berupa Pengadaan Gerobak Sampah di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 60 juta dan di Kelurahan Panjang Baru dengan anggaran 26 juta.

Secara rinci kegiatan Program KOTAKU Tahun Anggaran 2019 melalui Satker pada Dinperkim adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 18 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 Program KOTAKU melalui Dinperkim

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
1	Penanganan Banjir / Rob melalui Program KOTAKU	1.203.830.000,00	Terbangunnya tanggul pengedali banjir di Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Kelurahan Tirto
2	Peningkatan Kualitas Drainase	3.856.902.400,00	Terbangunnya drainase lingkungan, plat dekker dan gorong-gorong di Kelurahan Bandengan, Krapyak, Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tirto
3	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	4.238.328.200,00	Terbangunnya Jalan Beton, Paving dan Aspal di Kelurahan Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Bandengan dan Kelurahan Krapyak
4	Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	349.182.900,00	1. Terbangunnya tower air bersih dan jaringan perpipaan di Kelurahan Padukuhan Kraton. 2. Terbangunnya MCK Komunal di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Panjang Baru.
5	Peningkatan Sarana Persampahan	86.000.000,00	Tersedianya gerobak sampah di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Panjang Baru

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2019

d. Dinas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah memperoleh beberapa program kegiatan yang



bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Program kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan secara umum yaitu meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan pemutakhiran data SMDK kesehatan bertujuan untuk mendata dan membuat profil SDM kesehatan di fasilitas kesehatan, data pendidikan, registrasi dan perijinan. Kemudian adanya dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program JKN sebagai hasil keluaran dari program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan. Dilaksanakannya skrining kesehatan di 6 kelurahan dengan peserta sebanyak 6000 orang yang merupakan bagian dari kegiatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (Posbindu PTM). Kegiatan Intensif Case Fanding (ICF) bertujuan untuk pengobatan secara dini dan menghindari penemuan cacat kusta tingkat III. Dengan dilaksanakannya Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatus dan Kunjungan Nifas di Kota Pekalongan diharapkan Meningkatkan cakupan kunjungan neonatus (KN) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatkan cakupan kunjungan nifas (KF) di Kota Pekalongan 100%; dan Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan KN/KF. Pertemuan Konsolidasi RAD PG dalam Penanggulangan Stunting di Kota Pekalongan dengan tujuan diperolehnya pemahaman oleh petugas lintas program dan lintas sektor tentang stunting, penyebab, pencegahan dan penanggulangannya. Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kota Pekalongan bertujuan adanya pemahaman dari peserta tentang Kebijakan Program Perbaikan Gizi dan Pelayanan Gizi di Puskesmas; Konsep Dasar Proses PMBA yang berbasis masyarakat. Kegiatan Orientasi Surveilans dan Pemutakhiran Data Tingkat Kota di Kota Pekalongan dengan keluaran Penemuan kasus AFP mencapai target; Penanggulangan kasus potensial KLB tertangani < 24 jam; Menurunnya kasus potensial KLB (hepatitis, diare, typhoid); Meningkatnya surveilans epidemiologi ke Rumah Sakit dan Puskesmas.

Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 19 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
1	Pemutakhiran Data SMDK Kesehatan	18.420.000,00	1. Data SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan, data pendidikan, registrasi dan perijinan. 2. Pembuatan profil SDM Kesehatan
2	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	43.650.000,00	Adanya dokumen laporan pelaksanaan Monev Program JKN Bulanan; Adanya laporan rapat koordinasi; adanya hasil monev ke FKTP BPJS Kesehatan
3	Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)	79.365.000,00	Terlaksananya deteksi dini (skrining kesehatan) di 6 Kelurahan (Setono, Kalibaras, Gamer, Noyontaansari, Kauman) sebanyak 6.000 orang
4	ICF (Intensif Case Fanding)	72.750.000,00	1. Pengobatan secara dini 2. Menghindari penemuan cacat kusta tingkat III
5	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatus dan Kunjungan Nifas di Kota Pekalongan	10.800.000,00	Meningkatnya cakupan kunjungan neonatus (KN) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatnya cakupan kunjungan nifas (KF) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan KN/KF



No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
6	Pertemuan Penguatan 5 NG di Kota Pekalongan	9.551.000,00	Kab/Kota yang melakukan pelayanan ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95% dan prosentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95%
7	Pertemuan Konsolidasi RAD PG dalam Penanggulangan Stunting di Kota Pekalongan	9.050.000,00	Diperolehnya pemahaman oleh petugas lintas program dan lintas sektor tentang stunting, penyebab, pencegahan dan penanggulangannya
8	Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kota Pekalongan	44.280.000,00	Adanya pemahaman dari peserta tentang Kebijakan Program Perbaikan Gizi dan Pelayanan Gizi di Puskesmas; Konsep Dasar Proses PMBA yang berbasis masyarakat.
9	Orientasi Surveilans dan Pemutakhiran Data Tingkat Kota di Kota Pekalongan	24.630.000,00	Penemuan kasus AFP mencapai target; Penanggulangan kasus potensial KLB tertangani < 24 jam; Menurunnya kasus potensial KLB (hepatitis, diare, typhoid); Meningkatkan surveilans epidemiologi ke Rumah Sakit dan Puskesmas
10	Fasilitasi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	7.750.000,00	Terbentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja
11	Fasilitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Sehat	8.450.000,00	Meningkatnya kualitas higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
12	Pengukuran Kebugaran pada Calon Jamaah Haji	7.820.000,00	Hasil pengukuran kebugaran dan analisa hasil test kebugaran CJH
13	Pertemuan Peningkatan Lingkungan Sehat	10.800.000,00	Meningkatnya koordinasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan/KLB pada saat dan pasca bencana
14	Fasilitasi Limbah Rumah Tangga	1.800.000,00	Meningkatnya pemahaman pengelolaan limbah rumah tangga
15	Fasilitasi Sampah Rumah Tangga	1.096.000,00	Komposter skala rumah tangga

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2019

e. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh alokasi program kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi diantaranya adalah Program Keluarga Harapan bagi 8.265 Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai bagi 8.063 Keluarga Penerima Manfaat senilai Rp. 110.000,00/bulan dalam bentuk non tunai guna mengurangi beban pengeluaran KPM, fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) guna memberikan media bagi masyarakat melalui sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kota dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Selain itu ada beberapa kegiatan terkait urusan Keluarga Berencana yang dilaksanakan Dinsos P2KB, diantaranya adalah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk guna penyusunan profil grand design Kota Pekalongan, terlayannya 229 peserta KB MKJP dan tercapainya target PPM PB MKJP, tersosialisainya tata cara pengelolaan PPKS, terbinanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, 4 kelompok UPPKS, dan terfasilitasinya operasional 4 kelompok PIK Remaja di Kota Pekalongan serta terfasilitasinya kegiatan BKR di kampung KB.



Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 20 Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Keluaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	16.960.625.000,00	Tersalurkannya Bantuan Sosial PKH kepada 8.264 Keluarga Penerima Manfaat
2	Bantuan Pangan Non Tunai	10.643.160.000,00	Tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai kepada 8.063 Keluarga Penerima Manfaat
2	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	307.000.000,00	Terlayannya aduan permasalahan kemiskinan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12.825.000,00	1. Tercetaknya profil grand design kota pekalongan. 2. Data inventarisasi isu strategis kabupaten / kota. 3. Terbentuknya sekolah siaga kependudukan di SMPN 1 Pekalongan.
4	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	52.164.100,00	1. Terlayannya 229 peserta KB MKJP dan tercapainya target PPM PB MKJP. 2. Terlayannya akseptor yang telah habis masa pakai IMPLANT. 3. Tersosialisasinya program kespro di kelompok-kelompok kegiatan. 4. Terfasilitasinya TJM di tingkat kabupaten / kota.
5	Pembinaan dan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkat Wilayah	5.100.000,00	1. Tersosialisasinya tata cara pengelolaan PPKS di tingkat kabupaten / kota. 2. Terbinanya 4 kelompok BKB. 3. Terbinanya 4 kelompok BKL. 4. Terfasilitasinya pameran gelar dagang UPPKS dalam rangka HARGANAS Tingkat Provinsi. 5. Terbinanya 4 kelompok UPPKS di kabupaten / kota.
6	Penggerakan Stakeholder mitra Kerja Serta Perubahan Sikap dan perilaku Masyarakat berdasarkan data dan Informasi yang berbasis IT dalam program KKBPK	82.689.500,00	1. Terfasilitasinya pertemuan kelompok kerja advokasi. 2. Terfasilitasinya operasional pendayagunaan MUPEN. 3. Tersedianya data keluarga melalui aplikasi SIGA. 4. Tersedianya data statistik rutin (dalam dan pelkon) program KKBPK. 5. Terupdatinya data PK sampai dengan tingkat kelurahan. 6. Tersedianya data rutin secara berkualitas.
7	Penguatan peran PIK Remaja dan BKD dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai calon Ibu	24.995.000,00	1. Terfasilitasinya operasional 4 kelompok PIK Remaja. 2. Terfasilitasinya kegiatan pikir di kampung KB. 3. Terfasilitasinya kegiatan PIK Remaja dengan mitra kerja. 4. Terfasilitasinya dan terbinanya 46 kelompok BKR. 5. Terfasilitasinya kegiatan BKR di kampung KB.

Sumber: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2019



BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Pekalongan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Pekalongan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019, melalui laporan keuangan ini diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

Pekalongan, 11 Agustus 2020


W A L I K O T A P E K A L O N G A N

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**PENGADAAN TANAH UNTUK INTERCHANGE JALAN TOL**

No	Nama Penjual	Luas	Harga	Ket
1	Adi Nanggala Tjahyono	195,00	79.950.000,00	Interchange Jalan Tol
2	Adi Nanggala Tjahyono	313,00	281.700.000,00	Interchange Jalan Tol
3	Agus	7,20	3.312.000,00	Interchange Jalan Tol
4	Agus	7,20	3.456.000,00	Interchange Jalan Tol
5	Mahin Miharja	281,00	97.803.700,00	Interchange Jalan Tol
6	Mahin Miharja	279,00	97.107.600,00	Interchange Jalan Tol
7	Mahin Miharja	158,00	54.992.800,00	Interchange Jalan Tol
8	Mansyur Wibowo	168,00	58.473.400,00	Interchange Jalan Tol
9	Mansyur Wibowo	92,00	32.021.200,00	Interchange Jalan Tol
10	Mahin Miharja	58,00	20.187.200,00	Interchange Jalan Tol
	Jumlah	1.558,40	729.003.900,00	
	Patok dan Cat		2.750.000,00	
	Total		731.753.900,00	

LAMPIRAN 2**SILPA TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	26.884.779.309,00
	Saldo Giro di Bank Jateng	26.884.779.309,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.805.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	10.805.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
4	Kas di BLUD	10.899.968.384,61
	BLUD RSUD Bendan	9.744.757.200,61
	BLUD Puskesmas	1.022.557.275,00
	BLUD BKPM	59.871.109,00
	BLUD PSPJ	72.782.800,00
5	Kas BOS 2019	2.306.157.618,00
6	Setara Kas	55.000.000.000,00
	Deposito di Bank Jateng	55.000.000.000,00
	Jumlah	95.101.710.311,61

LAMPIRAN 3

RINCIAN KAS DI KASDA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Sisa 2018	Tahun 2019		
			Pendapatan	Belanja	Sisa Lebih/Kurang
1	DAK Fisik	-	49.033.606.513,00	47.618.854.989,00	1.414.751.524,00
	DAK Reguler Pendidikan	-	7.388.796.000,00	7.386.438.000,00	2.358.000,00
	DAK Reguler Kesehatan	-	15.246.351.610,00	15.211.439.610,00	34.912.000,00
	DAK Reguler Perumahan dan Permukiman	-	3.220.394.000,00	3.202.215.000,00	18.179.000,00
	DAK Reguler Jalan	-	12.694.618.400,00	12.647.190.000,00	47.428.400,00
	DAK Reguler Pertanian	-	1.513.879.312,00	1.513.879.312,00	-
	DAK Reguler Pariwisata	-	1.375.285.000,00	1.375.285.000,00	-
	DAK Penugasan Kesehatan	-	1.740.684.400,00	744.391.250,00	996.293.150,00
	DAK Penugasan Air Minum	-	2.178.261.000,00	1.877.883.000,00	300.378.000,00
	DAK Penugasan Sanitasi	-	1.369.400.000,00	1.359.630.000,00	9.770.000,00
	DAK Penugasan Pasar	-	1.473.436.791,00	1.468.003.817,00	5.432.974,00
	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	-	832.500.000,00	832.500.000,00	-
2	DAK Non Fisik	5.732.587.565,00	66.429.894.535,00	70.060.502.188,00	2.101.979.912,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.987.987.200,00	47.276.119.900,00	50.561.178.480,00	702.928.620,00
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372.300.000,00	-	140.250.000,00	232.050.000,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	761.545.071,00	8.801.822.929,00	8.935.675.728,00	627.692.272,00
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	48.537.022,00	868.425.978,00	870.257.796,00	46.705.204,00
	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	380.000.000,00	371.726.879,00	8.273.121,00
	Pelayanan Administrasi Kependudukan	115.585.845,00	872.658.155,00	796.828.459,00	191.415.541,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	446.632.427,00	6.445.567.573,00	6.635.137.346,00	257.062.654,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	1.185.300.000,00	1.182.400.000,00	2.900.000,00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	-	600.000.000,00	567.047.500,00	32.952.500,00
3	DBH	33.314.642,00	6.732.220.000,00	6.733.772.837,00	31.761.805,00
	DBHCHT	33.314.642	6.732.220.000,00	6.733.772.837,00	31.761.805,00
4	Silpa Tidak Terikat				23.336.286.068,00
	Jumlah				26.884.779.309,00

LAMPIRAN 4**SISA DANA BOS PADA MASING-MASING SEKOLAH**

No	Nama Sekolah	Sisa Dana		
		Tunai	Bank	Jumlah
1	SDN Kraton Kidul	0	1.732.291,00	1.732.291,00
2	SDN Kramatsari 01	0	511.109,00	511.109,00
3	SDN Bendan 01	0	1.510.936,00	1.510.936,00
4	SDN Bendan 03	0	296.523,00	296.523,00
5	SDN Bendan 04	0	724.007,00	724.007,00
6	SDN Bendan 08	0	202.812,00	202.812,00
7	SDN Sapuro 01	0	574.981,00	574.981,00
8	SDN Sapuro 05	0	45.702.354,00	45.702.354,00
9	SDN Podosugih 01	0	93.131.930,00	93.131.930,00
10	SDN Podosugih 03	0	967.056,00	967.056,00
11	SDN Medono 01	0	10.854.222,00	10.854.222,00
12	SDN Medono 04	0	2.364.070,00	2.364.070,00
13	SDN Medono 07	0	2.307.753,00	2.307.753,00
14	SDN Medono 08	0	10.907.771,00	10.907.771,00
15	SDN Kebulen	0	5.156.518,00	5.156.518,00
16	SDN Tirto 01	0	8.139.244,00	8.139.244,00
17	SDN Tirto 03	0	16.051.986,00	16.051.986,00
18	SDN Pasirsari 01	0	100.678,00	100.678,00
19	SDN Pasirsari 02	0	91.800,00	91.800,00
20	SDN Tegalrejo	0	1.739.184,00	1.739.184,00
21	SDN Bumirejo	0	259.646,00	259.646,00
22	SDN Pringlangu	0	170.316,00	170.316,00
23	SDN Keputran 04	0	948.285,00	948.285,00
24	SDN Keputran 06	0	18.972.184,00	18.972.184,00
25	SDN Landungsari 01	0	70.358.141,00	70.358.141,00
26	SDN Landungsari 04	0	5.251.276,00	5.251.276,00
27	SDN Landungsari 05	0	233.471,00	233.471,00
28	SDN Poncol 01	0	13.589.587,00	13.589.587,00
29	SDN Poncol 02	0	51.504.078,00	51.504.078,00
30	SDN Poncol 03	0	3.284.419,00	3.284.419,00
31	SDN Sampangan 01	0	222.975,00	222.975,00
32	SDN Klego 01	0	1.229.814,00	1.229.814,00
33	SDN Klego 04	0	4.441.948,00	4.441.948,00
34	SDN Gamer 01	0	11.235.204,00	11.235.204,00
35	SDN Gamer 02	0	759.804,00	759.804,00
36	SDN Sokorejo	0	112.797,00	112.797,00
37	SDN Baros	0	282.596,00	282.596,00
38	SDN Dekoro	0	1.373.982,00	1.373.982,00
39	SDN Karangmalang	0	734.192,00	734.192,00
40	SDN Kradenan 01	0	3.468.000,00	3.468.000,00
41	SDN Kradenan 04	0	8.558.313,00	8.558.313,00
42	SDN Buaran	0	75.841.798,00	75.841.798,00
43	SDN Banyurip Ageng	0	200.956,00	200.956,00
44	SDN Jenggot	0	3.244.306,00	3.244.306,00
45	SDN Kertoharjo 01	0	6.083,00	6.083,00

No	Nama Sekolah	Sisa Dana		
		Tunai	Bank	Jumlah
46	SDN Kertoharjo 02	0	187.180,00	187.180,00
47	SDN Kuripan Kidul 02	0	3.281.138,00	3.281.138,00
48	SDN Kuripan Lor 01	0	6.435.782,00	6.435.782,00
49	SDN Kuripan Lor 02	0	6.192.955,00	6.192.955,00
50	SDN Yosorejo 01	0	139.377,00	139.377,00
51	SDN Yosorejo 02	0	91.897.133,00	91.897.133,00
52	SDN Duwet	0	294.292,00	294.292,00
53	SDN Soko	0	1.066.419,00	1.066.419,00
54	SDN Panjang Wetan 01	0	507,00	507,00
55	SDN Panjang Wetan 03	0	8.243.082,00	8.243.082,00
56	SDN Panjang Wetan 04	0	2.539.593,00	2.539.593,00
57	SDN Kandang Panjang 01	0	6.915.739,00	6.915.739,00
58	SDN Kandang Panjang 02	0	1.005.512,00	1.005.512,00
59	SDN Kandang Panjang 10	0	375.311,00	375.311,00
60	SDN Dukuh	0	412.299,00	412.299,00
61	SDN Kraton	0	32.471.216,00	32.471.216,00
62	SDN Krapyak Lor 01	0	653.074,00	653.074,00
63	SDN Krapyak Lor 02	0	978.482,00	978.482,00
64	SDN Krapyak Lor 04	0	414.051,00	414.051,00
65	SDN Krapyak Lor 05	0	1.854.935,00	1.854.935,00
66	SDN Krapyak Kidul 02	0	43.809,00	43.809,00
67	SDN Bandengan 01	0	41.715,00	41.715,00
68	SDN Bandengan 02	0	7.360.749,00	7.360.749,00
69	SDN Pabean	0	5.712.368,00	5.712.368,00
70	SDN Degayu 01	0	1.808.100,00	1.808.100,00
71	SDN Degayu 02	0	11.093.734,00	11.093.734,00
72	SMPN 01 Pekalongan	0	657.136.114,00	657.136.114,00
73	SMPN 02 Pekalongan	0	491.310.372,00	491.310.372,00
74	SMPN 03 Pekalongan	0	11.432.262,00	11.432.262,00
75	SMPN 04 Pekalongan	0	19.158.103,00	19.158.103,00
76	SMPN 05 Pekalongan	0	119.271.244,00	119.271.244,00
77	SMPN 06 Pekalongan	0	22.330.453,00	22.330.453,00
78	SMPN 07 Pekalongan	0	51.727.689,00	51.727.689,00
79	SMPN 08 Pekalongan	0	31.014.173,00	31.014.173,00
80	SMPN 09 Pekalongan	0	2.375.710,00	2.375.710,00
81	SMPN 10 Pekalongan	0	34.287.445,00	34.287.445,00
82	SMPN 11 Pekalongan	0	4.989.941,00	4.989.941,00
83	SMPN 12 Pekalongan	0	5.847.517,00	5.847.517,00
84	SMPN 13 Pekalongan	0	24.583.793,00	24.583.793,00
85	SMPN 14 Pekalongan	0	84.794.729,00	84.794.729,00
86	SMPN 15 Pekalongan	0	16.601.284,00	16.601.284,00
87	SMPN 16 Pekalongan	0	52.040.754,00	52.040.754,00
88	SMPN 17 Pekalongan	0	24.911.087,00	24.911.087,00
	Jumlah	0	2.324.582.618,00	2.324.582.618,00
	Saldo Blokgrand SMP N 4	0	18.425.000,00	18.425.000,00
	Saldo BOS		2.306.157.618,00	2.306.157.618,00

LAMPIRAN 5

RINCIAN SALDO PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2019

REKESING	LRA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
01.01.07.01	Persediaan Bahan Pakai Habis Kantor	6.321.700.728,72	35.473.594.866,73	34.247.584.078,24	7.547.711.517,21
01.01.07.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	201.293.584,00	4.541.792.370,00	4.372.004.737,02	371.081.216,98
01.01.07.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	629.226.343,80	3.901.782.665,00	3.858.674.530,80	672.334.478,00
01.01.07.01.03	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery kering)	397.463.134,00	3.381.146.947,80	3.653.419.836,80	125.190.245,00
01.01.07.01.04	Persediaan Perangko, materi dan benda pos lainnya	922.000,00	215.354.400,00	215.654.400,00	622.000,00
01.01.07.01.05	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.	107.848.414,00	1.820.828.849,00	1.815.699.160,00	112.978.103,00
01.01.07.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	12.950.000,00	473.903.864,00	485.753.792,06	1.100.071,94
01.01.07.01.07	Persediaan Isi Tabung pemadam kebakaran	1.335.000,00	35.435.500,00	36.420.500,00	350.000,00
01.01.07.01.08	Persediaan Isi Tabung Gas	-	17.182.000,00	17.182.000,00	-
01.01.07.01.09	Persediaan Peralatan Pertamanan	-	-	-	-
01.01.07.01.10	Persediaan Perlengkapan Laboratorium dan Kesehatan	4.778.894.049,32	20.243.194.574,91	18.899.286.752,96	6.122.801.871,27
01.01.07.01.11	Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga	191.768.203,60	842.603.696,02	893.118.368,60	141.253.531,02
01.01.07.01.13	Persediaan Bahan Bakar Kayu	-	370.000,00	370.000,00	-
					-
01.01.07.02	Persediaan Bahan/Material	5.864.540.016,93	29.957.357.338,40	27.827.346.174,69	7.994.551.180,64
01.01.07.02.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	30.445.500,00	2.243.821.793,99	2.245.541.793,99	28.725.500,00
01.01.07.02.02	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	358.853.431,00	358.853.431,00	-
01.01.07.02.03	Persediaan Bibit Ternak	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
01.01.07.02.04	Persediaan Bahan Obat-Obatan	5.728.458.699,62	17.655.137.462,92	15.533.222.331,73	7.850.373.830,81
01.01.07.02.05	Persediaan Bahan Kimia	75.010.150,38	136.807.505,45	144.052.215,66	67.765.440,17
01.01.07.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	962.000,00	734.857.900,00	725.088.900,00	10.731.000,00
01.01.07.02.29	Persediaan Bahan Praktek/Percontohan	-	1.068.019.551,00	1.061.019.551,00	7.000.000,00
01.01.07.02.07	Persediaan suku cadang peralatan	-	17.672.500,00	17.672.500,00	-
01.01.07.02.08	Persediaan Hadiah Tropi/Piala dll (Barang)	-	521.244.000,00	521.244.000,00	-
01.01.07.02.09	Persediaan pakan satwa	-	51.061.500,00	51.061.500,00	-
01.01.07.02.10	Persediaan pupuk tanaman	-	158.149.879,00	158.149.879,00	-
01.01.07.02.11	Persediaan Bahan Perlengkapan Diklat/ Pelatihan/Sosialisasi/Workshop	630.000,00	1.069.990.850,00	1.070.345.850,00	275.000,00
01.01.07.02.12	Persediaan Bahan Makanan	21.302.540,93	4.670.446.610,04	4.668.925.945,31	22.823.205,66
01.01.07.02.13	Persediaan Perlengkapan Olah Raga	-	436.162.345,00	436.162.345,00	-
01.01.07.02.14	Persediaan peralatan pertanian	1.800.000,00	100.220.500,00	102.020.500,00	-
01.01.07.02.15	Persediaan Hewan Qurban	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
01.01.07.02.16	Persediaan Persyaratan Pernikahan	-	-	-	-
01.01.07.02.17	Persediaan Perlengkapan Seni	-	106.293.600,00	106.293.600,00	-
01.01.07.02.18	Persediaan Perlengkapan Upacara	-	117.594.400,00	117.594.400,00	-
01.01.07.02.19	Persediaan Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor	-	-	-	-
01.01.07.02.20	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.931.126,00	234.820.410,00	233.894.332,00	6.857.204,00
01.01.07.02.21	Persediaan Pembelian Gordyn	-	105.017.500,00	105.017.500,00	-
01.01.07.02.22	Persediaan Karpet / Matras	-	116.194.000,00	116.194.000,00	-
01.01.07.02.23	Persediaan Perlengkapan Ibadah	-	33.150.000,00	33.150.000,00	-
01.01.07.02.24	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	-	-	-	-

REKENING	LRA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
01.01.07.02.25	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	-	14.341.600,00	14.341.600,00	-
01.01.07.02.26	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Praktikum/Laboratorium	-	-	-	-
01.01.07.02.27	Persediaan Bahan Material Promosi Pariwisata	-	-	-	-
01.01.07.02.28	Persediaan Bahan Material Perpustakaan	-	-	-	-
					-
01.01.07.03	Persediaan Barang Lainnya	19.360.000,00	10.850.397.719,00	10.817.484.319,00	52.273.400,00
	Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.360.000,00	10.514.397.719,00	10.481.484.319,00	52.273.400,00
	Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	336.000.000,00	336.000.000,00	-
	JUMLAH	12.205.600.745,65	76.281.349.924,13	72.892.414.571,93	15.594.536.097,85

LAMPIRAN 6

INVESTASI PERMANEN

URAIAN	PT BKK JATENG (merger PD BKK PKL UTARA)/Audited	PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN/Audited	PD BPR BANK PEKALONGAN/Audited (ganti nama dr Bank Pasar)	PT. BANK JATENG	PT. PRPP JATENG/Audited	PERUMDA TIRTAYASA/Audited
Aktiva lancar						14.534.427.163,00
Aktiva Tetap						33.855.542.202,00
Aktiva lainnya						1.342.254.107,00
Total Aktiva	2.358.499.809.199,00	30.273.295.778,00	63.478.932.543,00		52.458.801.372,00	49.732.223.472,00
Kewajiban	2.120.663.747.475,00	21.484.930.646,00	51.611.360.124,00		1.392.133.637,00	3.645.287.882,00
Modal disetor	342.150.000.000,00	7.440.000.000,00	9.400.000.000,00		50.000.000.000,00	53.310.577.250,00
Dana Setoran Modal					30.536.400,00	
Donasi					262.727.000,00	
Cadangan	59.804.371.759,00	775.029.450,00	1.447.353.736,00			177.328.223,00
Laba (Rugi) Tahun lalu /Laba (Rugi) ditahan)	(102.344.539.086,00)	4.483.144,00	-		(1.369.450.498,00)	(5.936.124.719,00)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(61.773.770.949,00)	568.852.538,00	1.020.218.683,00		2.142.854.833,00	907.723.095,00
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja						(2.372.568.259,00)
Total ekuitas perusahaan	237.836.061.724,00	8.788.365.132,00	11.867.572.419,00		51.066.667.735,00	46.086.935.590,00
Kewajiban + Modal	2.358.499.809.199,00	30.273.295.778,00	63.478.932.543,00		52.458.801.372,00	49.732.223.472,00
Perhitungan % kepemilikan						
Modal Hibah						2.970.943.450,00
Pemerintah Pusat						992.149.950,00
Pemprop Jateng		3.880.000.000,00	-			-
Pemkot Pekalongan	6.950.000.000,00	3.560.000.000,00	9.400.000.000,00	22.393.000.000,00	305.200.000,00	49.347.483.849,63
	342.150.000.000,00	7.440.000.000,00	9.400.000.000,00	3.643.739.000.000,00	50.000.000.000,00	53.310.577.249,63
Prosentase Kepemilikan	2,03	47,85	100,00	0,61	0,61	98,14
Metode SAP	Biaya	Ekuitas	Ekuitas	Biaya	Biaya	Ekuitas
Pengakuan Metode Ekuitas	6.950.000.000,00	4.205.185.466,39	11.867.572.419,00	22.393.000.000,00	305.200.000,00	45.229.223.045,88

LAMPIRAN 7**TANAH NEGARA YANG DISEWAKAN**

No	SKPD Pencatat	Luas Tanah	Alamat	Penggunaan	Nilai Buku (Rp)	Status
1	BKD	126	JL.PEMBANGUNAN	PERUM WARGA SARIP	41.706.000,00	Tanah Negara
2	BKD	100	JL.PEMBANGUNAN	PERUM WARGA SALIYAN/M	33.100.000,00	Tanah Negara
3	BKD	240	JL.BENDAN (BENDAN BARAT)	H.AZIS	113.160.000,00	Tanah Negara
4	BKD	300	JL.MURIYA 10 (BENDAN BARAT)	RIYANTO	141.450.000,00	Tanah Negara
5	BKD	400	JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)	LS.TAMBUAN	188.600.000,00	Tanah Negara
6	BKD	320	JL.RINJANI 3(BENDAN BARAT)	SUSMAMTO	150.880.000,00	Tanah Negara
7	BKD	360	JL.MERAPI 7 (BENDAN BARAT)	AFIYAH	169.740.000,00	Tanah Negara
8	BKD	364	JL.VETERAN 23	ISWINARSO	120.484.000,00	Tanah Negara
9	BKD	176	JL.VETERAN GG. III	YAKUP CIPTO	58.256.000,00	Tanah Negara
10	BKD	160	JL.VETERAN GG.III	R.SLAMET/SRI REJEKI	52.960.000,00	Tanah Negara
11	BKD	209	JL.VETERAN 46	SURONO	69.179.000,00	Tanah Negara
12	BKD	176	JL.VETERAN 46 B	AQ MUDZAKIR	58.256.000,00	Tanah Negara
13	BKD	12	JL.VETERAN 46 C	NY.SUPARNO	3.806.500,00	Tanah Negara
14	BKD	5.500	JL.KALIBANGER	PERUMAHAN NOYONTAAN 17 ORANG	Rp1.309.000,00	Tanah Negara
15	BKD	3.000	JL.PONCOL BARU	UTK PERUMAHAN PONCOL BARU 41 ORG	826.500.000,00	Tanah Negara
16	BKD	2.984	JL.JAWA	PERUM WARGA KERGON	987.704.000,00	Tanah Negara
17	BKD	1.478	JL.KARIMUNJAWA	PERUM WARGA KERGON	489.218.000,00	Tanah Negara
18	BKD	80	Kauman	PERUM WARGA Kauman	19.040.000,00	Tanah Negara

LAMPIRAN 8

TANAH EKS BENGKOK YANG BERUBAH FUNGSI

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Nilai Perolehan (Rp.)	Berubah Fungsi Menjadi	Keterangan
1	Pringrejo	Pringlangu	1985	1.750	63.000.000,00	lapangan	hp.25
		Pringlangu	1985	2.400	86.400.000,00	lapangan	Hp.28
		Pringlangu	1985	1.975	71.100.000,00	lapangan	HP.29
		Pringlangu	1985	2.118	76.248.000,00	lapangan	Hp.30
		Pringlangu	1989	2.045	73.620.000,00	lapangan	HP 27
		Tegalrejo RW VIII	1988	6.988	482.310.000,00	Diurug untuk NUSEP	Leter C No. 4 Persil PI.59/S.III
		Tegalrejo RW VIII	1988	2.600	768.443.200,00	Diurug untuk NUSEP	Leter C No. 6 Persil PI.64/S.III
		Pringlangu	1989	595	50.575.000,00	Tower air dan IPAL	HP.39 .asal Leter C No. 1 Persil No.38/SII
2	Buaran Kradenan	Buaran rt 05 rw 02	1945	4.076	286.350.000,00	Puskesmas	HP.00018
3	Banyurip	Banyurip Ageng	1945	1.755	36.782.000,00	Jalan Desa	Leter C No. 6 Persil No. 39/SIV . Luas 1.388 M2
4	Kuripan Kertoharjo	RT 2 RW 6	1945	750	12.720.000,00	Lapangan	Leter No c11 Persil No. 72/d111 Luas 750 M2
5	Setono	Karangmalang	1988	250	26.250.000,00	Ditempati Pra KS	Leter C.3 Persil No. 53/S.II
6	Kalibaras	Baros	1990	1.050	42.000.000,00	Hutan Kota	bengkok Umum C6 Persil 89/S II
		Sokorejo	1990	2.333	183.750.000,00	Hutan Kota	Leter C No. 4 , Persil No. 43/S I, Luas 1.750 M2
		Sokorejo	1990	3.188	409.500.000,00	Hutan kota	Leter C No. 5 , Persil No. 79/S II, Luas 3.900 M2
		Sokorejo	1990	6.497	740.250.000,00	Lapangan	Leter C No. 1 , Persil No. 21/S III. Luas 7.050 M2
		Sokorejo	1990	6.297	792.750.000,00	Lapangan	Leter C No. 1 , Persil No. 71/S III . Luas 7.550 M2
		Sokorejo	1990	3.750	101.250.000,00	Hutan kota	Leter C No. 4 , Persil No. 40/S I. Luas 3.750 M2
7	Klego	Klego	1960	488	31.232.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C2 Persil 111 D1
		Klego	1960	1.350	86.400.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C3 Persil 53 D1
		Klego	1960	1.138	72.832.000,00	Hutan kota	Leter C No.6 Persil No.65/SII
		Klego	1960	7.900	1.207.800.000,00	Pustu dan PAUD	C1 Persil 48 S II
		Klego	1960	2.683	470.920.000,00	Perumahan warga Gg (Timur)	C6 Persil 105 S II
		Klego	1960	300	45.750.000,00	Depo Sampah	C9 Persil 72 S I
		Klego	1960	1.125	150.311.600,00	Hutan kota	C2 Persil 67 S I
		Klego	1960	530	70.813.400,00	Hutan kota	C2 Persil 67 S I
		Klego	1960	2.950	188.800.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C1 Persil 60 S III
		Klego	1960	388	24.832.000,00	Hutan kota	C1 Persil 71 S 1
		Klego	1960	175	11.200.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C1 Persil 117 D1
		Klego	1960	3.138	200.832.000,00	Pelebaran sungai Kalibanger	C2 Persil 56 D1
		8	Degayu	Ngetrem	2000	3.565	35.650.000,00
Babalan	2000			5.240	73.360.000,00	Kawasan Technopark	bengkok Polisi I C 8 Persil 6a S II

LAMPIRAN 9**TANAH EKS BENGKOK PONCOL DAN KLEGO YANG DIHUNI WARGA**

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	No. Reg	Luas	Tahun	No. Sertifikat	Alamat	Nilai (Rp)
1	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	1	6.069	1973	BQ.547947	Poncol Gg Asparagas	1.138.580.814,00
2	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	2	5.132	1973	BQ.547945	Poncol Gg Gumuk Indah	962.793.992,00
3	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	3	2.525	1980	BJ547952	Poncol Gg Gotong Royong	730.162.939,00
4	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	4	2.148	1985	BQ.547950	Poncol Gg Dahlia	608.869.418,00
5	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	6	457	1980	BQ.547953	poncol Gg Gotong Royong	132.152.061,00
6	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	7	379	1985	BJ.547951	Poncol Gg Dahlia	107.430.582,00
7	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	8	397	1980	BJ.547955	Poncol Gg Kemangi	49.094.608,00
8	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	9	2.998	1980	BJ.547954	Poncol Gg Kemangi	370.745.392,00
9	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	10	406	1978	BJ.547949	poncol Gg Pintu Air	124.952.184,00
10	Kel. Poncol	Kampung	01.01.01.01.01	11	2.446	1978	BQ.547948	Poncol Gg Pintu Air	752.790.816,00
11	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	3	510	1960	AX 834271	Klego	77.775.000,00
12	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	11	2.683	1960	BJ.547956	Klego	470.920.000,00
13	Kel. Klego	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	21	530	1960	AX 834270	Klego	70.813.400,00

LAMPIRAN 10**PENAMBAHAN NILAI ATAS TANAH INTERCHANGE TOL DI TA 2019**

No	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Tahun	Alamat	Nilai s.d th 2018 (Rp)	Penambahan th 2019 (Rp)	Nilai s.d 2019 (Rp)
1	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	01.01.13.07.04	3	2016	Kel. Kuripan Yosorejo	869.288.548,00	243.510,000,00	1.112.798.548,00
2	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	01.01.13.07.04	6	2016	Kel. Soko Duwet	3.950.010.177,00	1.394.665,000,00	4.075.240.077,00
3	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	01.01.13.07.04	1	2017	Kel. Kalibaros	1.964.663,000,00	363.014,000,00	2.327.677,000,00

LAMPIRAN 11**PENAMBAHAN NILAI ATAS TANAH TANGGUL ROB DI TA 2019**

No	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Tahun	Nilai s.d th 2018 (Rp)	Penambahan th 2019 (Rp)	Nilai s.d 2019 (Rp)
1	Tanah Waduk	01.01.11.07.01	2	2017	549.164.346,00	1.451.280.000,00	2.000.444.346,00

LAMPIRAN 12**TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA INTERCHANGE TOL**

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Luas tanah (m2)	Luas yang terkena (m2)	HP/ Letter C	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Kali Baros	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	1	4.400	2.292	Leter C No. 2 , Persil No. 31/S II	462.000.000
2	Kelurahan Kali Baros	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	10	3.188	3.188	Leter C No. 5 , Persil No. 79/S II	409.500.000
3	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	96	1.736	50	HP No. 20	38.950.000
4	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	95	6.367	334	HP No. 19	136.325.000
5	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	97	1.079	7	HP No. 35	37.925.000
6	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	101	2.846	19	HP No. 17	32.800.000
7	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	92	1.520	105	HP No. 24	38.950.000
8	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	89	1.887	117	HP No. 25	32.800.000
9	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	83	4.350	378	HP No. 31	85.075.000
10	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	93	1.548	118	HP No. 21	36.900.000
11	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	90	1.570	124	HP No. 22	27.675.000
12	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	84	3.580	240	HP No. 23	75.850.000
13	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	14	7.950	532	C 1 Persil 53/S IV	127.200.000
14	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	13	8.975	717	C1 Persil 52 / S III	143.600.000

No	SKPD	Jenis Barang	Kode Barang	Register	Luas tanah (m2)	Luas yang terkena (m2)	HP/ Letter C	Nilai (Rp)
15	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	16	800	46	C1 Persil Klas 55 / S III	12.800.000
16	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	15	1.050	56	C1 Persil Klas 54 / S II	16.800.000
17	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	78	3.808	251	HP No. 37	44.075.000
18	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	4	625	468	C10 Persil Klas 71 / S III	10.000.000
19	Kelurahan Kuripan Yosorejo	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	4	1.913	870	C12 Persil klas 72/S III	30.608.000
20	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	57	935	41	HP No 14	19.200.000
21	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	58	680	38	HP No 13	10.400.000
22	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	59	3.931	105	HP No. 42	67.200.000
23	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	43	6.136	132	HP No. 43	100.000.000
24	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	5	2.473	443	HP No. 46	110.400.000
25	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	36	1.868	459	HP No. 50	40.800.000
26	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	92	1.520	1.024	HP No. 24	38.950.000
27	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	89	1.887	1.793	HP No. 25	32.800.000
28	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	81	2.848	183	HP No. 26	45.100.000
29	Kelurahan Soko Duwet	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	75	17.143	468	HP No. 28	357.725.000
30	Kelurahan Buaran Kradenan	Sawah Ditanami Padi	01.01.02.01.01	3	3.060	512	-	61.200.000

LAMPIRAN 13

TANAH YANG DIPINJAM PAKAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat			
								Tgl	Nomor		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	11	1.000	1993	Jl. Majapahit Podosugih	Hak Pakai	11/13/2013	AU230255 HP. No. 36	SEKRETARIAT KORPRI/BAZ	210.500.000,00
2	Tanah Bangunan Lainnya	01.01.11.10.01	1	5.130	2000	Jl Gajah Mada / Merdeka No 21. 23. Jl Bahagia 1.3.5	Hak Pakai	5/18/1981	5407906 Hp No 6	Rumdin Dandim. Kajari. Wakapolres. Kasdim	1.446.660.000,00
3	Tanah Bangunan Poliklinik	01.01.11.04.13	1	723	1968	JL.VETERAN	Hak Pakai	11/19/2014	BQ 547763 HP No 130	KANT POLIKLINIK POLRI	347.550.000,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	13	1.675	2000	JL.HOS COKROAMINOTO	Hak Pakai	10/09/2001	AR350728 Hp No. 12	POLSEK SELATAN	338.350.000,00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	10	145	1987	JL.BANDUNG	Hak Pakai	09/12/2001	AR350780 Hp No. 37	POLSEK TIMUR	46.400.000,00
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	01.01.11.01.04	5	7.838	1950	JL BAHAGIA 13.15.17.19.21.23.25	Hak Pakai	05/12/1981	5407905 Hp No. 5	Rumah Dinas Muspida (Ketua DPRD. Walikota. Wakil Walikota. Sekda. Guest House. Kapolres. PKK dan DWP)	2.210.316.000,00
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	4	435	1980	JL.TONDANO	Hak Pakai	04/06/2002	AT.300703 HP No 25	KORAMIL TIMUR	103.530.000,00
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	14	1.205	2000	Jl.Hoscokroaminoto	Hak Pakai	10/09/2001	AR350729 Hp No. 11	KORAMIL SELATAN	243.410.000,00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	1	6.000	1991	Jl Kusuma Bangsa No 96	Hak Pakai	1/19/1991	AB051003 HP No 32	Sebagian dipinjampakai kan untuk Polsek Utara dan Koramil Utara	1.010.873.000,00
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	5	1.320	1983	Jl.Sriwijaya 17	Hak Pakai	04/12/1999	AN328208 Hp. No. 26	KANTOR KPU	622.380.000,00
11	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	11	520	2002	Jl. Tondano poncol	Hak Pakai	03/12/2010	BG 473004 Hp No. 30	KUA Kec. Pkl Timur	1.078.307.000,00
12	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	3	297	2002	Jl. Hos Coroaminoto	Hak Pakai	02/10/2015	BJ 141978 HP No 146	KUA Kuripan Kidul	596.462.000,00
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	1	1.195	1979	Jl.Veteran No. 27 Kelurahan Kraton Lor	Hak Pakai	3/14/2014	BJ 492655 HP No 21	Unit Donor Darah PMI	665.972.000,00
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	1	998	1987	Jl. Tondano pekalongan	Hak Pakai	5/17/2000	AL 562831 HP No 21	Sebagian Dipinjampakai kan untuk BP4	274.949.000,00

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Nilai Perolehan (Rp)
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat			
								Tgl	Nomor		
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	17	411	1970	JL.PEMBANGUNAN	Hak Pakai	11/19/2014	BO 709739 HP No 24	Panwaslu	565.800.000,00
16	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	10	882	2002	Jl Tondano Poncol	Hak Pakai	03/12/2015	BG 473019 HP No 31	Kntr Pengadilan Agama	163.216.000,00
17	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	1	4.550	2003	Jl. Dharma Bakti No.23 Pekalongan	Hak Pakai	6/28/2004	AU 853680 Hp No. 20	Sebagian dipinjamakai kan untuk AKN	1.070.721.495.21
18	Tanah Bangunan Pasar	01.01.11.02.01	1	20.000	2014	Jl Wr. Supratman/ Hp.74	Hak Pakai	7/14/2015	BT 408639 HP No 74	Sebagian dipinjamakai kan untuk TNI AL Tegal (Posko Lanal)	13.061.084.670,00
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	01.01.11.04.12	1	530	1982	Jl. Dharma Bakti	Hak Pakai	04/06/2002	AT 300876 HP No 14	Pinjam Pakai untuk AKN	159.000.000,00
20	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	01.01.11.01.11	5	670	2002	Jl. Rinjani Bendan	Hak Pakai	02/06/2015	BJ 141969	Sebagian dipinjamakai kan untuk Gudang KPU	1.495.598.000,00

LAMPIRAN 14

LAMPIRAN HIBAH PERALATAN DAN MESIN

SKPD	Jumlah	Perolehan Aset Tetap Peralatan mesin dari Hibah					Keterangan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Dana BOS	Komite Sekolah	Pihak Ke Tiga lainnya	
DINAS SOSIAL, P2KB	3	24.194.000					P.C Unit 2Unit RP. 20700000 PKH, Note Book 1Unit RP. 3.494.000,00 Tablet untuk PKH
Dindikcapil	2	79.783.000					Printer 2Unit RP.79.783.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	749.785.000					Mini Bus RP. 749.785.000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2		5.544.000				Rak Besi/Metal Rak Buku Perpus 2Unit RP. 5544000
RSUD	1.235	38.446.889.000					Alat-alat Besar RP. 242.000.000 , Alat Bengkel dan Alat Ukur RP. 58.342.600 , Alat Kantor dan Rumah Tangga RP. 1.902.226.200 , Alat Studio, RP. 1.450.000 , Kedokteran RP. 32.449.080.000 , Alat Laboratorium RP. 3.793.790.200
SDN Poncol 3	2				2.100.000		Kursi Tamu Rp1.500.000 Power Amplifier Rp600.000 Sound System Rp460.000 Ekstrakom
SDN Podosugih 3	1				6.170.000		laptop RP. 6.170.000,00
SDN Medono 7	1				3.250.000		Speaker Wireless Avino / P912-A Rp3.250.000 Speaker Simbadda Rp380.000
SDN Medono 4	3				7.000.000		LCD Proyektor Rp5.200.000 Bricket layar / screen wall Rp1.250.000 Layar / Screen wall Rp550.000
SMPN 14	3				11.850.000		Laptop Lenovo 2Unit @RP. 8.000.000 , Laptop Lenovo RP. 3.850.000
SDN Panjang Wetan 1	1					1.150.000	Speaker Aktif Portable RP. 1.150.000,00 (Alumni), Rak Kayu Rp. 300.000,00 (Komite)

SKPD	Jumlah	Perolehan Aset Tetap Peralatan mesin dari Hibah					Keterangan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Dana BOS	Komite Sekolah	Pihak Ke Tiga lainnya	
SDN Kuripan Lor 1	2				3.400.000		Lemari Etalase Kaca Rp900.000 , Lemari Etalase Kaca Rp2.500.000
SDN Bendan 01	1				1.700.000		LEMARI ES POLYTRON RP. 1.700.000 KIPAS ANGIN MASPION 2Unit RP. 625.000 (Ekstrakom)
SMPN 07	1				2.765.000		Air Compresor RP. 2.765.000,00
DINDIK	256	1.920.055.914					LAN TESTER + Crimpimh Tool 6Unit @RP. 999.988
							Server 7Unit @RP. 27.125.000
							Komputer klien + sofware CAI + Office +AVNOS+Headset 140Unit @RP. 8.781.500
							Printer 7Unit @RP. 2.275.000
							Projektor Rp4.700.000
							HDD Eksternal 7Unit @Rp1.115.000
							Switch Hub+ Konektor RJ45+kabel UTPLAN 7Unit @ Rp2.769.500
							Wireless Router 7Unit @Rp1.792.500
							Personal Komputer Lain-lain Rp999.998
							Proyektor + Attachment 5Unit Rp4.700.000
							Slide Projector Rp4.700.000
							UPS 35 Unit @Rp4.720.000
							Alat Laboratorium Lain-lain Rp240.006.988
Jumlah	1.514	41.220.706.914	5.544.000	-	38.235.000	1.150.000	
TOTAL		41.265.635.914					

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5.395.800	5.395.800	-	Setwan
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	951.500	951.500	-	Setwan
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	951.500	951.500	-	Setwan
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	951.500	951.500	-	Setwan
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	951.500	951.500	-	Setwan
DPUPR	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	951.500	951.500	-	Setwan
DPUPR	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	1.000.000	1.000.000	-	Setwan
DPUPR	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	2.590.000	2.590.000	-	Setwan
DINPERKIM	AC Split	2.500.000	2.500.000	-	DLH
DINPERKIM	AC Split	3.300.000	3.300.000	-	DLH
SATPOL PP	PC. Unit	5.741.700	5.741.700	-	Dinkominfo
SATPOL PP	PC. Unit	7.194.375	1.798.594	5.395.781	Dinkominfo
SATPOL PP	CPU	8.261.900	8.261.900	-	Dinkominfo
SATPOL PP	Camera Film	16.985.000	3.397.000	13.588.000	Dinkominfo
SATPOL PP	Scanner	7.281.835	5.825.468	1.456.367	Dinkominfo
SATPOL PP	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	BKD
SATPOL PP	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	BKD
BPBD	Meja komputer	656.053	656.053	-	SETWAN
BPBD	Meja komputer	656.053	656.053	-	SETWAN
BPBD	Meja kerja pegawai non struktural	5.395.800	5.395.800	-	SETWAN
BPBD	Meja kerja pegawai non struktural	5.395.800	5.395.800	-	SETWAN
BPBD	Meja kerja pegawai non struktural	951.500	951.500	-	SETWAN
DINPERPA	Facsimile	1.450.000	1.160.000	290.000	BAPPEDA
DISHUB	Sedan	216.000.000	216.000.000	-	Bag. RTP
DISKOMINFO	Sepeda Motor	17.160.833	17.160.833	-	BKD
DISKOMINFO	Sepeda Motor	11.800.000	11.800.000	-	BKD
DPMPTSP	AC Unit	14.400.000	8.640.000	5.760.000	BKD
DPMPTSP	AC Unit	14.680.000	8.808.000	5.872.000	BKD
DPMPTSP	Kipas Angin	2.400.000	2.400.000	-	BKD
DINPARBUDPORA	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1.365.476.000	1.365.476.000	-	BKD
DINPARBUDPORA	Mesin Potong Rumput	6.000.000	6.000.000	-	BKD
DINARPUS	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	BKD
BAG HUKUM	Televisi	2.777.700		2.777.700	Bag. RTP
BAG HUKUM	Laptop	14.999.040		14.999.040	Bag. RTP
BAG HUKUM	Printer	6.754.800		6.754.800	Bag. RTP
BAG HUKUM	Printer	2.050.000		2.050.000	Bag. RTP
BAG HUKUM	Meja Panjang	3.500.000		3.500.000	Bag. RTP
BAG HUKUM	Rak Kayu	2.400.000		2.400.000	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Filling Besi/Metal	6.000.000		6.000.000	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Alat Penghancur Kertas	1.954.000		1.954.000	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Dispenser	2.500.000		2.500.000	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	P.C Unit	8.300.160		8.300.160	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Lap Top	22.498.560		22.498.560	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Printer	10.374.000		10.374.000	Bag. RTP
BAG ORGANISASI	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11.770.000		11.770.000	Bag. RTP
BAG PEREKONOMIAN	Filling Besi/Metal	15.000.000		15.000.000	Bag. RTP

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
BAG PEREKONOMIAN	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	3.870.000		3.870.000	Bag. RTP
BAG PEREKONOMIAN	Lap top	7.499.520		7.499.520	Bag. RTP
BAG PEREKONOMIAN	Printer	5.187.000		5.187.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10.795.200		10.795.200	Bag. RTP
BAG MINBANG	Laptop	78.392.000		78.392.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Printer	5.187.000		5.187.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9.963.000		9.963.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Kursi Rapat	6.534.300		6.534.300	Bag. RTP
BAG MINBANG	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11.880.000		11.880.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Meja Rapat	10.230.000		10.230.000	Bag. RTP
BAG MINBANG	Televisi	2.777.700		2.777.700	Bag. RTP
BAG MINBANG	Laptop	9.950.000		9.950.000	Bag. RTP
BAG KESRA	Sepeda Motor	16.898.846	16.898.846	-	BKD
BAG UMUM	Sepeda Motor	10.300.000	8.828.574	1.471.426	BKD
BAG RTP	Pick Up	25.000.000	25.000.000	-	BKD
BAG RTP	Staion Wagon	465.000.000		465.000.000	BKD
BAG RTP	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	502.082.750		502.082.750	BKD
BAG RTP	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	502.082.750		502.082.750	BKD
BAG RTP	Sepeda Motor	49.080.000		49.080.000	BKD
BAG HUMAS	Sepeda motor	16.898.846	16.898.846	-	BKD
BAG HUMAS	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.244.000	-	3.244.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Filling Besi/Metal	2.492.000	498.400	1.993.600	Bag. RTP
BAG HUMAS	Filling Besi/Metal	2.492.000	498.400	1.993.600	Bag. RTP
BAG HUMAS	Televisi	4.700.000	-	4.700.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Printer	1.720.000	-	1.720.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11.000.000	-	11.000.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	Bag. RTP
BAG HUMAS	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	Bag. RTP
KEC PKL UTARA	Perkakas pengangkat bermesin	76.500.000	7.650.000	68.850.000	BPBD
KANDANG PANJANG	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PANJANG WETAN	Sepeda motor	17.469.600		17.469.600	BKD
DEGAYU	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BKD
BANDENGAN	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BKD
KRAPYAK	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PADUKUHAN KRATON	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PANJANG BARU	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
JENGGOT	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
BUARAN KRADENAN	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
KURIPAN KERTOHARJO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
KURIPAN YOSOREJO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
SOKO DUWET	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BKD
BANYURIP	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
MEDONO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PODOSUGIH	Sepeda motor	17.469.600		17.469.600	BKD
TIRTO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
SAPURO KEBULEN	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BKD
BENDAN KERGON	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BKD
PASIRKRATONKRAM AT	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PRINGREJO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
KAUMAN	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
PONCOL	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
KLEGO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
GAMER	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
NOYONTAANSARI	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
SETONO	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
SETONO	Viar Karya	26.000.000		26.000.000	BKD
KALIBAROS	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BKD
JUMLAH		4.514.002.399	1.945.478.045	2.568.524.354	

LAMPIRAN 16

PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama SKPD	PENGHAPUSAN		
		PERALATAN DAN MESIN		
		Jumlah	Di Lelang	Hilang/dimusnahkan
			SK No. 030/1196 17-Dec-19	SK No. 030/1196 17-Dec-19
1	Sekretariat DPRD/DPRD	161.248.334,29	161.248.334,29	
2	Bagian Hukum	14.375.000,00	14.375.000,00	
3	Bagian Umum dan Keuangan	27.633.700,00	27.633.700,00	
4	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	4.750.000,00	4.750.000,00	
5	Badan Keuangan Daerah	26.687.114,00	26.687.114,00	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.326.792,00	254.326.792,00	
7	Dinas Perhubungan	1.789.284.334,00	1.789.284.334,00	
8	Dinas Kesehatan	7.894.500,00	7.894.500,00	
9	Puskesmas Bendan	1.089.000,00		1.089.000,00
10	Puskesmas Tirta	675.000,00		675.000,00
11	Puskesmas Tondano	278.000,00		278.000,00
12	Puskesmas Pekalongan Selatan	177.000,00		177.000,00
13	RSUD BENDAN	704.468.272,29	704.468.272,29	
14	SMP N 07	5.800.000,00		5.800.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111.813.269,19	111.813.269,19	
16	Dinas Pertanian dan Pangan	97.436.337,00	97.436.337,00	
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.505.640,00	95.505.640,00	
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	200.527.895,00	200.527.895,00	
19	Inspektorat	106.762.411,54	106.762.411,54	
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	42.235.963,15	42.235.963,15	
21	Dinas Lingkungan Hidup	16.158.704,00	16.158.704,00	
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	57.084.100,00	57.084.100,00	
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	29.005.000,00	29.005.000,00	
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	117.329.754,53	117.329.754,53	
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	253.640.254,00	253.640.254,00	
26	Kelurahan Pasirkronkramat	8.162.659,00	8.162.659,00	
27	Kelurahan Sapuro Kebulen	27.530.741,00	27.530.741,00	
28	Kelurahan Medono	3.950.000,00	3.950.000,00	
29	Kelurahan Tirta	12.743.200,00	12.743.200,00	
30	Kecamatan Pekalongan Timur	9.080.000,00	9.080.000,00	
31	Kelurahan Poncol	6.000.000,00	6.000.000,00	
32	Kelurahan Noyontaansari	5.657.700,00	5.657.700,00	
33	Kecamatan Pekalongan Utara	19.991.380,50	19.991.380,50	
34	Kelurahan Krapyak	14.966.873,00	14.966.873,00	
35	Kelurahan Panjang Wetan	6.879.772,00	6.879.772,00	
36	Kelurahan Bandengan	10.601.654,00	10.601.654,00	
37	Kecamatan Pekalongan Selatan	62.653.207,00	62.653.207,00	
38	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	30.045.875,00	30.045.875,00	
		4.344.449.436,49	4.336.430.436,49	8.019.000,00

LAMPIRAN 17

BELANJA MODAL TIDAK DIKAPITALISASI

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				Penjelasan
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	
Sekretariat DPRD/DPRD	45.190.000,00	37.640.000	7.550.000		Pengadaan habis pakai 5 buah Lampu Hias dan 100 buah Kursi Rapat tidak memenuhi batas minimal aset tetap
BKD	54.879.000,00		54.879.000		Pengadaan Habis Pakai 55 buah Papan Nama Aset
DINPARBUDPORA	330.000,00	330.000			Pengadaan 1 buah Kipas Angin tidak memenuhi batas minimal aset tetap
RSUD BENDAN	352.592.255,00	66.557.700		286.034.555	Pelunasan hutang RSUD Bendan 2018, pengadaan 3 buah termometer, 2 buah pompa lain-lain, 1 buah papan gantung poli jantung, 155 buah kursi rapat, 2 buah x-ray protective glove, dan 6 buah Tromol Kecil tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DKP	2.975.000,00	450.000	2.525.000		Pengadaan Habis Pakai 8 buah Papan Tulis dan 12 buah Papan Informasi, serta 1 buah Charger Baterai tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINPERPAN	2.189.000,00	1.660.000	529.000		Pengadaan habis pakai 4 buah lampu dan 1 buah atap fiber, pengadaan 3 buah kipas angin, 1 buah kabel listrik, dan 1 buah Tabung gas tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DLH	68.151.675,00	28.366.600	39.785.075		Pengadaan habis pakai 40 buah tong sampah, pengadaan 71 buah kursi rapat, 4 buah kursi putar, dan 4 buah exhaust fan tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Bag. Adm. Pembangunan	1.070.000,00	1.070.000			Pengadaan 3 buah Laser Pointer tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Bag. Perlengkapan dan Rumah Tangga	2.960.000,00		2.960.000		Pengadaan habis pakai 1 buah Seprei dan 1 unit Magic Com dan 1 unit Pesawat Telepon
Kel. Setono	660.000,00	300.000	360.000		Pengadaan habis pakai 2 buah Microphone dan pengadaan 1 buah papan tulis tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Bendan Kergon	7.500.000,00			7.500.000	Pengadaan 2 buah teralis jendela tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Puskesmas Pekalongan Selatan	800.000,00	800.000			Pengadaan 2 buah Lemari Kayu tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
Kec. Pekalongan Utara	11.747.000,00	11.747.000			Pengadaan 25 buah kursi rapat dan 1 buah dispenser tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINKES	214.261.165,00	18.106.905	194.650.530	1.503.730	Pengadaan habis pakai 18 buah alat kantor lain-lain dan 2310 alat kedokteran umum. Pengadaan 1 UPS, 10 buah kursi besi, 25 stetoscope, dan 14 alat kedokteran gigi tidak memenuhi batas minimal aset tetap. Pengadaan wastafel tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi.
DINDAGKOP	81.150.000,00	81.150.000			Pengadaan 125 buah Anak Timbangan Bidur dan 90 buah Kursi Rapat tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Bag. Perekonomian	5.000.000,00		5.000.000		Pengadaan habis pakai 10 buah plakat canting
BKPM	1.045.000,00	1.045.000			Pengadaan 2 buah Pompa Air dan 2 buah Pigura tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Puskesmas Kusuma Bangsa	400.000,00	400.000			Pengadaan 1 buah Pompa Air tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SATPOL PP	6.660.000,00	2.340.000	4.320.000		Pengadaan habis pakai 12 Kantong Mayat. 2 buah Kunci Hydrant Pilar dan 4 Kampak dan tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DPMPSTP	5.625.600,00	5.625.600			Pengadaan 12 buah Kursi Lipat tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINPERINAKEK	9.559.600,00	1.402.500	8.157.100		Pengadaan Habis Pakai 4 buah Bracket TV, 1 set Bed Cover dan Sarung Bantal, dan 1 set Piring, Cangkir, mangkok dan pisau. Pengadaan 3 buah Papan Absen tidak memenuhi batas minimal aset tetap
BPBD	4.968.000,00	2.030.000	2.938.000		Pengadaan habis pakai 10 unit Carabiner dan 2 descender, pengadaan 3 buah puley dan 2 headlamp tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DPUPR	11.855.000,00	8.405.000,00		3.450.000,00	Honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPHP Kegiatan Pengadaan teodolit dan pengadaan 20 buah Kursi Rapat dan 1 buah White Board tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DISKOMINFO	11.250.000,00	10.500.000	750.000		Pengadaan habis pakai 4 buah headset dan 30 buah kursi rapat tidak memenuhi batas minimal aset tetap

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
DINSOS	46.950.000,00	46.950.000			Pengadaan 100 buah Kursi Rapat tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bandengan 01	2.761.000,00		2.761.000		Pengadaan habis pakai berupa 3 set perlengkapan komputer (mouse, keyboard), 1 unit speaker, dan 2 set alat dapur
SDN Baros	150.000,00		150.000		Pengadaan habis pakai 1 set alat panah
SDN Bendan 03	430.000,00		430.000		Pengadaan habis pakai 1 set alat dapur
SDN Bendan 08	1.001.450,00	351.450	650.000		Pengadaan habis pakai 4 buah flashdisk dan 1 buah mouse, serta pengadaan 1 buah magnet tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bumirejo	2.750.000,00			2.750.000	Pengadaan teralis jendela tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi
SDN Degayu 02	900.000,00		900.000,00		Pengadaan habis pakai 10 buah meja mini perpustakaan
SDN Dekoro	875.000,00		875.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah harddisk, 1 buah flashdisk, dan 1 buah charger laptop
SDN Dukuh 01	777.400,00		777.400,00		Pengadaan habis pakai 1 buah taplak, 1 buah flashdisk, dan 1 buah alat listrik
SDN Gamer 01	300.000,00	300.000			Pengadaan 3 buah Kursi Biasa tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Karangmalang	1.425.000,00		1.425.000,00		Pengadaan habis pakai 2 buah cartridge printer canon, 1 buah model penampang saluran darah, dan 20 buah alat olahraga
SDN Kebulen	670.000,00		670.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set alat praktek olahraga
SDN Keputran 06	495.000,00	495.000			Pengadaan 1 unit penangkal petir tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kertoharjo 02	140.000,00		140.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah speaker
SDN Kradenan 04	2.220.000,00		2.220.000,00		Pengadaan habis pakai 3 buah alat peraga/praktek sekolah dan 3 buah bahan praktek batik
SDN Kramatsari 01	1.714.000,00	420.000	1.294.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set alat dapur (kran air, dll) dan 1 set alat listrik untuk pompa air, serta pengadaan 1 unit pompa air tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Kidul 02	600.000,00		600.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah mainboard
SDN Krpyak Lor 04	523.000,00		523.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set perlengkapan P3K, 1 buah Bola Voli, dan 1 buah Bola Tennis
SDN Krpyak Lor 05	150.000,00		150.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah Kipas Angin
SDN Kraton Kidul	1.880.000,00		1.880.000,00		Pengadaan habis pakai 4 buah bendera, 1 set peralatan rumah tangga, 1 buah flashdisk, 1 buah card reader, 1 set perlengkapan kantor (ATK), 1 buah spanduk, dan 1 buah lampu
SDN Kraton	500.000,00		500.000,00		Pengadaan habis pakai 2 buah Kipas Angin
SDN Kuripan Kidul 02	354.000,00		354.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah speaker dan 1 buah flashdisk
SDN Kuripan Lor 02	720.000,00		720.000,00		Pengadaan habis pakai 2 buah poster
SDN Landungsari 01	338.000,00		338.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah mouse dan 1 buah flashdisk 8GB
SDN Landungsari 04	3.493.000,00	350.000	3.143.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set peralatan olahraga, 4 buah pianika, 1 set Alat Pertamanan, 1 buah thinner, serta pengadaan 1 buah tabung pemadam tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 04	346.000,00		346.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set alat dapur
SDN Medono 07	2.093.000,00		2.093.000,00		Pengadaan habis pakai 16 buah alat olahraga, serta pengadaan 4 buah model anatomi tubuh tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 08	825.000,00		825.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah bola voli dan 1 set anak panah
SDN Pabean	910.000,00		910.000,00		Pengadaan habis pakai 2 box plastik dan 88 buah alat dapur
SDN Panjang Wetan 01	200.000,00		200.000,00		Pengadaan habis pakai 2 buah CD Pembelajaran
SDN Panjang Wetan 04	380.000,00		380.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah mouse, 1 buah keyboard, dan 1 buah flashdisk
SDN Pasirsari 01	250.000,00		250.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah Alat Timbangan
SDN Pasirsari 02	150.000,00		150.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah Alat Timbangan badan
SDN Podosugih 01	160.000,00		160.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah pigura

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB B				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SDN Poncol 01	991.000,00		991.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah jangka papan tulis, 1 buah penggaris busur derajat, dan 1 buah baterai laptop
SDN Sampangan 01	4.880.000,00		4.880.000,00		Pengadaan habis pakai 51 buah alat olahraga
SDN Sapuro 01	745.000,00	499.000	246.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah Speaker dan pengadaan 1 buah Modem Smartfren tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Sapuro 05	956.000,00		956.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah besi titian dan 1 set anak panah
SDN Sokorejo	937.100,00		937.100,00		Pengadaan habis pakai 1 unit kamera CCTV, 2 buah bola, dan 1 set bahan praktek keterampilan
SDN Tirto 01	3.295.000,00	2.000.000	1.295.000,00		Pengadaan habis pakai 1 set alat keterampilan, serta pengadaan 4 buah rebana dan 1 buah alat musik tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 01	8.383.800,00		8.383.800,00		Pengadaan habis pakai 12 set perlengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker), 3 set peralatan jaringan komputer, dan 1 set peralatan instalasi listrik
SMPN 04	140.000,00		140.000,00		Pengadaan habis pakai 1 buah alat pengukur waktu
SMPN 05	162.000,00		162.000,00		Pengadaan habis pakai 2 set bahan praktek keterampilan
SMPN 06	2.940.000,00		2.940.000,00		Pengadaan habis pakai 12 buah alat rumah tangga lain-lain
SMPN 07	22.728.900,00	1.610.000	21.118.900		Pengadaan habis pakai 28 buah papan pengumuman, 3 set alat musik islami (rebana, darbuka, dan bass hadrof + koplak), 20 buah alat peraga olah raga, 25 alat praktek kimia, dan 1 buah mistar, serta pengadaan 1 buah stop watch dan 3 buah microphone tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 08	3.650.000,00		3.650.000		Pengadaan habis pakai 14 buah alat peraga olah raga
SMPN 10	860.000,00		860.000		Pengadaan habis pakai 4 set perlengkapan komputer
SMPN 16	12.210.875,00	6.720.000	5.490.875		Pengadaan habis pakai 25 buah alat peraga olah raga dan 30 seruling serta pengadaan 15 buah pianika tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 17	2.400.000,00	400.000	2.000.000		Pengadaan habis pakai 46 buah perlengkapan upacara dan 40 buah tempat sampah serta pengadaan 1 buah mic wireless tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINDIK	447.370.488,00	93.378.000	30.888.000	323.104.488	Pengadaan 19 buah alat kantor lainnya, 32 buah perlengkapan komputer untuk dihibahkan ke swasta, jasa pemasangan 299 buah gordyn dan 50 buah teralis, pengadaan habis pakai 160 buah kursi siswa, serta pengadaan 32 buah bangku siswa, 29 buah kipas angin, 25 buah kursi besi, 5 buah kursi guru kayu, 192 buah meja siswa, dan 5 buah papan absen tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DISHUB	184.052.500,00		184.052.500		Pengadaan habis pakai 25 buah Taplak Meja Kantor dan 90 Rambu Papan Nama Jalan
Jumlah	1.676.951.808,00	433.399.755,00	619.209.280,00	624.342.773,00	

OPD Pemberi	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
Setwan	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	2.590.000	2.590.000	-	DPUPR
DLH	AC Split	2.500.000	2.500.000	-	DINPERKIM
DLH	AC Split	3.300.000	3.300.000	-	DINPERKIM
Dinkominfo	PC. Unit	5.741.700	5.741.700	-	SATPOL PP
Dinkominfo	PC. Unit	7.194.375	1.798.594	5.395.781	SATPOL PP
Dinkominfo	CPU	8.261.900	8.261.900	-	SATPOL PP
Dinkominfo	Camera Film	16.985.000	3.397.000	13.588.000	SATPOL PP
Dinkominfo	Scanner	7.281.835	5.825.468	1.456.367	SATPOL PP
BKD	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	SATPOL PP
BKD	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	SATPOL PP
SETWAN	Meja komputer	656.053	656.053	-	BPBD
SETWAN	Meja komputer	656.053	656.053	-	BPBD
SETWAN	Meja kerja pegawai non struktural	5.395.800	5.395.800	-	BPBD
SETWAN	Meja kerja pegawai non struktural	5.395.800	5.395.800	-	BPBD
SETWAN	Meja kerja pegawai non struktural	951.500	951.500	-	BPBD
BAPPEDA	Facsimile	1.450.000	1.160.000	290.000	DINPERPA
Bag. RTP	Sedan	216.000.000	216.000.000	-	DISHUB
BKD	Sepeda Motor	17.160.833	17.160.833	-	DISKOMINFO
BKD	Sepeda Motor	11.800.000	11.800.000	-	DISKOMINFO
BKD	AC Unit	14.400.000	8.640.000	5.760.000	DPMPTSP
BKD	AC Unit	14.680.000	8.808.000	5.872.000	DPMPTSP
BKD	Kipas Angin	2.400.000	2.400.000	-	DPMPTSP
BKD	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1.365.476.000	1.365.476.000	-	DINPARBUDPORA
BKD	Mesin Potong Rumput	6.000.000	6.000.000	-	DINPARBUDPORA
BKD	Mesin Absensi	2.100.500		2.100.500	DINARPUS
Bag. RTP	Televisi	2.777.700		2.777.700	BAG HUKUM
Bag. RTP	Laptop	14.999.040		14.999.040	BAG HUKUM
Bag. RTP	Printer	6.754.800		6.754.800	BAG HUKUM
Bag. RTP	Printer	2.050.000		2.050.000	BAG HUKUM
Bag. RTP	Meja Panjang	3.500.000		3.500.000	BAG HUKUM
Bag. RTP	Rak Kayu	2.400.000		2.400.000	BAG HUKUM
Bag. RTP	Filling Besi/Metal	6.000.000		6.000.000	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Alat Penghancur Kertas	1.954.000		1.954.000	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Dispenser	2.500.000		2.500.000	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	P.C Unit	8.300.160		8.300.160	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Lap Top	22.498.560		22.498.560	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Printer	10.374.000		10.374.000	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11.770.000		11.770.000	BAG ORGANISASI
Bag. RTP	Filling Besi/Metal	15.000.000		15.000.000	BAG PEREKONOMIAN
Bag. RTP	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	3.870.000		3.870.000	BAG PEREKONOMIAN
Bag. RTP	Lap top	7.499.520		7.499.520	BAG PEREKONOMIAN
Bag. RTP	Printer	5.187.000		5.187.000	BAG PEREKONOMIAN
Bag. RTP	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10.795.200		10.795.200	BAG MINBANG
Bag. RTP	Laptop	78.392.000		78.392.000	BAG MINBANG
Bag. RTP	Printer	5.187.000		5.187.000	BAG MINBANG
Bag. RTP	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9.963.000		9.963.000	BAG MINBANG
Bag. RTP	Kursi Rapat	6.534.300		6.534.300	BAG MINBANG
Bag. RTP	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11.880.000		11.880.000	BAG MINBANG
Bag. RTP	Meja Rapat	10.230.000		10.230.000	BAG MINBANG
Bag. RTP	Televisi	2.777.700		2.777.700	BAG MINBANG
Bag. RTP	Laptop	9.950.000		9.950.000	BAG MINBANG
BKD	Sepeda Motor	16.898.846	16.898.846	-	BAG KESRA
BKD	Sepeda Motor	10.300.000	8.828.574	1.471.426	BAG UMUM

OPD Pemberi	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
BKD	Pick Up	25.000.000	25.000.000	-	BAG RTP
BKD	Staion Wagon	465.000.000		465.000.000	BAG RTP
BKD	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	502.082.750		502.082.750	BAG RTP
BKD	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	502.082.750		502.082.750	BAG RTP
BKD	Sepeda Motor	49.080.000		49.080.000	BAG RTP
BKD	Sepeda motor	16.898.846	16.898.846	-	BAG HUMAS
Bag. RTP	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	P.C Unit	7.820.000	-	7.820.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.244.000	-	3.244.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Filling Besi/Metal	2.492.000	498.400	1.993.600	BAG HUMAS
Bag. RTP	Filling Besi/Metal	2.492.000	498.400	1.993.600	BAG HUMAS
Bag. RTP	Televisi	4.700.000	-	4.700.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Printer	1.720.000	-	1.720.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11.000.000	-	11.000.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	BAG HUMAS
Bag. RTP	Handy Talky	4.117.000		4.117.000	BAG HUMAS
BPBD	Perkakas pengangkat bermesin	76.500.000	7.650.000	68.850.000	KEC PKL UTARA
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KANDANG PANJANG
BKD	Sepeda motor	17.469.600		17.469.600	PANJANG WETAN
BKD	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	DEGAYU
BKD	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BANDENGAN
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KRAPYAK
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	PADUKUHAN KRATON
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	PANJANG BARU
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	JENGGOT
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BUARAN KRADENAN
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KURIPAN KERTO HARJO
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KURIPAN YOSOREJO
BKD	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	SOKO DUWET
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	BANYURIP
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	MEDONO
BKD	Sepeda motor	17.469.600		17.469.600	PODOSUGIH
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	TIRTO
BKD	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	SAPURO KEBULEN
BKD	Sepeda Motor	17.469.600	-	17.469.600	BENDAN KERGON
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	PASIRKRATONKRAMAT
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	PRINGREJO
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KAUMAN
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	PONCOL
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KLEGO
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	GAMER
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	NOYONTAANSARI
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	SETONO
BKD	Viar Karya	26.000.000		26.000.000	SETONO

OPD Pemberi	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Penerima
BKD	Sepeda Motor	17.469.600		17.469.600	KALIBAROS
	JUMLAH	4.514.002.399	1.945.478.045	2.568.524.354	

LAMPIRAN 19**KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI**

No.	OPD	Kode Barang	Register	Koreksi Bertambah
1	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.01	2	1.500.000,00
2	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.01	4	4.000.000,00
3	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.01	1	1.000.000,00
4	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	19	142.524.821,17
5	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	17	2.000.000,00
6	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	4	1.500.000,00
7	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	7	15.000.000,00
8	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	3	60.000.000,00
9	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	12	3.500.000,00
10	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	1	3.500.000,00
11	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	3	14.556.000,00
12	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	2	42.300.000,00
13	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	9	21.312.500,00
14	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	37	2.400.000,00
15	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	10	12.500.000,00
16	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	40	18.830.000,00
17	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	8	5.857.500,00
18	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	41	8.400.000,00
19	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	33	10.000.000,00
20	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	27	31.625.000,00
21	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	24	1.375.000,00
22	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	23	5.120.000,00
23	Kelurahan Yosorejo	04.13.01.04.01	2	10.800.000,00
24	Kelurahan Yosorejo	04.13.01.04.01	4	2.800.000,00
25	Kelurahan Sapuro	04.13.01.04.01	1	7.650.000,00
26	Kelurahan Sapuro	04.13.01.04.01	17	61.992.000,00
27	Kelurahan Sapuro	04.13.01.04.01	8	12.650.000,00
28	Kelurahan Sapuro	04.13.01.04.01	9	37.293.000,00
29	Kelurahan Kandang Panjang	04.13.01.04.01	2	30.300.000,00
30	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	11	14.105.000,00
31	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	20	32.865.000,00
32	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	17	77.715.000,00
33	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	21	2.625.000,00
34	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	14	30.450.000,00
36	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	9	16.695.000,00
37	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	15	60.937.500,00
39	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	9	3.000.000,00
40	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	3	75.000.000,00
42	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	4	92.500.000,00
44	Kelurahan Krapyak	04.13.01.04.01	1	140.757.000,00
45	DINPERKIM	04.13.01.04.01	4	190.566.250,00
46	DINPERKIM	04.13.01.04.01	104	33.048.919,00

No.	OPD	Kode Barang	Register	Koreksi Bertambah
47	DINPERKIM	04.13.01.04.01	15	19.787.453,00
48	DINPERKIM	04.13.01.04.01	33	28.807.000,00
49	DINPERKIM	04.13.01.04.01	4	95.466.250,00
50	DINPERKIM	04.13.01.04.01	69	54.433.000,00
51	DINPERKIM	04.13.01.04.01	89	176.466.250,00
52	DINPERKIM	04.13.01.04.01	94	71.700.000,00
53	DINPERKIM	04.13.01.04.01	146	46.832.198,00
54	DINPERKIM	04.13.01.04.01	47	28.082.250,00
55	DINPERKIM	04.13.01.04.01	92	59.456.250,00
56	DINPERKIM	04.13.01.05.08	14	50.609.000,00
57	DINPERKIM	04.13.01.05.08	15	78.459.341,00
58	DINPERKIM	04.13.01.05.08	19	95.850.000,00
59	DINPERKIM	04.13.01.05.08	22	80.816.000,00
60	DINPERKIM	04.13.01.05.08	31	95.720.000,00
61	DINPERKIM	04.13.01.05.08	42	81.100.000,00
62	DINPERKIM	04.13.01.05.08	62	75.124.651,00
63	DINPERKIM	04.13.01.04.01	13	244.911.829,00
64	DINPERKIM	04.13.01.05.08	5	64.108.727,00
65	DINPERKIM	04.13.01.04.01	36	67.813.406,00
66	DINPERKIM	04.13.01.04.01	52	216.989.314,00
67	DINPERKIM	04.13.01.04.01	20	47.200.000,00
68	DINPERKIM	04.13.01.04.01	56	107.577.324,00
69	DINPERKIM	04.13.01.05.08	16	150.538.000,00
70	DINPERKIM	04.13.01.04.01	85	45.936.250,00
71	DINPERKIM	04.13.01.05.08	43	77.195.000,00
72	DINPERKIM	04.13.01.04.01	116	60.425.000,00
73	DINPERKIM	04.13.01.04.01	144	79.966.250,00
74	DINPERKIM	04.13.01.05.08	19	19.614.486,00
75	DINPERKIM	04.13.01.04.01	154	95.016.250,00
76	Kel. Banyurip	04.13.01.04.01	1	114.850.000,00
77	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	1	4.500.000,00
78	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	12	16.000.000,00
79	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	14	11.250.000,00
80	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	15	42.250.000,00
81	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	17	13.000.000,00
82	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	4	21.250.000,00
83	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	6	40.500.000,00
84	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	7	29.250.000,00
85	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	12	4.500.000,00
86	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	13	6.000.000,00
87	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	17	20.000.000,00
88	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	2	3.000.000,00
89	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	4	26.500.000,00
90	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	5	3.250.000,00
91	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	6	60.000.000,00

No.	OPD	Kode Barang	Register	Koreksi Bertambah
92	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	7	69.067.000,00
93	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	27	4.500.000,00
94	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	34	4.200.000,00
95	Kel. Soko Duwet	04.13.01.04.01	38	6.750.000,00
96	Kel. Medono	04.13.01.04.01	1	360.176.500,00
97	Kel. Medono	04.13.01.04.01	3	136.913.000,00
	Jumlah			4.756.258.469,17

LAMPIRAN 20

TRANSFER MASUK JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	18.970.000	2.845.500	16.124.500	DLH
DINPERKIM	Jalan Desa	36.678.000		36.678.000	Kel Poncol
DINPERKIM	Jalan Desa	12.756.000		12.756.000	Kel Poncol
DINPERKIM	Jalan Desa	57.365.000		57.365.000	Kel Kalibaras
DINPERKIM	Jalan Desa	20.729.500		20.729.500	Kel Kalibaras
DINPERKIM	Jalan Desa	7.465.500		7.465.500	Kel Kalibaras
DINPERKIM	Jalan Desa	72.452.000		72.452.000	Kel. Kauman
DINPERKIM	Jalan Desa	76.696.000		76.696.000	Kel. Kauman
DINPERKIM	Jalan Desa	46.841.000		46.841.000	Kel.Pasirkratonkramat
DINPERKIM	Jalan Desa	63.829.750		63.829.750	Kel. Sapuro Kebulen
DINPERKIM	Jalan Desa	78.420.000		78.420.000	Kel. Sapuro Kebulen
DINPERKIM	Jalan Desa	58.940.000		58.940.000	Kel. Bendan Kergon
DINPERKIM	Jalan Desa	25.508.000		25.508.000	Kel. Bendan Kergon
DINPERKIM	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	Kel.Pringrejo
DINPERKIM	Jalan Desa	15.000.000	9.300.000	5.700.000	Kel.Pringrejo
DINPERKIM	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	Kel.Pringrejo
DINPERKIM	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	Kel.Pringrejo
DINPERKIM	Jalan Desa	72.263.000		72.263.000	Kel. Podosugih
DINPERKIM	Jalan Desa	52.257.000		52.257.000	Kel. Podosugih
DINPERKIM	Jalan Desa	22.442.960		22.442.960	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	21.242.750		21.242.750	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	15.299.350		15.299.350	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	36.800.040		36.800.040	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	42.961.000		42.961.000	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	26.513.800		26.513.800	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	40.727.100		40.727.100	Kel. Tirta
DINPERKIM	Jalan Desa	69.120.000		69.120.000	Kel.Jenggot
DINPERKIM	Jalan Desa	9.593.000		9.593.000	Kel.Jenggot
DINPERKIM	Jalan Desa	11.487.000		11.487.000	Kel.Jenggot
DINPERKIM	Jalan Desa	39.620.000		39.620.000	Kel. Kuripan Kertoharjo
DINPERKIM	Jalan Desa	13.981.000		13.981.000	Kel. Kuripan Kertoharjo
DINPERKIM	Jalan Desa	103.126.500		103.126.500	Kel. Kuripan Yosorejo
DINPERKIM	Jalan Desa	17.593.500		17.593.500	Kel. Kuripan Yosorejo
DINPERKIM	Jalan Desa	15.695.000		15.695.000	Kel. Panjang Baru
DINPERKIM	Jalan Desa	19.445.000		19.445.000	Kel. Panjang Baru
DINPERKIM	Jalan Desa	42.045.000		42.045.000	Kel. Panjang Baru
DINPERKIM	Jalan Desa	47.861.000		47.861.000	Kel. Panjang Baru
DINPERKIM	Jalan Desa	112.653.000		112.653.000	Kel. Panjang Wetan
DINPERKIM	Jalan Desa	88.215.000		88.215.000	Kel. Panjang Wetan
DINPERKIM	Jalan Desa	27.249.000		27.249.000	Kel. Panjang Wetan
DINPERKIM	Jalan Desa	155.830.000		155.830.000	Kel. Krapyak
DINPERKIM	Jalan Desa	54.850.000		54.850.000	Kel. Kd. Panjang
DINPERKIM	Jalan Desa	57.637.000		57.637.000	Kel. Noyontaansari
DINPERKIM	Jalan Desa	75.596.000		75.596.000	Kel. Gamer
DINPERKIM	Jalan Desa	84.200.000		84.200.000	Kel. Degayu
DINPERKIM	Jalan Desa	92.052.000		92.052.000	Kel. Degayu
DINPERKIM	Jalan Desa	10.520.000		10.520.000	Kel. Medono
DINPERKIM	Jalan Desa	23.895.000		23.895.000	Kel. Medono
DINPERKIM	Jalan Desa	11.846.000		11.846.000	Kel. Medono
DINPERKIM	Jalan Desa	10.502.000		10.502.000	Kel. Medono
DINPARBUDPORA	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	245.691.000	67.565.025	178.125.975	BKD

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
PANJANG WETAN	Jalan Desa	166.656.268		166.656.268	DINPERKIM
PANJANG WETAN	Jalan Desa	45.120.041		45.120.041	DINPERKIM
DEGAYU	Jalan Desa	171.000.000	34.200.000	136.800.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa	100.648.000	50.324.000	50.324.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	93.768.446	93.768.446	-	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	189.870.000	37.974.000	151.896.000	DINPERKIM
BANDENGAN	Jalan Desa Lain-lain	99.496.268		99.496.268	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	30.728.537	3.072.854	27.655.683	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	39.909.196	3.990.920	35.918.276	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	21.969.019	2.196.902	19.772.117	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	16.679.208	1.667.921	15.011.287	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	9.453.116	945.312	8.507.804	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	89.540.000	17.908.000	71.632.000	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	143.300.000	28.660.000	114.640.000	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	99.722.868		99.722.868	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	175.496.268		175.496.268	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	29.319.157		29.319.157	DINPERKIM
KRAPYAK	Jalan Desa	49.839.268		49.839.268	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	111.795.000		111.795.000	Kel.Pasirkratonkramat
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	69.587.000	55.669.600	13.917.400	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	86.866.268		86.866.268	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	144.652.536		144.652.536	DINPERKIM
PADUKUHAN KRATON	Jalan Desa	164.846.268		164.846.268	DINPERKIM
JENGGOT	Jalan Desa	123.959.646		123.959.646	DINPERKIM
BUARAN KRADENAN	Jalan Desa	144.144.000	28.828.800	115.315.200	DINPERKIM
KURIPAN KERTOHARJO	Jalan Desa	36.827.173		36.827.173	DINPERKIM
KURIPAN YOSOREJO	Jalan Desa	197.883.323		197.883.323	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	11.095.052	1.109.505	9.985.547	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	95.960.000	19.192.000	76.768.000	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	45.560.367	4.556.037	41.004.330	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	91.783.303	-	91.783.303	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	98.453.323	-	98.453.323	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	87.919.393	-	87.919.393	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	59.067.323	-	59.067.323	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	93.241.106	-	93.241.106	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	163.843.626	-	163.843.626	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	74.166.823	-	74.166.823	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	42.263.146	-	42.263.146	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	48.335.323	-	48.335.323	DINPERKIM
SOKO DUWET	Jalan Desa	29.427.323	-	29.427.323	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Khusus Perorangan	290.900.427	232.720.344	58.180.083	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	57.495.455	5.749.546	51.745.909	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	93.965.000	18.793.000	75.172.000	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	96.528.639	9.652.864	86.875.775	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	86.028.861	8.602.886	77.425.975	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	96.466.250	9.646.625	86.819.625	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Khusus Perorangan	144.277.000	72.138.500	72.138.500	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Khusus Perorangan	455.229.211		455.229.211	DINPERKIM
BANYURIP	Jalan Desa	148.317.446	-	148.317.446	DINPERKIM
MEDONO	Jalan Desa	26.635.190		26.635.190	DINPERKIM
PODOSUGIH	Jalan Khusus Perorangan	80.714.000	40.357.000	40.357.000	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
TIRTO	Jalan Desa	287.166.250	28.716.625	258.449.625	DINPERKIM
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	143.935.000	28.787.000	115.148.000	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	107.696.250	10.769.625	96.926.625	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	170.466.250	17.046.625	153.419.625	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	67.394.170	-	67.394.170	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	43.731.410	-	43.731.410	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	54.469.650	-	54.469.650	Dinperkim
SAPURO KEBULEN	Jalan Desa	102.120.715	-	102.120.715	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	142.382.085	14.238.209	128.143.876	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	76.254.390	7.625.439	68.628.951	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	88.176.250	8.817.625	79.358.625	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	49.247.227	4.924.723	44.322.504	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	243.932.000	48.786.400	195.145.600	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	149.011.250	14.901.125	134.110.125	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	85.777.560	-	85.777.560	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	116.208.575	-	116.208.575	Dinperkim
BENDAN KERGON	Jalan Desa	32.640.580	-	32.640.580	Dinperkim
PASIRKRATONKRAM AT	Jalan Desa	47.466.250	4.746.625	42.719.625	Dinperkim
PASIRKRATONKRAM AT	Jalan Desa	145.116.250	14.511.625	130.604.625	Dinperkim
PASIRKRATONKRAM AT	Jalan Desa	77.925.030		77.925.030	Dinperkim
PASIRKRATONKRAM AT	Jalan Desa	18.242.825		18.242.825	Dinperkim
PRINGREJO	Jalan Khusus Lain-lain	172.002.000		172.002.000	DINPARBUDPORA
PRINGREJO	Jalan Desa	98.302.060		98.302.060	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	52.600.430		52.600.430	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	56.549.000	45.239.200	11.309.800	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	50.548.000	25.274.000	25.274.000	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	63.414.430		63.414.430	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	40.428.220		40.428.220	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	45.786.541		45.786.541	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	176.685.030		176.685.030	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	99.639.472		99.639.472	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	143.570.030		143.570.030	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	275.095.028		275.095.028	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	91.414.982		91.414.982	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Khusus Perorangan	29.491.000	26.541.900	2.949.100	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Khusus Perorangan	127.444.000	57.615.200	69.828.800	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	152.155.030		152.155.030	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Khusus Perorangan	248.680.000	153.460.100	95.219.900	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Desa	105.085.030		105.085.030	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Khusus Perorangan	101.097.000	50.548.500	50.548.500	DINPERKIM
PRINGREJO	Jalan Khusus Perorangan	80.510.000	40.255.000	40.255.000	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Khusus Perorangan	93.636.000	74.908.800	18.727.200	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Khusus Perorangan	82.956.000	41.478.000	41.478.000	DINPERKIM
KAUMAN	Jalan Desa	132.119.645		132.119.645	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	145.266.491		145.266.491	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	44.673.013		44.673.013	DINPERKIM
KLEGO	Jalan Desa	22.398.661		22.398.661	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	83.884.645		83.884.645	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	25.781.645		25.781.645	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	121.968.855		121.968.855	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	30.589.300		30.589.300	DINPERKIM
NOYONTAANSARI	Jalan Desa	60.909.635		60.909.635	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	105.639.730		105.639.730	DINPERKIM
SETONO	Jalan Desa	225.010.407		225.010.407	DINPERKIM

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
JUMLAH		13.227.902.488,00	1.617.827.933	11.610.074.555	

LAMPIRAN 21**KOREKSI KURANG SALDO AWAL JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI**

No.	SKPD	Kode Barang	Register	Koreksi Berkurang
1	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	22	1.500.000,00
2	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.01	3	3.000.000,00
3	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	24	1.000.000,00
4	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	21	1.000.000,00
5	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.01	6	142.524.821,17
6	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	16	2.000.000,00
7	Kelurahan Bandengan	04.13.01.04.02	3	1.500.000,00
8	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	8	15.000.000,00
9	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	5	60.000.000,00
10	Kelurahan Padukuhankraton	04.13.01.04.01	11	3.500.000,00
11	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	35	3.500.000,00
12	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	15	4.725.000,00
13	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	16	2.275.000,00
14	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	38	341.000,00
15	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	4	7.215.000,00
16	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	18	12.600.000,00
17	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	5	4.700.000,00
18	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	6	4.325.000,00
19	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	54	7.350.000,00
20	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	7	5.625.000,00
21	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	53	7.700.000,00
22	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	46	8.250.000,00
23	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	47	2.062.500,00
24	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	32	11.000.000,00
25	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	48	2.400.000,00
26	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	50	12.500.000,00
27	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	42	5.075.000,00
28	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	52	7.000.000,00
29	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	34	6.755.000,00
30	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	44	5.857.500,00
31	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	51	8.400.000,00
32	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	49	10.000.000,00
33	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	26	18.150.000,00
34	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	22	13.475.000,00
35	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	20	1.375.000,00
36	Kelurahan Bendan Kergon	04.13.01.04.01	19	5.120.000,00
37	Kelurahan Yosorejo	04.13.01.04.01	3	10.800.000,00
38	Kelurahan Yosorejo	04.13.01.04.01	7	2.800.000,00
39	Kelurahan Kandang Panjang	04.13.01.04.01	3	30.300.000,00
40	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	10	5.635.000,00
41	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	11	7.637.000,00
42	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	12	6.325.000,00

No.	SKPD	Kode Barang	Register	Koreksi Berkurang
43	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	13	6.875.000,00
44	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	14	6.800.000,00
45	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	15	2.271.000,00
46	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	16	1.750.000,00
48	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	20	12.650.000,00
47	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	2	1.650.000,00
49	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	21	3.000.000,00
51	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	26	3.000.000,00
50	Kelurahan Sapuro Kebulen	04.13.01.04.01	22	61.992.000,00
52	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	1	14.105.000,00
53	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	10	32.865.000,00
54	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	12	77.715.000,00
55	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	13	2.625.000,00
56	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	18	15.120.000,00
57	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	19	15.330.000,00
58	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	5	16.695.000,00
59	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	10	21.562.500,00
63	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	18	39.375.000,00
60	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	11	5.000.000,00
62	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	16	70.000.000,00
61	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	13	3.000.000,00
64	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	2	70.000.000,00
65	Kelurahan Pringrejo	04.13.01.04.01	4	22.500.000,00
66	Kelurahan Krapyak	04.13.01.04.01	11	140.757.000,00
67	DINPERKIM	04.13.01.04.01	4	190.566.250,00
68	DINPERKIM	04.13.01.04.01	10	33.048.919,00
69	DINPERKIM	04.13.01.04.01	15	19.787.453,00
70	DINPERKIM	04.13.01.04.01	33	28.807.000,00
71	DINPERKIM	04.13.01.04.01	4	95.466.250,00
72	DINPERKIM	04.13.01.04.01	69	54.433.000,00
73	DINPERKIM	04.13.01.04.01	89	176.466.250,00
74	DINPERKIM	04.13.01.04.01	94	71.700.000,00
75	DINPERKIM	04.13.01.04.01	14	46.832.198,00
76	DINPERKIM	04.13.01.04.01	47	28.082.250,00
77	DINPERKIM	04.13.01.04.01	92	59.456.250,00
78	DINPERKIM	04.13.01.05.08	14	50.609.000,00
79	DINPERKIM	04.13.01.05.08	15	78.459.341,00
80	DINPERKIM	04.13.01.05.08	19	95.850.000,00
81	DINPERKIM	04.13.01.05.08	22	80.816.000,00
82	DINPERKIM	04.13.01.05.08	31	95.720.000,00
83	DINPERKIM	04.13.01.05.08	42	81.100.000,00
84	DINPERKIM	04.13.01.05.08	62	75.124.651,00
85	DINPERKIM	04.13.01.04.01	13	89.911.123,00
86	DINPERKIM	04.13.01.04.01	8	79.711.000,00
87	DINPERKIM	04.13.01.04.01	15	75.289.706,00

No.	SKPD	Kode Barang	Register	Koreksi Berkurang
88	DINPERKIM	04.13.01.04.01	35	64.108.727,00
89	DINPERKIM	04.13.01.04.01	36	67.813.406,00
90	DINPERKIM	04.13.01.04.01	84	28.194.426,00
91	DINPERKIM	04.13.01.04.01	80	92.628.638,00
92	DINPERKIM	04.13.01.04.01	78	96.166.250,00
93	DINPERKIM	04.13.01.04.01	20	47.200.000,00
94	DINPERKIM	04.13.01.04.01	56	107.577.324,00
95	DINPERKIM	04.13.01.05.08	16	79.913.000,00
96	DINPERKIM	04.13.01.05.08	49	70.625.000,00
97	DINPERKIM	04.13.01.04.01	85	45.936.250,00
98	DINPERKIM	04.13.01.05.08	43	49.419.000,00
99	DINPERKIM	04.13.01.05.08	12	27.776.000,00
100	DINPERKIM	04.13.01.04.01	116	60.425.000,00
101	DINPERKIM	04.13.01.04.01	144	79.966.250,00
102	DINPERKIM	04.13.01.05.08	19	19.614.486,00
103	DINPERKIM	04.13.01.04.01	154	95.016.250,00
105	Medono	04.13.01.04.01	1	192.566.500,00
106	Medono	04.13.01.04.01	2	167.610.000,00
104	Medono	04.13.02.04.01	3	125.913.000,00
107	Medono	04.13.02.04.01	1	11.000.000,00
108	Banyuurip	04.13.01.04.01	2	114.850.000,00
109	Sokoduwet	04.13.01.04.01	42	6.750.000,00
110	Sokoduwet	04.13.01.04.01	3	21.250.000,00
111	Sokoduwet	04.13.01.04.01	2	4.500.000,00
112	Sokoduwet	04.13.01.04.01	8	40.500.000,00
113	Sokoduwet	04.13.01.04.01	9	9.000.000,00
114	Sokoduwet	04.13.01.04.01	5	20.250.000,00
115	Sokoduwet	04.13.01.04.01	11	16.000.000,00
116	Sokoduwet	04.13.01.04.01	41	11.250.000,00
117	Sokoduwet	04.13.01.04.01	17	13.000.000,00
118	Sokoduwet	04.13.01.04.01	26	17.000.000,00
119	Sokoduwet	04.13.01.04.01	19	12.500.000,00
120	Sokoduwet	04.13.01.04.01	40	12.750.000,00
121	Sokoduwet	04.13.01.04.01	25	69.067.000,00
122	Sokoduwet	04.13.01.04.01	28	2.500.000,00
123	Sokoduwet	04.13.01.04.01	22	15.000.000,00
124	Sokoduwet	04.13.01.04.01	21	15.000.000,00
125	Sokoduwet	04.13.01.04.01	24	20.000.000,00
126	Sokoduwet	04.13.01.04.01	23	7.500.000,00
127	Sokoduwet	04.13.01.04.01	35	4.500.000,00
128	Sokoduwet	04.13.01.04.01	29	3.250.000,00
129	Sokoduwet	04.13.01.04.01	31	6.000.000,00
130	Sokoduwet	04.13.01.04.01	19	10.000.000,00
131	Sokoduwet	04.13.01.04.01	30	6.500.000,00
132	Sokoduwet	04.13.01.04.01	20	10.000.000,00

No.	SKPD	Kode Barang	Register	Koreksi Berkurang
133	Sokoduwet	04.13.01.04.01	18	3.000.000,00
134	Sokoduwet	04.13.01.04.01	16	10.000.000,00
135	Sokoduwet	04.13.01.04.01	15	10.000.000,00
136	Sokoduwet	04.13.01.04.01	26	4.500.000,00
137	Sokoduwet	04.13.01.04.01	33	2.250.000,00
138	Sokoduwet	04.13.01.04.01	32	1.950.000,00
	Jumlah			4.756.258.469,17

LAMPIRAN 22

TRANSFER KELUAR JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DLH	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	18.970.000	2.845.500	16.124.500	DINPERKIM
Kel Poncol	Jalan Desa	36.678.000		36.678.000	DINPERKIM
Kel Poncol	Jalan Desa	12.756.000		12.756.000	DINPERKIM
Kel Kalibaras	Jalan Desa	57.365.000		57.365.000	DINPERKIM
Kel Kalibaras	Jalan Desa	20.729.500		20.729.500	DINPERKIM
Kel Kalibaras	Jalan Desa	7.465.500		7.465.500	DINPERKIM
Kel. Kauman	Jalan Desa	72.452.000		72.452.000	DINPERKIM
Kel. Kauman	Jalan Desa	76.696.000		76.696.000	DINPERKIM
Kel.Pasirkratonkramat	Jalan Desa	46.841.000		46.841.000	DINPERKIM
Kel. Sapuro Kebulen	Jalan Desa	63.829.750		63.829.750	DINPERKIM
Kel. Sapuro Kebulen	Jalan Desa	78.420.000		78.420.000	DINPERKIM
Kel. Bendan Kergon	Jalan Desa	58.940.000		58.940.000	DINPERKIM
Kel. Bendan Kergon	Jalan Desa	25.508.000		25.508.000	DINPERKIM
Kel.Pringrejo	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	DINPERKIM
Kel.Pringrejo	Jalan Desa	15.000.000	9.300.000	5.700.000	DINPERKIM
Kel.Pringrejo	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	DINPERKIM
Kel.Pringrejo	Jalan Desa	20.000.000	12.400.000	7.600.000	DINPERKIM
Kel. Podosugih	Jalan Desa	72.263.000		72.263.000	DINPERKIM
Kel. Podosugih	Jalan Desa	52.257.000		52.257.000	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	22.442.960		22.442.960	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	21.242.750		21.242.750	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	15.299.350		15.299.350	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	36.800.040		36.800.040	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	42.961.000		42.961.000	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	26.513.800		26.513.800	DINPERKIM
Kel. Tirto	Jalan Desa	40.727.100		40.727.100	DINPERKIM
Kel.Jenggot	Jalan Desa	69.120.000		69.120.000	DINPERKIM
Kel.Jenggot	Jalan Desa	9.593.000		9.593.000	DINPERKIM
Kel.Jenggot	Jalan Desa	11.487.000		11.487.000	DINPERKIM
Kel. Kuripan Kertoharjo	Jalan Desa	39.620.000		39.620.000	DINPERKIM
Kel. Kuripan Kertoharjo	Jalan Desa	13.981.000		13.981.000	DINPERKIM
Kel. Kuripan Yosorejo	Jalan Desa	103.126.500		103.126.500	DINPERKIM
Kel. Kuripan Yosorejo	Jalan Desa	17.593.500		17.593.500	DINPERKIM
Kel. Panjang Baru	Jalan Desa	15.695.000		15.695.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Baru	Jalan Desa	19.445.000		19.445.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Baru	Jalan Desa	42.045.000		42.045.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Baru	Jalan Desa	47.861.000		47.861.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Wetan	Jalan Desa	112.653.000		112.653.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Wetan	Jalan Desa	88.215.000		88.215.000	DINPERKIM
Kel. Panjang Wetan	Jalan Desa	27.249.000		27.249.000	DINPERKIM
Kel. Krapyak	Jalan Desa	155.830.000		155.830.000	DINPERKIM
Kel. Kd. Panjang	Jalan Desa	54.850.000		54.850.000	DINPERKIM
Kel. Noyontaansari	Jalan Desa	57.637.000		57.637.000	DINPERKIM
Kel. Gamer	Jalan Desa	75.596.000		75.596.000	DINPERKIM
Kel. Degayu	Jalan Desa	84.200.000		84.200.000	DINPERKIM
Kel. Degayu	Jalan Desa	92.052.000		92.052.000	DINPERKIM
Kel. Medono	Jalan Desa	10.520.000		10.520.000	DINPERKIM
Kel. Medono	Jalan Desa	23.895.000		23.895.000	DINPERKIM
Kel. Medono	Jalan Desa	11.846.000		11.846.000	DINPERKIM
Kel. Medono	Jalan Desa	10.502.000		10.502.000	DINPERKIM
BKD	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	245.691.000	67.565.025	178.125.975	DINPARBUDPORA
DINPERKIM	Jalan Desa	166.656.268		166.656.268	PANJANG WETAN

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jalan Desa	45.120.041		45.120.041	PANJANG WETAN
DINPERKIM	Jalan Desa	171.000.000	34.200.000	136.800.000	DEGAYU
DINPERKIM	Jalan Desa	100.648.000	50.324.000	50.324.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	93.768.446	93.768.446	-	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	189.870.000	37.974.000	151.896.000	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa Lain-lain	99.496.268		99.496.268	BANDENGAN
DINPERKIM	Jalan Desa	30.728.537	3.072.854	27.655.683	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	39.909.196	3.990.920	35.918.276	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	21.969.019	2.196.902	19.772.117	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	16.679.208	1.667.921	15.011.287	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	9.453.116	945.312	8.507.804	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	89.540.000	17.908.000	71.632.000	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	143.300.000	28.660.000	114.640.000	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	99.722.868		99.722.868	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	175.496.268		175.496.268	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	29.319.157		29.319.157	KRAPYAK
DINPERKIM	Jalan Desa	49.839.268		49.839.268	KRAPYAK
Kel.Pasirkratonkramat	Jalan Desa	111.795.000		111.795.000	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	69.587.000	55.669.600	13.917.400	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	86.866.268		86.866.268	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	144.652.536		144.652.536	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	164.846.268		164.846.268	PADUKUHAN KRATON
DINPERKIM	Jalan Desa	123.959.646		123.959.646	JENGGOT
DINPERKIM	Jalan Desa	144.144.000	28.828.800	115.315.200	BUARAN KRADENAN
DINPERKIM	Jalan Desa	36.827.173		36.827.173	KURIPAN KERTO HARJO
DINPERKIM	Jalan Desa	197.883.323		197.883.323	KURIPAN YOSOREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	11.095.052	1.109.505	9.985.547	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	95.960.000	19.192.000	76.768.000	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	45.560.367	4.556.037	41.004.330	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	91.783.303	-	91.783.303	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	98.453.323	-	98.453.323	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	87.919.393	-	87.919.393	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	59.067.323	-	59.067.323	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	93.241.106	-	93.241.106	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	163.843.626	-	163.843.626	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	74.166.823	-	74.166.823	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	42.263.146	-	42.263.146	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	48.335.323	-	48.335.323	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Desa	29.427.323	-	29.427.323	SOKO DUWET
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	290.900.427	232.720.344	58.180.083	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	57.495.455	5.749.546	51.745.909	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	93.965.000	18.793.000	75.172.000	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	96.528.639	9.652.864	86.875.775	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	86.028.861	8.602.886	77.425.975	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	96.466.250	9.646.625	86.819.625	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	144.277.000	72.138.500	72.138.500	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	455.229.211		455.229.211	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	148.317.446	-	148.317.446	BANYURIP
DINPERKIM	Jalan Desa	26.635.190		26.635.190	MEDONO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	80.714.000	40.357.000	40.357.000	PODOSUGIH
DINPERKIM	Jalan Desa	287.166.250	28.716.625	258.449.625	TIRTO
DINPERKIM	Jalan Desa	143.935.000	28.787.000	115.148.000	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	107.696.250	10.769.625	96.926.625	SAPURO KEBULEN

OPD Penerima	Aset yang Ditransfer	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	OPD Pemberi
DINPERKIM	Jalan Desa	170.466.250	17.046.625	153.419.625	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	67.394.170	-	67.394.170	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	43.731.410	-	43.731.410	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	54.469.650	-	54.469.650	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	102.120.715	-	102.120.715	SAPURO KEBULEN
DINPERKIM	Jalan Desa	142.382.085	14.238.209	128.143.876	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	76.254.390	7.625.439	68.628.951	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	88.176.250	8.817.625	79.358.625	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	49.247.227	4.924.723	44.322.504	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	243.932.000	48.786.400	195.145.600	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	149.011.250	14.901.125	134.110.125	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	85.777.560	-	85.777.560	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	116.208.575	-	116.208.575	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	32.640.580	-	32.640.580	BENDAN KERGON
DINPERKIM	Jalan Desa	47.466.250	4.746.625	42.719.625	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Jalan Desa	145.116.250	14.511.625	130.604.625	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Jalan Desa	77.925.030		77.925.030	PASIRKRATONKRAMAT
DINPERKIM	Jalan Desa	18.242.825		18.242.825	PASIRKRATONKRAMAT
DINPARBUDPORA	Jalan Khusus Lain-lain	172.002.000		172.002.000	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	98.302.060		98.302.060	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	52.600.430		52.600.430	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	56.549.000	45.239.200	11.309.800	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	50.548.000	25.274.000	25.274.000	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	63.414.430		63.414.430	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	40.428.220		40.428.220	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	45.786.541		45.786.541	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	176.685.030		176.685.030	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	99.639.472		99.639.472	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	143.570.030		143.570.030	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	275.095.028		275.095.028	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	91.414.982		91.414.982	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	29.491.000	26.541.900	2.949.100	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	127.444.000	57.615.200	69.828.800	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	152.155.030		152.155.030	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	248.680.000	153.460.100	95.219.900	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Desa	105.085.030		105.085.030	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	101.097.000	50.548.500	50.548.500	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	80.510.000	40.255.000	40.255.000	PRINGREJO
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	93.636.000	74.908.800	18.727.200	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Khusus Perorangan	82.956.000	41.478.000	41.478.000	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Desa	132.119.645		132.119.645	KAUMAN
DINPERKIM	Jalan Desa	145.266.491		145.266.491	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	44.673.013		44.673.013	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	22.398.661		22.398.661	KLEGO
DINPERKIM	Jalan Desa	83.884.645		83.884.645	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	25.781.645		25.781.645	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	121.968.855		121.968.855	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	30.589.300		30.589.300	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	60.909.635		60.909.635	NOYONTAANSARI
DINPERKIM	Jalan Desa	105.639.730		105.639.730	SETONO
DINPERKIM	Jalan Desa	225.010.407		225.010.407	SETONO
JUMLAH		13.227.902.488,00	1.617.827.933	11.610.074.555	

LAMPIRAN 23

BELANJA TIDAK DIKAPITALISASI ASET TETAP LAINNYA

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
Sekretariat DPRD/DPRD	1.381.000	1.381.000			Pengadaan 19 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Panjang Wetan	2.100.000	2.100.000			Pengadaan 34 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Bandengan	5.200.000	5.200.000			Pengadaan 83 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan 13 buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINPERINAKER	700.000	700.000			Pengadaan 2 buah Buku Agama Islam, 22 buah Majalah dan 3 buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Degayu	3.080.000	3.080.000			Pengadaan 58 buah buku umum lain lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Bag. Perekonomian	50.000	50.000			Pengadaan 1 buah buku umum lain lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Padukuhan Kraton	1.823.000	1.823.000			Pengadaan 7 buah buku hukum dan 19 buah buku ilmu pengeyahuan umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Poncol	90.000	90.000			Pengadaan 1 buah buku hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Panjang Baru	4.870.000	4.870.000			Pengadaan 88 buah buku umum lain-lain dan 5 buah buku hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Gamer	1.727.100	1.727.100			Pengadaan 18 buah buku ilmu pengetahuan umum dan 2 buah buku hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Medono	460.000	460.000			Pengadaan 6 buah Buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Noyontaan	2.478.000	2.478.000			Pengadaan 9 buah buku seni dan budaya, 6 buah buku ilmu pengetahuan dan teknologi, 9 buah buku ilmu pengetahuan umum, 8 buku keagamaan, dan 2 buah buku hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Buaran Kradenan	500.000	500.000			Pengadaan 11 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Tirto	400.000	400.000			Pengadaan 5 buah Buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Pringrejo	440.000	440.000			Pengadaan 6 buah Buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Sapuro Kebulen	400.000	400.000			Pengadaan 6 buah Buku Hukum tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Bendan Kergon	3.410.000	3.410.000			Pengadaan 25 buah buku ilmu sosial lain-lain, 26 buah buku ilmu pengetahuan praktis lain-lain, 14 buah buku umum lain-lain dan 1 buah buku ensiklopedia tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Kandang Panjang	5.000.000	5.000.000			Pengadaan 95 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Setono	1.268.000	1.268.000			Pengadaan 21 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kel. Krapyak	2.927.400	2.927.400			Pengadaan 53 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kec. Pekalongan Timur	1.360.000	1.360.000			Pengadaan 21 buah buku ilmu sosial lain-lain, 18 buah buku ilmu pengetahuan umum, dan 2 buah buku ensiklopedia tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Kec. Pekalongan Barat	3.538.250	3.538.250			Pengadaan 61 buah buku umum lain-lain, 9 buku hukum, dan 1 buku agama islam tidak memenuhi batas minimal aset tetap

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
Kec. Pekalongan Utara	1.954.000	1.954.000			Pengadaan 31 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bandengan 01	34.060.900	32.870.900	1.190.000		Pengadaan habis pakai 6 buah CD aplikasi raport kelas serta pengadaan 1513 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bandengan 02	10.471.400	10.471.400			Pengadaan 504 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Banyurip Ageng	16.800.800	16.800.800			Pengadaan 673 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Baros	5.353.800	5.353.800			Pengadaan 274 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bendan 01	49.601.300	49.601.300			Pengadaan 1441 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bendan 03	16.123.600	16.123.600			Pengadaan 761 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bendan 04	13.271.800	13.271.800			Pengadaan 439 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bendan 08	19.248.600	19.248.600			Pengadaan 797 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Buaran	19.777.000	19.777.000			Pengadaan 774 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Bumirejo	15.893.800	15.893.800			Pengadaan 834 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Degayu 01	3.077.200	3.077.200			Pengadaan 107 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Degayu 02	20.548.900	20.548.900			Pengadaan 441 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Dekoro	18.660.000	18.660.000			Pengadaan 662 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Dukuh 01	18.266.600	16.613.600	1.653.000		Pengadaan habis pakai 19 buah buku SPM Plus Kisi-kisi USBN 2019 dan pengadaan 906 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Duwet	17.779.300	16.523.300	1.256.000		Pengadaan habis pakai 100 buah buku Remen Bahasa Jawa Kelas 2 Kurikulum 13 dan 1 buah surat kabar/majalah, serta pengadaan 629 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Gamer 01	13.346.700	13.346.700			Pengadaan 406 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Gamer 02	29.006.100	29.006.100			Pengadaan 1174 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Jenggot	25.231.400	25.231.400			Pengadaan 993 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kandang Panjang 01	60.340.400	60.340.400			Pengadaan 1333 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kandang Panjang 02	71.220.100	71.220.100			Pengadaan 2142 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kandang Panjang 10	47.409.500	46.409.500	1.000.000		Pengadaan habis pakai 1 set body protector dan peecing silat serta pengadaan 1893 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Karangmalang	22.596.600	22.596.600			Pengadaan 835 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kebulen	14.886.000	14.886.000			Pengadaan 569 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Keputran 04	74.534.500	70.010.500	4.524.000		Pengadaan habis pakai 52 buah buku SPM dan pengadaan 3003 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Keputran 06	25.160.000	25.160.000			Pengadaan 1241 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SDN Kertoharjo 01	22.560.000	22.560.000			Pengadaan 782 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Klego 01	55.084.500	55.084.500			Pengadaan 1708 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Klego 04	15.941.200	15.941.200			Pengadaan 430 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kradenan 01	32.736.300	32.736.300			Pengadaan 1330 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kradenan 04	19.916.000	19.580.000	336.000		Pengadaan habis pakai 1 buah alat olahraga lainnya dan pengadaan 717 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kramatsari 01	55.670.200	55.670.200			Pengadaan 1929 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Kidul 02	21.578.000	21.578.000			Pengadaan 774 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Lor 01	29.500.100	29.500.100			Pengadaan 1043 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Lor 02	15.857.800	15.857.800			Pengadaan 598 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Lor 04	18.961.300	18.961.300			Pengadaan 827 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Krpyak Lor 05	21.239.500	21.239.500			Pengadaan 955 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kraton Kidul	24.620.900	22.760.900	1.860.000		Pengadaan habis pakai 12 buah bola, 2 buah net, 1 buah MMT, 20 buah Anak Panah, dan 1 buah flashdisk dan cartridge, serta pengadaan 1029 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kraton	47.567.200	47.567.200			Pengadaan 1252 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kuripan Kidul 02	16.585.300	13.279.300	3.306.000		Pengadaan habis pakai 20 buah peralatan olahraga dan pengadaan 734 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kuripan Lor 01	24.352.900	24.352.900			Pengadaan 973 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Kuripan Lor 02	32.061.700	30.061.700	2.000.000		Pengadaan habis pakai 8 buah foto presiden dan wakil presiden, serta pengadaan 1173 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Landungsari 01	46.630.900	46.630.900			Pengadaan 2053 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Landungsari 04	34.072.000	34.072.000			Pengadaan 1187 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Landungsari 05	15.680.300	15.680.300			Pengadaan 726 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 01	33.062.000	33.062.000			Pengadaan 1146 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 04	26.299.200	26.299.200			Pengadaan 633 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 07	23.400.400	23.400.400			Pengadaan 681 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Medono 08	18.161.700	18.161.700			Pengadaan 697 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Pabean	23.829.000	23.829.000			Pengadaan 871 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Panjang Wetan 01	57.226.000	57.226.000			Pengadaan 2343 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Panjang Wetan 03	20.289.800	20.289.800			Pengadaan 888 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Panjang Wetan 04	40.156.300	40.156.300			Pengadaan 1181 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SDN Pasirsari 01	13.645.000	13.345.000	300.000		Pengadaan habis pakai 1 buah bola voli dan 1 buah bola takraw, serta pengadaan 667 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Pasirsari 02	10.529.600	10.529.600			Pengadaan 359 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Podosugih 01	27.559.100	27.559.100			Pengadaan 1435 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Podosugih 03	24.400.600	24.400.600			Pengadaan 883 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Poncol 01	70.483.500	63.483.500	7.000.000		Pengadaan habis pakai 68 buah alat olahraga dan pengadaan 2035 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Poncol 02	42.442.500	42.442.500			Pengadaan 2060 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Poncol 03	26.314.379	24.549.000	1.765.379		Pengadaan habis pakai 4 buah bola dan pengadaan 807 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Pringlangu	23.596.100	23.596.100			Pengadaan 939 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Sampangan 01	37.098.200	33.531.200	3.567.000		Pengadaan habis pakai 41 buah buku SPM Plus USBN SD/MI 2019 dan pengadaan 1294 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Sapuro 01	53.341.200	53.341.200			Pengadaan 2058 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Sapuro 05	36.492.500	36.492.500			Pengadaan 1488 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Soko	10.503.300	10.503.300			Pengadaan 292 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Sokorejo	22.936.100	22.936.100			Pengadaan 1001 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Tegalrejo	29.175.698	29.175.698			Pengadaan 921 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Tirto 01	37.145.200	32.893.200	4.252.000		Pengadaan habis pakai 3 buah buku induk dan 1 set alat olahraga, serta pengadaan 1074 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Tirto 03	75.159.200	75.159.200			Pengadaan 1668 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Yosorejo 01	26.882.100	26.082.100	800.000		Pengadaan habis pakai 16 set figura dan foto presiden serta pengadaan 1171 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SDN Yosorejo 02	27.014.000	27.014.000			Pengadaan 970 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 01	26.398.800	26.398.800			Pengadaan 795 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 02	29.643.000	29.643.000			Pengadaan 371 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 03	74.508.000	74.508.000			Pengadaan 3011 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 04	95.585.800	95.585.800			Pengadaan 3469 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 05	65.339.500	63.039.500	2.300.000		Pengadaan habis pakai 4 buah alat panahan (arrow platinum, bow stand, string 68, dan quinsset) dan pengadaan 2890 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 06	20.050.800	20.050.800			Pengadaan 537 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 07	26.691.000	26.691.000			Pengadaan 877 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap

OPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB E				
	Jumlah	Ekstrakom	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
SMPN 08	91.794.200	91.794.200			Pengadaan 3345 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 09	38.406.600	34.406.600	4.000.000		Pengadaan habis pakai 7 buah alat peraga olah raga dan pengadaan 877 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 11	96.882.700	96.882.700			Pengadaan 3869 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 12	60.542.900	60.542.900			Pengadaan 2610 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 13	52.331.300	52.331.300			Pengadaan 2635 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 14	7.670.000,00		7.670.000		Pengadaan habis pakai 79 buah alat peraga olah raga dan 1 buah senar gitar
SMPN 15	66.074.400	66.074.400			Pengadaan 2617 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 16	74.866.900	74.866.900			Pengadaan 2713 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
SMPN 17	56.151.100	49.145.100	7.006.000		Pengadaan habis pakai 49 buah buku umum lain-lain dan pengadaan 2330 buah buku umum lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
DINARPUS	117.358.834	117.358.834			Pengadaan 2444 buah Buku Ilmu pengetahuan praktis lain-lain tidak memenuhi batas minimal aset tetap
Jumlah	3.095.877.661	3.040.092.282	55.785.379	-	

LAMPIRAN 24

TANAH EKS BENGKOK YANG TERKENA ROB

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Bandengan	Bandengan	12/30/1955	3.488	Bengkok Lurah	229.336.000	Leter C No. 1 Persil 11/II Luas 3.488 M2
		Bandengan	12/31/1955	6.725	Bengkok sekretaris	442.168.750	Leter C No. 2 Persil 15 / II Luas 6.725 M2
		Bandengan	12/31/1955	3.388	Bengkok Kesra	222.524.586	Leter C No. 9 Persil 16 / II Luas 3.388 M2
		Bandengan	12/31/1955	8.400	Bengkok K Umum	552.300.000	Leter C No. 9 Persil 26 / III Luas 4.150 M2
		Bandengan	12/31/1955	4.650	Bengkok Kasi Pemerintahan	305.737.500	Leter C No. 7 Persil 20 / II Luas 8.400 M2
		Bandengan	12/31/1955	4.650	Bengkok kasi Pembangunan	305.737.500	Leter C No. 5 Persil 35 / I Luas 4.650 M2
		Bandengan	12/31/1955	4.613	Bengkok Keuangan	303.304.750	Leter C No. 6 Persil 25 / III Luas 4.613 M2
		Bandengan	12/31/1955	5.000	Bengkok Umum	328.750.000	Leter C No. 10 Persil 133 / I Luas 5.000 M2
		Bandengan	12/31/1955	8.600	Bengkok Kadus I	565.450.000	Leter C No. 3 Persil 19 / II Luas 8.600 M2
		Bandengan	12/31/1955	5.900	Bengkok Kadus II	387.925.000	Leter C No. 4 Persil 24 / III Luas 5.900 M2
		Bandengan	12/31/1955	13.100	Bengkok Lurah	861.325.000	Leter C No. 1 Persil 23 / II Luas 13.100 M2
		Bandengan	12/31/1955	16.350	Bengkok Lurah	1.075.012.500	Leter C No. 1 Persil 18 / II Luas 16.350 M2
		Bandengan	12/31/1955	10.000	Bengkok Lurah	657.500.000	Leter C No. 1 Persil 14 / II Luas 10.000 M2
		Bandengan	12/31/1955	16.013	Bengkok Lurah	1.052.854.750	Leter C No. 1 Persil 34 / II Luas 16.013 M2
Bandengan	12/31/1955	5.150	Bengkok Lurah	362.282.500	Leter C No. 1 Persil 6 / V Luas 5.150 M2		
2	Podosugih	Bandengan	04/06/1905	3.740	Pertanian	245.905.000	
		Bandengan	04/06/1905	4.800	Pertanian	315.600.000	
		Bandengan	04/06/1905	3.120	Pertanian	205.140.000	
3	Medono	Kandang Panjang	23/05/1905	2.745	Sawah	347.242.500	
		Kandang Panjang	23/05/1905	3.255	Sawah	411.757.500	
		Kandang Panjang	23/05/1905	5.871	Sawah	742.681.500	
		Kandang Panjang	23/05/1905	5.724	Sawah	724.086.000	
		Kandang Panjang	23/05/1905	4.277	Sawah	541.040.500	
		Kandang Panjang	23/05/1905	5.299	Sawah	670.323.500	
		Kandang Panjang	23/05/1905	3.915	Sawah	495.247.500	
4	Pasirkraton kramat	Pasirsari	22/06/1905	3.450	bengkok Carik	474.743.750	C92 SP Luas : 3.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7.520	bengkok Carik	1.098.484.000	C41 SP Luas : 7.520 m2
		Pasirsari	22/06/1905	5.750	bengkok Kabayan 1	839.931.250	C70 SP Luas : 5.750 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.844	bengkok Carik	269.362.300	C74 SP Luas : 1.844 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.550	bengkok Kabayan 2	226.416.250	C121 SP Luas : 1.550 m2
		Pasirsari	22/06/1905	975	bengkok Kabayan	142.423.125	C25 SP Luas : 975 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.125	bengkok Kabayan	164.334.375	C22 SP Luas : 1.125 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.316	bengkok Kabayan	338.309.700	C20 SP III Luas : 2.316 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.200	bengkok Lebe	175.290.000	C21 SP Luas : 1.200 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.326	bengkok Lurah	338.894.000	C61 SK Luas : 2.326 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8.413	bengkok Lurah	1.228.928.975	C18 SK III Luas : 8.413 m2
		Pasirsari	22/06/1905	522	bengkok Carik	76.251.150	C 50 SP Luas : 522 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7.550	bengkok Lurah	1.102.866.250	C95 SP Luas : 7.550 m2
Pasirsari	22/06/1905	3.500	bengkok Lurah	511.262.500	C42 SK Luas : 3.500 m2		
Pasirsari	22/06/1905	2.763	bengkok Kabayan 2	403.605.225	C45 SP Luas : 2.763 m2		

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Pasirsari	22/06/1905	828	bengkok Lebe	134.535.075	C24 SP Luas : 828 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.169	bengkok Lebe	316.836.675	C39 SP 2.169 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.550	bengkok Polisi 2	372.491.250	C35 SP Luas : 2.550 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.450	bengkok Polisi 2	357.883.750	C 34 SP Luas : 2.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1.450	bengkok Kebayan 3	211.808.750	C43 SP Luas : 1.450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	9.400	bengkok Lurah	1.373.105.000	C36 SK III Luas : 9.400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	988	bengkok Polisi 2	144.322.100	C46 SP Luas : 988 m2
		Pasirsari	22/06/1905	7.050	bengkok Lebe	1.029.828.750	C15 SP Luas : 7.050 m2
		Pasirsari	22/06/1905	6.194	bengkok Kabayan	904.788.550	C69 SP Luas : 6.194 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8.120		1.186.129.000	C72 SP Luas : 8.120 m2
		Pasirsari	22/06/1905	3.900	bengkok Bau	569.692.500	C73 SP Luas : 3.900 m2
		Pasirsari	22/06/1905	2.556	bengkok Lebe	372.491.250	C75 SP Luas : 2.556 m2
		Pasirsari	22/06/1905	8.712	bengkok BAU	1.272.605.400	C62 SP Luas : 8.712 m2
		Pasirsari	22/06/1905	4.400	bengkok Kabayan I	636.302.700	C91 SP Luas : 4400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	0,8125	bengkok Polisi	1.132.081.250	C17 SP II Luas : 7.750 m2
		Pasirsari	22/06/1905	1,375	bengkok Lurah	2.760.817.500	C12 SK 2 Luas : 18.900 m2
		Pasirsari	22/06/1905	0,5	bengkok Carik	1.066.347.500	C14 SP Luas : 7.300 m2
		Pasirsari	22/06/1905	0,572917	bengkok Kabayan 2	636.302.700	C94 SP Luas : 4585 m2
		Pasirsari	22/06/1905	450	bengkok Polisi 2	9.000.000	C47 SP Luas 450 m2
		Pasirsari	22/06/1905	403	bengkok Kabayan 3	8.060.000	C93 SP Luas : 4.175 m2
		Pasirsari	22/06/1905	400	bengkok Lebe	8.000.000	C49 SP Luas : 400 m2
		Pasirsari	22/06/1905	4.175	Bengkok Polisi 1	83.500.000	Leter C 93 Persil SP Luas 4.175M2
		Jeruk Sari	07/06/1905	6.488	Sawah	819.272.016	leter C No. 1 Persil No. PS SK. 5/II Luas 6.488 M2
		Jeruk Sari	23/06/1905	4.800	Sawah	606.119.864	Leter C No. 3 Persil No. PS Sp.4/II Luas 4.800
		Sabuk Janur	30/06/1905	3.750	Sawah	473.531.144	Leter C No. 6 Persil No. PS Sp.2/II Luas 3.750 M2
		Sabuk Janur	30/06/1905	3.513	Sawah	443.603.976	Leter C No. 5 persil No. PS Sp.3/II Luas 3.513 M2
		Pasirsari	23/06/1905	1.300	Pertanian	189.897.500	HP No.9
		Pasirsari	23/06/1905	1.475	Pertanian	215.460.625	HP No. 10
		Pasirsari	13/06/1905	1.055	Pertanian	204.505.000	HP No.11
		Pasirsari	23/06/1905	730	Pertanian	106.634.750	HP No. 7
		Pasirsari	23/06/1905	755	Pertanian	110.286.625	HP No. 8
		Kandang Panjang	25/06/1905	2.088	Pertanian	90.000.000	Leter C No 41 persil No. 25b/ S IV Luas 2.088 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	1.931	Pertanian	90.000.000	Leter C 82 Persil Ps 25 b / S IV Luas 1.931 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	3.094	Pertanian	100.000.000	Leter C49 Persil 25 b /S III Luas 3.094 M2
		Kandang Panjang	25/06/1905	2.831	Pertanian	90.000.000	Leter C 111 Persil 25a /S III Luas 2.831 M2
		Jln AMD Kramatsari	13/06/1905	2.450	Pertanian	191.489.362	Leter C486 Persil 24/SII Luas 2.450 M2
		Jln AMD Kramatsari	26/06/1905	2.250	Pertanian	175.857.577	Leter C487 Persil 24/SII Luas 2.250 M2
		Jln AMD Kramatsari	26/06/1905	1.515	Pertanian	118.410.768	Leter C491 persil 14/S II Luas 2.050 M2
		Pasirsari	22/06/1905	1.785	Bengkok Kepala Kelurahan Kramatsari	260.743.875	
5	Degayu	Segendong	22/06/1905	6.500	Pertanian	91.000.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 56 /S1
		Sepondang	22/06/1905	5.580	Pertanian	78.120.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 57/S I
		Layatan	22/06/1905	10.545	Pertanian	105.450.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 28/S1
		Gili Gayu	22/06/1905	4.590	Pertanian	45.900.000	bengkok kepala desa GS C 1 Persil 53/SI
		Selele	22/06/1905	5.300	Pertanian	53.000.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 89/S II
		Sebayu	22/06/1905	2.885	Pertanian	40.390.000	bengkok kepala desa GS C 1 Persil 38/S 1
		Seresik	22/06/1905	3.780	Pertanian	37.800.000	bengkok kepala desa GS C1 Persil 69/S II

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Wongan Sumur	22/06/1905	1.500	Pertanian	15.000.000	bengkok sekretaris C 2/1 Persil 11/S II
		Wangan	22/06/1905	3.410	Pertanian	34.100.000	bengkok sekretaris G S C 2 Persil 12/S III
		Krowo	22/06/1905	1.800	Pertanian	25.200.000	bengkok sekretaris C 2/9 Persil 33/ S II
		Gili Kayu	22/06/1905	4.410	Pertanian	61.740.000	bengkok sekretaris C 2/4 Persil 56/ S I
		Bulan	22/06/1905	5.650	Pertanian	56.500.000	bengkok sekretaris C 2/5 Persil 94/ S II
		Selele	22/06/1905	1.650	Pertanian	16.500.000	bengkok sekretaris GS C2 Persil 96/ S II
		Selele	22/06/1905	1.815	Pertanian	18.150.000	bengkok Bau I C 3/1 Persil 37/S II
		Bulak	22/06/1905	1.350	Pertanian	13.500.000	bengkok Bau I C 3/3 Persil 97/S II
		Segedik	22/06/1905	3.800	Pertanian	38.000.000	bengkok Bau II C 4/1 Persil 20/S III
		Gesbel	22/06/1905	4.150	Pertanian	41.500.000	bengkok Bau II C 5/1 Persil 34/S II
		Degayu	22/06/1905	6.500	Pertanian	91.000.000	bengkok Bau III C 5/2 Persil 83/ S II
		rw. Bund	22/06/1905	3.660	Pertanian	36.600.000	bengkok Bau III C 5/3 Persil 93/S II
		Gempol	22/06/1905	3.490	Pertanian	48.860.000	bengkok Bau II C 6/1 Persil 13/ S III
		Tugus	22/06/1905	2.665	Pertanian	26.650.000	bengkok Bau III GS C 6 Persil 61/ S II
		Gili Gayu	22/06/1905	7.000	Pertanian	70.000.000	bengkok Bau IV GS C 7 Persil 31b/S II
		Congkeng	22/06/1905	1.270	Pertanian	17.780.000	bengkok Polisi I C 8/1 Persil 8/S I
		Wangan Sumur	22/06/1905	2.045	Pertanian	28.630.000	bengkok Polisi I C 8/2 Persil 10/S II
		Ketapang	22/06/1905	1.680	Pertanian	16.800.000	bengkok Polisi I C 8 Persil 62a S II
		Rowo	22/06/1905	1.770	Pertanian	17.700.000	bengkok Poldes II GS C 9 Persil 25/ S IV
		Selele	22/06/1905	5.740	Pertanian	57.400.000	bengkok Poldes II C 9/3 Persil 101/S II
		Degayu	22/06/1905	2.700	Pertanian	27.000.000	bengkok Poldes II C 9/4 Persil 38/S II
		Bulak	22/06/1905	2.530	Pertanian	25.300.000	bengkok Poldes III C 10/1 Persil 52/S II
		Gepol	22/06/1905	4.065	Pertanian	56.910.000	bengkok Poldes III GS C 10 Persil 58/S II
		Goyangan	22/06/1905	1.010	Pertanian	14.140.000	bengkok Poldes III C 10/3 Persil 92/ S I
		beng. Gr	22/06/1905	2.490	Pertanian	34.860.000	bengkok Poldes IV C 11/1 Persil 9/ S II
		Kebon	22/06/1905	2.680	Pertanian	37.520.000	bengkok Poldes IV C 11/2 Persil 29/ S I
		Degayu	22/06/1905	815	Pertanian	11.410.000	bengkok Poldes IV GS C 11 Persil 36/ S I
		Degayu	22/06/1905	1.110	Pertanian	11.100.000	bengkok Poldes IV C11/4 Persil 78 / S II
		Ngetrem	22/06/1905	1.455	Pertanian	20.370.000	bengkok Poldes IV C 11/5 Persil 82/S II
		Ngetrem	22/06/1905	1.810	Pertanian	18.100.000	bengkok Poldes IV C 11/6 Persil 103/S II
		Krandu	22/06/1905	2.430	Pertanian	155.520.000	bengkok Kabayan I C 12/1 Persil 56/S I
		Kebon	22/06/1905	2.770	Pertanian	38.780.000	bengkok Kabayan I C 12/2 Persil 63/ S I
		Kebon	22/06/1905	305	Pertanian	4.270.000	bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 66/ S I
		Segendong	22/06/1905	770	Pertanian	7.700.000	bengkok Kabayan I C 12/ Persil 77/ S I
		Segendong	22/06/1905	1.580	Pertanian	15.800.000	bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 88 / S I
		Dadap	22/06/1905	175	Pertanian	1.750.000	bengkok Kabayan II C 12/1 Persil 89 / S II
		Serandong	22/06/1905	1.200	Pertanian	12.000.000	bengkok Kabayan II C 13/ 1 Persil 41/ S I
		Sebaya	22/06/1905	915	Pertanian	9.150.000	bengkok kabayan II C 13/2 Persil 52/ S I
		Kebon	22/06/1905	3.700	Pertanian	51.800.000	bengkok kabayan II C 13/4 Persil 60 / S II
		Selele	22/06/1905	6.400	Pertanian	64.000.000	bengkok Lebe II C 14 /1 Persil 95/S III
		Gili Gayu	22/06/1905	3.250	Pertanian	45.500.000	bengkok Lebe II C 15/1 Persil 55/S I
		Bendo	22/06/1905	2.500	Pertanian	25.000.000	bondo Deso C 1/16/1 Persil 1/D III
		Bendo	22/06/1905	59.450	Pertanian	594.500.000	bondo deso C 1/17/2 Persil 1 /D III
		Bk. Guru	22/06/1905	2.050	Pertanian	20.500.000	Bengkok D.H.D C 1/17/3 Persil 39/ S 1
		Bk. Guru	22/06/1905	8.300	Pertanian	83.000.000	Bengkok D.H.D C 1/17/2 Persil 31a/S I
		Bk. Guru	22/06/1905	3.150	Pertanian	31.500.000	bengkok D.H.D C1/17/3 Persil 31b / S II
		Sekedung	22/06/1905	10.000	Pertanian	100.000.000	bengkok Pemb Desa C 1/16/1 Persil 19/ D IV
6	Kandang Panjang	Kandang Panjang	08/06/1905	7.488	Pertanian	947.232.000	Persil/klas SP 86 Luas 7.488 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	7.963	Pertanian	1.007.319.500	Persil / Klas SP 85 Luas 7.963 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	5.188	Pertanian	656.282.000	Persli/ kalas SP.53 Luas 5.188 M2
		Kandang Panjang	08/06/1905	3.100	Pertanian	380.765.000	Persil/ Klas tanah SP 121 Luas 3.100 M2

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Kandang Panjang	08/06/1905	3.800	Pertanian	480.700.000	Persil / Klas Tanah SP.52 Luas 3.800 M2
7	Panjang Wetan	Bandengan	26/06/1905	0,576389	Pertanian	679.387.500	HP No. 5 asal Leter C 360 Persil 22/III Luas 8.235 M2
		Bandengan	26/06/1905	0,666667	Pertanian	75.600.000	HP No. 04
		Bandengan	26/06/1905	0,756944	Pertanian	245.025.000	
		Bandengan	26/06/1905	0,545139	Pertanian	218.625.000	HP No. 6
8	Padukuhan Kraton	Pabean	23/04/1905	2.725	Sawah	116.493.750	Leter C No. 2 , Persil No. 8 / S.IV , Luas 2.725 M2
		Pabean	23/04/1905	1.750	Sawah	74.812.500	Leter C No. 4 , Persil No. 5 / D.IV , Luas 1.750 M2
		Pabean	23/04/1905	538	Sawah	22.999.500	Leter C No. 4 , Persil No. 23 / S.II , Luas 538 M2
		Pabean	23/04/1905	1.533	Sawah	65.535.750	Leter C No. 4 , Persil No. 25 / S.II , Luas 1.533 M2
		Pabean	23/04/1905	1.600	Sawah	68.400.000	Leter C No. 4 , Persil No. 32 / S.II , Luas 1.600 M2
		Pabean	23/04/1905	1.600	Sawah	68.400.000	Leter C No. 5 , Persil No. 11 / S.IV , Luas 1.600 M2
		Pabean	23/04/1905	1.444	Sawah	61.731.000	Leter C No. 7 , Persil No.10 / S.IV , Luas 1.444 M2
		Pabean	23/04/1905	1.419	Sawah	60.662.250	Leter C No. 8 , Persil No. 12 / S.IV , Luas 1.419 M2
		Pabean	23/04/1905	1.594	Sawah	68.143.500	Leter C No. 8 , Persil No. 26 / S.II , Luas 1.594 M2
		Pabean	23/04/1905	2.125	Sawah	90.843.750	Leter C No. 8 , Persil No. 31 / S.II , Luas 2.125 M2
		Pabean	23/04/1905	1.457	Sawah	10.417.550	Leter C No. 6 , Persil No. 9 / S.IV , Luas 1.457 M2
		Pabean	23/04/1905	1.800	Sawah	709.200.000	Leter C No. 9 , Persil No. 49 / D.II , Luas 1.800 M2 sisa (tukar guling)
		Pabean	23/04/1905	12.570	Sawah	5.348.843.000	Leter C No. 9 , Persil No. 50 / S.II , Luas 12.570 (sisa tukar guling)
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.300	Pertanian	408.200.000	HP. 08
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.360	Pertanian	427.040.000	HP No. 9
		Kraton Kidul	26/06/1905	99	Pertanian	31.086.000	HP. No 10
		Kraton Kidul	26/06/1905	99	Pertanian	31.086.000	HP No. 11
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.580	Pertanian	496.120.000	HP No.14
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.580	Pertanian	496.120.000	HP No. 5
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.575	Pertanian	494.550.000	HP No. 16
		Kraton Kidul	26/06/1905	2.365	Pertanian	742.610.000	HP No.17
		Kraton Kidul	26/06/1905	865	Pertanian	271.610.000	HP No. 19
		Kraton Kidul	26/06/1905	920	Pertanian	288.880.000	HP No. 20
		Kraton Kidul	26/06/1905	900	Pertanian	282.600.000	HP No. 21
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.000	Pertanian	314.000.000	HP No. 22
		Kraton Kidul	26/06/1905	900	Pertanian	282.600.000	HP No.23
		Kraton Kidul	26/06/1905	960	Pertanian	301.440.000	HP No. 24
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.285	Pertanian	403.490.000	HP No.25
		Kraton Kidul	26/06/1905	235	Pertanian	73.790.000	HP No. 29
		Kandang Panjang	03/06/1905	1.380	Sawah Padi	174.570.000	
		Kandang Panjang	03/06/1905	970	Sawah Padi	122.705.000	
		Kandang Panjang	03/06/1905	2.520	Sawah Padi	318.780.000	
		Kandang Panjang	03/06/1905	450	Sawah Padi	56.925.000	
		Kandang Panjang	03/06/1905	113	Sawah Padi	14.294.500	
		Kandang Panjang	03/06/1905	925	Sawah Padi	117.012.500	
		Kandang Panjang	03/06/1905	1.965	Sawah Padi	248.572.500	
		Kandang Panjang	03/06/1905	4.060	Sawah Padi	513.590.000	

No	Kelurahan	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Penggunaan	Nilai Perolehan	Keterangan
		Pabean	23/04/1905	4.450	Sawah	190.238.000	Leter C No. 1 Persil No. 34
		Pabean	23/04/1905	725	Sawah	30.993.750	Leter C No. 1 Persil No. 35
		Pabean	23/04/1905	5.200	Sawah	222.300.000	Leter C No. 1 Persil No. 36
		Pabean	23/04/1905	4.369	Sawah	186.774.750	Leter C No. 2 Persil No. 37
		Pabean	23/04/1905	2.350	Sawah	100.035.000	Leter C No. 3 Persil No. 4
		Pabean	23/04/1905	4.344	Sawah	185.706.000	Leter C No. 3 Persil No. 38
		Pabean	23/04/1905	1.700	Sawah	72.675.000	Leter C No. 5 Persil No. 27
		Pabean	23/04/1905	1.800	Sawah	76.950.000	Leter C No. 5 Persil No. 30
		Pabean	23/04/1905	1.625	Sawah	69.468.750	Leter C No. 6 Persil No. 28
		Pabean	23/04/1905	1.650	Sawah	70.537.500	Leter C No. 6 Persil No. 29
		Pabean	23/04/1905	750	Sawah	32.062.500	Leter C No. 7 Persil No. 22
		Pabean	23/04/1905	1.682	Sawah	71.905.500	Leter C No. 7 Persil No. 24
		Pabean	23/04/1905	1.782	Sawah	76.180.500	Leter C No. 7 Persil No. 33
		Pabean	23/04/1905	4.413	Sawah	188.656.000	Leter C No. 1 Persil No. 7
		Kandang Panjang	07/06/1905	3.100	Pertanian	392.150.000	Leter C No. 297 Persil 5b./S.III
		Kandang Panjang	07/06/1905	7.195	Eks Bengkok	910.167.500	Leter C 68 Persil 28/S.III
		Panjang Wetan	07/06/1905	3.715	Pertanian	555.392.500	Leter C.65 Persil C.2 S.III
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.350	Persawahan	423.900.000	HP No. 12
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.315	Pertanian	412.910.000	HP No. 13
		Kraton Kidul	26/06/1905	195	Pertanian	61.230.000	HP No. 18
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.305	Pertanian	409.770.000	HP No.26
		Kraton Kidul	26/06/1905	1.120	Pertanian	351.680.000	HP No. 27
		Kraton Kidul	26/06/1905	145	Pertanian	45.530.000	HP No. 28

LAMPIRAN 25

MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET LAIN-LAIN UNTUK MASING-MASING OPD

Nama OPB	Jenis Aset	Saldo Awal Audited per 2 Januari 2019			Mutasi Tambah	Rekalas Tambah dari Aset Tetap	Mutasi Kurang	Reklas kurang ke Aset Tetap	Ak. Penyusutan		Saldo Akhir Audited per 31 Desember 2019						
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku					Pengadaan	An Audited	Penghapusan	An Audited	Bertambah	Berkurang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Harga	Harga	Harga											Harga	Harga	Harga
Total Aset Lain-lain		154.433.065.256,00	22.387.425.777,33	132.045.639.478,67	-	182.147.000,00	172.162.000,00	610.000,00	1.098.049.717,36	-	154.442.440.256,00	23.485.475.494,69	130.956.964.761,31				
Aset Lain-lain Rusak Berat		72.841.900.459,00	18.537.098.615,00	54.304.801.844,00	-	-	172.162.000,00	610.000,00	-	-	72.669.128.459,00	18.537.098.615,00	54.132.029.844,00				
Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan dan Jembatan	1.245.267.001,00	622.633.500,00	622.633.501,00							1.245.267.001,00	622.633.500,00	622.633.501,00				
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Gedung dan Bangunan	71.407.011.458,00	17.913.715.115,00	53.493.296.343,00							71.407.011.458,00	17.913.715.115,00	53.493.296.343,00				
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	-	8.100.000,00							8.100.000,00	-	8.100.000,00				
Kelurahan Buaran Kradenan	Peralatan dan Mesin	610.000,00	-	610.000,00				610.000,00			-	-	-				
Kelurahan Banyurip	Gedung dan Bangunan	172.162.000,00	-	172.162.000,00			172.162.000,00				-	-	-				
Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	750.000,00	8.000.000,00							8.750.000,00	750.000,00	8.000.000,00				
Aset Lain-lain Non Aktif		81.591.164.797,00	3.850.327.162,33	77.740.837.634,67	-	182.147.000,00	-	-	1.098.049.717,36	-	81.773.311.797,00	4.948.376.879,69	76.824.934.917,31				
Badan Keuangan Daerah	Peralatan dan Mesin	2.153.447.032,00	974.483.590,00	1.178.963.442,00						528.068.701,71	2.153.447.032,00	1.502.552.291,71	650.894.740,29				
	Gedung dan Bangunan	8.089.252.076,00	2.644.565.272,33	5.444.686.803,67		147.147.000,00				484.099.075,37	8.236.399.076,00	3.128.664.347,70	5.107.734.728,30				
Dinas Kelautan dan Perikanan	Gedung dan Bangunan	310.105.000,00	18.606.300,00	291.498.700,00						6.202.100,00	310.105.000,00	24.808.400,00	285.296.600,00				
Kelurahan Pasirkatonkramat	Tanah	26.263.845.632,00	-	26.263.845.632,00							26.263.845.632,00	-	26.263.845.632,00				
Kelurahan Podosugih	Tanah	1.199.280.000,00	-	1.199.280.000,00							1.199.280.000,00	-	1.199.280.000,00				
Kelurahan Medono	Tanah	4.525.664.000,00	-	4.525.664.000,00							4.525.664.000,00	-	4.525.664.000,00				
Kelurahan Kali Baros	Tanah	176.440.000,00	-	176.440.000,00							176.440.000,00	-	176.440.000,00				
Kelurahan Krapyak	Tanah	2.891.100.000,00	-	2.891.100.000,00							2.891.100.000,00	-	2.891.100.000,00				
Kelurahan Kd. Panjang	Tanah	3.472.298.500,00	-	3.472.298.500,00							3.472.298.500,00	-	3.472.298.500,00				
Kelurahan Panjang Wetan	Tanah	1.218.637.500,00	-	1.218.637.500,00							1.218.637.500,00	-	1.218.637.500,00				
Kelurahan Padukuhankraton	Tanah	18.815.367.300,00	-	18.815.367.300,00							18.815.367.300,00	-	18.815.367.300,00				
Kelurahan Degayu	Tanah	2.700.750.000,00	-	2.700.750.000,00							2.700.750.000,00	-	2.700.750.000,00				
Kelurahan Bandengan	Tanah	7.974.781.750,00	-	7.974.781.750,00							7.974.781.750,00	-	7.974.781.750,00				
Bagian Perlengkapan	Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	18.200.000,00	-							18.200.000,00	18.200.000,00	-				
Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	270.100.000,00	194.472.000,00	75.628.000,00		35.000.000,00				19.204.000,00	305.100.000,00	213.676.000,00	91.424.000,00				
Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	1.511.896.007,00	-	1.511.896.007,00						60.475.840,28	1.511.896.007,00	60.475.840,28	1.451.420.166,72				
Aset Tak Berwujud		3.789.167.551,05	2.537.792.077,65	1.251.375.474,00	709.526.400,00	25.008.986,00	-	132.616.000,00	570.264.059,60	-	4.391.086.937,05	3.108.056.137,25	1.283.030.799,80				
Sekretariat DPRD/DPRD		49.635.000,00	19.854.000,00	29.781.000,00	-				9.927.000,00		49.635.000,00	29.781.000,00	19.854.000,00				
Bagian Adm. Pembangunan				-	75.150.000,00					15.030.000,00	75.150.000,00	15.030.000,00	60.120.000,00				
Bagian Hukum		34.199.950,00	24.419.970,00	9.779.980,00	-				6.839.990,00		34.199.950,00	31.259.960,00	2.939.990,00				
Badan Keuangan Daerah		510.224.330,00	350.926.530,00	159.297.800,00	97.820.000,00				80.553.000,00		608.044.330,00	431.479.530,00	176.564.800,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		110.858.000,00	54.177.200,00	56.680.800,00	19.999.100,00				22.893.420,00		130.857.100,00	77.070.620,00	53.786.480,00				
Dinas Perhubungan		106.547.725,00	106.547.725,00	-	197.776.000,00			132.616.000,00	13.032.000,00		171.707.725,00	119.579.725,00	52.128.000,00				

Nama OPB	Jenis Aset	Saldo Awal Audited per 2 Januari 2019			Mutasi Tambah	Reklas Tambah dari Aset Tetap	Mutasi Kurang	Reklas kurang ke Aset Tetap	Ak. Penyusutan		Saldo Akhir Audited per 31 Desember 2019		
		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Pengadaan	An Audited	Penghapusan	An Audited	Bertambah	Berkurang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Harga	Harga	Harga							Harga	Harga	Harga
RSUD BENDAN		1.296.792.000,00	992.845.800,00	303.946.200,00	5.613.300,00	18.041.586,00			140.251.577,20		1.320.446.886,00	1.133.097.377,20	187.349.508,80
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB		9.490.800,00	9.490.800,00	-	-						9.490.800,00	9.490.800,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		62.229.600,00	51.051.520,00	11.178.080,00	-			2.794.520,00		62.229.600,00	53.846.040,00	8.383.560,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan		11.385.681,00	5.454.272,40	5.931.409,00	-			1.977.136,20		11.385.681,00	7.431.408,60	3.954.272,40	
Dinas Pertanian dan Pangan		8.250.000,00	3.300.000,00	4.950.000,00	-			1.650.000,00		8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00	
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		109.131.200,00	29.282.480,00	79.848.720,00	-			21.826.240,00		109.131.200,00	51.108.720,00	58.022.480,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		473.656.400,00	359.303.000,00	114.353.400,00	-			44.914.200,00		473.656.400,00	404.217.200,00	69.439.200,00	
Dinas Lingkungan Hidup				-	29.590.000,00			5.918.000,00		29.590.000,00	5.918.000,00	23.672.000,00	
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		52.405.000,00	22.579.000,00	29.826.000,00	-			9.942.000,00		52.405.000,00	32.521.000,00	19.884.000,00	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		171.353.481,00	94.954.696,20	76.398.785,00	-	6.967.400,00		20.493.176,20		178.320.881,00	115.447.872,40	62.873.008,60	
Dinas Komunikasi dan Informatika		235.772.500,00	171.596.600,00	64.175.900,00	-			36.072.100,00		235.772.500,00	207.668.700,00	28.103.800,00	
Dinas Kesehatan		272.007.000,00	164.541.400,00	107.465.600,00	49.500.000,00			39.241.400,00		321.507.000,00	203.782.800,00	117.724.200,00	
Dinas Pendidikan		275.228.884,05	77.467.084,05	197.761.800,00	234.078.000,00			96.908.300,00		509.306.884,05	174.375.384,05	334.931.500,00	